MENCIPTAKAN NILAI UNGGUL

LAPORAN TAHUNAN 2007

Committed 2 U

TELKOM INDONESIA

Daftar Isi Laporan Tahunan TELKOM 2007

1 Sekilas TELKOM

Menciptakan Nilai Unggul 1
Tentang TELKOM 2
Visi, Misi, Sasaran 3
Sejarah Perusahaan 4
Ikhtisar Keuangan 6
Ikhtisar Operasi 10
Ikhtisar Saham 11
Peristiwa Penting 2007 18
Penghargaan 22

LAPORAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Laporan Komisaris Utama 26
Laporan Direksi 28

PENGELOLAAN TELKOM

Profil Dewan Komisaris 32
Profil Direksi 34
Memberdayakan Kekuatan TELKOMGroup 36
Inisiatif Pemasaran dan Layanan Pelanggan 2007 38
Menghadapi Isu-isu Kompetisi, Regulasi, dan Kepatuhan 40

HUMAN CAPITAL

Profil SDM 43
Produktivitas SDM 44
Pengembangan SDM 45
Pengelolaan Hubungan Kerja 46
Remunerasi yang Kompetitif 46
Pengembangan Budaya dan Etika Bisnis 47
Pengelolaan Kesehatan Karyawan TELKOM 48
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 48

2 Menciptakan Nilai Unggul

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Industri Telekomunikasi Indonesia 50
Regulasi 50
Persaingan 53

TELKOM DAN KINERJA OPERASI 2007

Tinjauan Bisnis 58
Infrastruktur Jaringan 61
Pengembangan Jaringan 63
Strategi Perusahaan 64
Layanan kepada Pelanggan 66
Penjualan, Pemasaran, dan Distribusi 67
Tagihan, Pembayaran dan Penagihan 67
Asuransi 68
Merek Dagang, Hak Cipta, dan Paten 68

FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Risiko yang Terkait dengan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan 69
Risiko yang Terkait dengan Indonesia 69
Risiko yang Terkait dengan TELKOM dan anak perusahaan 70
Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif Mengenai Risiko Pasar 74

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Tinjauan Hasil Usaha 78
Likuiditas dan Sumber Permodalan 93
Riset dan Pengembangan dan Kekayaan Intelektual 99
Informasi Tren 100
Pengaturan Transaksi di Luar Neraca 100
Pengungkapan dalam Bentuk Tabel untuk Kewajiban Kontraktual 101

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi Keuangan 102
Memorandum dan Anggaran Dasar 103
Kontrak Material 105
Pengendalian Nilai Tukar 107
Pengendalian Valuta Asing 107
Perpajakan 108
Dokumen yang Ditunjukkan 110

3 Komitmen pada Kepatuhan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan 116
Kepatuhan & Manajemen Risiko 128
Laporan Komite Audit 129
Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi 132
Laporan Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko 133

4 Komitmen kepada Masyarakat

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Konsep CSR TELKOM 136
Kegiatan CSR TELKOM di tahun 2007 137

5 Data Perusahaan

Struktur Bisnis dan Organisasi 144
Aktiva Tetap 146
Wilayah Operasi 146
Produk dan Layanan 147
Alamat Perusahaan 150
Manajemen Senior 152

6 Lampiran

DAFTAR ISTILAH

Daftar Istilah 154

REFERENSI

Referensi Silang Form 20-F 157
Referensi Peraturan Bapepam-LK X.K.6 158

7 Terbuka & Bertanggung Jawab

LAPORAN KEUANGAN

Tanggung Jawab Manajemen 160
Pernyataan Direksi 161
Opini Auditor Independen 162
Laporan Keuangan Konsolidasian 163

Pernyataan yang Bersifat Pandangan ke Depan

Laporan Tahunan TELKOM disusun berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bapepam&LK Nomer X.K.6 dan X.K.7 serta Form 20-F sesuai dengan peraturan US-SEC.

Peraturan Section 27A dari Securities Act 1933 dan Section 21E dari Securities Exchange Act 1934 serta Private Securities Litigation Reform Act 1995 (perundang-undangan pasar modal Amerika Serikat), mengharuskan Perseroan untuk menyampaikan peringatan perihal pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan (forward looking statements), sebagai berikut.

Dalam Laporan Tahunan ini, kata "TELKOM", "kami", "Perseroan" atau "Perusahaan" merujuk kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Sedangkan kata "Indonesia" merujuk kepada Republik Indonesia. "Pemerintah" adalah Pemerintah Indonesia. "Amerika Serikat" atau "AS" adalah Amerika Serikat. "Rupiah" atau "Rp" adalah mata uang resmi Indonesia dan "Dolar AS" atau "US$" adalah mata uang resmi Amerika Serikat. Kecuali jika disebutkan, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan Perseroan disajikan dalam Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan TELKOM ini memuat beberapa informasi keuangan dan hasil-hasil usaha tertentu, selain juga beberapa proyeksi, rencana, strategi dan tujuan tertentu dari Perseroan yang bukan merupakan pernyataan fakta historis, yang akan dianggap sebagai pernyataan pandangan ke depan dalam batasan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kejadian nyata atau perkembangan di masa depan berbeda secara material dari pernyataan-pernyataan pandangan ke depan yang tercantum di Laporan Tahunan ini.

Informasi penting mengenai risiko dan ketidakpastian juga disajikan di bagian lain Laporan Tahunan ini, termasuk "Faktor-Faktor Risiko", "Pengaturan Transaksi di Luar Neraca", "Pengungkapan dalam Bentuk Tabel untuk Kewajiban Kontraktual", dan "Pengungkapan Mengenai Risiko Pasar".

menciptakan nilai unggul

TELKOM menciptakan tren dalam sektor telekomunikasi di Indonesia. Kami memimpin pasar, mulai dari telepon tidak bergerak kabel, telepon selular, solusi telekomunikasi korporasi, dan jaringan layanan teknologi informasi. Kami mengerahkan segenap daya untuk menghasilkan nilai unggul bagi para pemangku kepentingan - menyediakan dan menyokong hasil yang berkesinambungan bagi para pemegang saham, solusi komprehensif untuk para pelanggan, kesempatan berkembang bagi para karyawan dan mitra bisnis, serta kemajuan bagi masyarakat, bangsa dan dunia.

TENTANG TELKOM

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (“TELKOM”, “Perseroan”, “Perusahaan” atau “Kami”) merupakan perusahaan penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi (InfoComm) yang memiliki layanan paling lengkap dan jaringan terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan layanan telepon tidak bergerak kabel (*fixed wireline*) dan telepon tidak bergerak nirkabel (*fixed wireless*), layanan telepon selular, data dan internet, jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.

Sampai dengan 31 Desember 2007, jumlah pelanggan TELKOM mencapai **63,0 juta, terdiri dari 8,7 juta pelanggan** telepon tidak bergerak kabel, **6,4 juta pelanggan telepon** tidak bergerak nirkabel, dan **47,9 juta pelanggan telepon selular** Pertumbuhan pelanggan mencapai **29,9%** pada tahun 2007.

Saham TELKOM, sampai dengan 31 Desember 2007, dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (51,82%) dan pemegang saham publik (48,18%). Saham TELKOM tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), New York (“NYSE”), London Stock Exchange (“LSE”) dan Tokyo Stock Exchange, tanpa tercatat. Harga saham TELKOM di BEI pada akhir Desember 2007 meningkat 0,5% menjadi Rp 10.150 dari Rp 10.100 pada periode yang sama tahun 2006. Nilai kapitalisasi pasar saham TELKOM pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 204.624 miliar atau 10,3% dari kapitalisasi pasar BEI.

VISI

Menjadi perusahaan InfoComm terkemuka di kawasan regional.

MISI

- Menyediakan layanan InfoComm terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif.
- Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

SASARAN

Sasaran strategis TELKOM adalah menciptakan nilai unggul untuk mencapai kapitalisasi pasar sebesar US$ 30 miliar pada tahun 2010.

INISIATIF STRATEGIS

1. Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel / *fixed wire line* ("FWL").
2. Menyelaraskan layanan selular-akses jaringan tidak bergerak nirkabel / *fixed wireless access* ("FWA") dan mempersiapkan FWA sebagai unit usaha tersendiri.
3. Investasi dalam jaringan pita lebar (*broadband*).
4. Solusi enterprise terintegrasi.
5. Mengintegrasikan *Next Generation Network* ("NGN").
6. Mengembangkan layanan teknologi informasi.
7. Mengembangkan bisnis portal.
8. Menyederhanakan portofolio anak perusahaan.
9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio.
10. Transformasi budaya perusahaan.

SEJARAH PERUSAHAAN

TELKOM, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, merupakan penyedia utama layanan sambungan telepon tidak bergerak kabel di Indonesia. PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh TELKOM, juga merupakan operator telepon selular terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan beragam layanan telekomunikasi lainnya termasuk layanan interkoneksi, jaringan, data dan internet serta layanan terkait lainnya. Perusahaan bertujuan untuk mengoperasikan jaringan telekomunikasi dan menyediakan layanan telekomunikasi dan informasi.

Pada tahun 1884, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta untuk menyediakan layanan pos dan telegraf domestik dan kemudian layanan telegraf internasional. Layanan telepon diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1882. Sampai dengan 1906, layanan telepon disediakan oleh perusahaan swasta yang memiliki lisensi dari pemerintah untuk jangka waktu 25 tahun. Pada tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan seluruh layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1961, sebagian besar dari layanan ini dialihkan kepada perusahaan milik negara. Pemerintah memisahkan layanan pos dan telekomunikasi pada tahun 1965 ke dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua perusahaan milik negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi ("Perumtel") sebagai penyedia layanan telekomunikasi domestik dan internasional serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("PT INTI") sebagai perusahaan pembuat perangkat telekomunikasi. Pada tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional dialihkan kepada PT Indonesian Satellite Corporation ("Indosat").

Pada tahun 1991, status Perumtel berubah menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama TELKOM. Sebelum tahun 1995, operasi bisnis TELKOM dibagi ke dalam duabelas wilayah operasi, yang dikenal sebagai "Witel". Setiap Witel memiliki struktur manajemen yang bertanggung jawab atas seluruh aspek bisnis di wilayahnya masing-masing, mulai dari penyedia layanan telepon hingga manajemen dan keamanan properti.

Pada tahun 1995, duabelas Witel TELKOM diubah menjadi tujuh divisi regional (Divisi I Sumatera; Divisi II Jakarta dan sekitarnya; Divisi III Jawa Barat; Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Divisi V Jawa Timur; Divisi VI Kalimantan; dan Divisi VII Indonesia bagian Timur) serta satu Divisi Network. TELKOM melakukan kesepakatan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan mengalihkan hak untuk mengoperasikan lima dari tujuh divisi regional (Divisi Regional I, III, IV, VI dan VII) kepada konsorsium swasta. Dengan kesepakatan tersebut, maka mitra KSO akan mengelola dan mengoperasikan divisi regional untuk periode waktu tertentu, melaksanakan pembangunan sambungan telepon tidak bergerak dalam jumlah yang telah ditetapkan dan pada akhir periode kesepakatan, mengalihkan fasilitas telekomunikasi yang telah dibangun kepada TELKOM dengan kompensasi yang besarnya telah disepakati. Pendapatan dari KSO akan dibagi antara TELKOM dan mitra KSO.

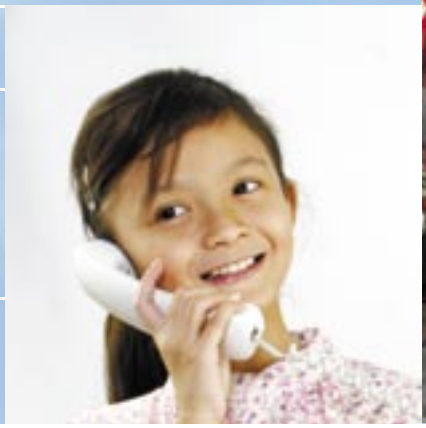

Menyusul krisis ekonomi Indonesia, yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, beberapa mitra KSO mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada TELKOM yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. TELKOM mengadakan perjanjian untuk mengakuisisi mitra-mitra KSO di regional I, III, dan VI, dan menyesuaikan isi kesepakatan KSO dengan mitra-mitranya di regional IV dan VII untuk memperoleh hak pengawasan pengambilan keputusan-keputusan keuangan dan operasional di regional yang bersangkutan.

Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah melakukan penjualan saham TELKOM melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering). Saham TELKOM tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia pada Desember 2007), dan saham TELKOM dalam bentuk ADS tercatat di NYSE dan LSE. Selain itu saham TELKOM juga terdaftar di bursa efek Tokyo dalam bentuk Public Offering Without Listing. TELKOM saat ini merupakan salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, dengan nilai kapitalisasi mencapai sekitar Rp 204.624 miliar per 31 Desember 2007. Pemerintah memiliki hak 51,82% dari keseluruhan saham TELKOM yang dikeluarkan dan beredar. Pemerintah juga memegang saham Dwiwarna TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu.

Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Telekomunikasi No. 36 (“Undang-undang Telekomunikasi”) yang berlaku efektif pada bulan September 2000. Undang-undang tersebut merupakan pedoman yang mengatur reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan, TELKOM dan Indosat merupakan pemilik bersama dari sebagian besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Reformasi yang dilakukan Pemerintah kemudian menghapus kepemilikan bersama tersebut untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Hasilnya, pada tahun 2001 TELKOM mengakuisisi 35,0% saham Indosat di Telkomsel yang menjadikan total saham TELKOM di Telkomsel menjadi sebesar 77,7%, sementara Indosat mengambil alih 22,5% saham TELKOM di Satelindo dan 37,7% saham TELKOM di Lintasarta. Pada tahun 2002, TELKOM menjual 12,7% sahamnya di Telkomsel kepada Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (“SingTel Mobile”) sehingga kepemilikan saham TELKOM di Telkomsel berkurang menjadi 65,0%.

Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi, pada tanggal 1 Agustus 2001, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif TELKOM sebagai satu-satunya penyelenggara layanan telepon tidak bergerak kabel di Indonesia dan Indosat sebagai satu-satunya penyelenggara layanan sambungan langsung internasional (SLI). Hak eksklusif TELKOM sebagai penyedia layanan sambungan lokal dan layanan sambungan langsung jarak jauh berakhir masing-masing pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2003. Pada tanggal 7 Juni 2004, TELKOM meluncurkan layanan SLI.

IKHTISAR KEUANGAN

Neraca Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

	31 Des 2003	31 Des 2004	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007
Jumlah Aktiva Lancar	8.942	9.204	10.305	13.921	15.978
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	41.341	46.975	51.866	61.215	66.081
JUMLAH AKTIVA	50.283	56.179	62.171	75.136	82.059
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.170	11.677	13.513	20.536	20.674
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	18.092	21.436	19.061	18.344	18.331
JUMLAH KEWAJIBAN	29.262	33.113	32.574	38.880	39.005
HAK MINORITAS	3.708	4.938	6.305	8.187	9.305
EKUITAS	17.313	18.128	23.292	28.069	33.749

Laporan Laba-Rugi Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali untuk laba bersih per lembar saham dan laba bersih per ADS)

	31 Des 2003	31 Des 2004	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007
Jumlah Pendapatan Usaha	27.116	33.948	41.807	51.294	59.440
Jumlah Beban Usaha	15.140	19.360	24.636	29.701	32.967
EBITDA	17.486	21.899	25.660	31.716	37.067
LABA USAHA	11.976	14.588	17.171	21.593	26.473
Penghasilan (Beban) Lain - Bersih	(524)	(1.839)	(929)	400	(877)
LABA SEBELUM PAJAK	11.452	12.749	16.242	21.993	25.596
LABA BERSIH	6.087	6.615	7.994	11.006	12.857
Laba Bersih per Saham	301,95	328,10	396,51	547,15	644,08
Laba Bersih per ADS (40 saham seri B per ADS)	12.077,83	13.124,14	15.860,25	21.886,00	25.763,20

Rasio Keuangan dan Operasi Konsolidasian

	31 Des 2003	31 Des 2004	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aktiva (ROA)[1] (%)	12,1	11,8	12,9	14,6	15,7
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE)[2] (%)	35,2	36,5	34,3	39,2	38,1
Rasio Lancar[3] (%)	80,1	78,8	76,3	67,8	77,3
Rasio Total Kewajiban terhadap Total Aktiva[4] (%)	58,2	58,9	52,4	51,7	47,5
Marjin Usaha[5] (%)	44,2	43,0	41,1	42,1	44,5
Marjin EBITDA Kotor[6] (%)	64,5	64,5	61,4	61,8	62,4
Marjin Laba Bersih[7] (%)	22,4	19,5	19,1	21,5	21,6
Rasio Hutang terhadap Ekuitas[8] (%)	88,5	91,7	57,9	54,8	46,7
Rasio Hutang terhadap EBITDA[9] (%)	87,6	75,9	52,5	48,5	42,6
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga[10] (kali)	12,6	17,2	21,8	24,7	25,8
Rasio EBITDA terhadap Hutang Bersih[11] (%)	180,4	187,1	322,7	454,9	677,8
RASIO PRODUKTIVITAS:					
Rasio Pendapatan Usaha/Karyawan (Rp miliar)	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8
LIS/Karyawan (sst)	275,1	340,3	452,4	465,9	593,3

(1) ROA merupakan laba bersih dibagi jumlah aktiva pada akhir tahun.
(2) ROE merupakan laba bersih dibagi jumlah ekuitas pada akhir tahun.
(3) Rasio lancar merupakan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar pada akhir tahun.
(4) Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva merupakan jumlah kewajiban dibagi jumlah aktiva pada akhir tahun.
(5) Marjin usaha merupakan laba usaha dibagi pendapatan usaha.
(6) Marjin EBITDA merupakan EBITDA dibagi pendapatan usaha.
(7) EBITDA merupakan laba usaha ditambah penyusutan dan amortisasi.
(8) Marjin laba bersih merupakan laba bersih dibagi pendapatan usaha.
(9) Rasio hutang terhadap ekuitas merupakan jumlah hutang dibagi jumlah ekuitas pada akhir tahun.
(10) Rasio EBITDA terhadap beban bunga merupakan EBITDA dibagi beban bunga.
(11) Rasio EBITDA terhadap hutang bersih merupakan EBITDA dibagi jumlah kewajiban dikurangi kas dan ekuivalen kas, penyertaan sementara dan rekening *escrow* pada akhir tahun.

Data Keuangan Tertentu

KAP Haryanto Sahari & Rekan, merupakan anggota dari firma PricewaterhouseCoopers ("PwC") di Indonesia, telah mengaudit laporan keuangan TELKOM tahun 2006 dan 2007. Sebelumnya, KAP Siddharta Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International ("KPMG") di Indonesia telah mengaudit laporan keuangan TELKOM untuk tahun 2003, 2004 dan 2005. Laporan keuangan konsolidasian TELKOM disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK Indonesia), yang dalam beberapa hal berbeda dengan U.S. GAAP. Lihat Catatan No. 56 dan 57 laporan keuangan konsolidasian TELKOM yang menjelaskan mengenai ikhtisar beberapa perbedaan signifikan antara PSAK Indonesia dan U.S. GAAP, serta rekonsiliasi jumlah laba bersih dan ekuitas pemegang saham TELKOM untuk setiap akhir tahun yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sampai dengan 31 Desember 2007, sembilan perusahaan dan anak perusahaannya telah dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian TELKOM tahun buku 2007, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII", sebelumnya PT AriaWest International - "AriaWest", 100%-dimiliki TELKOM), PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra", 100%-dimiliki TELKOM), PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo", 100%-dimiliki TELKOM), PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel", 65%-dimiliki TELKOM), PT Multimedia Nusantara ("Metra", 100%-dimiliki TELKOM), PT Infomedia Nusantara ("Infomedia", 51%-dimiliki TELKOM), PT Indonusa Telemedia ("Indonusa", 98,75%-dimiliki TELKOM), PT Graha Sarana Duta ("GSD", 99,99%-dimiliki TELKOM), dan PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo", 60%-dimiliki TELKOM). Lihat Catatan 1d laporan keuangan konsolidasian TELKOM.

Tabel berikut menguraikan rangkuman informasi keuangan TELKOM terhitung pada dan untuk setiap tahun-tahun tersebut. Informasi ini sebaiknya dibaca bersama dengan "Tinjauan dan Prospek terhadap Operasi dan Keuangan" dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian TELKOM beserta catatan-catatan pendukung yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

	Tahun yang berakhir 31 Desember,					
	2003	2004	2005	2006	2007	2007
	(angka disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)					(angka disajikan dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)[1)]
Data Laporan Laba Rugi Konsolidasian						
PSAK Indonesia						
PENDAPATAN USAHA						
Telepon						
Telepon tidak bergerak						
Percakapan Lokal dan SLJJ	6.562	7.439	7.223	7.131	7.023	748
Pendapatan Abonemen Bulanan	1.949	2.935	3.290	3.492	3.701	394
Biaya pemasangan	223	201	197	170	124	13
Lain-lain	163	70	71	186	153	16
Jumlah pendapatan telepon tidak bergerak	8.897	10.645	10.781	10.979	11.001	1.171
Selular						
Pendapatan pulsa	7.678	9.826	13.666	19.257	21.823	2.323
Pendapatan bulanan	581	448	384	298	372	40
Fitur	6	91	457	959	313	33
Pendapatan jasa penyambungan	194	56	64	109	130	14
Jumlah pendapatan selular	8.459	10.421	14.571	20.623	22.638	2.410
Jumlah pendapatan telepon	17.356	21.066	25.352	31.602	33.639	3.581
Kerjasama Operasi (KSO)						
Pendapatan minimum TELKOM	900	296	269	207	-	-
Bagian atas pendapatan KSO yang harus dibagi	583	350	319	275	-	-
Amortisasi pendapatan						
kompensasi KSO yang						
ditangguhkan	3	11	1	7	-	-
Jumlah pendapatan kerjasama operasi	1.486	657	589	489	-	-
Interkoneksi – bersih	4.162	6.188	7.742	8.682	9.651	1.027
Pendapatan	6.903	9.465	10.724	11.794	12.706	1.352
Beban	(2.741)	(3.277)	(2.982)	(3.112)	(3.055)	(325)
Jaringan	518	654	587	719	708	75
Data dan Internet	3.109	4.809	6.934	9.065	14.684	1.563
Pola Bagi Hasil	258	281	302	415	428	46
Layanan telekomunikasi lainnya	227	293	301	322	330	35
Jumlah pendapatan usaha	27.116	33.948	41.807	51.294	59.440	6. 327

	Tahun yang berakhir 31 Desember,					
	2003	2004	2005	2006	2007	2007
	(angka disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)					(angka disajikan dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)[1]
BEBAN USAHA						
Beban Karyawan	4.440	4.910	6.563	8.514	8.495	904
Depresiasi	4.779	6.438	7.571	9.178	9.545	1.016
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	3.339	4.530	5.916	7.496	9.590	1.021
Umum dan administrasi	2.079	2.600	2.764	3.271	3.568	380
Pemasaran	503	882	1.126	1.242	1.769	188
Penurunan nilai aktiva	–	–	617	–	–	–
Rugi atas komitmen pembelian	–	–	79	–	–	–
Jumlah Beban Usaha	15.140	19.360	24.636	29.701	32.967	3.509
Laba Usaha	11.976	14.588	17.171	21.593	26.473	2.818
Penghasilan (beban) Lain-lain						
Beban bunga	(1.383)	(1.270)	(1.177)	(1.286)	(1.436)	(153)
Pendapatan bunga	366	318	345	655	518	55
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – bersih	126	(1.221)	(517)	836	(295)	(31)
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi	3	3	11	(7)	7	1
Lain-lain – bersih	364	331	409	202	329	35
Penghasilan (beban) lain – bersih	(524)	(1.893)	(929)	400	(877)	(93)
Laba sebelum pajak	11.452	12.749	16.242	21.993	25.596	2.725
Beban pajak	(3.861)	(4.178)	(5.184)	(7.040)	(7.928)	(844)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	7.591	8.571	11.058	14.953	17.668	1.881
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi – bersih	(1.504)	(1.956)	(3.064)	(3.948)	(4.811)	(512)
Laba Bersih	6.087	6.615	7.994	11.005	12.857	1.369
Rata-rata tertimbang saham yang beredar (juta)	20.160	20.160	20.160	20.115	19.962	-
Laba bersih per saham	301,95	328,10	396,51	547,15	644,08	0,07
Laba bersih per ADS	12.077,83	13.124,14	15.860,25	21.886.00	25.763,20	2,80
U.S. GAAP[3]						
Laba bersih	5.791	6.469	7.840	12.111	11.963	1.274
Pendapatan usaha	27.332	34.494	42.187	54.357	62.813	6.687
Laba bersih per saham	287.23	320,86	388,89	602,12	599,43	0,06
Laba bersih per ADS	11.489,40	12.834.47	15.555,74	24.085,00	23.977,20	2,55
Dividen terkait periode (berbasis akrual)[2]						
Dividen per saham yang diumumkan	150,97	152,01	218,86	303,21	48,45	0,01
Dividen per ADS yang diumumkan	6.038,92	6.080,56	8.754,40	12.128,40	19,38	0,21
Dividen dibayarkan pada periode (berbasis kas)[2]						
Dividen per saham yang diumumkan	165,58	158,09	144,90	267,27	303,25	0,03
Dividen per ADS yang diumumkan	6.623,23	6.323,39	5.796,09	10.692,40	12.130,00	1,29

	Tahun yang berakhir 31 Desember,					
	2003	2004	2005	2006	2007	2007
	(angka disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)					(angka disajikan dalam jutaan Dolar Amerika Serikat, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)[1]
Neraca Konsolidasian						
PABU Indonesia						
Jumlah aktiva	50.283	56.179	62.171	75.136	82.059	8.735
Kewajiban lancar[4]	11.170	11.677	13.513	20.536	20.674	2.201
Kewajiban lain-lain	6.258	8.222	7.728	8.095	7.736	823
Kewajiban jangka panjang	11.834	13.214	11.332	10.249	10.595	1.128
Jumlah kewajiban	29.262	33.113	32.573	38.880	39.005	4.152
Hak minoritas	3.708	4.938	6.305	8.187	9.305	990
Modal saham[5]	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	537
Jumlah ekuitas	17.313	18.128	23.292	28.069	33.749	3.593
U.S. GAAP(3)						
Aktiva lancar	9.411	9.611	10.953	14.639	16.977	1.807
Aktiva tidak lancar	41.936	47.091	52.528	61.495	66.963	7.128
Jumlah aktiva	51.347	56.702	63.481	76.134	83.940	8.935
Kewajiban lancar	11.207	11.650	13.797	19.682	22.068	2.349
Kewajiban tidak lancar	20.213	20.548	18.800	21.976	22.731	2.420
Jumlah kewajiban	31.420	32.198	32.597	41.658	44.799	4.769
Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan	3.642	4.933	6.316	8.167	9.323	922
Ekuitas	16.285	19.571	24.568	26.309	29.818	3.174
Jumlah kewajiban dan ekuitas	51.347	56.702	63.481	76.134	83.940	8.935

(1) Translasi Rupiah ke Dolar AS ditujukan hanya untuk kemudahan kepada pembaca dan menggunakan rata-rata atas nilai beli dan jual sebesar Rp 9.394 per Dolar AS yang dipublikasikan oleh Reuters pada tanggal 28 Desember 2007. Kemudahan translasi ini tidak unntuk diartikan bahwa Rupiah telah, dapat atau akan, dikonversikan ke dalam Dolar AS pada nilai tukar tersebut atau nilai tukar lainnya.

(2) Dividen yang diumumkan perusahaan pada tahun 2003 adalah dividen perusahaan setelah penyesuaian atas pemecahan saham yang dilakukan pada tahun 2004. Dividen yang diumumkan pada tahun 2004 terdiri dari dividen tunai tahun 2003 sebesar Rp 150,98 per lembar saham dan dividen tunai interim yang diumumkan pada bulan Desember 2004 sebesar Rp 7,11 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2005 terdiri dari dividen tunai interim untuk tahun 2004 sebesar Rp 152,01 per lembar saham dikurangi dividen tunai interim yang diumumkan pada tahun 2004 sebesar Rp 7,11 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2006 terdiri dari dividen tunai untuk tahun 2005 sebesar Rp 218,86 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2007 terdiri dari dividen tunai untuk tahun 2006 sebesar Rp 303,21 per lembar saham (di antaranya dividen tunai interim yang diumumkan pada tahun 2006 sebesar Rp 48,45 per lembar saham) dan dividen tunai interim yang diumumkan pada tahun 2007 sebesar Rp 48,45 per lembar saham.

(3) Jumlah berdasarkan U.S. GAAP menunjukkan penyesuaian atas beberapa perbedaan perlakuan akuntansi dari manfaat pensiun dini, perbedaan selisih kurs yang dikapitalisasi pada aktiva dalam konstruksi, bunga dikapitalisasi pada aktiva dalam konstruksi, pola bagi hasil (PBH), imbalan kerja, bagian laba bersih atau rugi atas perusahaan asosiasi, amortisasi hak atas tanah, pengakuan pendapatan, amortisasi *goodwill*, sewa pembiayaan, akuisisi Dayamitra, kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aktiva, pajak penghasilan tangguhan, serta amandemen dan pernyataan kembali KSO di Divre VII, instrumen derivatif melekat aktiva, penurunan nilai aktiva, laba atau rugi atas penghapusan aktiva tetap, reklasifikasi perbedaan nilai restrukturisasi antara entitas sepengendali, efek tersedia untuk dijual dan penyesuaian translasi kumulatif. Lihat Catatan no 55 laporan keuangan konsolidasian.

(4) Termasuk porsi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun.

(5) Sampai dengan 31 Desember 2007, Modal Saham yang diterbitkan dan disetor penuh terdiri dari satu Saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp 250 per lembar dan 20.159.999.279 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 250 per lembar dari modal saham yang tercatat terdiri dari satu Saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 Saham Seri B.

IKHTISAR OPERASI

	31 Des 2003	31 Des 2004	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007
TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL					
Jumlah Pelanggan (dalam ribuan pelanggan)	8.214	8.559	8.686	8.709	8.685
Jumlah Produksi Pulsa (dalam jutaan pulsa)	62.261	65.152	67.669	64.012	75.451
TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL (FLEXI)					
Jumlah Pelanggan					
Classy/Pascabayar(dalam ribuan pelanggan)	228	684	821	794	828
Trendy/Prabayar (dalam ribuan pelanggan)	37	745	3.241	3.381	5.535
Total (dalam ribuan pelanggan)	265	1.429	4.062	4.176	6.363
Penjualan					
Classy/Pascabayar (dalam ribuan pelanggan)	228	595	475	261	273
Trendy/Prabayar (dalam ribuan pelanggan)	38	889	3.558	3.175	5.026
Jumlah (dalam ribuan pelanggan)	264	1.484	4.034	3.436	5.299
ARPU (rata-rata 12 bulan):					
Pascabayar (Rp ribu)	154	94	123	135	115
Prabayar (Rp ribu)	24	20	19	35	42
Campuran (Rp ribu)	141	60	47	54	53
Jaringan					
BTS (unit)	396	1.136	1.448	1.531	1.911
Jumlah kota yang dilayani	38	192	231	236	238
SELULAR					
Base Transceiver Station / BTS (unit)	4.820	6.205	9.895	16.057	20.858
Kapasitas Jaringan (dalam jutaan pelanggan)	10,8	17,9	26,2	38,8	50,5
Customer Base (dalam jutaan pelanggan)	9,6	16,3	24,3	35,6	47,9
Pascabayar (kartuHALO)	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9
Prabayar (simPATI)	8,6	11,6	16,0	21,4	24,0
Prabayar (kartuAs)	-	3,4	6,8	12,5	22,0
ARPU – campuran (Rp '000)	123	102	87	84	80
Pascabayar (kartuHALO)	314	304	291	274	264
Prabayar (simPATI)	95	84	84	83	84
Prabayar (kartuAs)	-	48	45	54	57

KRONOLOGI KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM TELKOM

Tanggal	Tindakan Korporasi	Komposisi Kepemilikan Saham			
		Pemerintah Republik Indonesia	%	Publik	%
13 November 1995	*Pre Initial Public Offering* (IPO)	8.400.000.000	100,0	-	-
14 November 1995	IPO				
	Penjualan saham milik Pemerintah	(933.334.000)		933.334.000	
	Emisi saham baru TELKOM			933.333.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.466.666.000	80,0	1.866.667.000	20,0
11 Desember 1996	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(388.000.000)		388.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.078.666.000	75,8	2.254.667.000	24,2
15 Mei 1997	Pemerintah membagikan saham insentif kepada para pemegang saham publik	(2.670.300)		2.670.300	
	Komposisi kepemilikan saham	7.075.995.700	75,8	2.257.337.300	24,2
07 Mei 1999	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(898.000.000)		898.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	6.177.995.700	66,2	3.155.337.300	33,8
02 Agustus 1999	Pembagian bonus saham (emisi) (setiap 50 saham mendapatkan 4 saham)	494.239.656		252.426.984	
	Komposisi kepemilikan saham	6.672.235.356	66,2	3.407.764.284	33,8
07 Desember 2001	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(1.200.000.000)		1.200.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.472.235.356	54,3	4.607.764.284	45,7
16 Juli 2002	*Block Sale* saham milik Pemerintah	(312.000.000)		312.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.160.235.356	51,2	4.919.764.284	48,8
30 Juli 2004	Pemecahan nilai nominal saham (1:2)				
	Komposisi kepemilikan saham	10.320.470.712	51.2	9.839.528.568	48.8

KRONOLOGI PERNYATAAN DIVIDEN SAHAM TELKOM DAN RASIO PEMBAYARAN

TELKOM membayar dividen tunai seperti yang diputuskan oleh RUPST, sebagai berikut:

Tahun Dividen	Tanggal RUPST	Rasio Pembayaran (%)	Jumlah Dividen (Rp juta)	Dividen per Lembar Saham1 (Rp)
2003	30 Juli 2004	50,0	3.043.614	301,95[2]
2004	24 Juni 2005	50,0	3.064.604[3]	152,01
2005	30 Juni 2006	55,0	4.400.090	218,86
2006	5 Desember 2006	-	971.017[4]	48,41
2006	29 Juni 2007	55,0	5.082.050	254,80
2007	6 November 2007	-	965.398[5]	48,45

1 Merupakan persentase laba bersih dari tahun buku saat dividen dibayarkan.
2 Dividen per lembar saham untuk tahun 2002 dan 2003 sebelum *stock split* 1:2 seperti yang telah disetujui pada RUPST 30 Juli 2004.
3 Termasuk dividen tunai interim yang dibagikan pada bulan Desember 2004 sejumlah Rp 143.377 juta.
4 Dividen tunai interim yang dibagikan pada bulan Desember 2006 sejumlah Rp 971.017 juta.
5 Dividen tunai interim yang dibagikan pada bulan Desember 2007 sejumlah Rp 965.398 juta.

Pada tahun 2005, 2006, dan 2007, dividen tunai dibayarkan kepada SingTel Mobile, pemegang saham minoritas Telkomsel, masing-masing berjumlah Rp 1.694,3 miliar, Rp 2.067,7 miliar, dan Rp 3.693,1 miliar.

Pada tanggal 22 Juni 2007, Telkomsel menyelenggarakan RUPST yang antara lain menyetujui dividen tunai sebesar Rp 9.505,0 miliar yang merupakan 85% dari laba bersih Telkomsel tahun 2006. Sejumlah 35% dari dividen yang diumumkan dibayarkan kepada SingTel Mobile.

IKHTISAR SAHAM

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penetapan besarnya dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham diusulkan dan diputuskan dalam RUPST. Pada tahun 2005, 2006 dan 2007, jumlah dividen tunai yang harus dibayar telah diusulkan oleh TELKOM dan telah disetujui oleh RUPST.

Untuk tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 besarnya rasio pembayaran dividen Perusahaan masing-masing sebesar 50%, 50%, 55%, dan 55%. Untuk tahun buku 2007, besarnya rasio pembayaran dividen akan diputuskan dalam RUPST 2008.

Kinerja Perdagangan Saham TELKOM 2007

Volume Harga

HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN TELKOM DI BEI

ADS TELKOM DAN VOLUME PERDAGANGAN DI NYSE

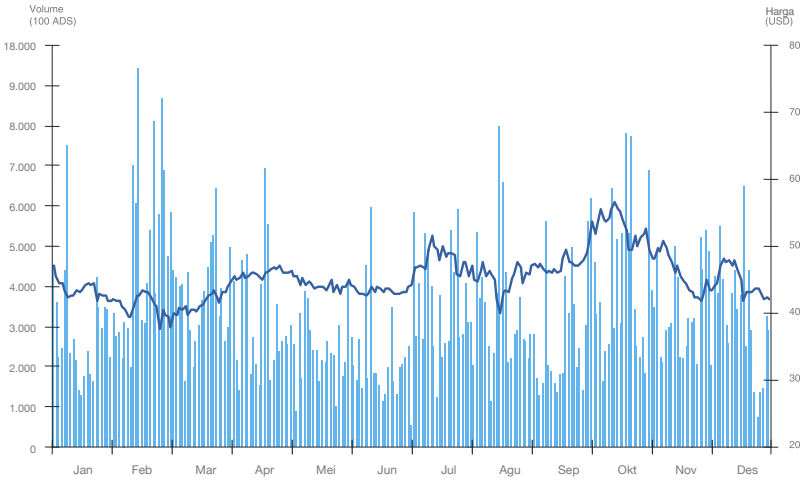

HARGA SAHAM PER KUARTAL

Tabel berikut merupakan harga tertinggi dan terendah dari saham biasa untuk periode tertentu, yang tercatat di BEI pada periode yang disajikan.

INFORMASI HARGA SAHAM

Tahun Kalender	Harga per Lembar Saham*	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam Rupiah)	
2003	6.750	3.225
Kuartal Pertama	3.725	3.225
Kuartal Kedua	4.950	3.650
Kuartal Ketiga	6.000	4.125
Kuartal Keempat	6.750	5.650
2004	5.200	3.300
Kuartal Pertama	4.025	3.300
Kuartal Kedua	4.350	3.300
Kuarter Ketiga	4.225	3.650
Kuartal Keempat	5.200	4.175
2005	6.150	4.175
Kuartal Pertama	5.125	4.300
Kuartal Kedua	5.350	4.175
Kuarter Ketiga	5.800	4.775
Kuartal Keempat	6.150	4.925
2006	10.550	5.950
Kuartal Pertama	7.000	5.950
Kuartal Kedua	8.400	6.750
Kuartal Ketiga	8.450	7.100
Kuartal Keempat	10.550	8.200
2007	12.650	8.900
Kuartal Pertama	10.350	8.900
Kuartal Kedua	10.800	9.400
Kuartal Ketiga	11.450	9.850
Kuartal Keempat	12.650	10.000
Nopember	11.600	10.000
Desember	11.100	10.000
2008		
Januari	10.250	8.400
Pebruari	10.250	9.300
Maret	9.800	9.200
April	9.700	8.650

* Perusahaan melaksanakan pemecahan saham 1:2 untuk Saham Biasa dari nilai nominal Rp 500 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp 250 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPST pada 30 Juli 2004, efektif pada tanggal 1 Oktober 2004. Harga per lembar saham mencerminkan pemecahan tersebut untuk seluruh periode yang tertera.

Pada tanggal 28 Desember 2007 (hari terakhir perdagangan pada tahun 2007 di BEI), harga penutupan saham untuk saham biasa adalah Rp 10.150.

Tabel berikut merupakan harga tertinggi dan terendah ADS TELKOM, untuk jangka waktu tertentu, yang tercatat di NYSE dan LSE.

INFORMASI HARGA SAHAM ADS

Tahun Kalender	Harga per ADS (NYSE)		Harga per ADS (LSE)	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
	(dalam Dolar AS)		(dalam Dolar AS)	
2003	16,42	7,30	16,05	7,27
Kuartal Pertama	8,44	7,30	8,53	7,27
Kuartal Kedua	12,09	8,19	11,78	8,33
Kuartal Ketiga	13,73	9,85	13,90	9,60
Kuartal Keempat	16,42	13,13	16,05	13,40
2004	23,33	14,13	23,21	14,08
Kuartal Pertama	19,45	15,13	18,97	15,29
Kuartal Kedua	19,91	14,13	20,27	14,08
Kuartal Ketiga	18,55	15,81	19,00	15,73
Kuartal Keempat	23,33	18,30	23,21	19,37
2005	25,50	16,85	29,76	16,88
Kuartal Pertama	21,96	18,11	21,86	18,17
Kuartal Kedua	21,96	16,85	21,99	16,88
Kuartal Ketiga	23,66	18,10	29,76	17,97
Kuartal Keempat	25,50	19,81	25,47	19,71
2006	46,68	24,65	46,70	23,78
Kuartal Pertama	31,51	24,65	31,38	23,78
Kuartal Kedua	38,28	27,95	38,35	27,90
Kuartal Ketiga	36,56	30,32	36,15	30,08
Kuartal Keempat	46,68	35,64	46,69	36,00
2007	56,50	37,74	56,87	38,29
Kuartal Pertama	46,98	37,74	46,82	39,30
Kuartal Kedua	47,02	42,70	47,15	39,60
Kuartal Ketiga	51,61	40,00	51,60	38,29
Kuartal Keempat	56,50	41,88	56,87	41,79
Nopember	51,13	41,30	51,03	41,79
Desember	48,18	41,88	49,41	41,88
2008				
Januari	44,12	37,50	42,95	36,32
Pebruari	45,50	40,96	45,74	38,96
Maret	43,16	39,85	43,01	40,08
April	42,86	38,36	41,99	19,61

Pada tanggal 31 Desember 2007 (hari terakhir perdagangan pada tahun 2007 di NYSE), harga penutupan untuk satu lembar ADS sebesar US$ 42,01 di NYSE. Pada 31 Desember 2007 (hari terakhir perdagangan pada tahun 2007 di LSE), harga penutupan untuk satu lembar ADS sebesar US$ 42,26 di LSE.

Pasar

Saham Biasa Perusahaan tercatat di BEI yang merupakan pasar perdagangan utama Saham Biasa Perusahaan di luar pasar perdagangan Amerika Serikat. Selain itu *American Depositary Shares* (ADS) TELKOM yang merepresentasikan 40 saham dari Saham Biasa, tercatat dan diperdagangkan di NYSE dan LSE. Saham Biasa TELKOM juga telah ditawarkan kepada publik tanpa pencatatan di Jepang.

Pasar Sekuritas Indonesia

Sampai dengan akhir Nopember 2007, terdapat dua bursa efek di Indonesia. Pasar utama adalah BEJ yang berada di Jakarta dan yang lainnya adalah BES yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Terhitung tanggal 1 Desember 2007, BES melebur ke dalam BEJ. Kemudian, BEJ berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada akhir tahun 2007, kapitalisasi pasar BEI mencapai
Rp 1.988,3 triliun dan jumlah nilai perdagangan mencapai Rp 1.050,2 triliun pada tahun 2007.

Sekilas BEI

Sampai dengan 31 Desember 2007, BEI terdiri dari 122 anggota (perusahaan pialang). Aturan perdagangan di BEI, saat ini, merupakan hasil keputusan BEI. Saat ini dalam satu hari terdapat dua sesi perdagangan untuk pasar reguler dan pasar negosiasi (*negotiated market*) dari Senin hingga Kamis. Sesi pagi dimulai pukul 09.30 hingga pukul 12.00, sementara sesi siang berlangsung antara pukul 13.30-16.00. Sementara pada hari Jumat, sesi pagi mulai pukul 09.30-11.30 dan sesi siang mulai pukul 14.00-16.00. Sesi perdagangan pasar tunai berlangsung Senin-Kamis, mulai pukul 09.30-12.00, dan pada hari Jumat, dari pukul 09.30-11.30.

Perdagangan sekuritas dibagi menjadi tiga segmen pasar: pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai (kecuali untuk *right issue* yang hanya dapat diperdagangkan pada pasar tunai dan pasar negosiasi). Pasar reguler merupakan mekanisme untuk memperdagangkan saham dalam lot standar di pasar lelang yang dilakukan secara terus menerus selama jam bursa. Perdagangan pasar reguler dan pasar tunai pada umumnya dilaksanakan dalam unit lot, dimana satu lot terdiri dari 500 lembar saham. Pergerakan harga:

- untuk saham dengan harga sebelumnya di bawah Rp 200, dalam kelipatan Rp 1 dan setiap pergerakan harga tidak boleh lebih dari Rp 10;
- untuk saham dengan harga sebelumnya antara Rp 200 – Rp 500, dalam kelipatan Rp 5 dan setiap pergerakan harga tidak boleh lebih dari Rp 50;
- untuk saham dengan harga sebelumnya antara Rp 500 – Rp 2.000, dalam kelipatan Rp 10 dan setiap pergerakan harga tidak boleh lebih dari Rp 100;
- untuk saham dengan harga sebelumnya antara Rp 2.000 – Rp 5.000, dalam kelipatan Rp 25 dan setiap pergerakan harga tidak boleh lebih dari Rp 250;
- untuk saham dengan harga sebelumnya lebih dari Rp 5.000, dalam kelipatan Rp 50 dan setiap pergerakan harga tidak boleh lebih dari Rp 500.

Lelang berlangsung sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga merujuk pada pemberian prioritas untuk pesanan pembelian dengan harga yang lebih tinggi atau pesanan penjualan dengan harga yang lebih rendah. Apabila pesanan pembelian atau penjualan diajukan dengan harga yang sama, maka prioritas diberikan untuk pesanan pembelian atau penjualan yang diajukan pertama kali (prioritas waktu). Perdagangan pasar negosiasi dilaksanakan melalui (i) negosiasi langsung antara anggota BEI atau (ii) antara klien melalui satu anggota BEI atau (iii) antara klien dan anggota BEI atau (iv) antara anggota BEI dengan Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI"). Perdagangan pasar negosisasi tidak menggunakan unit saham bulat (*round lot*).

Transaksi di pasar regular BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada hari perdagangan ketiga setelah transaksi kecuali untuk perdagangan silang. Transaksi di pasar negosisasi diselesaikan berdasarkan perjanjian antara anggota bursa yang menjual dan anggota bursa yang membeli dan diselesaikan per transaksi. Transaksi di pasar tunai BEI harus diselesaikan pada hari perdagangan transaksi. Dalam hal anggota bursa gagal dalam melakukan penyelesaian, maka berlaku ketentuan perdagangan pasar tunai berlangsung berdasarkan mana perdagangan sekuritas melalui perundingan langsung dengan menggunakan persyaratan tunai dan langsung (*cash and carry*) akan dilaksanakan. Seluruh transaksi pasar tunai harus dilaporkan ke BEI. Anggota bursa diwajibkan membayar biaya transaksi sebagaimana yang diatur oleh BEI, keterlambatan pembayaran biaya transaksi akan dikenakan denda sebesar 1,0% dari jumlah yang terhutang untuk setiap hari keterlambatan. Untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan BEI, maka BEI dapat mengenakan sanksi kepada anggota bursa, yaitu: (i) denda sampai Rp 500 juta; (ii) peringatan tertulis; (iii) skorsing; atau (iv) pencabutan ijin sebagai anggota bursa.

Seluruh transaksi terkait saham yang hanya tercatat di BEI yang menggunakan jasa pialang harus dilaksanakan melalui BEI. Agar perdagangan (kecuali *block trade*) dapat dilaksanakan di BEI, maka baik penyelesaian (*settlement*) tunai maupun sekuritas harus dilaksanakan melalui fasilitas BEI. Pemakaian modus *short selling* dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, BEI dapat membatalkan transaksi apabila terdapat bukti adanya kecurangan, manipulasi pasar atau penggunaan informasi orang dalam. BEI juga dapat menangguhkan perdagangan apabila terdapat petunjuk adanya transaksi yang berupa penipuan atau penggelembungan harga saham, informasi yang menyesatkan, referensi informasi orang dalam, sekuritas palsu atau sekuritas yang diblokir dari perdagangan, atau peristiwa material lainnya. BEI dapat menangguhkan perdagangan sekuritas tertentu atau menskors anggota tertentu dari bursa efek.

Anggota BEI mengenakan biaya pialang untuk jasa mereka berdasarkan perjanjian dengan klien hingga maksimum 1,0% dari nilai transaksi. Saat melaksanakan transaksi saham di BEI, anggota bursa diharuskan membayar biaya transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi (untuk transaksi di pasar regular dan pasar tunai) dan biaya transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi atau berdasarkan kebijakan bursa (untuk transaksi di pasar negosisasi). Biaya transaksi minimal sebesar Rp 2 juta per bulan sebagai kontribusi untuk penyediaan fasilitas bursa efek (tetap berlaku untuk anggota bursa efek yang diskors). Klien juga bertanggung jawab membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10,0% atas jumlah biaya pialang dan biaya transaksi. Selain itu, penjual Indonesia diharuskan membayar wajib pungut pajak penghasilan/*withholding tax* sebesar 0,1% (0,6% untuk saham pendiri) dari jumlah nilai transaksi. Selain itu, bea meterai sebesar Rp 3.000 harus dibayar untuk setiap transaksi dengan nilai antara Rp 250.000 dan Rp 1.000.000 dan bea meterai sebesar Rp 6.000 harus dibayar atas setiap transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000.

Para pemegang saham atau pihak yang ditunjuk, setiap saat selama jam kerja, dapat meminta emiten atau biro administrasi sekuritas yang ditunjuk oleh emiten saham tersebut untuk mendaftarkan saham mereka dalam daftar pemegang saham emiten. Pelaporan kepemilikan saham kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam") diwajibkan untuk para pemegang saham yang kepemilikannya telah mencapai 5,0% atau lebih dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, setelah memenuhi tingkat kepemilikan saham tersebut atau setelah terjadinya perubahan kepemilikan tersebut.

Perdagangan di NYSE dan LSE

Bank of New York bertindak sebagai kustodian untuk ADS yang diperdagangkan di NYSE dan LSE. Setiap ADS mewakili 40 saham dari Saham Biasa. Sampai dengan 31 Desember 2007, sebanyak 44.769.015 ADS beredar di NYSE atau LSE dan terdapat 112 pemegang ADS terdaftar.

Komposisi Pemegang Saham

Modal Dasar Perseroan:

Satu lembar saham Seri A Dwiwarna, dan 79.999.999.999 lembar saham Seri B (saham biasa)

Pemegang Saham Treasuri TELKOM dan Saham Treasury pada tanggal 31 Desember 2007

	Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri B (Saham Biasa)	%
Pemerintah Republik Indonesia	1	10.320.470.711	51,82
Publik		9.594.788.068	48,18
Sub Total ditempatkan, diterbitkan, dan disetor penuh	1	19.915.258.779	100,00
Saham Treasuri (Saham yang dibeli kembali)		244.740.500	-
TOTAL	1	20.159.999.279	-

Pemerintah Republik Indonesia memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara istimewa. Hak-hak material dan batasan-batasan yang terdapat pada Saham Biasa, juga berlaku pada Saham Dwiwarna, kecuali Pemerintah tidak dapat mengalihkan saham Dwiwarna dan Pemerintah memiliki hak veto berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk perubahan untuk menggabungkan atau membubarkan Perusahaan sebelum masa berlakunya berakhir, menambah atau mengurangi modal dasar dan mengurangi saham yang dipesan (*subscribed capital*).

Pemegang Saham TELKOM dengan Kepemilikan lebih dari 5% dan Jumlah Saham yang Dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi, sampai dengan 31 Desember 2007

Jenis Saham	Identitas Orang atau Kelompok	Jumlah Saham yang Dimiliki	Persentase Saham (%)
Seri A	Pemerintah	1	-
Seri B	Pemerintah	10.320.470.711	51,82
Seri B	JPMCB US Resident (Norbax Inc.)	1.691.164.849	8,49
Seri B	The Bank of New York	1.733.904.616	8,71
Seri B	Direksi	23.112	<0,01

Pemegang Saham TELKOM dengan Kepemilikan kurang dari 5%, sampai dengan 31 Desember 2007

Jenis Saham	Identitas Orang atau Kelompok	Jumlah Saham yang Dimiliki	Persentase Saham (%)
Seri B	Perorangan Indonesia	205.385.486	1,03
Seri B	Karyawan-Lokal	15.941.446	0,08
Seri B	Koperasi	661.720	0,00
Seri B	Yayasan	7.602.860	0,04
Seri B	Dana Pensiun	144.475.260	0,73
Seri B	Asuransi	149.814.540	0,75
Seri B	Bank	242.376	0,00
Seri B	Perseroan Terbatas	347.558.357	1,75
Seri B	Badan Usaha Lain	4.320	0,00
Seri B	Danareksa	32.000	0,00
Seri B	Reksadana	283.813.000	1,43
Seri B	Perorangan Asing	4.787.064	0,02
Seri B	Badan Usaha Asing	5.009.400.174	25,15
	Jumlah	6.169.718.603	30,98

Hubungan dengan Pemerintah

Pemerintah sebagai Pemegang Saham

Sampai dengan 31 Desember 2007, Pemerintah memiliki 51,82% Saham Biasa dan Saham Seri A (Saham Dwiwarna) TELKOM, yang memiliki hak suara khusus. Sebagai pemegang saham TELKOM terbesar, Pemerintah berkepentingan atas kinerja TELKOM, baik terkait dengan manfaat yang diberikannya kepada bangsa di samping kemampuannya untuk beroperasi secara komersial. Hak dan batasan material yang berlaku untuk Saham Biasa juga berlaku untuk Saham Dwiwarna, kecuali Pemerintah tidak boleh mengalihkan Saham Dwiwarna dan sebagai pemegang Saham Dwiwarna, Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan: (i) pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Direktur; (ii) pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris; (iii) penerbitan saham baru; dan (iv) perubahan terhadap Anggaran Dasar, termasuk tindakan untuk menggabungkan atau membubarkan TELKOM, meningkatkan atau mengurangi modal dasarnya, atau mengurangi modal yang dipesan. Dengan demikian, Pemerintah memiliki kendali efektif atas hal-hal tersebut walaupun memiliki kurang dari mayoritas Saham Biasa yang beredar. Hak-hak Pemerintah berkenaan dengan Saham Dwiwarna tidak akan berakhir kecuali Anggaran Dasar Perusahaan diubah, yang mensyaratkan persetujuan dari Pemerintah sebagai pemegang Saham Dwiwarna tersebut. Lihat Catatan 25 Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

Adalah merupakan kebijakan Perusahaan untuk tidak mengadakan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa apabila tidak lebih menguntungkan Perusahaan dibandingkan dengan yang dapat diperoleh Perusahaan atas dasar transaksi dengan pihak yang independen (*arm's-length basis*). Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) telah memberitahukan Perusahaan bahwa Menteri Keuangan, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham yang mengendalikan Perusahaan, tidak akan meminta Perusahaan untuk mengadakan transaksi dengan entitas lain di bawah kendalinya kecuali syarat-syaratnya konsisten dengan kebijakan Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam kalimat sebelumnya. Meneg BUMN telah menerapkan kebijakan serupa.

Berdasarkan peraturan Bapepam, Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Keuangan Indonesia, karena Perusahaan tercatat di BEI, setiap transaksi yang memiliki benturan kepentingan (sebagaimana dijelaskan di bawah ini) harus mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang saham dari Saham Biasa yang tidak memiliki benturan kepentingan atas transaksi yang diusulkan, kecuali benturan terjadi sebelum Perusahaan tercatat dan diungkapkan sepenuhnya dalam dokumen penawaran. Benturan kepentingan didefinisikan dalam peraturan Bapepam sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi Perusahaan dan para pemegang saham di satu sisi dan kepentingan ekonomi pribadi anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham prinsipal (pemegang 20% atau lebih saham yang dikeluarkan) dan afiliasi mereka, baik secara gabungan atau terpisah. Suatu benturan kepentingan juga terjadi apabila anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham prinsipal dari Perusahaan atau afiliasi mereka masing-masing terlibat dalam transaksi yang kepentingan pribadi mereka bisa saja berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Bapepam berwenang untuk memberlakukan peraturan ini; pemegang saham Perusahaan juga berhak untuk mengupayakan pemberlakuan atau mengajukan tindakan pemberlakuan berdasarkan peraturan ini.

Sesuai peraturan Bapepam, transaksi antara Perusahaan dan badan usaha milik negara atau badan usaha lainnya yang dikendalikan oleh negara, dapat mengandung “benturan kepentingan”. Apabila terjadi benturan kepentingan, persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan wajib diperoleh. Perusahaan meyakini bahwa banyak transaksi yang dilaksanakan dengan badan usaha milik atau yang dikendalikan negara melalui praktik bisnis yang independen, berbasis komersial dan bukan merupakan transaksi yang mengandung “benturan kepentingan” yang memerlukan suara pemegang saham yang tidak berkepentingan. Transaksi tersebut dapat termasuk penjualan jasa telepon oleh TELKOM kepada badan usaha milik atau yang dikendalikan negara atau pembelian listrik dari Perusahaan dari badan usaha milik negara. Selain itu, peraturan Bapepam tidak mewajibkan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan atas suatu transaksi, yang syarat-syarat pokoknya diungkapkan dalam prospektus Indonesia untuk IPO. Perusahaan berharap, dalam hubungannya dengan pengembangan dan pertumbuhan bisnisnya, Perusahaan dapat mengadakan usaha patungan, perjanjian atau transaksi dengan badan usaha milik atau yang dikendalikan oleh Pemerintah tersebut. Dalam situasi ini, TELKOM dapat berkonsultasi dengan Bapepam dalam menentukan apakah usaha patungan, perjanjian atau transaksi yang diusulkan memerlukan suara dari pemegang saham yang tidak berkepentingan berdasarkan syarat-syarat peraturan Bapepam. Apabila Bapepam berpandangan bahwa usaha patungan, perjanjian atau transaksi yang diusulkan tidak memerlukan suara dari pemegang saham yang tidak berkepentingan sesuai peraturan yang berlaku, maka TELKOM dapat melaksanakannya tanpa meminta persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan tersebut. Namun, apabila Bapepam mensyaratkan bahwa usulan tersebut memerlukan suara dari pemegang saham yang tidak berkepentingan sesuai peraturan yang berlaku, maka TELKOM harus berupaya mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan sebagaimana yang disyaratkan atau membatalkan usulan tersebut.

Pemerintah sebagai Pengatur (*Regulator*)

Pemerintah mengatur sektor telekomunikasi melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Khususnya, Menkominfo berwenang menerbitkan keputusan pelaksanaan Undang-Undang, yang umumnya memiliki lingkup yang luas, sehingga memberikan keleluasaan bagi kementerian untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan. Berdasarkan keputusan ini, Menkominfo mendefinisikan struktur industri, menentukan rumus tarif, menentukan kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation* - USO) TELKOM dan mengendalikan banyak faktor yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif, usaha dan kondisi keuangan TELKOM. Melalui Ditjen Postel, Pemerintah mengatur alokasi frekuensi dan *bandwidth* dan TELKOM harus mendapatkan lisensi dari Ditjen Postel untuk setiap jasanya di samping untuk pemanfaatan frekuensi dan *bandwidth*. TELKOM dan operator lain diharuskan membayar biaya hak penggunaan frekuensi. Telkomsel memiliki beberapa lisensi yang diterbitkan oleh Menkominfo (yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menhub) untuk penyediaan jasa selularnya dan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia terkait dengan investasi oleh Telkomsel untuk pembangunan jasa sambungan telepon selular dengan jangkauan nasional, termasuk perluasan jangkauan jaringannya. Pemerintah, melalui Menkominfo sebagai pengatur, berwenang untuk memberikan lisensi baru untuk pendirian usaha patungan dan perjanjian baru lainnya, khususnya di sektor telekomunikasi.

TELKOM membayar biaya hak penyelengggaraan jasa telekomunikasi dan biaya hak penggunaan frekuensi radio kepada Menkominfo. Biaya hak penyelenggaraan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing mencapai Rp 558,5 miliar, Rp 497,9 miliar, dan Rp 587,8 miliar (US$ 62,6 juta). Biaya hak penyelenggaraan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing merepresentasikan 2,3%, 1,7%, dan 1,8% dari jumlah beban usaha. Biaya hak penggunaan frekuensi radio pada tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing mencapai Rp 548,2 miliar, Rp 722,6 miliar, dan Rp 1.138,5 miliar (US$ 121,2 juta). Biaya penggunaan frekuensi radio pada tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing merepresentasikan 2,2%, 2,4%, dan 3,5% dari jumlah beban usaha. Sejak tahun 2005, TELKOM membayar biaya USO kepada Menkominfo sebesar Rp 307,7 miliar, Rp 383,8 miliar, dan Rp 438,5 miliar (US$ 46,7 juta) masing-masing untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 yang merepresentasikan 1,2%, 1,3%, dan 1,3% dari jumlah beban usaha pada tahun 2005, 2006, dan 2007.

Pemerintah sebagai Pemberi Pinjaman

Sampai dengan 31 Desember 2007, Pemerintah memiliki pinjaman yang dipinjamkan kembali dari para pemberi pinjaman asing kepada TELKOM dalam bentuk “pinjaman penerusan” sebesar Rp 4.174,4 miliar (US$ 444,1 juta), termasuk yang jatuh tempo pada tahun berjalan (*current maturities*). TELKOM diwajibkan membayar bunga kepada Pemerintah dan membayar kembali pokok pinjamannya yang selanjutnya dibayarkan oleh Pemerintah kepada masing-masing pemberi pinjaman. Sampai dengan 31 Desember 2007, pinjaman dalam mata uang asing adalah sebesar 66,4% dari jumlah pinjaman terhutang. Sisanya sebesar 33,6% dari pinjaman yang terhutang tersebut dalam Rupiah. Pada tahun 2007, tingkat suku bunga tahunan dikenakan atas pinjaman yang harus dibayar kembali dalam Rupiah yang berkisar antara 8,97% sampai 12,14%, atas pinjaman yang harus dibayar kembali dalam Dolar Amerika Serikat mulai dari 4,0% sampai 7,39%, dan atas pinjaman yang harus dibayar kembali dalam Yen Jepang sebesar 3,1% dan 3,2%.

Pemerintah sebagai Pelanggan

Pemerintah membeli layanan dari TELKOM secara komersial. Lembaga Pemerintah secara keseluruhan merupakan pengguna terbesar layanan TELKOM. Namun TELKOM berurusan dengan berbagai departemen dan instansi Pemerintah sebagai pelanggan secara terpisah satu dengan lainnya. Penyediaan layanan kepada departemen atau instansi secara terpisah seperti ini tidak meningkatkan pendapatan TELKOM secara signifikan nilainya. Dalam pemberian tarif, pemerintah dan instansi pemerintah diperlakukan sama dengan segmen rumah tinggal untuk biaya sambungan serta biaya bulanan. Tarif untuk segmen rumah tinggal lebih rendah daripada untuk segmen bisnis. Perlakuan khusus ini tidak berlaku untuk tarif panggilan lokal, jarak jauh dan SLI.

Lain-Lain

Proporsi sekuritas TELKOM di Indonesia dan di luar Indonesia

Sampai dengan 31 Desember 2007, sebanyak 21.289 pihak, termasuk Pemerintah, terdaftar sebagai pemegang dari 19.915.258.779 Saham Seri B dari Saham Biasa TELKOM di Indonesia. Secara keseluruhan terdapat 44.769.015 ADS yang dimiliki oleh 112 pemegang terdaftar. ADS diperdagangkan di NYSE dan LSE.

Perubahan Kendali

Tidak ada perjanjian yang sepengetahuan TELKOM dapat mengakibatkan suatu perubahan kendali terhadap TELKOM.

Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

TELKOM terikat dengan perjanjian tertentu dan terlibat dalam transaksi dengan sejumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan TELKOM, seperti perusahaan patungan, koperasi dan yayasan, selain Pemerintah dan badan usaha yang terkait atau yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, seperti badan usaha milik negara. Lihat Catatan 44 pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM untuk informasi lebih rinci mengenai transaksi dengan pihak terkait.

Pembelian Surat Saham Oleh Emiten dan Pembeli Terafiliasi

Sampai dengan 31 Desember 2007, jumlah saham TELKOM yang telah dibeli kembali (share buyback pertama dan kedua) berjumlah 244.740.500 yang terdiri dari 118.376.500 dan 126.364.000 lembar saham untuk tahun 2006 dan 2007. Untuk program *share buyback* kedua jumlah maksimal saham TELKOM yang diijinkan untuk dibeli adalah 181.550.000 lembar saham.

Tabel berikut menyajikan informasi saham seri B yang dibeli kembali pada tahun 2007.

Periode (2007)	Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Rata-rata per Lembar Saham (Rp)	Jumlah Saham yang telah Dibeli Kembali[1]	Jumlah Maksimal Pembelian Saham yang Diijinkan[2]
Januari	7.900.000	9.661.23	126.276.500	881.723.464
Pebruari	44.639.000	9.293.26	170.915.500	837.084.464
Maret	21.000.000	9.426.28	191.915.500	816.084.464
April	1.625.000	9.969.23	193.540.500	814.459.464
Mei	9.250.000	9.578.72	202.790.500	805.209.464
Juni[3]	8.500.000	9.711.52	211.290.500	796.709.464
JUMLAH	92.914.000	9.433,12	211.290.500	796.709.464

(1) Merepresentasikan Saham Seri B yang dibeli sesuai dengan rencana pembelian kembali saham TELKOM yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Desember 2005. Berdasarkan rencana pembelian kembali, TELKOM diperbolehkan membeli kembali hingga maksimum 5% dari saham yang diterbitkan dan beredar Saham Seri B untuk jumlah pembelian kembali tidak melebihi Rp 5,25 triliun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bapepam dan bursa saham tempat Saham Biasa dan ADS diperdagangkan, serta seluruh lembaga regulasi terkait lainnya. Pembelian kembali tersebut dimaksudkan dilaksanakan dari waktu ke waktu selama jangka waktu delapan belas bulan setelah pengumuman. Pembelian kembali dapat dilaksanakan atas keputusan manajemen TELKOM melalui pembelian saham pada BEI, pembelian saham dalam bentuk ADS pada New York Stock Exchange, transaksi dan perjanjian di luar bursa, atau cara yang sah lainnya yang dianggap tepat oleh Perusahaan.

(2) Merepresentasikan maksimum 1.007.999.964 Saham Seri B (setara dengan 5% dari saham yang diterbitkan dan beredar dari Saham Seri B) yang awalnya tersedia untuk pembelian kembali berdasarkan rencana pembelian kembali saham TELKOM tahap pertama.

Periode (2007)	Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Rata-rata per Lembar Saham (Rp)	Jumlah Saham yang telah Dibeli Kembali[4]	Jumlah Maksimal Pembelian Saham yang Diijinkan[5]
Juli	-	-	-	215.000.000
Agustus	4.600.000	10.119.29	4.600.000	210.400.000
September	6.450.000	9.382.57	11.050.000	203.950.000
Oktober	-	-	11.050.000	203.950.000
Nopember	12.900.000	10.345.80	23.950.000	191.050.000
Desember	9.500.000	10.219.53	33.450.000	181.550.000
JUMLAH	33.450.000	10.380.57	33.450.000	181.550.000

(3) Akhir dari rencana pembelian kembali saham TELKOM tahap pertama.

(4) Merepresentasikan Saham Seri B yang dibeli sesuai dengan rencana pembelian kembali saham TELKOM tahap kedua yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juni 2007. TELKOM diperbolehkan membeli kembali hingga maksimum 215 juta lembar saham Seri B dengan jumlah pembelian kembali tidak melebihi Rp 2 triliun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bapepam dan bursa saham tempat Saham Biasa dan ADS diperdagangkan, serta seluruh lembaga regulasi terkait lainnya. Pembelian kembali tersebut dimaksudkan dilaksanakan dari waktu ke waktu selama jangka waktu delapan belas bulan setelah pengumuman. Pembelian kembali dapat dilaksanakan atas keputusan manajemen TELKOM melalui pembelian saham pada BEI, pembelian saham dalam bentuk ADS pada New York Stock Exchange, transaksi dan perjanjian di luar bursa, atau cara yang sah lainnya yang dianggap tepat oleh Perusahaan.

(5) Merepresentasikan jumlah maksimal 215 juta lembar saham Seri B yang diijinkan untuk dibeli kembali oleh TELKOM. Untuk keterangan lebih lengkap, lihat catatan 1c dan 27 Laporan Keuangan Konsolidasian unutk keterangan lebih rinci mengenai rencana pembelian kembali saham TELKOM.

PERISTIWA PENTING 2007

Pebruari:

RUPSLB, Perubahan Susunan Direksi

Pada tanggal 28 Pebruari 2007 telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa yang agendanya antara lain dalam agenda lima menyatakan perubahan susunan keanggotaan Direksi. Anggota Direksi sebelumnya berjumlah tujuh orang, kemudian terdapat penambahan dua direktur yakni Direktur Information Technology and Supply dan Direktur Compliance and Risk Management. Selain itu ada perubahan nama untuk Direktur Sumber Daya Manusia menjadi Direktur Human Capital & General Affairs.

TELKOM Memenuhi Kebutuhan Data Bank Indonesia

TELKOM kembali memenangkan tender di Bank Indonesia (BI) untuk kebutuhan sewa *Link Dense Wave Length Division Multiplexing* (DWDM) sebesar delapan Gbps. *Link* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mirroring data center* di Kantor Pusat BI dengan data di DRC (*Disaster Recovery Center*) Bank Indonesia, dan juga untuk meng-*update* data secara *real time*. Selain itu *link* DWDM tersebut digunakan juga sebagai sistem *back up* untuk kliring nasional, laporan harian bank, sistem *back office* dan sistem informasi debitur. Dengan memenangkan tender tersebut TELKOM menjadi *market leader* untuk kebutuhan InfoComm di BI dan mengantongi lebih dari 53% *wallet share* BI. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2007 oleh EGM Divisi Enterprise TELKOM serta Direktur Teknologi Informasi BI.

Maret:

Perubahan Nama PT AriaWest International

Sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka terhitung sejak tanggal 14 Maret 2007 PT AriaWest International berubah nama menjadi PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII"). Semua hak dan kewajiban yang tercantum pada perjanjian KSO menjadikan TII sebagai mitra KSO selanjutnya.

TII Menandatangani Kontrak dengan Timor Leste

TII, anak perusahaan TELKOM, telah menandatangani amandemen pengalihan kontrak transponder dengan pemerintah Timor Leste pada tanggal 3 Oktober 2007. Melalui pengalihan kontrak tersebut, pelanggan TELKOM dilayani oleh TII. Melalui TII, TELKOM berharap dapat lebih fokus menangkap dan mengelola peluang bisnis di luar pasar domestik.

April:

TELKOM Sponsori e-Indonesia Initiatives 2007

Dalam rangka mempromosikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology* atau "ICT") di Indonesia pada kalangan akademisi, pemerintah dan swasta, dan untuk berbagi ide serta pemahaman tentang fungsi strategis ICT, e-Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi nasional tentang ICT 2007 pada tanggal 25-26 April di Jakarta. TELKOM menjadi sponsor utama acara tersebut dan mempromosikan beberapa produknya seperti e-Document, e-Auction, e-Learning, e-Government, POINT, Ventus dan IG2S. TELKOM juga melakukan presentasi pada seminar mengenai pengembangan ICT di Perguruan Tinggi (*smart campus*), pengembangan industri ICT di Indonesia, peran dan tanggung jawab dari *Chief Information Officer* (CIO) di perusahaan-perusahaan, dan pengembangan e-Documents untuk mendukung transaksi bisnis.

Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Serat Optik TELKOM-PGN

Pada tanggal 13 April 2007, TELKOM menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Jaringan Serat Optik dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta. Selama ini pemanfaatan jaringan serat optik yang terpasang pada jaringan pipa gas bumi yang terletak di sepanjang Gresik-Cilegon, Sumatera Selatan, hingga perbatasan Singapura, hanya digunakan untuk komunikasi pemeliharaan jaringan pipa gas, sehingga kerjasama ini diharapkan akan memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi kedua belah pihak. TELKOM akan menggunakan jaringan serat optik tersebut untuk memberikan layanan telekomunikasi kepada pengguna produk TELKOM seperti telepon tidak bergerak kabel, Speedy, 3G, dan Flexi.

Juni:

TELKOM Group Mengikuti Apconex 2007

TELKOM berpartisipasi dalam *Asia Pacific Conference and Exhibition (Apconex 2007) on Banking Excellence* pada tanggal 9-11 Juni 2007. TELKOM Group menampilkan produk-produk anak perusahaannya seperti Finnet, Telkomsel, Infomedia dan berkesempatan untuk mendemonstrasikan penggunaan ATM melalui teknologi GPRS.

Pameran ICT 2007

Pameran *Information Communication Technology* (ICT) 2007 berlangsung dari tanggal 3-5 Juni 2007. Dalam Pameran tersebut, TELKOM Group menampilkan produk-produknya seperti Speedy, Flexi, 3G, Flash, Satelit dan TV Kabel digital. Pameran ini menjadi ajang peningkatan pemahaman dalam pengelolaan bisnis terkait ICT, dan juga menjadi tempat bertemunya berbagai industri untuk saling bekerjasama.

Juli:

Peluncuran Layanan TV Prabayar & TV Kabel Digital

Konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2007 menandai peluncuran TV Prabayar dan TV kabel Digital TELKOMVision. TELKOMVision secara resmi menggunakan *Head End* DTH dengan menggunakan satelit TELKOM-1 pada transponder C-Band yang mampu menjangkau seluruh Indonesia yang didukung teknologi terbaru. Selain itu TELKOMVision juga menerapkan sistem pemasaran prabayar pertama di Indonesia. TELKOMVision telah menambah enam kanal baru pada layanan DTH dan TV kabel seperti HBO Signature, Discovery Real Time, Celestial Movies, Disney channel, E!Entertainment serta Ten Sports. TELKOMVision menargetkan menguasai pasar TV berlangganan di Indonesia pada tahun 2009 dan diharapkan dapat mengakuisisi 1 juta pelanggan di tahun 2010.

Peluncuran TELKOM Solution House

TELKOM telah meluncurkan TELKOM *Solution House* (TSH) pada tanggal 18 Juli 2007. TSH merupakan sebuah pusat promosi, pengenalan solusi baru *high end market, benchmark icon*, visualisasi serta klinik solusi InfoComm dan bisnis layanan pelanggan korporasi. Pengelolaan TSH didukung oleh anak perusahaan TELKOM seperti Telkomsel, Infomedia, Indonusa, Sistelindo dan Finnet serta mitra Divisi Enterprise (DIVES), yakni Tanberg, Polycom, Sony, Alcatel-Lucent, Gamatechno, Juniper, 3Com dan Mikrotik. DIVES bertindak sebagai *host, exhibitor* dan fasilitator sedangkan anak perusahaan dan mitra diberi kesempatan sebagai *exhibitor* dan *user* sehingga mereka berhak menggunakan TSH sebagai *benchmark* bagi para pelanggan mereka.

Agustus:

Corporate Campaign Memperingati HUT RI ke-62

Untuk meningkatkan kesadaran terhadap citra, TELKOM mengadakan kampanye *corporate image* pada perayaan menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-62 melalui iklan TV (*TV Commercial* –TVC), media-media utama nasional dengan tema "TELKOM Mendukung Pembangunan Indonesia Cerdas". Kampanye ini merupakan kelanjutan dari program Internet Goes to School.

Kerjasama Restorasi *Backbone* TELKOM dan Indosat

Pada tanggal 29 Agustus 2007, TELKOM dan Indosat telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk merestorasi infrastruktur sarana telekomunikasi serat optik secara timbal balik. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi isu kinerja *link* transmisi akibat sering terputusnya kabel serat optik di Kalimantan, menjaga ketersediaan link yang handal dan membantu menjaga kehandalan produk layanan bagi pelanggan.

September:

TELKOM Akuisisi Trafik SLI Indosat dari XL

Direktur Komersial PT Excelcomindo Pratama (XL) dan General Manager (GM) *Inter Carrier Relation* (ICR) TELKOM telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk penyelesaian trafik anomali dan adendum PKS untuk pemanfaatan infrastruktur/sarana pendukung TELKOM oleh XL. Dengan penandatangan PKS tersebut, dipastikan TELKOM akan mengakuisisi Trafik SLI Indosat originasi dari XL dengan *signaling* internasional senilai rata-rata Rp 2,5 miliar per bulan.

Komitmen TELKOM kepada Departemen Pertahanan/TNI

Pada tanggal 11 September 2007, TELKOM dan Departemen Pertahanan (Dephan)/TNI menandatangani nota kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk Penggunaan Layanan VPN Dial dan VSAT IP. Pelanggan dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp 150 miliar per tahun akan mendapatkan prioritas *coverage, consultancy* (konsultasi), *customization* dan *cost* atau ”4C”, disamping *confidentiality*. Penandatanganan ini merupakan bentuk sinergi Dephan/TNI dengan TELKOM untuk menjaga kedaulatan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oktober:

TELKOM – TM Malaysia Sepakati Kerjasama untuk Pemenuhan *Bandwidth*

TELKOM telah menjalin kerjasama bilateral dalam penyediaan dan peningkatan *bandwidth* dengan TM Malaysia. Penandatangan kerjasama tersebut dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2007. Dalam penandatanganan tersebut disepakati secara bersama harga untuk pengadaan IRU x STM-4 ke Hong Kong melalui APCN2 cable system dan VC Agreement untuk kerjasama penyaluran trafik bilateral antara TELKOM – TM Malaysia. Pada saat penandatangan, TELKOM diwakili oleh EGM Divisi Infratel sementara TM Malaysia diwakili oleh Vice President TM Global. Tujuan diadakan kerjasama yang saling menguntungkan tersebut adalah menjaga kontinuitas kerjasama bilateral penyaluran trafik bilateral antara TELKOM Indonesia dan TM Malaysia di masa yang akan datang.

Nopember:

Penandatanganan Proyek Palapa Ring

Menteri Komunikasi dan Informasi menjadi saksi penandatanganan proyek Palapa Ring pada tanggal 10 Nopember 2007 yang melibatkan enam operator telekomunikasi yaitu Telkom, Bakrie Telecom, Excelcomindo Pratama, Infokom Elektrindo, Indosat, dan Powertek Utama Internusa. Proyek ini merupakan bagian dari upaya enam operator tersebut untuk mempercepat pembangunan prasarana telekomunikasi di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT). Jumlah total investasi pada proyek ini mencapai US$ 225 miliar atau Rp 2,07 triliun, TELKOM berkontribusi sejumlah 40% dari total nilai investasi tersebut, sedangkan beberapa anggota konsorsium lainnya menyumbang masing-masing mencapai 13,3% dan satu anggota 6,4%. Dengan penyertaan dana 40%, praktis TELKOM mendapatkan kuota kapasitas paling besar 40 Gbps. Palapa Ring akan memperkuat dan memfasilitasi TELKOM dalam memperluas layanan InfoComm untuk mencakup wilayah yang lebih luas. Spesifikasi teknis Palapa-Ring tersebut memiliki panjang jaringan 11.202 km, kabel bawah laut (*submarine cable*) 9.345 km dan kabel darat (*land cable*) 1.857 km, kapasitas 100 GB dan bisa di-*upgrade* hingga 160 GB. Kekuatan jaringan ini adalah pada penggunaan konsep 2 *pair* (*4 core*). Palapa Ring untuk Kawasan Timur Indonesia (IBT) tersebut memiliki 32 *landing point* yang melalui 30 kabupaten. Pada tahap selanjutnya direncanakan dibangun *extension network* hingga ke seluruh kabupaten/ kota.

TELKOM dan SingTel Mobile Tandatangani Kontrak Kerjasama

Pada tanggal 19 Nopember 2007, TELKOM dan SingTel Mobile menandatangani kesepakatan kerjasama kontrak IRU dan sewa *Internet Gateway* & IP Port. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah bekerjasama dalam pengadaan layanan IPLC & IP *Transport* untuk memenuhi peningkatan permintaan pelanggan TELKOM dalam bisnis hubungan internasional. Sebagai pemain lama, TELKOM memulai bisnis dari telepon tidak bergerak dan akan menjadikan pita lebar sebagai ujung tombak layanan. TELKOM juga telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas *bandwidth* demi kepuasan pelanggan.

TELKOM Dukung Acara *IT for UNFCCC* di Bali

TELKOM menjadi perusahaan yang dipercaya untuk mendukung bidang TI dalam acara konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007. TELKOM adalah perusahaan telekomunikasi yang dipilih PBB setelah mengalahkan dua perusahaan telekomunikasi lainnya, yaitu Indosat dan XL. UNFCCC adalah salah satu badan milik PBB di bidang penanganan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya, terutama menyangkut pergantian iklim yang menyebabkan pemanasan bumi yang menjadi masalah internasional. Dengan keikutsertaan TELKOM sebagai perusahaan yang mendukung acara konferensi tersebut, TELKOM telah menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu pemanasan global.

Desember:

TELKOM Luncurkan Aplikasi *e-Procurement*

Pada tanggal 12 Desember 2007, dilakukan peluncuran penerapan aplikasi *e-procurement* dalam proses bisnis pengadaan TELKOM. *e-procurement* merupakan proses otomatisasi *end to end* proses pengadaan yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan jaringan internet, yang bertujuan untuk transparansi dan standarisasi proses pengadaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, terutama dari sisi waktu proses, serta memudahkan dalam pengendalian proses pengadaan. Termasuk dalam proses *e-procurement* ini adalah *e-auction.* Implementasi *e-procurement* sendiri mulai dilakukan melalui dua tahap. Tahap I dimulai pada awal triwulan pertama. Sedangkan tahap II akan dimulai pada awal triwulan kedua untuk seluruh unit bisnis di lingkungan TELKOM.

TELKOM Fasilitasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

TELKOM memfasilitasi infrastruktur Bank Indonesia berupa jaringan VPN IP dan VPN dial yang didedikasikan bukan hanya untuk penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) namun juga aplikasi Laporan Bank Umum Harian serta Sistem Informasi Debitur. TELKOM juga menyediakan *Disaster Recovery System* (DRS) Bank Indonesia yang merupakan layanan *back up* data secara keseluruhan dengan sistem *mirroring* untuk menjamin keamanan data dari kemungkinan adanya bencana. Sistem *mirroring* ini memanfaatkan layanan *Dense Wavelength Division Multiplexer* (DWDM) TELKOM dengan kapasitas mencapai 8 GB.

TELKOM Akuisisi 80% Saham SIGMA

TELKOM melalui anak perusahaannya PT Multimedia Nusantara ("Metra") menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Conditional Purchase & Sale Agreement-CSPA*) untuk mengakuisisi 80% saham PT Sigma Cipta Caraka (Sigma) pada tanggal 18 Desember 2007. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi TELKOMGroup dalam pasar teknologi informasi dan *enterprise* di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri Teknologi Informasi (TI), menjadikan Sigma sebagai perusahaan terkemuka Indonesia dalam bidang TI, yang juga berperan aktif di dalam sektor perbankan, menawarkan layanan khusus, seperti pengembangan dan modifikasi perangkat lunak, integrasi sistem dan jaringan, pengelolaan sumberdaya, dan akses internet.

PENGHARGAAN

1

Januari:

Indonesia's Best for Shareholders' Rights and Equitable Treatment

TELKOM terpilih sebagai *Indonesia's Best for Shareholder's Rights and Equitable Treatment* pada *polling* Corporate Governance 2006 yang diselenggarakan oleh majalah finansial Asia – ASIAMONEY. Penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 24 Januari 2007 di Asian Civilization Museum di Singapura.

2

Pebruari:

***Top Brand Award* 2000-2007**

TELKOM meraih penghargaan tertinggi "Top Brand" untuk dua kategori merek tahun 2000-2007. Pertama, kategori internet provider melalui produk "TELKOMNet Instan" dan kedua, kategori simcard pascabayar melalui produk "Flexi Classy". Penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007. Top Brand Award merupakan gagasan dari Pimpinan Frontier Consulting Group untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional. Keberhasilan meraih penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras perusahaan membangun *Top of Mind Share, Top of Market Share* dan *Top of Commitment Share* berdasarkan hasil survei Frontier Consulting Group selama delapan tahun.

Zero Accident Award

TELKOM menerima Penghargaan Kecelakaan Kerja Nihil (Zero Accident Award atau "ZAA") dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 6 Pebruari 2007. ZAA diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara optimal dalam kurun waktu tertentu dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja.

4

April:

The Best CDMA Provider

TELKOM melalui produk TEKOMFlexi berhasil meraih anugerah *The Best CDMA Provider* pada acara *Cellular Award* 2006 yang diselenggarakan atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel), dan Majalah Selular. Penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 4 April 2007. Penghargaan ini merupakan suatu bentuk pengakuan atas keunggulan TELKOMFlexi dibandingkan layanan sejenis. Melalui inovasi fitur FlexiCombo, TELKOMFlexi berhasil memperluas jangkauan mobilitasnya hingga mencakup lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia.

***Call Center Award* 2007**

Contact Center TELKOM 147 yang dikelola Infomedia Nusantara memperoleh dua penghargaan *Call Center Award* (CCA) yang diserahkan pada tanggal 12 April 2007 sebagai *call center* terbaik untuk kategori telekomunikasi dan kategori *Internet Service Provider*. CCA diselenggarakan oleh Center for Customer Satisfaction & Loyalty ("CCSL") dan Majalah Marketing.

Penilaian kinerja *call center* mengacu pada *Call Center Service Excellence Index* ("CCSEI"). Indeks tersebut merupakan barometer kinerja *call center* dari kepuasan pelanggan. Penilaian CCSEI 2007 dihasilkan dari pemantauan kinerja sepanjang semester kedua (Juli-Desember 2006.) Pengukuran dilakukan berdasarkan pengalaman nyata dengan menggunakan *mystery caller* dengan standar CCSL. CCSEI 2007 melibatkan 76 *call center* dari 36 industri yang memiliki *call center* dan terbagi dalam 13 kategori industri. *Mystery call* dilakukan secara acak, baik hari dan waktunya. Hasil pengukurannya dapat dijadikan gambaran kinerja *call center* secara keseluruhan. Penilaian kinerja *call center* didasarkan pada tiga kontak layanan, yakni akses, sistem & prosedur, dan sumber daya manusia.

7

Juli:

IMAC Award 2007

TELKOM menerima *Indonesia's Most Admired Company* (IMAC) *Award* 2007 di bidang Telekomunikasi. Penghargaan ini diberikan oleh majalah *BusinessWeek* dan *Frontier Consulting Group*. Penghargaan diterima TELKOM pada tanggal 12 Juli 2007. *IMAC Award* adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki citra dan reputasi terbaik di bidang industrinya masing-masing. Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Frontier Consulting Group* kepada para pemangku kepentingan yang terdiri dari investor, manajemen, masyarakat umum, dan jurnalis bisnis.

Selain *IMAC Award*, TELKOM juga menerima penghargaan *The Most Sustainable Corporate Image* 2007. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan presentasi dan tanya-jawab CEO perusahaan mengenai strategi, implementasi, program, dan citra perusahaan.

Most Admired in Industry Category for Telecommunications

Survey IMAC 2007 yang dimuat di majalah *BusinessWeek* edisi Indonesia, Nomor 19 tanggal 25 Juli 2007 menobatkan TELKOM sebagai perusahaan yang paling dikagumi untuk kategori perusahaan telekomunikasi. TELKOM memperoleh skor 3.997, sementara Telkomsel (sebagai perusahaan paling dikagumi tahun 2006) menempati peringkat kedua dengan skor 3.972, disusul Indosat pada peringkat ketiga dengan skor 3.822. Rata-rata skor industri telekomunikasi sebesar 3.754. Responden yang dipilih dalam survei IMAC 2007 dibagi pada empat kelompok: manajemen, investor, jurnalis dan publik. Jumlah total responden adalah 1.420 orang dari dua kota yakni Jakarta dan Surabaya.

8

Agustus:

2007 *Marketing Award*

TELKOM meraih *Marketing Award* 2007 untuk kategori *The Best Experiental Marketing and Customer Experience* dan *The Best Marketing Campaign* dari majalah *Marketing*. Penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 29 Agustus 2007. *Marketing Award* 2007 merupakan salah satu penghargaan tertinggi di bidang pemasaran yang diberikan kepada 19 perusahaan yang memiliki strategi pemasaran terbaik dalam 1-2 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan tersebut dipilih oleh para konsultan pemasaran, dosen senior dan profesor dari sekolah manajemen terkemuka serta wakil masyarakat periklanan Indonesia.

Anugerah *Business Review*

TELKOM menerima beberapa penghargaan "Anugerah *Business Review* 2007": peringkat pertama untuk Pengembangan SDM Terbaik dan Kinerja Saham Terbaik, peringkat kedua untuk Keuangan (berdasarkan EVA), Korporasi, Program Kepedulian Sosial (CSR), dan *Corporate Secretary* Terbaik.

Penghargaan diterima TELKOM pada tanggal 15 Agustus 2007. Anugerah *Business Review* 2007, diikuti oleh 51 finalis perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Juara Umum Anugerah Media Humas Nasional 2007

TELKOM meraih juara umum pada "Anugerah Media Humas 2007" dan mendapatkan sembilan buah piala. Predikat Juara Umum diperoleh setelah memenangkan tiga juara dalam tiga kategori media (peringkat pertama untuk *company profile* cetak, peringkat pertama untuk kalender, dan peringkat pertama profil lembaga audio visual). Anugerah tersebut diberikan pada tanggal 30 Agustus 2007 di Denpasar. Anugerah Media Humas 2007 diselenggarakan dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan Tingkat Nasional Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah. Dari sembilan kategori yang diperlombakan, TELKOM mengikuti delapan kategori dan berhasil memenangkan seluruh kategori yang diikuti.

PENGHARGAAN

9

September:

ICSA 2007

TELKOM dengan produk TELKOMNet Instan dan Flexi Trendy menjadi pemenang pertama dan menerima "*Indonesian Customer Satisfaction Award* (ICSA) 2007" untuk kategori "*Internet Service Provider*" dan "Simcard FWA Prabayar" dari Majalah SWA dan lembaga riset kepuasan pelanggan, Frontier, bekerjasama dengan SWANetwork. Penghargaan diberikan pada tanggal 7 September 2007.

Apresiasi BNI kepada TELKOM untuk SMS Banking

BNI yang memiliki 972 cabang di seluruh Indonesia serta lima cabang di luar negeri, dan mempunyai sekitar sembilan juta nasabah merupakan pelanggan *cluster* satu TELKOM dengan *wallet share* sebesar 70%. Sejak peluncuran BNI SMS Banking pada bulan Mei 2006 oleh BNI, terjadi kenaikan sebesar 92% pada periode Januari-Agustus 2007 (dari 133.268 pengguna menjadi 255.941 pengguna), total transaksi mencapai tujuh juta transaksi, dengan rata-rata transaksi mencapai Rp 600 miliar per bulan.

BNI SMS Banking merupakan layanan transaksi perbankan melalui telepon selular berbasis *plain-text* SMS menggunakan nomor 3346. BNI SMS Banking mudah diakses oleh nasabah pengguna kartu selular, baik melalui GSM maupun CDMA tanpa harus mengganti simcard, salah satu *provider* yang dipercaya menangani BNI SMS Banking tersebut adalah TELKOM melalui produk TELKOMFlexi.
Dalam acara "BNI SMS Banking 250.000 Pelanggan Pertama Kolaborasi BNI dengan Tujuh *Provider* Telekomunikasi Utama" bertempat di Jakarta tanggal 19 September 2007, TELKOM mendapat apresiasi dari BNI yang turut serta dalam meningkatkan jumlah transaksi SMS melalui BNI SMS Banking.

Best Social Reporting ISRA 2007

TELKOM meraih penghargaan pada *Indonesia Sustainability Reporting Awards* (ISRA) 2007 untuk kategori *Best Social Reporting*. Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama Alumni IAI-KAM (Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Manajemen), Bapepam, BEI, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

12

Desember:

Fabulous 50

TELKOM menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 50 perusahaan publik terbaik Asia Pasifik atau *Fabulous 50-The Best of Asia Pacific's Biggest Listed Companies* versi majalah bisnis terkenal Forbes Asia. Penilaian diberikan mengacu kepada pencapaian kinerja TELKOM selama tahun 2006 dan 2007 yang dinilai luar biasa. Penghargaan diserahkan pada tanggal 4 Desember 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan telekomunikasi di wilayah Asia Pasifik yang mendapatkan penghargaan serupa adalah China Mobile (Cina) dan Bharti Airtel (India).

Best IT Project

TELKOM menerima penghargaan *The Best Project Management* dan *The Best IT Knowledge Transfer* dari SAP pada tanggal 13 Desember 2007. Pemberian penghargaan ini merupakan pengakuan SAP atas keberhasilan TELKOM mengelola transformasi sistem yang dikemas dalam *INFUSION Project*.

Value Creator Award 2007

TELKOM berhasil meraih peringkat pertama dalam 100 Perusahaan Pencetak Kekayaan Tertinggi di Pasar Modal (SWA 100) dan berhak menerima *Value Creator Award*. Penghargaan yang diberikan oleh Majalah SWA bekerjasama dengan Stern Stewart & Co. tersebut mengacu pada penilaian *Economic Value Added* ("EVA") dan *Market Value Added* ("MVA") terhadap 100 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI. Berdasarkan hasil penilaian, TELKOM memperoleh hasil tertinggi, Rp 171,2 triliun. Penghargaan diterima TELKOM pada tanggal 17 Desember 2007.

Investor Award 2007

TELKOM menerima *Investor Award* 2007 dengan predikat BUMN terbaik non keuangan, sektor telekomunikasi pada tanggal 18 Desember 2007. Seleksi dilakukan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dengan mengacu pada delapan kriteria: *return* setahun, pertumbuhan penjualan dalam tiga tahun, *net operating margin, return on equity, asset turn over,* volatilitas saham, likuiditas saham, dan pertumbuhan laba operasi dalam tiga tahun terakhir.

kepada para pemegang saham

- **Laporan Komisaris Utama**
- **Laporan Direksi**

LAPORAN KOMISARIS UTAMA

Tanri Abeng
Komisaris Utama

Pencapaian usaha TELKOM pada akhir tahun 2007 sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. EBITDA meningkat sebesar 16,9% menjadi Rp 37,0 triliun, sementara laba bersih tumbuh sebesar 16,8% dari tahun lalu menjadi Rp 12,9 triliun. Hasil ini sesuai dengan anggaran dan target yang telah ditetapkan oleh Manajemen dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, Dewan Komisaris berpendapat bahwa laju pertumbuhan TELKOM berada di dalam koridor strategi bisnis yang telah ditetapkan, sehingga Perusahaan semakin memperkokoh fundamentalnya.

Arus Kas yang Kuat

Perseroan melanjutkan program pembelian kembali saham pada tahun 2007, sejumlah 126,4 juta saham senilai Rp 1,2 triliun yang kini menjadi saham dalam portepel (*treasury stock*) Perseroan. Pembelian kembali saham ini seluruhnya dibiayai dari dana internal TELKOM.

Pendapatan dan arus kas yang kuat memperkokoh neraca TELKOM, sehingga kami mampu membiayai belanja modal untuk beragam teknologi dan sistem baru yang mendukung transformasi bisnis yang kami lakukan. TELKOM secara agresif membangun kapasitas untuk memasuki pasar *new wave* sekaligus mengembangkan NGN dalam dunia informasi komunikasi. Upaya ini bertujuan mendorong bisnis dan memperluas sumber pendapatan TELKOM di masa datang sebagai jaminan keberlanjutan jangka panjang.

Peta Jalan Strategis

Keberhasilan Perseroan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir dalam memimpin pasar mencerminkan strategi bisnis yang efektif. TELKOM secara terus menerus telah menyempurnakan kedalaman rencana bisnisnya, mencari dan menemukan peluang-peluang pasar yang berbeda. Strategi-strategi efektif dan rencana-rencana aksi untuk tiap peluang dibuat secara terinci. Hal ini memudahkan manajemen mencapai target-target bisnis TELKOM.

Kini bisnis telekomunikasi di seluruh dunia mengalami transformasi yang cepat. Kemampuan TELKOM untuk menentukan peta jalan yang spesifik telah membuka peluang baru yang luas yang bahkan belum terbayangkan beberapa tahun lalu. Produk-produk baru dari trend teknologi baru diharapkan menghasilkan pendapatan yang signifikan dan tumbuh secara meyakinkan.

Pertumbuhan dan Akuisisi-akuisisi Strategis

Kami terus berupaya meniti peluang dalam bisnis *new wave* dengan berinvestasi pada penggelaran teknologi pita lebar dan NGN yang memungkinkan layanan *triple play*, yaitu suara, data/internet dan multimedia. Direksi telah menentukan arah pengembangan *new wave* maupun NGN antara lain melalui langkah akuisisi strategis. Hal ini dilakukan dalam rangka memantapkan kepemimpinan kami dalam pasar jaringan teknologi informasi. Kami melihat bahwa bisnis *new wave* yang mengarah pada layanan konten dapat dikembangkan melalui akuisisi-akuisisi strategis terhadap usaha-usaha terkait yang tidak langsung berfokus pada telekomunikasi, namun dapat menyediakan nilai tambah jangka panjang bagi TELKOM.

Usaha-usaha yang terkait dengan konten dapat meningkatkan pertumbuhan penggunaan layanan pita lebar dan televisi berlangganan di Indonesia. Layanan-layanan bernilai tambah untuk meningkatkan mutu penyediaan jasa telekomunikasi bergerak maupun tidak bergerak nirkabel. Jasa-jasa teknologi informasi untuk mengembangkan sektor layanan korporat yang berubah dengan cepat dan untuk menawarkan layanan terpadu dengan memanfaatkan ketersediaan jaringan TELKOM yang dipadukan dengan teknologi baru. Beberapa inisiatif ini selaras dengan tekad kami untuk menjadi pemimpin penyedia layanan konvergensi terpadu sehingga menghasilkan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bagi segenap pemangku kepentingan.

Gigih Memperjuangkan Kerangka Aturan yang Adil dan Fleksibel

Telekomunikasi adalah salah satu industri yang memiliki begitu banyak regulasi. TELKOM meyakini bahwa hal tersebut memerlukan kerangka aturan yang adil dan fleksibel, melainkan juga dapat merangsang pertumbuhan industri.

TELKOM telah membentuk satu unit khusus untuk selalu berinteraksi dengan para regulator dan pemangku kepentingan

tertentu dalam menajamkan pemikiran dan tujuan aturan. Selain menularkan informasi mendalam tentang industri telekomunikasi kepada para regulator dan pembuat undang-undang, tujuan utama keterlibatan kami adalah memastikan sektor telekomunikasi di Indonesia tetap menarik bagi para investor potensial, dan lebih penting lagi, investasi mereka dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dengan adanya kepastian masa depan industri.

Acuan Prospek Pertumbuhan Bangsa

Sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar saham terbesar di BEI, pelaku pasar menilai TELKOM sebagai acuan prospek investasi di Indonesia. Hal ini membuat kami terawasi secara intens yang memaksa kami bertindak cermat dan hati-hati dalam setiap langkah bisnis dan interaksi sosial. Aspek kuncinya terletak pada tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan Dewan Komisaris yang efektif. Keduanya sangat menentukan bagi pengembangan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan senang hati kami laporkan bahwa kami telah mencapai kemajuan dalam hal tata kelola perusahaan, khususnya di bidang audit terpadu dalam kerangka *Sarbanes Oxley Act* (SOA), serta meningkatnya keyakinan bahwa proses-audit internal yang menyeluruh telah meningkatkan integritas laporan keuangan Perseroan. Selama tahun 2007, TELKOM berhasil mengurangi kelemahan material dalam hal pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICoFR) dari lima aspek menjadi dua aspek. Kami berharap dapat lebih mengandalkan ICoFR dan tata kelola perusahaan yang baik demi keberlanjutan jangka panjang.

Komite Audit secara aktif memastikan agar TELKOM tetap fokus pada pencapaian kewajiban-kewajiban SOA dan memberi informasi mutakhir kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah penting yang segera memerlukan perhatian Manajemen. Selain dari Komite Audit, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko. Ulasan mengenai komite-komite di bawah Dewan Komisaris disajikan dalam laporan tahunan ini.

Membantu Masyarakat Tumbuh dan Berkembang

Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, TELKOM melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan membantu masyarakat dan kalangan usaha kecil menengah. Manfaat yang diberikan oleh TELKOM tidak hanya berupa akses yang mudah dari segi komunikasi serta konektivitas, melainkan juga pertumbuhan dan perkembangan yang diperoleh dari konektivitas tersebut. TELKOM memiliki program pengembangan UKM dan pemberdayaan ekonomi daerah yang aktif dan berkelanjutan. Memasuki tahun kelima, program kemitraan dan bina lingkungan TELKOM mendukung 40.309 usaha kecil dalam mencapai kemandirian serta keberlanjutan. Pada tahun 2007, TELKOM mengalokasikan dana sebesar Rp 182,6 miliar dalam bentuk pinjaman lunak serta hibah untuk pengembangan 9.709 usaha kecil dan industri rumah tangga.

Selain kegiatan di atas, salah satu kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) Perseroan adalah di bidang pendidikan. TELKOM menyediakan prasarana teknologi informasi untuk sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan pemahaman serta keterampilan penggunaan komputer. Hal ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk membangun masyarakat teknologi di Indonesia pada abad ke-21. Program CSR bidang pendidikan ini sejalan dengan Indonesian Digital Generation (Indigo), sebagai salah satu upaya TELKOM menggelar NGN di Indonesia hingga tahun 2014.

Bertanggung jawab atas lingkungan hidup juga merupakan kepedulian utama TELKOM. Selain pemasangan kabel terestrial dan bawah laut, serta pembangunan menara-menara pemancar/penerima jaringan selular, teknologi telekomunikasi tidak terlalu meninggalkan jejak karbon. Namun demikian, industri kami merupakan salah satu pengguna listrik terbesar yang masih mengeluarkan sejumlah besar gas rumah kaca di Indonesia. Karena itu menjadi kewajiban TELKOM untuk menggunakan listrik secara bijak, dan apabila memungkinkan, memanfaatkan pembangkit-pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi.

Pergantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tahun 2007 keanggotaan Dewan Komisaris TELKOM mengalami pergantian. Saya menyambut Saudara Mahmuddin Yasin sebagai anggota Dewan Komisaris baru yang menggantikan Saudara Gatot Trihargo mulai tanggal 29 Juni 2007. Perkenankan pula saya menyambut Saudara Rinaldi Firmansyah yang mulai tanggal 28 Februari 2007 sebagai Presiden Direktur, menggantikan Saudara Arwin Rasyid. Saudara Rinaldi sebelumnya adalah Direktur Keuangan selama tiga tahun dengan kemampuan yang meyakinkan di bidang keuangan disertai pengalaman yang kaya sebagai eksekutif di beberapa perusahaan besar Indonesia sebelum bergabung dengan TELKOM.

Saya juga menyambut para direktur baru, Saudara Sudiro Asno, Faisal Syam, I Nyoman G. Wiryanata, dan Ermady Dahlan. Mereka menggantikan Saudara Rinaldi Firmansyah, John Welly, Abdul Haris dan Guntur Siregar masing-masing sebagai para Direktur Keuangan, Direktur Human Capital and General Affairs, Direktur Network and Solution, dan Direktur Konsumer untuk tahun 2007. Selain itu Saudara Prasetio dan Indra Utoyo telah memimpin Direktorat Compliance & Risk Management, serta Direktorat IT and Supply. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para mantan direktur dan dewan komisaris atas sumbangan berharganya selama bertugas.

Menatap Masa Depan yang Cerah

Para pemangku kepentingan, terutama karyawan TELKOM, mendukung program transformasi Perseroan - suatu hal yang membesarkan hati - dan kami terus mengandalkan kepercayaan dan dukungan mereka. Masa depan usaha InfoComm tampak cerah, dengan layanan pita lebar serta konten yang berpotensi mengubah cara orang menjalani kehidupan, bekerja dan bermain. Proses perubahan tersebut akan berjalan secara bertahap dan prospek pertumbuhan layanan *new wave* yang akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, menjanjikan masa depan yang cerah bagi kita semua.

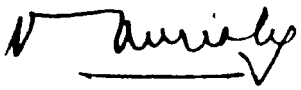

Tanri Abeng
Komisaris Utama

LAPORAN DIREKSI

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama

Perusahaan kami tengah menjalani transformasi besar. Selama beberapa tahun terakhir, TELKOM telah melakukan banyak perubahan pada tatanan usaha dan budaya pelayanan. Kami pun terus meluaskan lini produk dan memperdalam penetrasi pasar untuk tetap menjadi salah satu yang terkemuka dalam penyediaan layanan InfoComm di Indonesia.

Pencapaian Tahun 2007

TELKOM berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 59,4 triliun pada tahun 2007, lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun 2006 sejumlah Rp 51,3 triliun. Laba bersih meningkat 16,8% menjadi Rp 12,9 triliun yang menghasilkan laba per saham sebesar Rp 644,08. Pencapaian laba bersih tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,85% pada tahun 2007. Tingkat Pengembalian Aktiva (*Return on Assets*) dan Rasio Lancar (*Current Ratio*) masing-masing mencapai 15,7% dan 77,3%, meningkat dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 14,6% dan 67,8%.

Hasil-hasil positif yang telah kami capai di tahun 2007 tersebut didukung oleh kinerja operasional bisnis telepon selular dan telepon tidak bergerak nirkabel. Total pelanggan selular dan tambahan pelanggan bersih (*net additional subscriber*) masing-masing mencapai 47,89 juta dan 12,29 juta, atau 11% dan 37% di atas target 2007. Untuk telepon tidak bergerak nirkabel ”Flexi”, total pelanggan dan tambahan pelanggan bersih masing-masing mencapai 6,4 juta dan 2,19 juta, atau 6% dan 14% di atas target tahun 2007.

Empat Transformasi Konstruktif

Ada empat bagian transformasi besar yang tengah berlangsung di TELKOM. Pertama, kami sedang mentransformasikan portofolio bisnis kami yang mencerminkan perubahan teknologi dan perubahan pasar. Kini pasar menuntut lebih dari sekedar layanan telepon sederhana *Plain Old Telephony Service* (POTS) dan TELKOM memimpin dalam melayanani pasar *new wave* yang sedang tumbuh di Indonesia. Hal ini tampak antara lain dengan terobosan-terobosan baru kami dalam menyediakan produk-produk dan layanan-layanan yang unggul dalam pita lebar dan konten.

Bagian kedua transformasi kami menyangkut infrastruktur. Untuk menyediakan layanan *new wave*, kami telah mulai melengkapi jaringan telepon tidak bergerak kabel dengan *platform* gelombang pita lebar dan *platform* berbasis protokol internet (IP). Hal ini terlihat dari belanja modal kami yang signifikan, termasuk untuk tahun 2007. TELKOM antara lain ditugaskan untuk membangun beberapa *ring backbone* telekomunikasi nasional dan regional di seluruh Indonesia, juga *ring backbone* yang lebih kecil di wilayah-wilayah pertumbuhan tertentu; peluncuran satelit komunikasi TELKOM-3; pembukaan gerbang internasional dan koneksi ke jaringan kabel global seperti Asian American Gateway; dan akses ke jalur utama pita-lebar untuk kapasitas *bandwidth* yang besar. Tujuan kami dalam pembangunan infrastruktur yang masif ini adalah agar dapat menyediakan layanan-layanan *new wave* berskala penuh yang sering ditandai dengan lebar gelombang virtual tanpa batas, mobilitas penuh dan jaringan *seamless*.

Pada saat yang sama, kami telah mulai mentransformasikan operasi-operasi dan proses-proses bisnis kami sebagai transformasi besar ketiga melalui suatu inisiatif bernama INFUSION. Inisiatif ini mengintegrasikan operasi-operasi kunci yang melibatkan pusat-pusat layanan pelanggan, operasi-operasi jaringan dan sistem-sistem pembayaran. Dengan demikian kami dapat mengelola sumber-sumber daya

perusahaan yang luas, sistem-sistem pengiriman dan tujuan-tujuan pendapatan secara terpadu dalam satu arus yang lancar; inilah yang kami maksud dengan 'INFUSION'.

Bagian terakhir transformasi yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi sumberdaya manusia agar beradaptasi terhadap lingkungan baru yang terus berubah, mengembangkan keterampilan dan keahlian baru yang menjadi tuntutan perkembangan teknologi *new wave*, menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, juga semakin bertanggung jawab atas kinerja mereka.

Merampingkan Organisasi

TELKOM telah menetapkan perencanaan sumber daya manusia, untuk lima tahun ke depan, Perusahaan akan memperoleh manfaat dari pengurangan karyawan secara alami dari kelompok karyawan berusia lebih dari 45 tahun, yaitu mereka yang berhak mendapatkan manfaat pensiun. Saat ini kelompok usia tersebut berjumlah sekitar 40% dari jumlah 25.361 karyawan TELKOM. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga administratif, pemeliharaan dan personil lapangan yang mengelola bisnis legacy jaringan telekomunikasi TELKOM yang begitu besar. Mereka secara bertahap dan alamiah akan keluar dan digantikan oleh tenaga-tenaga muda yang lebih terlatih, terutama untuk menghadapi integrasi dan otomatisasi sistem operasi TELKOM dalam waktu dekat ini. Pergantian semacam ini akan menjadikan TELKOM sebagai organisasi yang lebih ramping yang lebih siap untuk menjawab tuntutan dan memberikan layanan InfoComm berkualitas tinggi pada abad ke-21.

Strategi untuk Keberlanjutan

Isu keberlanjutan jangka panjang menjadi sangat mengemuka dalam berbagai strategi bisnis saat ini. Terlebih saat menghadapi kelangkaan beberapa sumber daya penting, meningkatnya biaya energi dan ketidakpastian akibat perubahan iklim global, bencana alam, ancaman kesehatan dan konflik sosial.

Secara langsung maupun tidak langsung TELKOM dihadapkan pada risiko-risiko ini. Selain itu, sebagai pendahulu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, TELKOM menghadapi peraturan baru yang dapat mengancam keberlanjutan pertumbuhannya. Kegagalan beradaptasi secara cepat terhadap peraturan baru, perubahan pasar, teknologi baru atau meningkatnya kompetisi dapat menimbulkan hilangnya pendapatan.

Pada tahun 2007 kami memetakan profil risiko TELKOM secara komprehensif untuk menemukan dan mengurangi risiko-risiko bisnis kami dengan kesiapan yang lebih baik. Terbentuknya Direktorat Compliance & Risk Management adalah untuk mengawasi dan mengelola risiko perusahaan dan kepatuhan. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, yang antara lain mendorong perbaikan pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan. Selain itu juga mengedepankan pengambilan keputusan manajemen melalui pertimbangan dan penilaian berbasis informasi yang melibatkan Komite-Komite Eksekutif TELKOM yang pada akhir 2007 berjumlah 11 komite.

MENCIPTAKAN NILAI UNGGUL:

"Bersama anak perusahaan dalam TELKOMGroup, kami berhasil memimpin dalam banyak hal, mulai dari bisnis, keterlibatan dalam regulasi hingga tanggung jawab sosial perusahaan."

Demi keberlanjutan pertumbuhan bisnis kami dalam jangka panjang, strategi bisnis kami adalah mempertahankan pasar-pasar tradisional kami dan pada saat yang sama kami mengejar pertumbuhan yang menguntungkan di pasar-pasar *new wave*.

Pasar POTS di seluruh dunia terus menciut dengan perpindahan para pelanggan ke telekomunikasi *new wave* yang lebih baik dan ekonomis secara terus menerus. Kecenderungan global ini tidak bisa dipungkiri dan pasar Indonesia pun bukan pengecualian, walau kenyataannya bahwa tingkat penetrasi sambungan telepon tidak bergerak di negeri ini hanya 5,5 per 100 penduduk. Namun angka 5,5% sambungan di Indonesia berarti mendekati jumlah 15 juta sambungan telepon tidak bergerak. Angka ini lebih besar dari kebanyakan pasar telekomunikasi di negara-negara lain.

Mengingat besarnya basis pelanggan kami, mengharuskan kami mempertahankan keberadaan layanan POTS di samping pengembangan layanan *new wave*. Tindakan ini kami lakukan melalui perbaikan-perbaikan kualitas layanan, respon dan pemulihan lebih cepat pada gangguan pelanggan, dan promosi agresif untuk meningkatkan penggunaan produk-produk yang tumbuh secara potensial, misalnya sambungan internet *dial-up* yang masih tergantung pada jaringan PSTN. Upaya-upaya kami mempertahankan keunggulan konvensional telah membuahkan hasil.

Layanan *new wave* terdiri dari gelombang pita-lebar internet yang telah mapan dan bertumbuh cepat, serta layanan teknologi informasi. TELKOM muncul sebagai pemain utama dan kekuatan yang patut diperhitungkan dalam fenomena pasar *new wave* di Indonesia. Kuatnya posisi pasar kami membuat kami berpengaruh baik untuk membentuk kemitraan strategis dengan para pemain global yang memimpin, atau melakukan akuisisi-akuisisi strategis untuk meningkatkan dominasi kami di pasar *new wave*. Kenyataan ini, menurut keyakinan kami, nampaknya akan meningkatkan keberlanjutan dan keuntungan jangka panjang Perusahaan.

Menciptakan Nilai Unggul

Tema laporan tahunan kami kali ini adalah "Menciptakan Nilai Unggul", secara pantas menggambarkan posisi TELKOM sekarang dan nilai unggul yang harus kami ciptakan pada produk-produk dan layanan-layanan agar tetap mampu bersaing di pasar sehingga melestarikan pertumbuhan jangka panjang kami. Menciptakan nilai unggul juga berkonotasi kepemimpinan kuat di wilayah yang kami terjuni. Bersama anak perusahaan TELKOM, kami berhasil memimpin dalam banyak hal, mulai dari bisnis, keterlibatan dalam regulasi hingga tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam industri telekomunikasi, kamilah penyedia utama layanan komunikasi data teleponi dasar di negeri ini, operator telepon selular terkemuka melalui Telkomsel, dan penyedia layanan jaringan dan gelombang pita-lebar yang sedang tumbuh dengan kekuatan yang patut diperhitungkan.

Dalam masalah yang berhubungan dengan regulasi, kami berperan aktif memikirkan dan memberikan masukan atas arah dan penyusunan regulasi dunia telekomunikasi di Indonesia. Upaya kami ini telah memberikan manfaat nyata bagi industri dan para pemangku kepentingan. Sebagai contoh, kami berhasil meyakinkan regulator untuk menerapkan kebijakan kode akses SLJJ nasional secara terbatas dan bertahap daripada menerapkannya sekaligus.

Untuk kepedulian pada tanggung jawab sosial perusahaan, kami tetap berkomitmen terhadap beragam kebutuhan sosial negeri ini dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, memberdayakan ekonomi lokal, membantu usaha-usaha kecil dan menengah, membantu korban bencana alam dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Dengan senang hati kami laporkan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 TELKOM menerima penghargaan nasional tertinggi atas Laporan Keberlanjutan.

Rotasi Direksi

Sejak penunjukan anggota Direksi pada RUPS Luar Biasa tanggal 28 Pebruari 2007, tidak ada perubahan komposisi Direksi hingga akhir 2007. Namun kemudian Dewan Komisaris merotasi dua direktur melalui Keputusan Komisaris yang berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2008. Ermady Dahlan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konsumer, telah ditunjuk sebagai Direktur Network and Solution. Ermady Dahlan bertukar jabatan dengan I Nyoman G. Wiranata.

Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan TELKOM, banyak di antara mereka telah berjasa dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan Perseroan. Kami sampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan dan dukungannya. Secara khusus kami juga menyampaikan penghargaan kepada para pelanggan yang tetap setia sehingga menjadikan TELKOM sebagai penyedia jaringan dan layanan InfoComm terkemuka di Indonesia, hari ini dan di masa mendatang.

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama

pengelolaan telkom

- Profil Dewan Komisaris
- Profil Direksi
- Memberdayakan Kekuatan TELKOMGroup
- Inisiatif Pemasaran dan Layanan 2007
- Menghadapi Isu-isu Kompetisi, Regulasi, dan Kepatuhan
- Human Capital

PROFIL DEWAN KOMISARIS

1. TANRI ABENG
2. ARIF ARRYMAN
3. P. SARTONO
4. MAHMUDDIN YASIN
5. ANGGITO ABIMANYU

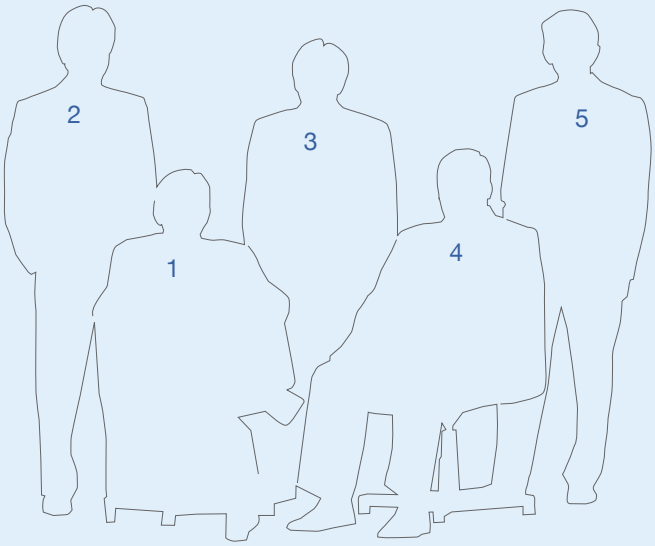

Anggota Dewan Komisaris TELKOM sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Nama	Usia per 31 Desember 2007	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
Tanri Abeng	66	Komisaris Utama	10 Maret 2004
P. Sartono	63	Komisaris Independen	21 Juni 2002
Arif Arryman	52	Komisaris Independen	21 Juni 2002
Anggito Abimanyu	45	Komisaris	10 Maret 2004
Mahmuddin Yasin	53	Komisaris	29 Juni 2007

Tanri Abeng

Tanri Abeng menjabat Komisaris Utama TELKOM sejak tanggal 10 Maret 2004. Dari tahun 1980 hingga 1998, sebagai Presiden Direktur (1980-1991) dan Komisaris Utama (1991-1998) PT Multi Bintang Indonesia, sebuah perusahaan minuman di Indonesia. Selanjutnya sebagai Presiden Direktur PT Bakrie dan Brothers sejak tahun 1991 hingga 1998, kemudian menjadi Komisaris Utama PT B.A.T. Indonesia sejak tahun 1993 hingga 1998 dan menjadi Komisaris PT Sepatu BATA sejak tahun 1989 hingga 1998. Sebagai anggota MPR RI sejak tahun 1993 hingga 1999 dan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara sejak tahun 1998 hingga 1999. Menyandang gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin, gelar Master of Business Administration dari State University of New York, Buffalo dan menyelesaikan Advanced Management Program di Claremont Graduate School di Los Angeles.

P. Sartono

P. Sartono, menjabat Komisaris Independen TELKOM sejak tanggal 21 Juni 2002. P. Sartono menjadi karyawan TELKOM pada tahun 1972 dan telah menjalani berbagai posisi manajemen, termasuk sebagai Corporate Secretary sejak tahun 1992 hingga 1995, hingga pensiun di tahun 2000. Selama bekerja di TELKOM, pernah menjabat berbagai posisi di Direktorat Jenderal Pos dan Komunikasi sejak tahun 1973 hingga 1985 dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Telekomindo Primabhakti tahun 1995-1998. Menyandang gelar Sarjana dalam bidang hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Management (Marketing) dari IPWI Jakarta, Master of Law dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM di Jakarta.

Arif Arryman

Arif Arryman, menjabat Komisaris Independen TELKOM sejak tanggal 21 Juni 2002. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank BNI Tbk sejak tahun 2001-2005. Sebelumnya menjabat sebagai penasihat Menteri Koordinator Ekonomi dan anggota tim asistensi Menteri Keuangan. Menyandang gelar sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung, gelar master dalam bidang Engineering dari Asia Institute of Technology, Bangkok, Diplome d'Etude Approfondie dari Universite Paris-IX Daulphine France dan gelar doktor dalam bidang Ekonomi dari Universite Paris-IX Daulphine France.

Anggito Abimanyu

Anggito Abimanyu, menjabat Komisaris TELKOM sejak tanggal 10 Maret 2004. Anggito Abimanyu merupakan Kepala Instansi Penelitian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan dan menjadi anggota staf ahli Menteri Keuangan sejak tahun 2000. Sebelumnya adalah anggota Dewan Komisaris Bank Lippo dan Bank Internasional Indonesia. Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Menyandang gelar sarjana dan master dalam bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master in Science dalam bidang International Development dari University of Pennsylvania dan gelar Ph.D. dalam Environmental Economics dari University of Pennsylvania.

Mahmuddin Yasin

Mahmuddin Yasin, menjabat Komisaris TELKOM sejak 29 Juni 2007. Mahmuddin Yasin merupakan Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Privatisasi BUMN dan Deputi Direktur Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selain itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT Socfin Indonesia (sejak 11 April 2005) dan Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya (sejak 8 Juli 2004). Pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Rumah Sakit Kanker Dharmais (2001-2003) dan Komisaris PT Indo Farma, Tbk (2002-2003). Menyandang gelar sarjana dalam bidang Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta dan gelar MBA dari Washington University, St. Louis, USA.

PROFIL DIREKSI

1. RINALDI FIRMANSYAH
2. SUDIRO ASNO
3. FAISAL SYAM
4. ERMADY DAHLAN
5. I NYOMAN WIRYANATA
6. ARIEF YAHYA
7. INDRA UTOYO
8. PRASETIO

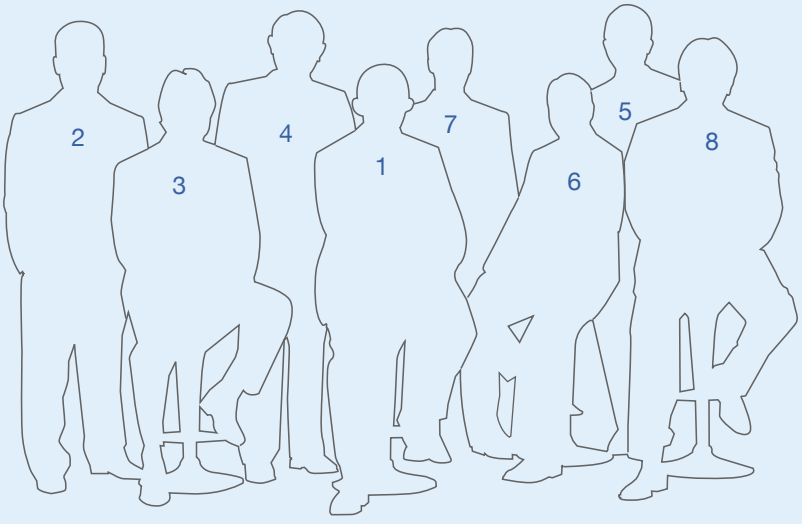

Anggota Direksi TELKOM sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Nama	Usia per 31 Desember 2007	Jabatan	Tanggal pengangkatan
Rinaldi Firmansyah	48	Direktur Utama	28 Pebruari 2007
Sudiro Asno	51	Direktur Keuangan	28 Pebruari 2007
Faisal Syam	52	Direktur Human Capital dan General Affairs	28 Pebruari 2007
I Nyoman G Wiryanata	49	Direktur Network & Solution	28 Pebruari 2007
Ermady Dahlan	55	Direktur Konsumer	28 Pebruari 2007
Arief Yahya	47	Direktur Enterprise & Wholesale	24 Juni 2005
Prasetio	48	Direktur Compliance & Risk Management	28 Pebruari 2007
Indra Utoyo	46	Direktur Information Technology & Supply	28 Pebruari 2007

Rinaldi Firmansyah

Rinaldi Firmansyah, diangkat sebagai Direktur Utama TELKOM dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Pebruari 2007. Menjabat sebagai Direktur Keuangan TELKOM sejak tanggal 10 Maret 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama, Presiden Direktur dan Direktur Investment Banking PT Bahana Securities, masing-masing, sejak tahun 2003 sampai 2004, 2001 sampai 2003 dan 1997 sampai 2001 serta Komisaris dan Kepala Komite Audit PT Semen Padang pada tahun 2003. Menyandang gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, dan gelar MBA dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta serta memiliki sertifikasi CFA.

Sudiro Asno

Sudiro Asno, diangkat sebagai Direktur Keuangan TELKOM dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Pebruari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1985 dan telah menduduki beberapa posisi di Direktorat Keuangan TELKOM. Sebelumnya menjabat sebagai Senior General Manager di Finance Center TELKOM. Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dalam Bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung.

Faisal Syam

Faisal Syam, diangkat sebagai Direktur Human Capital & General Affairs TELKOM dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Pebruari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1983 dan menjabat beberapa posisi di berbagai departemen, termasuk Senior General Manager Human Resource Center TELKOM. Menyandang gelar Sarjana Matematika dari Universitas Sumatera Utara dan gelar MM dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB).

I Nyoman G Wiryanata

I Nyoman G. Wiryanata, diangkat sebagai Direktur Network & Solution TELKOM pada tanggal 28 Pebruari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1983 dan menjabat beberapa posisi di berbagai departemen, sebelumnya menjabat sebagai Executive General Manager Divisi Regional I (Sumatera). Menyandang gelar sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya dan gelar master dalam Business Administration dari Institut Manajemen Prasetya Mulya.

Ermady Dahlan

Ermady Dahlan, diangkat sebagai Direktur Konsumer TELKOM pada tanggal 28 Pebruari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1973 dan menjabat beberapa posisi di berbagai departemen. Sebelumnya menjabat sebagai Executive General Manager Divisi Regional II (Jakarta). Menyandang gelar dalam Bidang Telekomunikasi dari Akademi Telekomunikasi Nasional, Bandung.

Arief Yahya

Arief Yahya, menjabat sebagai Direktur Enterprise & Wholesale TELKOM sejak 24 Juni 2005. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1986 dan menjabat berbagai posisi di berbagai departemen. Sebelumnya, menjabat sebagai Kepala Divisi Regional V (Jawa Timur) dan Kepala Divisi Regional VI (Kalimantan) TELKOM. Menyandang gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master dalam Telecommunications Engineering dari University of Surrey.

Prasetio

Prasetio, diangkat sebagai Direktur Compliance & Risk Management pada tanggal 28 Pebruari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 2006 sebagai Executive Vice President Risk Management, Legal & Compliance. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Merpati Nusantara Airline dari Oktober 2004 sampai Juni 2005, dan sebelumnya ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN sebagai Komisaris Independen PT Bank BRI, Tbk sejak Juli 2004 sampai Oktober 2004, dan sebagai Penasehat CEO PT Bank BNI, Tbk sejak April 2004 sampai Juli 2004. Prasetio juga pernah menjabat sebagai Executive Vice President (Chief Credit Risk Officer) dan Managing Director/Chief Financial Officer (juga mengawasi Commercial & Small Medium Enterprise Banking) PT Danamon Indonesia sejak tahun 2001 sampai 2004, Vice Chairman Bank Prima Express (di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau "BPPN") sejak tahun 2000 sampai 2001, Senior Vice President BPPN sejak tahun 1999 sampai 2001. Prasetio bekerja selama 15 tahun pada PT Bank Niaga Tbk sejak tahun 1984 sampai 1999 dalam lima tahun terakhir ditunjuk sebagai Vice President Group Head. Prasetio menyandang Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1983, Akuntan register negara pada tahun 1984 dan selama di Bank Niaga menyelesaikan Advance Finance & Commercial Lending Program dari State University of New York at Buffalo pada tahun 1994 dan Top Management Program dari Asian Institute Management in Manila pada tahun 1996.

Indra Utoyo

Indra Utoyo, diangkat sebagai Direktur Information Technology and Supply TELKOM pada tanggal 28 Pebruari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1986 dan menjabat berbagai posisi di berbagai departemen, termasuk Senior General Manager Information System Center. Menyandang gelar sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master dalam Communication and Signal Processing dari Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London.

Tidak satu pun dari Direktur memiliki kontrak kerja dengan TELKOM atau kontrak lain yang serupa. Alamat kantor Direksi berada di Jalan Japati 1, Bandung 40133, Indonesia. Tidak satupun dari Direktur atau Komisaris memiliki hubungan kekeluargaan.

MEMBERDAYAKAN KEKUATAN TELKOMGROUP

Di bawah arahan manajemen baru yang diperkenalkan pada Pebruari 2007, TELKOM berupaya keras dalam memberdayakan kekuatan TELKOM Group sebagai sebuah kelompok usaha yang terpadu dan bukan suatu konglomerasi yang berdiri sendiri sehingga setiap unit bisnis bekerja tanpa tujuan bisnis strategis bersama.

TELKOMGroup merupakan kelompok usaha yang terkemuka. Lebih dari sembilan perusahaan di dalamnya menjalankan usaha di bidang telepon sambungan-tidak bergerak, selular, aplikasi, konten, komunikasi data, serta properti dan konstruksi. Sayangnya kekuatan ini seringkali dipandang bukan sebagai satu kesatuan dari kepentingan dan tujuan strategis TELKOM dan TELKOMGroup secara keseluruhan. Hal tersebut kini tengah dalam pembenahan. Pada tahun 2007, TELKOM menugaskan semua Direktur menjadi Komisaris Utama di beberapa anak perusahaan strategis atau perusahaan afiliasi TELKOM. Sebagai contoh, Direktur Utama TELKOM saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Telkomsel, yang merupakan anak perusahaan penyumbang laba terbesar TELKOM.

Sebelumnya, penunjukan anggota Dewan Komisaris di anak perusahaan TELKOM ditujukan kepada para manajer tingkat menengah yang umumnya kalah senior dibandingkan para Direktur anak-anak perusahaan TELKOM yang sebagian besar di antara mereka adalah para eksekutif di TELKOM. Peran Dewan Komisaris yang tidak efektif ini menyulitkan TELKOM dalam memberikan penekanan atau arahan kepada anak perusahaan. Penempatan para Direktur TELKOM di anak perusahaan membuat Manajemen TELKOM lebih tahu arah dan kemajuan usaha anak perusahaannya. Selain itu, segenap isu strategis yang signifikansinya lebih besar terhadap keseluruhan TELKOMGroup kini didiskusikan di tingkat paling tinggi secara teratur. Implikasi strategisnya tentu pada pembuatan kebijakan dan perencanaan usaha. Saat ini, TELKOM mengkoordinasikan strategi-strategi pemasaran layanan untuk sambungan-tetap nirkabel CDMA dengan selular GSM. Tujuannya adalah menempatkan masing-masing layanan itu untuk bersaing dengan efektif untuk kategori yang sama, bukannya bersaing satu sama lain. Upaya ini menguatkan posisi kompetitif beragam produk dan layanan TELKOMGroup, kemudian memantapkan kepemimpinan di pasar.

Kami meyakini langkah tersebut akan meningkatkan kekuatan sinergi TELKOMGroup. Sebuah gambaran lebih luas tentang kekuatan bersama TELKOMGroup memungkinkan Manajemen TELKOM melakukan akuisisi terbaru atas perusahaan teknologi informasi terkemuka, PT Sigma Caraka. Akuisisi ini diharapkan mampu mendorong kompetensi dan kemampuan kami untuk meraih pangsa pasar layanan jaringan teknologi informasi yang sedang tumbuh di Indonesia.

Akuisisi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya TELKOM membangun infrastruktur NGN yang dikemas dalam visi Indonesia Synchronized – INSYNC 2014. Kini kami sudah menerima permintaan untuk platform NGN yang mengkonfigurasikan kanal pita lebar digital berbasis protokol internet untuk menyajikan layanan triple-play, yaitu suara, internet dan multimedia kepada jutaan rumah di seluruh pelosok negeri.

TELKOMGroup

INISIATIF PEMASARAN DAN LAYANAN PELANGGAN 2007

TELKOM telah memulai transformasi bisnis berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk menyempurnakan sistem dan proses yang kami miliki, dengan tujuan mencapai koordinasi dan integrasi yang lebih baik dari manajemen produk dan layanan antar sehingga memaksimalkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan orientasi dan baku mutu yang kini sangat berpusat pada pelanggan, para pelanggan menuntut kesempurnaan produk dan layanan mendekati 100% untuk keandalan dan ketersediaan, sepanjang waktu dalam tujuh hari seminggu.

Inilah norma yang berlaku saat ini untuk layanan-layanan kelas dunia. Jika TELKOM bermaksud mempertahankan usahanya dengan berhasil dan memenangkan persaingan layanan-layanan new wave, maka TELKOM perlu membangun infrastruktur teknologi informasi yang kokoh dengan segala tuntutannya agar menjadi sebuah organisasi yang mengedepankan pelanggan.

Tuntutan itu tengah kami tangani dengan program INFUSION 2008. Program ini berupaya memperbaiki kualitas keseluruhan layanan TELKOM melalui transformasi bisnis komprehensif bersandarkan teknologi informasi dan sistem-sistem operasi yang telah disempurnakan, proses-proses yang lebih terintegrasi, produk yang beragam serta layanan yang unggul. Survei kepuasan pelanggan terbaru menunjukkan skor bagi TELKOM sebesar 85,04% untuk sambungan baru, 81,09% untuk penagihan dan pembayaran, 78,15% untuk layanan pelanggan di Plasa TELKOM, 73,26% untuk respon atas keluhan pelanggan, dan 73,06% untuk layanan-layanan call center. Hasil-hasil tersebut di atas cukup memuaskan, namun jelas masih ada ruang untuk perbaikan. INFUSION bertujuan meningkatkan faktor-faktor kepuasan secara signifikan dengan menggeser penekanan kami dari penggunaan menit percakapan (minutes-of-use- MoU) ke paket berlangganan non-suara, dari manfaat produk ke solusi inovatif, dari kapasitas ke kemampuan, dan dari volume ke nilai tambah.

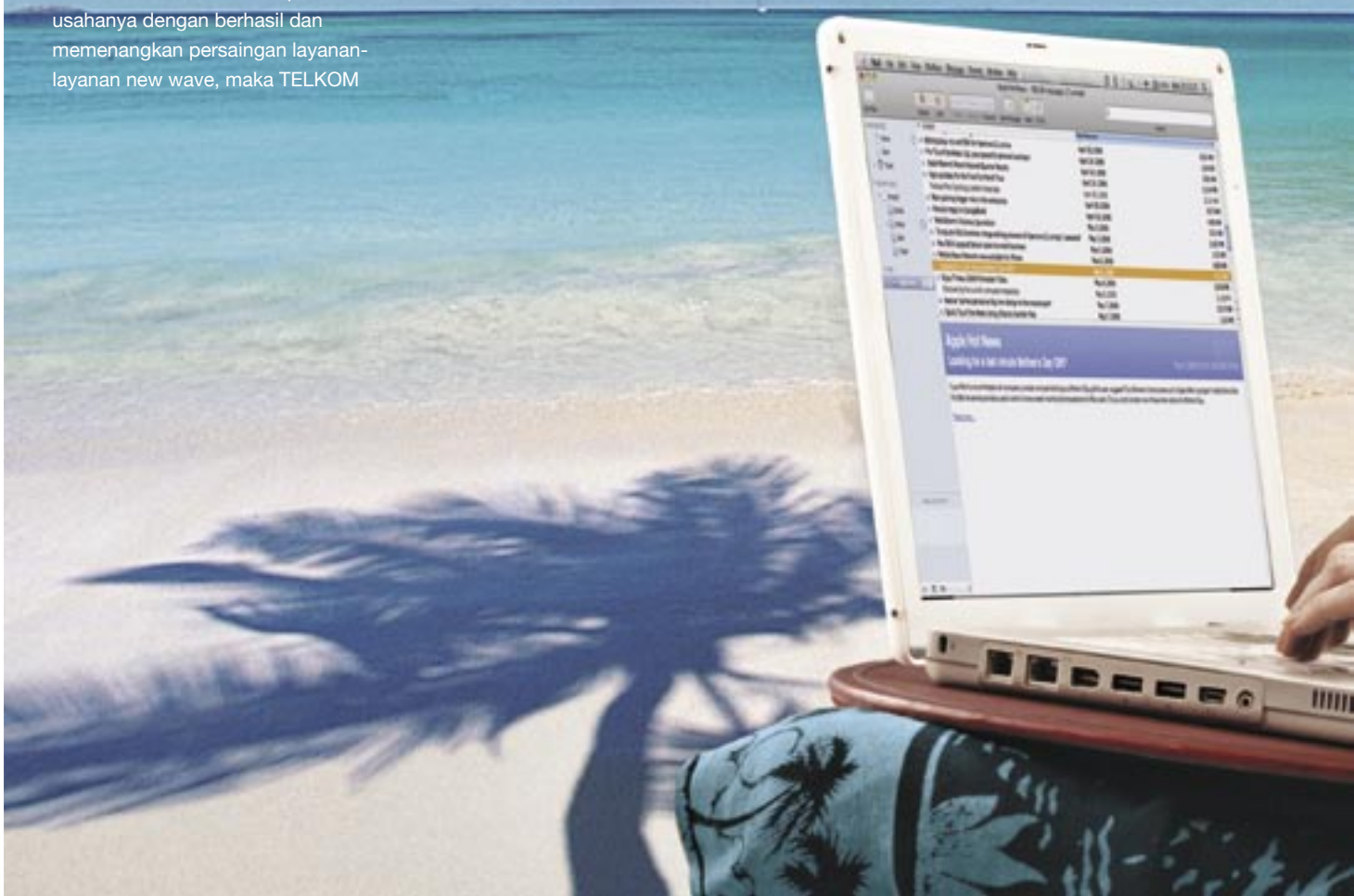

Inisiatif INFUSION TELKOM menghasilkan beberapa parameter yang dapat mengukur keberhasilan. Keberhasilan itu antara lain mencakup kesepakatan tingkat layanan dan jaminan layanan, layanan pembayaran berganda dengan satu tagihan tunggal, layanan khusus sesuai permintaan (customized service) berdasarkan pengelolaan Customer Relationship Management (CRM) yang andal.

INFUSION menuntut pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang memadai guna mengelola sistem INFUSION dimaksud dan mengembangkannya di masa depan. Untuk itu diperlukan program pelatihan dalam skala besar. Sebagai langkah awal, TELKOM telah menentukan dan mengalokasikan dana pelatihan bagi sekitar 8.000 personil TELKOM dan seluruh TELKOMGroup.

MENGHADAPI ISU-ISU KOMPETISI, REGULASI DAN KEPATUHAN

Sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, TELKOM menghadapi banyak tantangan.

Persaingan pasar yang ketat serta perang harga yang dipicu oleh operator telepon selular berskala lebih kecil dan penyedia layanan internet yang baru mulai dapat menciptakan tekanan kuat terhadap pendapatan Perseroan jika

tidak ditanggapi secara benar. Dengan skala usaha kami yang besar, tidaklah selalu menguntungkan untuk bersaing harga dengan para pesaing kami. Hal ini terjadi pada Telkomsel, anak perusahaan kami yang menyediakan layanan selular dengan lebih dari 47 juta pelanggan yang terus bertambah. Tantangan yang dihadapi oleh Telkomsel berkaitan erat dengan elastisitas layanan terhadap perubahan tarif percakapan telepon selular. Penurunan tarif cenderung mendorong peningkatan volume trafik percakapan, sehingga akan berdampak pada kemampuan jaringan untuk menampung beban lonjakan trafik percakapan yang terjadi serempak.

Pendekatan regulasi yang adil dan berimbang berdasarkan penilaian yang lengkap dan memenuhi kebutuhan industri perlu dikembangkan agar memberikan keuntungan bagi para pelanggan. TELKOM mendorong terlaksananya peraturan yang adil dan seimbang dengan berperan aktif dalam dialog-dialog dan pertimbangan dalam membantu merumuskan kebijakan regulasi, khususnya dalam bidang rezim baru tarif interkoneksi berbasis biaya, kode akses SLJJ nasional,

Sementara itu, sebagai perusahaan asing dengan klasifikasi efek terdaftar di U.S. Securities Exchange Act of 1934 dan tercatat di NYSE, TELKOM menghadapi suatu tantangan untuk mematuhi persyaratan pelaporan SEC dan SOA 404 mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR). TELKOM memperoleh manfaat dari pemenuhan persyaratan tersebut, termasuk pendokumentasian yang lebih baik dan transparansi atas proses dan pengendalian, identifikasi dan pembenahan kelemahan yang terdapat dalam pelaporan keuangan, kesiagaan yang lebih besar terhadap risiko, serta realisasi bahwa kepatuhan mendukung integritas dan nilai dari pelaporan keuangan kami dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Namun demikian, setelah beberapa tahun berupaya dengan penuh komitmen, pencapaian kami belum seluruhnya memuaskan. Kami belum bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan material tertentu, baik dalam proses-proses akunting maupun dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Karena itu kami berupaya lebih keras dan mengerahkan sumber daya lebih banyak untuk urusan ini.

Kami Mengelola Human Capital

Pada tahun 2007, TELKOM melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM)-nya. TELKOM merubah konsep dari *human resources* menjadi *human capital.* Berbeda dengan *human resources*, konsep *human capital* menginventarisir bakat karyawan ke dalam aset Perusahaan. Bakat karyawan dimaksud meliputi: keterampilan individu, pengetahuan, sikap, kecerdasan, keahlian, pengalaman, *eligibility*, kemampuan, kesesuaian, wewenang, pelatihan, pendidikan, kreativitas dan nilai tambah lainnya. Kami berharap konsep baru ini akan mendorong pembentukan sebuah organisasi pembelajaran. Dengan cara ini, bakat karyawan tetap menjadi aset Perusahaan walaupun karyawan tidak lagi bergabung dengan Telkom.

Keberhasilan usaha TELKOM ditunjang oleh peningkatan kualitas serta peningkatan profesionalisme karyawan internal. Konsep pengembangan karyawan sejalan dengan kerangka bisnis TELKOM, yang termasuk dalam program pengembangan sumber daya sekarang ini antara lain (1) *Malcolm Baldrige for Performance Excellence, (2) Human Capital Management, (3) Strategic Human Capital Management Pillars Leveraging Human Capital Management to Performance Excellent,* dan *Lessons Learned and Shared the TELKOM Experience.*

Profil SDM

Jumlah Karyawan

Sampai dengan 31 Desember 2007, karyawan TELKOM dan anak perusahaan berjumlah 32.465 karyawan, terdiri dari 25.361 karyawan TELKOM dan 7.104 karyawan anak perusahaan.

Tabel di bawah menguraikan rincian karyawan TELKOM berdasarkan posisinya:

	TELKOM per 31 Desember 2007	Anak Perusahaan TELKOM per 31 Desember 2007
Manajemen Senior	180	125
Manajemen Madya	2.437	493
Pengawas	9.841	753
Lainnya	12.903	5.733
Total	**25.361**	**7.104**

Pada tanggal 31 Desember 2006, karyawan TELKOM termasuk anak perusahaannya beerjumlah 34.021 karyawan, terdiri dari 27.658 karyawan TELKOM dan 6.363 karyawan anak perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2005, karyawan TELKOM termasuk anak perusahaan mencapai 34.004 karyawan, terdiri dari 28.179 karyawan TELKOM dan 5.825 karyawan anak perusahaan.

Dalam rentang waktu 2003-2007, TELKOM mengalami penurunan jumlah karyawan dengan rata-rata penurunan sebesar 6% per tahun. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan TELKOM melakukan program *multi-exit* terutama program pensiun dini selama periode tahun 2003-2005 serta tahun 2007.

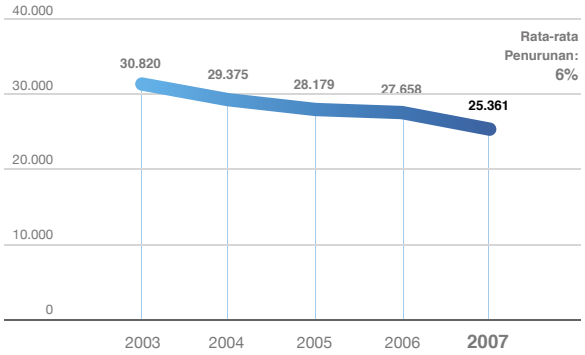

Pertumbuhan pegawai TELKOM mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2007 terdapat pengurangan karyawan sebanyak 2.297 orang atau sebesar 8.31% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006, yang terutama disebabkan oleh program pensiun dini, selain juga disebabkan oleh pensiun normal, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, dan lain-lain.

Tingkat Pendidikan

Komposisi karyawan TELKOM berdasarkan tingkat pendidikan untuk tahun 2007 terdiri dari karyawan berlatar belakang pendidikan SD sebesar 5,3 % dari jumlah karyawan, komposisi pendidikan SLTP sebesar 8,3 % dan pendidikan setingkat SLTA masih tertinggi, yaitu 34,1 %, sedangkan pendidikan D1-D3 sebesar 30,7%, pendidikan S1 sebesar 18,3% dan S2/S3 sebesar 3,3 %.

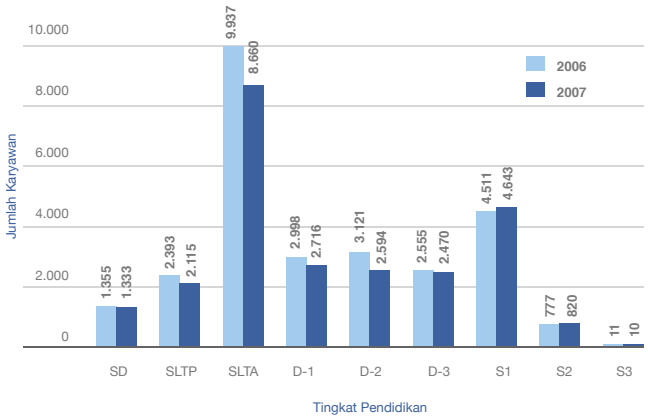

Dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi perubahan jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, terutama pada kelompok pendidikan SLTP, SLTA, D1, D2 dan D3 yang mengalami penurunan serta pada kelompok pendidikan S1 dan S2 mengalami kenaikan. Kondisi ini disebabkan karena keberhasilan dari program kebijakan rekrutmen saat ini dan program pensiun dini yang dirancang dengan sasaran kelompok karyawan dengan pendidikan di bawah S1.

Perubahan Komposisi Karyawan berdasarkan Pendidikan (2006-2007)

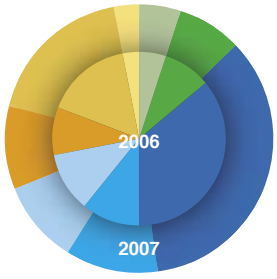

	2006	2007
SD	5%	5%
SLTP	9%	8%
SLTA	36%	35%
Diploma-1	11%	11%
Diploma-2	11%	10%
Diploma-3	9%	10%
Sarjana (S1)	16%	18%
Pascasarjana (S2)	3%	3%
Doktor (S3)	0%	0%

Usia

Dari aspek usia, kondisi karyawan TELKOM pada tahun 2007, sebagian besar masih berada di atas 41 tahun, yaitu sebesar 79,8%, usia 31-40 tahun sebesar 17,2% dan usia di bawah 30 tahun sebesar 3,0% dari seluruh total karyawan TELKOM.

Dibandingkan dengan tahun 2006, pada tahun 2007 terjadi penurunan pada kelompok usia 18-25, 31-35, 36-40, 41-45 dan 51-55 tahun, sementara pada kelompok usia 26-30 dan 46-50 tahun terjadi kenaikan. Penurunan jumlah karyawan pada kelompok usia 31-35, 41-45 dan 51-55 tahun terkait dengan pelaksanaan program pensiun dini pada tahun 2007.

Profil Karyawan TELKOM berdasarkan Usia

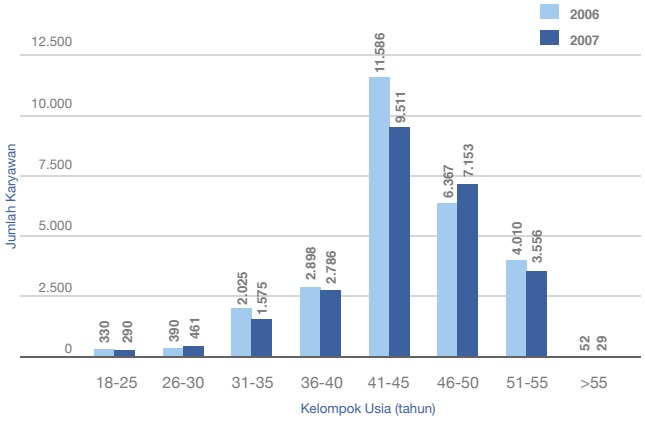

Perubahan Komposisi Karyawan berdasarkan Kelompok Usia (2006-2007)

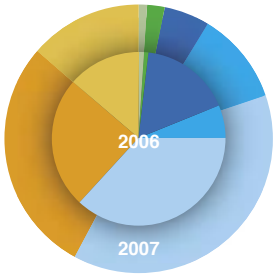

	2006	2007
18-25	1%	1%
26-30	1%	2%
31-35	7%	6%
36-40	10%	11%
41-45	43%	38%
46-50	24%	28%
51-55	14%	14%
>55	0%	0%

Produktivitas SDM

Pertumbuhan Produktivitas SDM pada Tahun 2006-2007 (bersih):

Elemen	Unit	2006	2007	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Usaha	Rp juta	26.353.000	27.997.000	6,2%
EBITDA	Rp juta	9.804.000	10.480.000	6,9%
Laba Usaha	Rp juta	4.787.000	6.172.000	28,9%
Beban Operasi	Rp juta	21,566.000	21.825.000	1,2%
Beban Karyawan	Rp juta	7.218.000	6.855.000	-5,0%
Jumlah Karyawan	Rp juta	27.658	25.361	-8,3%

Indikator Produktivitas	Unit	2006	2007	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Usaha / Jumlah Karyawan	Rp juta	952,82	1.103,81	15,8%
EBITDA / Jumlah Karyawan	Rp juta	354,47	413,18	16,6%
Laba Usaha / Jumlah Karyawan	Rp juta	173,08	243,34	40,6%
Return on Human Investment Ratio *)	persentase	166,32	190,04	14,3%
Pendapatan Usaha / Beban Karyawan	persentase	66,32	90,04	35,8%
Beban Karyawan / Pendapatan Usaha	persentase	27,39	24,48	-10,6%
Beban Karyawan / Beban Operasi	persentase	33,47	31,41	-6,2%
Beban Karyawan / Jumlah Karyawan	Rp juta	260,97	270,26	3,6%

*)ROHI = (Pendapatan Usaha – (Beban Operasi – Beban SDM)) / Beban SDM

Produktivitas SDM pada tahun 2007 mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari naiknya rasio-rasio Pendapatan Usaha / Jumlah Karyawan, EBITDA / Jumlah Karyawan, Laba Usaha / Jumlah Karyawan serta Laba Usaha / Beban Karyawan. Indikasi naiknya produktivitas SDM pada tahun 2007 diperkuat dengan turunnya Beban Karyawan / Pendapatan Usaha serta Beban Karyawan / Beban Operasi.

Untuk mengukur kinerja karyawan, TELKOM menggunakan *Competency Base Human Resources Management* (CBHRM). Pada awal implementasi CBHRM tahun 2004 digunakan untuk mengukur kinerja dan menumbuhkan kompetisi diantara karyawan. Pada tahun 2007, kami mulai mengandalkan CBHRM secara penuh untuk mengukur kinerja karyawan, menentukan tingkat gaji dan membangun kompetensi. Berdasarkan hal ini, kami memperbarui "*Competency Directory* "dan membangun sebuah rencana induk untuk memberikan arah bagi pengembangan SDM kami untuk periode 2008-2012.

Pengembangan SDM

Konsep pengembangan SDM TELKOM disesuaikan dengan strategi bisnis Perusahaan mengacu pada *Corporate Strategic Scenario* (CSS), *Master Plan Human Capital* (MPHC), *Training Need Analysis* (TNA), transformasi organisasi serta pertumbuhan kondisi keuangan perusahaan.

Pendidikan dan Pelatihan

Untuk tahun 2007, pendidikan dan pelatihan karyawan difokuskan kepada:

- Pengembangan kepemimpinan guna membentuk pemimpin yang potensial dengan tujuan untuk mencapai kualitas *excellent* dan berwawasan global;
- Mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, sesuai rencana CSS, dan rencana dari unit bisnis terkait;
- Mengurangi kesenjangan kompetensi di antara karyawan melalui evaluasi kompetensi berbasis penilaian CBHRM.

Program-program tersebut dibagi dalam:

- *Mandatory Corporate Program* (program yang diselenggarakan dan dibiayai oleh HRC Corporate, baik di dalam maupun luar Negeri);
- *Regular Program* (program yang diselenggarakan oleh HR unit lokal, yang berfokus pada kinerja unit bisnis).

Pelatihan eksekutif diberikan dalam berbagai bentuk program kepemimpinan (Suspim 135, *Commander training*, Program Kepemimpinan Lanjutan dan Program Kepemimpinan *Extraordinary*). Pelatihan eksekutif selama tahun 2007 diikuti oleh 4.216 karyawan, sementara program untuk mengurangi kesenjangan kompetensi dan program-program pelatihan operasional lainnya diikuti oleh 18.136 karyawan.

Program pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi karyawan dalam hal teknologi, pemasaran serta pengelolaan bisnis dalam bidang informasi dan telekomunikasi sejalan dengan rencana TELKOM untuk menjadi pemimpin pasar di bidang InfoComm. Berbagai kerjasama dengan institusi terkait dengan industri TELKOM, baik di dalam maupun luar negeri, dijalin untuk mendukung program pelatihan tersebut.

Selama tahun 2006 dan 2007, TELKOM mengalokasikan dana pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 168,1 miliar. Rata-rata alokasi biaya pelatihan per karyawan mencapai Rp 6,0 juta, berdasarkan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan selama tahun 2007 sebanyak 22.352 peserta pelatihan.

Selain melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan SDM juga dilakukan melalui pengembangan *Knowledge Management* yang merupakan sarana bagi setiap karyawan untuk menyampaikan berbagai ide, konsep dan informasi dalam bentuk artikel tertulis, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai TELKOM.

Untuk pengembangan SDM di masa mendatang, TELKOM terus berupaya mendapatkan komposisi SDM yang ideal melalui program perekrutan yang strategis dan sesuai target yang dikembangkan oleh *Assessment Service Center* dan *Talent Pool.*

Promosi dan Rotasi

Selama tahun 2007, telah dilakukan promosi terhadap 4.172 karyawan dan rotasi sebanyak 1.994 karyawan. Pelaksanaan promosi dilakukan dengan metode *Assessment Tool* dan *Job Tender.*

Peningkatan Pelayanan SDM

TELKOM melakukan peningkatan dalam media *employee relation*, dan *Human Resources Care Center* (HRCC) yang keduanya mampu menciptakan komunikasi internal dan solusi untuk SDM yang lebih efektif. Media tersebut diresmikan pada bulan Oktober 2007.

Selain itu telah dikembangkan situs web resmi Human Capital dan *General Affair* yang merupakan sarana komunikasi antara pembuat kebijakan, pengelola SDM serta karyawan. Situs web ini menyediakan fasilitas bagi seluruh karyawan untuk mencari kebijakan-kebijakan serta informasi lainnya yang terkait dengan SDM serta melakukan tanya jawab seputar permasalahan yang terkait dengan kebijakan SDM dan pelaksanaannya.

Dukungan IT untuk Media Komunikasi Internal

Dalam mendukung media komunikasi internal, TELKOM menyediakan aplikasi yang mendukung proses otomatisasi bisnis perusahaan, baik berupa nota dinas elektronik, virtual meeting, shared files, *online surveys* dan intranet. Jaringan intranet TELKOM didukung oleh beberapa sistem aplikasi, termasuk SAP, CCF, Makxi, T3 Online, C4, CRM dan TELKOM e-learning.

Aktivitas Ekstrakurikuler Karyawan

Fasilitas TELKOM untuk aktivitas ekstrakurikuler untuk terdiri dari budaya, olahraga dan masalah keagamaan. Sedapat mungkin aktivitas ini digalakkan dengan partisipasi oleh karyawan dan keluarga mereka, termasuk aktivitas seperti kompetisi

pembacaan Al-Quran, paduan suara gereja, Utsawa Dharma Gita dan pertandingan olahraga.

Pensiun Dini

Pada tahun 2007, sejumlah 1.873 karyawan memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pensiun dini (Pendi).

Pengelolaan Hubungan Kerja

Pada bulan Mei 2000, karyawan TELKOM membentuk serikat bernama "Serikat Karyawan TELKOM" atau "SEKAR". Pada bulan Mei 2006, beberapa karyawan TELKOM membentuk serikat lain bernama "Serikat Pekerja" atau "SP" sebagai alternatif di luar SEKAR. Pembentukan setiap SEKAR dan SP adalah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 mengenai ratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak membentuk organisasi. Keanggotaan pada serikat tidak wajib sifatnya. TELKOM meyakini bahwa hubungannya dengan SEKAR dan SP cukup baik. Namun, tidak ada jaminan bahwa kegiatan serikat pekerja tidak akan berubah atau memberi dampak material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan prospek TELKOM.

Pengelolaan hubungan kerja, baik antara perusahaan dengan karyawan maupun antara perusahaan dengan SEKAR diatur melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III tanggal 17 Juli 2007 yang mengatur hak dan tanggung jawab Perusahaan, karyawan, dan SEKAR.

Dengan ditandatanganinya PKB III maka telah dicapai kesepakatan antara SEKAR dan TELKOM tentang forum LKS *Bipartite* yang fokus pada peningkatan komunikasi dua arah untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan kinerja Perseroan. Tahapan berikutnya adalah pembentukan forum LKS *Bipartite* pada tingkat pusat dan regional sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2007.

Remunerasi Yang Kompetitif

Pada umumnya, karyawan TELKOM menerima gaji pokok dan gaji terkait dengan tunjangan, bonus dan berbagai tunjangan, termasuk program pensiun dan program pelayanan kesehatan pasca-kerja, tunjangan medis untuk mereka sendiri dan beberapa anggota keluarga inti mereka, tunjangan perumahan dan tunjangan tertentu lainnya, termasuk yang terkait dengan kinerja unit kerja karyawan.

Bonus dianggarkan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan diberikan pada tahun berikutnya ketika bonus tersebut diperoleh. Selama lima tahun terakhir, jumlah bonus tahunan berkisar dari Rp 113,5 miliar sampai Rp 391,3 miliar. Pada tahun 2007, bonus diberikan kepada seluruh karyawan setelah disampaikannya laporan keuangan TELKOM yang diaudit tahun 2007. Besarnya bonus ditentukan dan disetujui pada RUPS 2008 sebelum Manajemen mendistribusikannya kepada seluruh karyawan sesuai tingkat posisi masing-masing.

Usia pensiun untuk seluruh karyawan TELKOM adalah 56 tahun. TELKOM mensponsori program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti diperuntukkan untuk karyawan tetap yang direkrut sebelum tanggal 1 Juli 2002. Besarnya pensiun untuk program pensiun manfaat pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika karyawan tersebut meninggal. Sumber utama dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan TELKOM. Karyawan yang berpartisipasi dalam program berkontribusi sebesar 18% dari gaji pokok (sebelum bulan Maret 2003, tingkat kontribusi karyawan adalah sebesar 8,4%) dan TELKOM memberikan kontribusi sisanya dari jumlah yang diperlukan untuk mendanai program. Kontribusi TELKOM untuk dana pensiun sebesar Rp 698,5 miliar, Rp 693,5 miliar dan Rp 700,2 miliar masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2005, 2006, dan 2007.

Efektif tanggal 1 Januari 2003, TELKOM meningkatkan (a) manfaat pensiun minimum untuk pensiunan sekitar Rp 425.000 per bulan dan (b) manfaat pensiun untuk karyawan yang pensiun sebelum tanggal 1 Agustus 2000 sebesar 50%. Karyawan yang pensiun pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002 menerima kenaikan manfaat pensiun bulanan sebesar dua kali gaji dasar bulanan yang bersangkutan. Kebijakan ini berlaku untuk karyawan yang pensiun pada usia pensiun normal yaitu 56 tahun.

Program Pensiun Iuran Pasti disediakan untuk karyawan tetap yang direkrut pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan yang telah diakui. Kontribusi tahunan Perusahaan untuk Program Pensiun Iuran Pasti ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji peserta dengan jumlah sebesar Rp 971,0 juta, Rp 1.858,0 juta dan Rp 2.196,0 juta masing-masing pada tahun 2005, 2006, dan 2007.

TELKOM juga menyediakan manfaat kesehatan pasca-pensiun untuk seluruh karyawan yang pensiun, termasuk istri atau suami dan anak mereka. Ada dua jenis pendanaan untuk manfaat kesehatan pasca-pensiun: (i) untuk karyawan yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 Nopember 1995 yang pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995 atau yang telah 20 tahun bekerja untuk mereka yang pensiun setelah tanggal 3 Juni 1995, manfaat tersebut didanai oleh Yayasan Kesehatan TELKOM; (ii) untuk karyawan yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 Nopember 1995 dan pensiun dengan jumlah tahun bekerja kurang dari 20 tahun dan untuk karyawan yang dipekerjakan setelah tanggal 1 Nopember 1995, manfaat tersebut akan diberikan dalam bentuk tunjangan asuransi oleh TELKOM. Kontribusi TELKOM untuk program karyawan yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 Nopember 1995 yang pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995 dan yang telah 20 tahun bekerja saat yang bersangkutan pensiun tanggal 3 Juni 1995 adalah sebesar Rp 435,9 miliar, Rp 714,8 miliar, dan Rp 900,0 miliar masing-masing, untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005, 2006, dan 2007.

TELKOM *Employee Reward* (TER).

TELKOM memberikan penghargaan kepada karyawan atau unit yang berprestasi untuk memacu prestasi dan produktivitas karyawan. TELKOM telah menyediakan beberapa penghargaan yang diberikan kepada karyawan terkait dengan prestasi individu atau unit. Penghargaan ini disebut TELKOM *Employee Reward* yang meliputi penghargaan keagamaan, penghargaan prestasi individu, dan penghargaan prestasi unit.

Selain itu TELKOM juga menyediakan penghargaan *The Healthiest Family Award, Best Tactical Innovator Award, Champion Award,* dan *Best Regional Office Award*.

Pengelolaan Saham TELKOM milik Pegawai (ESOP)

Program utama ESOP antara lain melayani transaksi jual beli saham ESOP. Pada saat IPO tanggal 14 Nopember 1995, jumlah saham TELKOM sebanyak 116.666.475 lembar didapat oleh 43.218 pegawai. Pada tanggal 31 Desember 2007, 15.941.446 lembar saham TELKOM dimiliki oleh 12.487 karyawan dan pensiunan TELKOM.

Pengembangan Budaya Perusahaan dan Etika Bisnis

Perseroan memiliki kebijakan internal dan pengembangan budaya perusahaan yang dikenal dengan *The TELKOM Way* (TTW) 135. TTW 135 menekankan sejumlah unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam diri setiap karyawan. Unsur-unsur tersebut mencakup satu asumsi dasar, tiga nilai utama, dan lima langkah perilaku.

Asumsi dasar adalah *Committed to you*, tiga nilai utama mencakup: nilai bagi pelanggan, pelayanan yang unggul, dan pegawai yang kompeten. Lima langkah perilaku untuk memenangkan persaingan: merentangkan tujuan, menyederhanakan, melibatkan tiap orang, kualitas dalam setiap pekerjaan dan penghargaan terhadap pemenang. TTW 135 diharapkan akan menciptakan kendali budaya yang efektif terhadap bagaimana merasa, bagaimana memandang, bagaimana berpikir dan cara berperilaku seluruh karyawan TELKOM.

Budaya TTW 135 dilanjutkan untuk tetap dijalankan sebagai satu-satunya budaya TELKOM. Pada tahun 2007 telah dimulai pembangunan budaya lingkup TELKOMGroup melalui perencanaan dan persiapan bersama beberapa program sinergi TELKOMGroup.

Pengembangan budaya diselaraskan dengan program-program inisiatif strategis kami. Transformasi budaya dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeluruh baik yang berbasis nilai seperti yang telah diterapkan sebelumnya maupun pendekatan berbasis sistem seperti yang ditentukan oleh inisiatif strategis.

Pada tahun 2007 aktivitas rutin tahunan adalah:
(i) Pengukuran tingkat kemajuan dalam implementasi TTW 135 melalui penelitian budaya Perusahaan untuk memperoleh TELKOM *Corporate Index*, (ii) atas satu komitmen untuk memenuhi kepatuhan terhadap penandatanganan etika bisnis TELKOM, (iii) memperbaiki tingkat kepatuhan, (iv) penilaian atas pemahaman karyawan terhadap isu-isu etika bisnis, dan (v) pelaksanaan penandatanganan etika bisnis sebagai salah satu perwujudan dari kepatuhan terhadap kaidah-kaidah etika bisnis yang sejalan dengan penerapan SOA, termasuk keharusan Direktur Utama dan Direktur Keuangan untuk memberikan tanda tangan mereka pada Laporan Tahunan TELKOM sebagai bentuk keabsahan dan keterhandalan.

Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan SDM

Komunikasi kebijakan SDM dilakukan kepada seluruh lingkungan TELKOMGroup melalui berbagai cara termasuk melalui media elektronik seperti siaran televisi internal perusahaan Indonet, portal situs web, *mailing list*, dan nota dinas. Salah satunya adalah sosialisasi PKB III pada bulan Juli 2007 yang dilakukan melalui media-media internal tersebut di atas.

Survei Pendapat Kepuasan Karyawan TELKOM (TEOS)

Survei TEOS diselenggarakan pada bulan Agustus-September 2007 secara online melalui portal Intranet TELKOM. Berdasarkan hasil survey tersebut, Index Kepuasan Karyawan (ESI) mencapai 79,23% sedangkan Index Ketidakpuasan Karyawan (EDI) mencapai 5,19%.

ESI tertinggi adalah untuk Kebanggaan Tempat Bekerja dengan nilai 89,97% dan ESI terendah adalah untuk Remunerasi dengan nilai 73,10%. Sementara EDI terendah adalah untuk Kebanggaan Tempat Bekerja dengan nilai 0,64% dan EDI tertinggi adalah untuk Remunerasi dengan nilai 11,51%.

Pengelolaan Kesehatan Karyawan TELKOM

TELKOM memberikan layanan kesehatan bagi karyawannya melalui Yayasan Kesehatan (Yakes) TELKOM. Aktivitas utama Yakes adalah menyelenggarakan kebutuhan kesehatan karyawan dan pensiunan TELKOM beserta keluarga intinya.

Untuk tahun 2007, Yakes TELKOM memiliki fasilitas pelayanan sebanyak 931 unit yang terdiri dari 17 pusat pelayanan kesehatan dan 914 fasilitas kesehatan lainnya diselenggarakan melalui kerja sama dengan mitra kesehatan, seperti dokter, spesialis kesehatan, rumah sakit, apotik, klinik, laboratorium, optik, dan lainnya.

Karyawan dan pensiunan TELKOM beserta keluarganya yang menjadi peserta Yakes berjumlah 159.751 orang pada akhir tahun 2007, menurun sejumlah 9.034 orang dibandingkan pada akhir tahun 2006. Penurunan ini terjadi karena telah berakhirnya masa keanggotaan Yakes yang disebabkan karena karyawan yang bersangkutan meninggal atau umur progresif di luar batas usia yang telah ditetapkan atau karena adanya kebijakan pensiun tertentu tanpa fasilitas kesehatan.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan keamanan karyawan TELKOM maupun orang lain yang beraktivitas di lingkungan operasi TELKOM dan untuk pengamanan terhadap sumber produksi, proses produksi, alat produksi dan lingkungan kerja, TELKOM menetapkan seluruh kebijakan K3 dengan tujuan untuk mencapai tingkat kecelakaan kerja nihil (*zero accident goal*). Pengelolaan K3 dilakukan berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat melalui Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Pada tahun 2007, survei K3 diselenggarakan bersamaan dengan survei TEOS. Survei K3 tersebut merupakan survei pertama yang dilakukan untuk mengetahui apakah lingkungan kerja karyawan TELKOM sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Berdasarkan hasil survei, pencapaian K3 TELKOM memperoleh nilai 76,06% yang dikategorikan sebagai “Baik”.

menciptakan nilai unggul

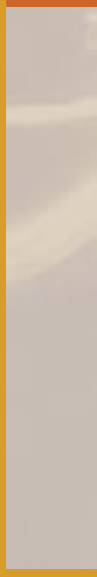

Tinjauan Industri Telekomunikasi

TELKOM dan Kinerja Operasi tahun 2007

Faktor-faktor Risiko

Pembahasan dan Analisis Manajemen

Informasi Keuangan Tambahan

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Industri Telekomunikasi Indonesia

Sejak tahun 1961, layanan telekomunikasi di Indonesia telah diselenggarakan oleh perusahaan milik negara. Seperti negara berkembang lainnya, perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi memainkan peranan yang penting di dalam perkembangan ekonomi nasional secara umum. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi yang belum dapat terpenuhi.

Pemerintah memiliki kewenangan regulasi yang luas dan pengawasan pada sektor telekomunikasi, terutama melalui Menkominfo. Pada awalnya Pemerintah mempertahankan monopoli atas layanan telekomunikasi di Indonesia. Reformasi saat ini telah menciptakan kerangka regulasi yang mendorong tumbuhnya persaingan dan percepatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi. Reformasi tersebut menghasilkan regulasi baru yang berlaku mulai bulan September 2000, yang dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan dengan penghapusan monopoli, meningkatkan transparansi dan memberi gambaran yang jelas tentang kerangka regulasi, menciptakan peluang bagi aliansi strategis dengan mitra asing dan memfasilitasi masuknya pemain baru dalam industri telekomunikasi. Pada saat itu, deregulasi sektor telekomunikasi sangat erat kaitannya dengan program pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh *International Monetary Fund* ("IMF").

Penetrasi sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia masih rendah berdasarkan standar internasional. Sesuai dengan studi internal yang dilakukan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, penetrasi sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia (termasuk pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel) diperkirakan sebesar 7,7% dan penetrasi selular diperkirakan sebesar 41,1%.

Kami yakin ada beberapa kecenderungan yang signifikan dalam industri telekomunikasi di Indonesia antara lain:

- Pertumbuhan yang berkesinambungan. Kami yakin industri telekomunikasi akan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan akan meningkatkan permintaan layanan telekomunikasi.
- Migrasi ke jaringan nirkabel. Kami mengantisipasi layanan nirkabel yang semakin populer sebagai akibat dari semakin luasnya area cakupan, membaiknya kualitas jaringan nirkabel, menurunnya harga telepon genggam dan meluasnya layanan prabayar.
- Meningkatnya persaingan. Kami mengantisipasi akan semakin kompetitifnya pasar telekomunikasi Indonesia sebagai akibat dari reformasi peraturan pemerintah.

Regulasi

Tinjauan

Pemerintah mempunyai kewenangan membuat regulasi dan pengawasan atas industri telekomunikasi di Indonesia. Kerangka hukum untuk industri telekomunikasi didasarkan atas undang-undang tertentu, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Pemerintah saat ini mengatur sektor telekomunikasi melalui Menkominfo. Menkominfo bertanggung jawab atas keseluruhan pengawasan dan regulasi dalam industri telekomunikasi. Di dalam Menkominfo, berbagai direktorat dan biro melaksanakan beberapa tugas regulasi khusus. Menkominfo berwenang mengeluarkan keputusan implementasi, yang biasanya luas cakupannya, sehingga memberikan keleluasaan kepada Menkominfo. Sesuai keputusan tersebut, Menkominfo menentukan ruang hak eksklusif, merumuskan dan memberikan persetujuan atas tarif, menentukan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan mengontrol berbagai faktor yang berpengaruh pada posisi kompetitif, operasi dan kondisi keuangan TELKOM. Menkominfo, sebagai pihak pembuat peraturan, berwenang memberikan lisensi baru untuk pendirian usaha patungan baru dan pengaturan lainnya, terutama di sektor telekomunikasi.

Sebelum bulan Maret 1998, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ("Deparpostel") bertanggung jawab atas regulasi telekomunikasi di Indonesia, akan tetapi dengan reorganisasi Pemerintah sesudah Pemilihan Umum 1999, Dephub menerima tanggung jawab untuk melakukan pengaturan. Pada tahun 2005, sesuai Keputusan Presiden, tanggung jawab untuk mengatur tersebut dialihkan kepada Menkominfo. Melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Dirjenpostel"), salah satu direktorat jenderal di bawah Menkominfo, Pemerintah mengatur alokasi spektrum frekuensi radio untuk seluruh operator, termasuk TELKOM, yang diharuskan untuk mendapat lisensi dari Menkominfo untuk masing-masing layanan yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Seluruh operator telekomunikasi juga diharuskan membayar penggunaan spektrum frekuensi radio. Pemerintah juga mensyaratkan seluruh operator telekomunikasi untuk membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebesar 1% dari pendapatan usaha yang diperoleh.

Pada saat itu seluruh program deregulasi sektor telekomunikasi sangat erat kaitannya dengan program pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh IMF. Rencana nasional didokumentasikan dalam Nota Kebijakan Ekonomi dan Keuangan ("NKEK"), sebagaimana dijelaskan selanjutnya dalam Nota Kesepakatan kepada IMF pada bulan Januari dan Mei 2000. Fokus utama NKEK adalah menstabilkan ekonomi dan menumbuhkan kembali kepercayaan melalui rencana komprehensif yang berdasarkan pada:

- Deregulasi;
- Mendorong persaingan;
- Liberalisasi;
- Restrukturisasi;
- Meningkatkan akses pasar, dan
- Memperkenalkan regulasi yang berorientasi pada pasar.

Kebijakan reformasi telekomunikasi Pemerintah tertuang dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Telekomunikasi", sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menhub No. KM 72 tahun 1999 tertanggal 20 Juli 1999. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk:

- Meningkatkan kinerja sektor tersebut di era globalisasi;
- Melakukan liberalisasi sektor dengan struktur yang kompetitif dengan meniadakan pengawasan monopoli;
- Meningkatkan transparansi dan gambaran yang jelas tentang kerangka regulasi;
- Menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan para mitra asing;
- Menciptakan peluang bisnis untuk badan usaha skala kecil dan menengah; dan
- Memfasilitasi peluang-peluang kerja yang baru.

Reformasi regulasi pada sektor telekomunikasi Indonesia berlandaskan pada Undang-undang Telekomunikasi yang berlaku efektif pada tanggl 8 September 2000.

Pada 15 September 2003, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi berdasarkan Instruksi Presiden No. 15. Pemerintah bermaksud meningkatkan efisiensi, kapasitas dan ekuitas dalam telekomunikasi dengan menambah infrastruktur sebanyak 3 juta satuan sambungan telepon tidak bergerak (sst) dan 43.000 sst di daerah terpencil. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2004, Menhub mengeluarkan Pengumuman No. PM 2/2004 mengenai Implementasi Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi yang antara lain, menyatakan bahwa Pemerintah mengharuskan operator memasang minimal 1,4 juta satuan sambungan pada tahun 2004 dan 10,7 juta satuan sambungan sampai dengan tahun 2008.

Undang-undang Telekomunikasi

Undang-undang Telekomunikasi menetapkan panduan utama untuk reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, fasilitasi pemain baru dan peningkatan transparansi dan persaingan. Berdasarkan kerangka regulasi Indonesia, Undang-undang Telekomunikasi secara garis-besar hanya menguraikan prinsip substantif materi pokok. Ketentuan rinci pelaksanaan Undang-undang Telekomunikasi akan ditetapkan dalam aturan pelaksanaan yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Dirjenpostel.

Undang-undang Telekomunikasi meniadakan konsep “badan penyelenggara” sehingga mengakhiri status TELKOM dan Indosat sebagai badan penyelenggara dengan tanggung jawab menyelenggarakan masing-masing layanan telekomunikasi domestik dan internasional untuk industri telekomunikasi. Untuk meningkatkan persaingan, Undang-undang Telekomunikasi secara khusus melarang praktik monopoli dan persaingan tidak wajar di antara operator telekomunikasi.

Peran Pemerintah adalah menjadi pembuat dan pengawas kebijakan imparsial. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Telekomunikasi dan untuk memastikan transparansi dalam proses pembuatan regulasi, badan regulasi independen didirikan pada 11 Juli 2003 untuk mengatur, memantau dan mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat dari Dirjenpostel dan Komite Regulasi Telekomunikasi dan diketuai oleh Direktur Jenderal Layanan Pos dan Telekomunikasi. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi ditunjuk pada 19 Desember 2003.

Keputusan Menteri Perhubungan No. 67/2003 menyatakan hubungan antara Menhub, yang tanggung jawab pengaturan telekomunikasi dialihkan kepada Menkominfo pada bulan Pebruari 2005, dan BRTI. Sebagai bagian dari fungsi pengatur, BRTI berwenang untuk (i) melaksanakan pemilihan atau evaluasi untuk pemberian lisensi jaringan dan layanan telekomunikasi sesuai dengan kebijakan Menkominfo, dan (ii) mengusulkan kepada Menkominfo mengenai standar pelaksanaan operasi untuk jaringan dan layanan telekomunikasi, standar kualitas layanan, biaya interkoneksi dan standardisasi peralatan. Sebagai bagian dari fungsi pemantauan, BRTI berwenang memantau dan diharuskan melaporkan kepada Menkominfo mengenai (i) pelaksanaan standar pelaksanaan operasi untuk jaringan dan layanan telekomunikasi, (ii) persaingan di antara operator jaringan dan layanan, dan (iii) pemanfaatan peralatan telekomunikasi sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, BRTI juga diberi wewenang untuk mengawasi dan diharuskan untuk melaporkan ke Menkominfo mengenai fasilitasi penyelesaian sengketa di antara operator jaringan dan layanan, dan kontrol penggunaan peralatan telekomunikasi dan pelaksanaan standar kualitas layanan. Keputusan BRTI dituangkan dalam bentuk keputusan Dirjenpostel.

Kategori Layanan Baru

Undang-undang Telekomunikasi menggolongkan penyedia telekomunikasi ke dalam tiga kategori: (i) penyedia jaringan telekomunikasi, (ii) penyedia layanan telekomunikasi; dan (iii) penyedia telekomunikasi khusus. Berdasarkan kategori-kategori tersebut, operasi jaringan telekomunikasi dan/atau penyediaan layanan telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh setiap badan hukum yang didirikan untuk tujuan tersebut.

Lisensi diperlukan untuk setiap kategori layanan telekomunikasi. Penyedia jaringan telekomunikasi mendapat lisensi untuk memiliki dan/atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi. Penyedia layanan telekomunikasi mendapat lisensi untuk menyediakan layanan dengan menyewa kapasitas jaringan dari penyedia jaringan lain. Lisensi telekomunikasi khusus diperlukan untuk penyedia layanan telekomunikasi swasta untuk tujuan yang terkait dengan penyiaran dan kepentingan keamanan nasional. Keputusan Menhub No. KM 20/2001 (yang diubah berdasarkan Keputusan No. KM 29/2004) dan Keputusan Menhub No. KM 21/2001 (yang diubah berdasarkan Keputusan No. KM 30/2004) melaksanakan ketentuan Undang-undang Telekomunikasi mengenai kategori baru atas jaringan dan layanan operasi telekomunikasi.

Persaingan

Walaupun ada terminasi hak eksklusivitas, Pemerintah tidak melarang atau mencegah operator mendapatkan posisi yang dominan berkenaan dengan layanan telekomunikasi. Namun, Pemerintah melarang operator menyalahgunakan posisi yang dominan tersebut. Pada 11 Maret 2004, Menhub mengeluarkan Keputusan No. 33/2004, yang menguraikan langkah-langkah untuk melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh penyedia jaringan dan layanan. Penyedia yang dominan ditentukan berdasarkan atas sejumlah faktor seperti lingkup bisnis, area cakupan layanan dan apakah mereka mengontrol pasar tertentu atau tidak. Terutama, Keputusan tersebut melarang penyedia yang dominan terlibat dalam praktik seperti dumping (penurunan harga besar-besaran), penetapan harga yang semena-mena, subsidi-silang, memaksa pelanggan menggunakan layanan penyedia tersebut (dengan mengesampingkan sama sekali para pesaing) dan menghambat kewajiban interkoneksi (termasuk diskriminasi terhadap penyedia layanan tertentu).

Interkoneksi

Berdasarkan larangan atas kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak wajar, Undang-undang Telekomunikasi menetapkan interkoneksi jaringan yang wajar agar tercipta “konektifitas antara satu dengan yang lainnya”. Biaya interkoneksi harus disepakati oleh setiap penyedia jaringan dan dihitung secara transparan. Undang-undang Telekomunikasi menetapkan panduan berkenaan dengan pola interkoneksi antara para penyedia jaringan telekomunikasi. Pada 8 Pebruari 2006, Menkominfo mengeluarkan Peraturan No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 yang mewajibkan pola tarif interkoneksi berbasis-biaya untuk seluruh operator jaringan dan jasa telekomunikasi. Berdasarkan

pola baru, operator jaringan tempat panggilan berakhir akan menentukan biaya interkoneksi yang harus diterima oleh pihaknya berdasarkan atas formula berbasis-biaya.

Berdasarkan Keputusan No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006, setiap operator jaringan telekomunikasi diharuskan menyusun dan menyerahkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) kepada BRTI, yang harus berisikan jenis layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh operator jaringan dan tarif yang dikenakan untuk setiap layanan yang ditawarkan. Biaya interkoneksi yang dihitung tersebut harus dilaporkan dalam DPI dan diserahkan kepada BRTI. TELKOM menyerahkan DPI pada bulan April 2006. Pada bulan Agustus 2006, BRTI menyelesaikan kajiannya terhadap DPI yang diserahkan oleh operator jaringan yang besar, termasuk TELKOM. Sehubungan dengan modifikasi yang signifikan yang dilakukan oleh BRTI terhadap DPI TELKOM, TELKOM mengusulkan perubahan tertentu atasnya. Sesudah berlangsung surat menyurat antara TELKOM dan BRTI, BRTI memutuskan bahwa DPI TELKOM final adalah sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan DJPT No. 279/DIRJEN/2006 yang dikeluarkan pada 4 Agustus 2006. Pola tarif interkoneksi berlaku pada 1 Januari 2007.

Berdasarkan klausul peralihan dalam Peraturan Menkominfo No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006, perjanjian interkoneksi yang ada tetap berlaku selama para pihak pada perjanjian sepakat dan perjanjian yang ada tidak berbenturan dengan Peraturan No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006. Pada 28 Desember 2006, TELKOM dan seluruh operator jaringan yang ada menandatangani perubahan terhadap perjanjian interkoneksi masing-masing untuk pelaksanaan tarif berbasis-biaya yang diwajibkan berdasarkan Peraturan No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006. Perubahan ini berlaku pada 1 Januari 2007.

Berdasarkan Peraturan No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 dan surat BRTI No.246/BRTI/VII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, TELKOM menyerahkan pemutakhiran DPI kepada BRTI pada tanggal 26 Oktober 2007 yang mencakup penyesuaian untuk operasional, konfigurasi, teknis dan layanan yang ditawarkan. Pada Desember 2007, TELKOM dan semua operator jaringan menandatangani kesepakatan interkoneksi baru yang menggantikan semua kesepakatan interkoneksi TELKOM dengan operator lainnya termasuk amendemen kesepakatan semua interkoneksi yang ditandatangani pada Desember 2006. Kesepakatan-kesepakatan ini menekankan persyaratan berdasarkan DPI TELKOM. Pada 5 Februari 2008, Pemerintah mengeluarkan aturan penyesuaian tarif mengacu pada rezim tarif interkoneksi berbasis biaya. Berdasarkan peraturan ini, TELKOM dan Telkomsel, bersama dengan sepuluh penyedia layanan telekomunikasi lainnya di Indonesia, wajib menyesuaikan tingkat tarif interkoneksi masing-masing dengan skema baru yang telah ditetapkan per 1 April 2008.

Layanan SLJJ dan SLI

TELKOM mendapatkan izin penggunaan kode akses “007” untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI). Pada 1 Desember 2005, TELKOM dan Indosat memasuki kesepakatan interkoneksi lainnya yang memungkinkan pelanggan masing-masing melakukan panggilan domestik antara jaringan telepon bergerak Indosat dengan jaringan telepon tidak bergerak TELKOM dan membolehkan pelanggan telepon bergerak Indosat mengakses layanan SLI TELKOM dengan memutar “007”. Kesepakatan ini mengganti semua kesepakatan interkoneksi jaringan bergerak dan tidak bergerak antara TELKOM dan Indosat.

Pada 17 Mei 2005, Menkominfo mengeluarkan Keputusan No. 6/2005 tentang kode akses layanan SLJJ. Berdasakan keputusan ini, kode akses tiga digit berupa “01X” dan kode akses “0” untuk layanan SLJJ boleh digunakan. Kode akses “0” digunakan untuk mengakomodasi pelanggan yang lebih suka tidak memilih sambungan jarak jauh, sedangkan kode akses “01X” digunakan secara bertahap di wilayah-wilayah lokal yang telah memiliki kemampuan secara teknis untuk mendukung layanan tersebut.

Pada 3 Desember 2007, Menkominfo mengeluarkan Keputusan No. 43/2007 yang mengatur tahapan penerapan kode akses. Keputusan ini mengharuskan TELKOM memulai pemakaian layanan jarak jauh berkode “01X” pada 3 April 2008 di Balikpapan dan, dengan kondisi tertentu, berlaku di semua wilayah lainnya paling lambat tanggal 27 September 2011. Namun demikian, Keputusan itu juga menuntut pembukaan akses SLJJ jaringan telepon tidak bergerak kabel dan jaringan telepon tidak bergerak nirkabel untuk operator lain sebelum tenggat waktu itu apabila Indosat atau operator berlesensi lainnya mencapai ambang batas jumlah pelanggan tertentu. Berdasarkan Keputusan ini, TELKOM diwajibkan membuka akses jaringan telepon tidak bergerak nirkabel kepada Indosat atau operator berizin lainnya yang mencapai jumlah pelanggan setara 30% atau 15% dari jumlah pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM. TELKOM diwajibkan pula membuka akses jaringan telepon tidak bergerak kabel dan jaringan telepon tidak bergerak nirkabel kepada Indosat atau operator berizin lainnya yang mencapai jumlah pelanggan layanan terminal telepon tidak bergerak nirkabel setara 15% dari gabungan pelanggan TELKOM.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Pada 11 Juli 2003, BRTI ditetapkan sebagai instansi pelaksana Undang-undang Telekomunikasi. Berdasarkan Keputusan Menhub No. KM 31/2003, yang diubah berdasarkan Keputusan Menhub No. 25/2005, BRTI berwenang mengatur, memantau dan mengontrol operasi sektor telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat Dirjenpostel dan Komite Regulasi Telekomunikasi. Digabung dengan privatisasi lebih lanjut atas TELKOM dan Indosat, pendirian badan regulasi independen tersebut dimaksudkan untuk mengurangi peran Pemerintah dalam industri telekomunikasi dari pihak yang membiayai, mengoperasikan, mengatur dan memberi lisensi industri telekomunikasi menjadi terutama sebagai pemberi lisensi dan pengatur industri.

Pada tahun 2003, Menhub juga mengumumkan penetapan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (”SKTT”) yang akan membantu BRTI dalam menjalankan fungsinya dan yang akan bertanggung jawab atas seluruh hal interkoneksi. Diharapkan melalui SKTT, BRTI akan mendapatkan data yang akurat mengenai profil trafik interkoneksi antar operator untuk memastikan terwujudnya transparansi dalam pengenaan biaya interkoneksi. Pelaksanaan operasi dari SKTT akan dilaksanakan oleh PT Pratama Jaringan Nusantara, suatu badan swasta yang dipilih oleh Menhub pada 18 Pebruari 2004 yang akan bertindak di bawah pengawasan dan kontrol BRTI. Terhitung sampai dengan laporan tahunan ini dibuat, SKTT belum beroperasi.

Pada tahun 2007, Menkominfo mengumumkan sebuah cetak biru untuk kerangka kerja baru distribusi ijin-ijin teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Berdasarkan kerangka kerja yang sekarang berlaku, ijin ICT diberikan kepada para operator

dengan kategori: internet, PSTN, akses nirkabel tak bergerak dan selular, dan televisi berlangganan. Kerangka kerja baru itu akan menggantikan ketentuan yang lama dengan kategori sebagai berikut: layanan (*email*, televisi, internet, suara), jaringan (*softswitch*)/kanal-lunak, *IP network*/jaringan protokol internet), akses (sambungan kabel, 3G/4G, WiFi) dan peralatan milik pelanggan (komputer pribadi, PDA/asisten pribadi digital, pesawat telepon genggam, modem). Kerangka kerja baru ijin-ijin ICT ditunda untuk mendapatkan tinjauan dan komentar dan dijadwalkan penerapannya pada tahun 2011.

Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Telekomunikasi, setiap operator harus memberikan jaminan perlindungan konsumen dalam hal kualitas layanan, biaya layanan, biaya kompensasi dan hal lainnya. Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai kerugian konsumen yang disebabkan oleh kelalaian operasi untuk mengajukan klaim kepada operator yang melakukan kelalaian tersebut.

Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")

Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi, seluruh operator jaringan telekomunikasi dan penyedia layanan terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal yang mengharuskan operator jaringan dan penyedia layanan telekomunikasi tersebut memberikan kontribusi pada penyediaan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi universal atau bentuk kompensasi lain. Sampai Laporan Tahunan ini disusun, TELKOM telah membayarkan KPU sejumlah Rp 307,7 miliar untuk tahun fiskal 2005, Rp 383,8 miliar tahun 2006 dan Rp 438,5 miliar untuk tahun 2007. Informasi lebih lanjut tentang KPU, lihat Catatan 48g pada laporan keuangan konsolidasi.

Regulasi Pelaksana

Hingga saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaan di bawah Undang-Undang Telekomunikasi, termasuk Peraturan Menkominfo No.01/2006 tentang Operasi Jaringan Selular dengan Gelombang Radio Berfrekuensi 2,1 GHz, Peraturan Menkominfo No.8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi dan Keputusan Menkominfo No. 181/2006 tentang Migrasi Frekuensi.

Regulasi Satelit

Industri satelit internasional adalah sebuah industri yang diatur dengan amat ketat. Selain harus mengikuti aturan pemberian lisensi domestik dan regulasi di Indonesia untuk penggunaan slot orbit dan frekuensi radio, penempatan dan operasi satelit TELKOM juga harus didaftarkan kepada Biro Komunikasi Radio ITU (International Telecommunications Union) dan melalui proses konsultasi dengan Intelsat.

Regulasi Telepon Tidak Bergerak Kabel dan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel

Pada 11 Maret 2004, Menhub mengeluarkan Keputusan No. 35/2004 yang menetapkan bahwa hanya operator jaringan telepon tidak bergerak berlisensi dari Menhub dan menggunakan jaringan akses frekuensi radio yang boleh menawarkan layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel. Selain itu, dinyatakan bahwa setiap penyedia akses telepon tidak bergerak nirkabel harus menyediakan layanan telepon dasar. Namun, penyedia akses telepon tidak bergerak nirkabel hanya dapat menyediakan layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel dalam kode area yang telah ditetapkan. Selain itu, layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel tidak boleh memasukkan fitur roaming dan perpindahan otomatis. Pelanggan tidak dapat menggunakan telepon tidak bergerak nirkabel mereka untuk melakukan atau menerima panggilan sewaktu mereka berada di luar dari kode area masing-masing.

Pada bulan Mei 2006, TELKOM mulai menawarkan layanan pusat panggilan langsung terintegrasi kepada para pelanggan korporat. Kami namakan layanan ini "TELKOM Call 500". TELKOM Call 500 adalah sebuah solusi layanan komunikasi dasar yang menyediakan pusat komunikasi terintegrasi bagi para pelanggan korporat untuk mendukung program-program pemasaran dan layanan pelanggan mereka. TELKOM Call 500 menyasar perusahaan-perusahaan berbagai segmen termasuk perbankan dan keuangan, manufaktur, industri dan perdagangan, pemerintah, pertambangan dan konstruksi. Mengingat pada tahun 2007 Pemerintah meninjau ulang rencana penomoran nasional berawalan 500-XXX, TELKOM menghentikan layanan ini sambil menunggu tindakan Pemerintah selanjutnya.

Persaingan

Telepon Tidak Bergerak Kabel dan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel

Pada awalnya, TELKOM memiliki hak eksklusif untuk menyediakan layanan telekomunikasi domestik sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Telekomunikasi, Pemerintah mengakhiri monopoli TELKOM dalam menyediakan layanan telekomunikasi domestik sambungan telepon tidak bergerak. Menhub mengeluarkan lisensi untuk Indosat untuk menyediakan layanan telepon lokal sejak bulan Agustus 2002. Pada 13 Mei 2004, Indosat menerima lisensi komersial untuk menyediakan layanan telepon SLJJ. Indosat meluncurkan layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel CDMA dengan merek dagang "StarOne" di Surabaya pada 29 Mei 2004 dan di Jakarta pada 25 Juli 2004, menciptakan "sistem duopoli" di pasar telekomunikasi domestik sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2005, Indosat mampu menyediakan layanan SLJJ di tingkat nasional melalui jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA, jaringan telepon tidak bergerak milik Indosat dan perjanjian interkoneksi dengan TELKOM. Berdasarkan perjanjian interkoneksi antara TELKOM dan Indosat tertanggal 23 September 2005, TELKOM sepakat untuk membuka interkoneksi dengan layanan sambungan telepon tidak bergerak lokal Indosat di wilayah tertentu seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Balikpapan dan Denpasar. Hingga saat ini, Indosat telah memperluas jangkauan jaringan telepon tidak bergerak lokal ke sebagian besar daerah di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Indosat juga mulai menawarkan layanan SLJJ terbatas untuk panggilan di dalam jaringannya pada akhir tahun 2004.

Layanan sambungan telepon tidak bergerak TELKOM menghadapi persaingan langsung maupun tidak langsung dari penyedia layanan telepon tidak bergerak kabel dan telepon tidak bergerak nirkabel lain, seperti PT Bakrie Telecom (dahulu Ratelindo) dan PT Batam Bintan Telecom, layanan telepon selular, layanan selular tetap, SMS, layanan VoIP dan e-mail. TELKOM memperkirakan bahwa peningkatan penggunaan layanan ini dapat memberi dampak merugikan pada permintaan terhadap layanan sambungan telepon tidak bergerak di masa mendatang.

Selular

Pasar selular di Indonesia didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo. Sampai dengan 31 Desember 2007, operator selular tingkat nasional ini (mobilitas penuh) secara bersama-sama memiliki lebih dari 85% pangsa pasar selular Indonesia. Jumlah pelanggan selular dengan mobilitas penuh di Indonesia mencapai jumlah total kurang lebih 63,7 juta pada akhir tahun 2006 dan kurang lebih 93,1 juta pada akhir tahun 2007, yang merupakan pertumbuhan tahunan kurang lebih 40,0% selama jangka waktu tersebut. Meskipun pertumbuhan ini sangat pesat, namun tingkat penetrasi selular di Indonesia, yaitu kurang lebih 41,1% pada akhir tahun 2007, tetap relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Dalam tahun-tahun terakhir, persaingan di antara para operator selular semakin intensif.

Operator telepon selular GSM bersaing terutama atas dasar penetapan harga, merek, jangkauan jaringan, distribusi, teknologi, layanan bernilai-tambah dan kualitas layanan. TELKOM yakin bahwa Telkomsel mampu bersaing secara efektif di pasar selular Indonesia sehubungan dengan kualitas dan jangkauan jaringan telepon selularnya dan kekuatan merek dagangnya.

Layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA, TELKOMFlexi, menawarkan mobilitas terbatas dan membebankan biaya kepada pelanggan berdasarkan tarif PSTN yang secara substansial lebih rendah dari tarif untuk layanan selular, dapat menawarkan alternatif yang kompetitif di luar layanan GSM.

Pada tanggal 31 Desember 2007, Telkomsel tetap merupakan penyedia layanan selular berlisensi nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan selular mencapai 47,9 juta dan pangsa pasar kurang lebih 51,0% dari pasar selular dengan mobilitas penuh. Indosat, sebagai hasil dari merger dengan Satelindo, merupakan penyedia terbesar kedua. Excelcomindo merupakan penyedia terbesar ketiga. Sejak tahun 2003, Mobile 8 juga telah mengoperasikan layanan telepon selular CDMA di tingkat nasional. Mobile 8 memiliki kurang lebih 3,0 juta pelanggan dan pangsa pasar kurang lebih 3,3% pada 31 Desember 2007. Selain operator GSM di tingkat nasional, sejumlah penyedia selular GSM, analog dan CDMA regional yang lebih kecil beroperasi di Indonesia.
Tabel berikut memuat rangkuman informasi pada 31 Desember 2007 mengenai tiga operator telepon selular GSM berlisensi terkemuka di tingkat nasional:

	Operator		
	Telkomsel	Indosat	Excelcomindo
Tanggal peluncuran	Mei 1995	Nopember 1994(2)	Oktober 1996
Bandwidth frekuensi berlisensi 2G (GSM 900 & 1800)	30 MHz	30 MHz	25 MHz
Bandwidth frekuensi berlisensi 3G (2,1 GHz)	5 MHz	5 MHz	5 MHz
Cakupan berlisensi	Nasional	Nasional	Nasional
Cakupan jaringan	Nasional	Informasi tidak tersedia	Informasi tidak tersedia
Pangsa pasar (per 31 Desember 2007)(1)	51,0%	26,0%	17,0%
Pelanggan (per 31 Desember 2007)(1)	47,9 juta	24,5 juta	15,5 juta

(1) Perkiraan, berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh TELKOM.
(2) Pada bulan Nopember 2003, Indosat dan Satelindo dimerger dan Indosat telah mengambil alih operasi selular Satelindo.

SLI

Pada 1 Agustus 2001, Pemerintah melalui Dirjenpostel mengumumkan terminasi dini hak eksklusivitas Indosat untuk SLI. Pengumuman tersebut menyatakan maksud dari Pemerintah agar TELKOM menerima lisensi komersial untuk menyediakan layanan SLI pada akhir tahun 2003. Meskipun TELKOM menerima lisensi komersial pada 13 Mei 2004, namun TELKOM telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk menyediakan layanan SLI sebelum menerima lisensi tersebut dan pada 7 Juni 2004, TELKOM mulai menawarkan layanan sambungan telepon tidak bergerak SLI kepada pelanggan. TELKOM telah meningkatkan *switching* tertentu agar memiliki kemampuan gerbang internasional di Batam, Jakarta dan Surabaya. Gerbang ini telah mendapat sertifikat operasi (sertifikat ULO) dari Dirjenpostel. Agar terhubung dengan operator luar negeri, TELKOM telah membangun dua sambungan gelombang mikro untuk menghubungkan Batam-Singapura dan Batam-Pangerang (Malaysia). Selain itu, TELKOM, SingTel Mobile dan CAT mengembangkan sistem kabel bawah laut TIS pada tahun 2003 yang menghubungkan Batam, Singapura dan Thailand. TELKOM juga menandatangani perjanjian dengan Telekom Malaysia Berhad untuk pembangunan dan pemeliharaan kabel optik bawah laut yang baru untuk menghubungkan Dumai (Indonesia) dengan Melaka (Malaysia) yang diselesaikan pada bulan Desember 2004. TELKOM juga memperluas kabel internasional dengan membeli sejumlah kapasitas bandwidth agar terhubung dengan Hong Kong dan TELKOM menggunakan kapasitas ini untuk terhubung ke negara lain, seperti Amerika Serikat. TELKOM juga menyelesaikan pengembangan ground segment untuk terhubung ke Satelit Intelsat pada bulan Desember 2004. Sebagai pemain baru di SLI, TELKOM bekerja sama dengan beberapa operator global untuk mendapatkan hubungan langsung atau tidak langsung agar dapat menjangkau seluruh tempat tujuan di luar negeri, persiapan ini memungkinkan TELKOM untuk mulai menawarkan kepada pelanggan layanan sambungan telepon tidak bergerak SLI pada 7 Juni 2004.

VoIP

TELKOM meluncurkan layanan VoIP pada bulan September 2002. VoIP menggunakan komunikasi data untuk mengalihkan trafik suara melalui internet, yang menghasilkan penghematan biaya yang sangat substansial kepada pelanggan. Selain TELKOM, Excelcomindo, Indosat, Atlasat, Gaharu dan PT Satria Widya Prima juga menyediakan layanan VoIP di Indonesia. Operator lain yang tidak berlisensi juga menyediakan layanan VoIP yang dapat diakses melalui internet, juga dari piranti lunak yang memungkinkan komunikasi suara dari PC-ke-PC dapat terwujud melalui internet. Operator VoIP yang menawarkan layanan internasional juga bersaing dengan operator SLI, seperti Indosat dan, mulai tanggal 7 Juni 2004, dengan TELKOM. Operator VoIP bersaing terutama atas dasar penetapan harga dan kualitas layanan. Operator VoIP tertentu mulai menawarkan layanan seperti budget call dan calling card prabayar, yang diperkirakan akan menghasilkan persaingan yang lebih ketat di antara para operator VoIP dan penyedia layanan SLI lain.

Satelit

Saat ini, persaingan di bisnis satelit Asia-Pasifik semakin intensif. Perusahaan-perusahaan di bisnis ini bersaing terutama dalam hal kekuatan jangkauan, penawaran produk dan harga. Industri satelit Indonesia tidak terlalu diatur dan dalam praktiknya beroperasi sesuai dengan kebijakan “open-sky”. Artinya operator satelit Indonesia harus bersaing dengan operator satelit asing.

Lain-lain

Dalam tiga tahun terakhir, persaingan yang berkenaan dengan bisnis multimedia, internet, dan layanan yang terkait dengan komunikasi data semakin ketat terutama sehubungan dengan dikeluarkannya lisensi

baru sebagai hasil dari deregulasi industri telekomunikasi Indonesia. TELKOM memperkirakan persaingan ini akan terus berlanjut dan semakin ketat. Penyedia layanan multimedia, internet dan layanan yang terkait dengan komunikasi data di Indonesia pada dasarnya bersaing dalam hal harga, rentang layanan yang disediakan, kualitas jaringan, jangkauan jaringan dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Lisensi

Undang-undang Telekomunikasi mensyaratkan operator jaringan telekomunikasi dan operator layanan telekomunikasi, termasuk TELKOM, untuk mendapatkan lisensi mengoperasikan jaringan telekomunikasi dan menyediakan layanan telekomunikasi.

Sambungan telepon tidak bergerak kabel dan sambungan telepon tidak bergerak nirkabel. TELKOM menyediakan layanan sambungan telepon tidak bergerak lokal dan SLJJ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25/1991 dan Peraturan Pemerintah No. 8/1993. Berdasarkan Keputusan Menhub No. KM 39/1993 mengenai operasi telekomunikasi dasar, TELKOM diijinkan mengadakan pola kerjasama operasi ("KSO") dengan mitra KSO yang ada untuk penyediaan layanan sambungan telepon tidak bergerak di wilayah masing-masing. Pemerintah telah mengubah lisensi sambungan telepon tidak bergerak TELKOM tertentu agar memenuhi Undang-undang Telekomunikasi, TELKOM menerima Lisensi Modern untuk menyediakan layanan sambungan telepon tidak bergerak, layanan SLJJ dan layanan SLI pada 13 Mei 2004. TELKOM menyediakan layanan sambungan telepon tidak bergerak nirkabel berdasarkan wewenang TELKOM untuk menyediakan layanan sambungan telepon tidak bergerak dan menerapkan tarif PSTN untuk layanan ini, yang secara substansial lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya untuk layanan selular. Kemampuan TELKOM untuk menyediakan layanan sambungan telepon tidak bergerak nirkabel dengan tarif PSTN dapat dipertanyakan oleh pihak regulator, operator selular lain dan asosiasi pedagang selular.

Selular. Telkomsel memiliki lisensi untuk mengoperasikan jaringan telepon selular GSM di tingkat nasional, menggunakan bandwidth frekuensi radio 7,5 MHz dalam band 900 MHz dan menggunakan bandwidth frekuensi radio 22,5 MHz dalam band 1800 MHz. Telkomsel juga memiliki lisensi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia yang mengijinkan Telkomsel untuk mengembangkan layanan selular dengan jangkauan nasional, termasuk perluasan kapasitas jaringannya. Selain itu, Telkomsel memiliki ijin dan lisensi dan registrasi pada pemerintah daerah tertentu dan/atau instansi pemerintah, terutama dalam hubungannya dengan operasinya di wilayah tersebut, properti yang dimiliki oleh pihaknya dan/atau pembangunan dan penggunaan *base transceiver station*.

Sistem Telekomunikasi Bergerak Generasi Ketiga (3G). Pada bulan Pebruari 2006, Pemerintah Indonesia melaksanakan tender untuk tiga lisensi spektrum frekuensi radio 2,1 GHz, masing-masing memiliki bandwidth 5 MHz, yang akan digunakan bersama lisensi baru untuk mengoperasikan jaringan telekomunikasi selular 3G di tingkat nasional di Indonesia. Penawar yang menang akan menjadi operator jaringan telekomunikasi selular 3G bersama dua pemegang lisensi yang ada (HCPT dan PT Lippo Telekom (Natrindo Telepon Selular)) yang telah menerima lisensi 3G melalui penawaran kompetitif pada tahun 2003. Pada 14 Pebruari 2006, berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 19/2006, lisensi 3G diberikan kepada Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo. Sebagai pemenang, kepada Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo diwajibkan membayar *upfront fee* hingga 200% dari harga penawaran, yang harus dibayar dalam waktu 30 hari kerja setelah penetapan. Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo juga harus membayar biaya penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan formula tertentu sesuai dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 (Lihat Catatan 50d (ii) pada laporan keuangan konsolidasian).

SLI. TELKOM menerima Lisensi Komersial untuk menyediakan layanan SLI pada 13 Mei 2004 berdasarkan Keputusan Menhub No. KP162/2004 sebagai bagian dari Lisensi Modern yang dimiliki TELKOM.

VoIP dan ISP. TELKOM menerima Lisensi Modern pada tanggal 29 Januari 2004 untuk menyediakan layanan VoIP dan ISP berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. SK02/DIRJEN/2004 yang juga mengijinkan TELKOM menyediakan layanan komunikasi data.

Penyedia akses jaringan. TELKOM memegang lisensi untuk menyediakan layanan koneksi internet yang dimulai pada 31 Juli 2006 berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 275/DIRJEN/2006

Tarif dan Biaya Interkoneksi

Pemerintah membagi tarif menjadi dua kategori:

- Tarif untuk penyediaan layanan telekomunikasi; dan
- Tarif untuk penyediaan jaringan telekomunikasi.

Secara umum, Menkominfo mengatur harga dan jumlah yang dapat dikenakan oleh TELKOM didasarkan atas formula tarif untuk layanan telekomunikasi di Indonesia. Operator telekomunikasi dapat menetapkan besaran tarif. Dalam hal ini, unit bisnis TELKOM berwenang melakukan penyesuaian terhadap harga berdasarkan panduan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi TELKOM.

Tarif Sambungan Telepon Tidak Bergerak Kabel.
Untuk informasi lebih rinci berkaitan dengan tarif sambungan telepon tidak bergerak kabel, lihat Catatan 48 laporan keuangan konsolidasian.

Daftar tarif adalah sebagai berikut:

Biaya Akses	Bisnis (Rp)	Residensial (Rp)	Sosial (Rp)
Instalasi	175.000–450.000	75.000–295.000	50.000–205.000
Abonemen	38.400–57.600	20.600–32.600	12.500–18.500

Biaya Penggunaan:
Lokal:

	Harga per Pulsa (Rp)	Durasi Pulsa
Sampai 20 km	250	3 menit (di luar jam sibuk) dan 2 menit (jam sibuk)
Lebih dari 20 km	250	2 menit (di luar jam sibuk) dan 1,5 menit (jam sibuk)

SLJJ:

	Harga Per Menit (Rp)	Pembulatan Waktu Durasi Blok
0-20 km	83 – 122	1 menit
20-30 km	122 – 163	1 menit
30-200 km	325 – 1.290	6 detik
200-500 km	460 – 1.815	6 detik
Lebih dari 500 km	570 – 2.270	6 detik

Tarif Telepon Tidak Bergerak Nirkabel Tarif yang dikenakan terhadap pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel CDMA dicatat sebagai pendapatan telepon tidak bergerak. TELKOM menawarkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel pasca-bayar dan prabayar.

a. **Pascabayar**. Pelanggan pascabayar membayar biaya aktivasi satu kali sebesar Rp 25.000 dan abonemen sebesar Rp 30.000. Biaya penggunaan untuk pelanggan pascabayar adalah sebagai berikut:

Biaya Penggunaan:

Lokal:

	Harga per Pulsa (Rp)	Durasi Pulsa
Flexi ke Flexi	49	1 menit
Flexi ke PSTN	150	1 menit

SLJJ:

	Harga per Menit		Pembulatan Waktu Durasi Blok
	Jam Sibuk (Rp)	Di luar jam sibuk (Rp)	
SLJJ			
Flexi ke Flexi	900	449	6 detik
Flexi ke PSTN			
Hari kerja (Senin – Sabtu) 0 – 200 km	900	449	6 detik
Lebih dari 200 km	1.500	449	6 detik
Hari libur 0 – 200 km	600	449	6 detik
Lebih dari 200 km	1.100	449	6 detik
Flexi ke telepon selular:			
Lokal	550	550	30 detik
SLJJ (hari kerja)			
30-200 km	1.600	800	30 detik
Lebih dari 200 km	2.500	1.250	30 detik
SLJJ (hari libur)	1.500	1.500	30 detik

Untuk SMS, pelanggan pascabayar dikenakan biaya Rp 75 per SMS untuk penggunaan dari Flexi ke Flexi, dan Rp 250 untuk penggunaan dari Flexi ke telepon tidak bergerak kabel (PSTN) dan ke operator telepon lain. Pelanggan pascabayar yang menggunakan akses internet TELKOM melalui *dial-up* telepon tidak bergerak nirkabel dikenakan biaya Rp 165 per menit. Pelanggan pascabayar yang menggunakan sambungan khusus berbasis-*Public Data Network* untuk akses internet dikenakan biaya Rp 3 per KBps.

b. **Prabayar.** Biaya penggunaan untuk pelanggan prabayar, termasuk PPN sebesar 10%, sebagai berikut:

Biaya Penggunaan:

	Harga per Menit (Rp)	Pembulatan Waktu Durasi Blok
Lokal :		
Flexi ke Flexi	49	60 detik
Flexi ke PSTN	250	60 detik
SLJJ :		
Flexi ke Flexi	900	30 detik
Flexi ke PSTN		
0 – 200 km	1.400 (jam sibuk), 900 (di luar jam sibuk)	30 detik
Lebih dari 200 km	2.400 (jam sibuk) , 900 (di luar jam sibuk)	30 detik
Flexi ke selular :		
Lokal	800	30 detik
SLJJ		
30-200 km	1.900 (jam sibuk)–1.200 (di luar jam sibuk)	30 detik
Lebih dari 200 km	3.300 (jam sibuk)–2.200 (di luar jam sibuk)	30 detik

Untuk SMS, pelanggan prabayar dikenakan biaya Rp 100 per SMS untuk penggunaan dari Flexi ke Flexi, dan Rp 350 per SMS untuk penggunaan dari Flexi ke operator telepon lain. Pelanggan prabayar yang menggunakan akses internet TELKOM melalui dial-up telepon tidak bergerak nirkabel dikenakan biaya sebesar Rp 350 per menit. Pelanggan prabayar yang menggunakan sambungan khusus berbasis-*Public Data Network* untuk akses internet dikenakan biaya Rp 5 per KBps.

Tarif SLI. TELKOM mulai menawarkan layanan sambungan telepon tidak bergerak SLI pada 7 Juni 2004. Tarif untuk panggilan SLI ditetapkan oleh penyedia layanan dengan ketentuan batas maksimum tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif terkini SLI TELKOM dapat dilihat pada tabel berikut.

Wilayah	Harga per Menit (Rp)	Pembulatan Waktu Durasi Blok
Afrika	5.090 – 6.440	6 detik
Amerika dan Karibia	5.090 – 7.470	6 detik
Asia dan Oseania	4.410 – 9.630	6 detik
Eropa	5.090 – 9.630	6 detik
Timur Tengah	5.090 – 8.460	6 detik

Tarif Selular

a. **Tarif Pascabayar.** Untuk informasi terkait tarif pascabayar telepon selular, lihat Catatan 48 laporan keuangan konsolidasian.

Biaya pemakaian yang dibebankan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:

	Harga per Menit (Rp)	Pembulatan Waktu Durasi Blok
Telepon selular ke telepon selular:		
Lokal	650 – 938	20 detik
SLJJ		
30-200 km	1.110 – 2.628	15 detik
Lebih dari 200 km	1.220 – 3.083	15 detik
Telepon selular ke PSTN:		
Lokal	450 – 531	20 detik
SLJJ		
30-200 km	650 – 1.696	15 detik
200-500 km	785 – 2.221	15 detik
Lebih dari 500 km	895 – 2.676	15 detik
SLI		
Grup I	3.675 – 5.880	15 detik
Grup II	4.237 – 6.780	15 detik
Grup III	4.687 – 7.500	15 detik
Grup IV	5.362 – 8.580	15 detik
Grup V	6.225 – 9.960	15 detik
Grup VI	7.050 – 11.280	15 detik
Grup VII	8.025 – 12.840	15 detik

b. **Tarif Prabayar.** Untuk layanan selular prabayar, biaya aktivasi dapat ditentukan dengan bebas oleh operator selular sementara biaya pemakaian dibatasi maksimum 140% di atas biaya pemakaian puncak untuk layanan pascabayar. Telkomsel membebankan biaya penggunaan kepada pelanggan prabayar (SimPATI / Kartu As) pada tabel berikut:

	Harga per Menit (Rp)			Pembulatan Waktu Durasi Blok		
	simPATI Ekstra	simPATI PeDe*	Kartu As	simPATI Ekstra	simPATI PeDe*	Kartu As
Panggilan sesama Telkomsel:						
Lokal	300 – 1.500	1.500	1.200	30 detik	per detik	per detik
SLJJ						
Zona 1	300 – 4.000	1.500	1.200	30 detik	per detik	per detik
Zona 2	300 – 4.500	1.500	1.200	30 detik	per detik	per detik
Panggilan ke selular lain:						
Lokal	1.300 – 1.600	1.500	2.400	30 detik	per detik	per detik
SLJJ						
Zona 1	3.500 – 4.000	3.600	2.400	30 detik	per detik	per detik
Zona 2	4.000 – 4.500	3.600	2.400	30 detik	per detik	per detik
Panggilan ke telepon tidak bergerak/telepon tidak bergerak nirkabel:						
Lokal	700 – 950	900	1.800	30 detik	per detik	per detik
SLJJ						
30-200 km	2.000 – 2.300	2.100	1.800	30 detik	per detik	per detik
200-500 km	3.200 – 3.720	2.100	1.800	30 detik	per detik	per detik
Lebih dari 500 km	3.600 – 4.150	2.100	1.800	30 detik	per detik	per detik
SLI:						
Grup I-III	7.500 – 8.000	7.500 – 8.000	8.000	15 detik	15 detik	15 detik
Grup IV-VII	11.000 – 12.000	11.000 – 12.000	12.000	15 detik	15 detik	15 detik

* pengguna simPATI PeDe dikenakan biaya Rp 25 per detik untuk satu menit pertama dan Rp 0,5 per detik setelah penggunaan satu menit ke seluruh pengguna Telkomsel

Tarif Sirkit Sewa. Pemerintah menentukan tarif maksimum untuk sirkit langganan. Pemerintah menurunkan tarif sirkit langganan secara substansial pada tahun 1997 dan 1998. Pada 1 Januari 1997, Pemerintah menurunkan tarif untuk sirkit langganan rata-rata sebesar 52%. Tarif sirkit langganan untuk operator telekomunikasi lain dan badan Pemerintah lebih lanjut diturunkan hingga 30% yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998. Pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya bermaksud beranjak ke struktur tarif berbasis formula untuk layanan sirkit langganan, namun Pemerintah belum mengumumkan usulan kerangka untuk formula tersebut.

Di bawah ini adalah tabel tarif sirkit sewa:

	Tarif (Rp)
Biaya Instalasi	
Akses pelanggan	1,500,000
Biaya Langganan Bulanan	
Sambungan digital	
Lokal (atau hingga 25 km)	750,000 – 115,000,000(1)
Inter-lokal (lebih dari 25 km)	14,550,000 – 1,528,100,000(2)

(1) Harga berbeda berdasarkan pengguna (swasta, operator telekomunikasi berlisensi lainnya, atau pemerintah) dan kecepatan.
(2) Harga berbeda berdasarkan pengguna (swasta, operator telekomunikasi berlisensi lainnya, atau pemerintah), kecepatan dan wilayah

Tarif VoIP. Biaya untuk layanan VoIP dapat ditentukan dengan bebas oleh operator VoIP berdasarkan beban biaya. TELKOM telah meluncurkan layanan VoIP, yang saat ini terdiri dari TELKOM Global-01017 dan TELKOMSave dengan tarif yang lebih murah.

Tarif Satelit. Tarif maksimum tahunan adalah US$ 1,20 juta per transponder, meskipun dalam beberapa hal TELKOM dapat menawarkan tarif dengan potongan harga untuk komitmen jangka panjang atau pelanggan yang setia

Tarif Akses Pita Lebar. Tabel berikut memuat tarif layanan akses pita lebar TELKOM:

Layanan Speedy	Biaya Aktivasi (Rp)	Biaya Bulanan (Rp)	Batas Pemakaian Bulanan	Biaya Kelebihan Pemakaian (Rp)
Limited Home	75.000	200.000	1,0 GB	500/MB
Limited Professional	75.000	400.000	3,0 GB	500/MB
Unlimited	75.000	750.000	Tak Terbatas	–
Unlimited Warnet	75.000	2.500.000	Tak Terbatas	–
Speedy Time Based	75.000	200.000	50 jam	25/menit

Tarif Wartel. Wartel adalah telepon umum yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Biaya untuk wartel dapat ditentukan dengan bebas oleh operator. TELKOM mendapatkan 70% dari tarif dasar yang dikenakan oleh operator wartel kepada pelanggannya pada panggilan domestik yang dilakukan dari wartel dan mendapatkan hingga 92% dari tarif dasar yang dikenakan operator wartel untuk panggilan internasional (SLI).

Tarif Layanan Lainnya. Besaran tarif untuk penyewaan satelit serta layanan teleponi dan multimedia lain ditentukan oleh penyedia layanan dengan mempertimbangkan pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menentukan formula tarif untuk layanan teleponi dasar, sementara tidak ada penetapan untuk tarif layanan lain.

Tarif Interkoneksi. Pemerintah menetapkan tarif interkoneksi dan akses, termasuk jumlah biaya interkoneksi yang diterima oleh masing-masing operator terkait dengan panggilan yang melalui beberapa jaringan. Untuk rincian mengenai tarif ini, lihat catatan 48c laporan keuangan konsolidasian.

TELKOM DAN KINERJA OPERASI 2007

Tinjauan Umum

Umum

TELKOM adalah penyedia utama layanan telekomunikasi sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia dan merupakan pemegang saham mayoritas Telkomsel, yang merupakan operator telepon selular terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pelanggan dan total pendapatan. TELKOM juga menyediakan beragam layanan telekomunikasi lainnya termasuk layanan interkoneksi, jaringan, data dan internet. TELKOM melaporkan pendapatan dalam kategori sebagai berikut:

- Telepon tidak bergerak (yang terdiri dari telepon tidak bergerak kabel dan tetap nirkabel);
- Selular;
- Kerja Sama Operasi (KSO);
- Interkoneksi;
- Jaringan;
- Data dan Internet;
- Pola Bagi-Hasil; dan
- Layanan lain (termasuk pendapatan dari layanan direktori telepon dan pengelolaan gedung).

Untuk pelaporan segmen usaha, TELKOM memiliki empat segmen: telepon tidak bergerak kabel, telepon tidak bergerak nirkabel, selular dan lain-lain. Segmen usaha telepon tidak bergerak kabel menyediakan layanan telepon lokal, SLJJ dan internasional dan layanan telekomunikasi lain (seperti sirkit langganan, teleks, transponder, satelit dan *Very Small Aperture Terminal*-VSAT) sebagai jasa pelengkapnya. Segmen telepon tidak bergerak nirkabel menyediakan layanan telepon berbasis CDMA di samping layanan telekomunikasi lain yang menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan mobilitas terbatas di dalam kode area setempat. Segmen selular menyediakan layanan telekomunikasi dasar, terutama layanan telekomunikasi telepon selular. Segmen operasi lainnya yang tidak mewakili lebih dari 10% dari pendapatan TELKOM disajikan sebagai "lain-lain". Segmen tersebut terdiri dari direktori telepon dan layanan pengelolaan gedung.

Pada tahun 2007, tidak ada satu pelanggan pun, selain pelanggan interkoneksi yang menyumbangkan lebih dari 1% dari jumlah pendapatan usaha. Untuk kegunaan perhitungan pendapatan usaha, TELKOM memperlakukan setiap badan usaha milik negara yang dimiliki oleh Pemerintah sebagai satu pelanggan. Bisnis TELKOM tidak mengalami suatu perubahan yang signifikan.

Layanan Telepon Tidak Bergerak

Layanan telepon tidak bergerak terutama terdiri dari lokal dan sambungan langsung jarak jauh. TELKOM adalah penyedia utama layanan sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia.

a. **Layanan Telepon Tidak Bergerak Kabel.** Pelanggan telepon tidak bergerak kabel membayar satu kali biaya pasang baru, biaya langganan bulanan dan biaya pemakaian untuk layanan lokal, sambungan langsung jarak jauh dan internasional. Selain itu, pelanggan diberi sejumlah fitur yang mempunyai nilai tambah, seperti pesan-suara (*voicemail*) dan layanan informasi, serta tagihan dan bantuan direktori.

b. **Layanan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel.** TELKOM menawarkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA dengan mobilitas terbatas (di dalam kode area setempat) dengan merek dagang "TELKOMFlexi" untuk pesawat telepon tidak bergerak dan genggam. Teknologi telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA memungkinkan dikembangkannya jaringan telepon dengan cepat dan mengurangi belanja modal per sambungan dengan mengurangi dan seringkali meniadakan kebutuhan jaringan kabel.

Pelanggan TELKOMFlexi dapat memilih layanan pascabayar atau prabayar. Pelanggan pascabayar membayar biaya aktivasi satu kali, biaya langganan bulanan dan biaya pemakaian untuk layanan lokal, sambungan langsung jarak jauh dan internasional. Biaya-biaya ini pada umumnya sama seperti yang dibayarkan oleh pelanggan sambungan telepon tidak bergerak.

TELKOM juga menyediakan sejumlah fitur nilai tambah kepada para pelanggan TELKOMFlexi seperti pesan singkat (SMS), protokol aplikasi nirkabel (WAP), sebuah portal web, nada dering, pesan suara dan layanan informasi seperti tagihan, bantuan direktori dan layanan pesan/konten lainnya. Pendapatan dari layanan-layanan ini dilaporkan sebagai "Layanan Internet dan Data". Pelanggan TELKOMFlexi pada umumnya mendapatkan layanan sejenis yang ditawarkan oleh layanan-layanan selular kecuali roaming ke kode area lokal lain dan internasional.
Pada bulan Januari 2007, TELKOM meluncurkan "FlexiMILIS", layanan baru yang memungkinkan pelanggan untuk mengirim SMS ke sekelompok pelanggan yang ditentukan. Layanan ini serupa dengan layanan mailing list.

Pada bulan Mei 2007, TELKOM mengeluarkan kartu isi ulang dengan nominal Rp 10.000 untuk setiap vouchernya. Seperti isi ulang elektronik bernilai sama yang diluncurkan lebih dahulu, kartu isi ulang ini mempunyai masa aktif 15 hari dan masa tenggang 30 hari.

Layanan Selular

TELKOM menyediakan layanan telepon selular melalui Telkomsel yang 65% sahamnya dimiliki oleh TELKOM. Pada tahun 2007, pelanggan selular Telkomsel (prabayar dan pascabayar) meningkat 35% dari 35,6 juta pada akhir tahun 2006 menjadi 47,9 juta pada akhir 2007. Berdasarkan data yang Telkomsel kumpulkan dari berbagai sumber,Telkomsel memperkirakan pangsa pasarnya di Indonesia sebesar 51% pada 31 Desember 2007, yang pada tanggal 31 Desember 2006 diperkirakan sebesar 56%.

Telkomsel menyediakan layanan selular GSM di Indonesia melalui jaringan sendiri dan dalam lingkup internasional melalui jaringan yang dioperasikan oleh 288 mitra roaming internasional di 155 negara pada akhir tahun 2007. Pada 31 Desember 2007, Telkomsel memiliki jaringan terbesar dibandingkan dengan operator-operator selular lainnya di Indonesia, yang menjangkau hingga lebih dari 95% dari total populasi Indonesia, termasuk seluruh kota/kabupaten di Indonesia dan seluruh kecamatan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatera.

Telkomsel menyediakan pilihan layanan prabayar dengan merek dagang "SimPATI" dan "Kartu As" serta layanan pascabayar dengan merek dagang "KartuHALO" kepada pelanggannya.

Telkomsel menawarkan pilihan paket-paket perdana kepada para pelanggan prabayarnya. Untuk pelanggan simPATI, pada bulan Pebruari 2007 telah diluncurkan paket perdana "simPATI Ekstra" seharga Rp 10.000, berisi kartu SIM simPATI dan voucher senilai Rp 5.000 ditambah Rp 5.000 untuk panggilan ke sesama pelanggan Telkomsel dan bonus Rp 10.000 setelah isi ulang pertama. Para pelanggan simPATI Ekstra mendapatkan beberapa keuntungan, misalnya potongan tarif suara dan SMS di luar jam sibuk dan tarif tetap untuk panggilan tak terbatas sepanjang hari ke sesama pelanggan Telkomsel. Selain itu, "simPATI Freetalk and SMS" menawarkan tiga menit panggilan

gratis ke pelanggan Telkomsel di luar jam sibuk untuk setiap tiga menit panggilan pada jam sibuk, serta enam SMS gratis ke pelanggan Telkomsel di luar jam sibuk untuk setiap enam SMS yang terkirim pada jam sibuk.

Pada Desember 2007, Telkomsel meluncurkan edisi baru simPATI dengan nama "simPATI PeDe". Nilai voucher paket perdana simPATI PeDe sama dengan simPATI Ekstra, tetapi simPATI PeDe menggunakan hitungan detik. Pelanggan dikenakan tarif Rp 25 per detik pada menit pertama, tarif pada menit berikutnya adalah Rp 0,5 per detik untuk panggilan ke sesama pelanggan Telkomsel. Pelanggan simPATI dapat bertukar pilihan antara simPATI Ekstra dan simPATI PeDe.

Untuk pelanggan Kartu As, paket perdana seharga Rp 10.000 berisi satu kartu SIM dan voucher senilai Rp 10.000. Paket perdana "SLANK" seharga Rp 15.000 berisi satu kartu SIM dan voucher senilai Rp 15.000.

Para pelanggan simPATI dapat membeli voucher prabayar seharga Rp 5.000 sampai dengan Rp 1 juta untuk meningkatkan nilai kartu SIM mereka. Sementara pelanggan Kartu As dapat membeli voucher mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 100.000. Pelanggan prabayar dapat menambah jumlah pulsa secara elektronik atau dengan voucher isi ulang. Pada saat pengisian voucher isi ulang, pelanggan menghubungi nomor telepon yang diotomatisasi dan memasukkan kode 14 angka yang tercetak pada voucher untuk mengaktifkan atau menambahkan jumlah pulsa sesuai dengan nilai voucher yang dibeli. Paket perdana dan voucher isi ulang Kartu As dan SimPATI dapat dibeli di setiap pusat layanan dan outlet distribusi Telkomsel. Isi ulang elektronik juga dapat dibeli di anjungan tunai mandiri (ATM), melalui telephone banking atau internet, dan M-KIOS yang memungkinkan pelanggan prabayar mengisi ulang dengan telepon genggam sebagai media transaksi melalui sarana yang aman. Pelanggan juga dapat membayar layanan isi ulang otomatis melalui kartu kredit VISA dan Master. Pelanggan prabayar dapat memilih pengisian ulang pulsa secara otomatis melalui salah satu cara sebagai berikut: (i) bilamana sisa saldo prabayar berada di bawah Rp 10.000; (ii) jumlah tetap tiap bulan; atau (iii) atas permintaan melalui SMS. Voucher isi ulang yang dibeli oleh pelanggan prabayar biasanya memiliki masa berlaku yang telah ditentukan.

Apabila seseorang telah memenuhi persyaratan kesanggupan tertentu, pelanggan simPATI dapat mengajukan permintaan untuk pindah layanan pascabayar KartuHALO Telkomsel setiap saat tanpa harus mengganti nomor telepon.

Pada bulan Maret 2007 Telkomsel meluncurkan HALOhybrid, satu produk pasca bayar yang menyediakan layanan pasca dan prabayar dalam satu kartu SIM. Pelanggan HALOhybrid mendapatkan keuntungan berupa fleksibilitas penggunaan bulanan (Rp 100.000 - Rp 3.000.000), tarif fleksibel, dapat diisi ulang (pada saat pelanggan mencapai batas penggunaan), SMS gratis, dan pengawasan penggunaan.

Pada bulan September 2006, Telkomsel meluncurkan layanan 3G di Jakarta untuk para pelanggan pascabayar dan prabayar. Sampai dengan 31 Desember 2007, layanan 3G Telkomsel tersedia di 81 kota. Layanan ini memberikan beragam fitur bagi para pelanggan Telkomsel (3,3 juta lebih di antaranya pengguna jaringan 3G) termasuk *video calls, mobile television, mobile download* dan akses data berkecepatan tinggi. Telkomsel terus memperluas dan mengoptimalkan jaringan 3G serta melakukan beragam promosi dan kampanye edukatif untuk layanan-layanan 3G-nya. Selain itu, Telkomsel memelihara teknologi lanjut untuk transmisi data yang disebut "EDGE" (*Enhanced Data rates for GSM Evolution*) yang menawarkan kecepatan transmisi data tingkat lanjut untuk pesawat telepon genggam yang dilengkapi peralatan EDGE. Sejak diperkenalkan pada tahun 2004, layanan EDGE tersedia di Jakarta, Surabaya, Batam, Semarang, dan Bali. Perkembangan EDGE lebih lanjut dihentikan pada tahun 2006.

Telkomsel juga menawarkan layanan yang memiliki nilai tambah bagi pengguna selular seperti "Telkomsel Flash" (sebuah layanan akses internet berkecepatan tinggi), "Telkomsel Pelindung Dataku" (*back-up*/cadangan di udara untuk daftar kontak, SMS dan kalender dalam telepon genggam), "Telkomsel You've Got Mail" (layanan *push-email*), *video conference call*, "Telkomsel My Pulau" (layanan *blogging* bergerak yang dapat diakses melalui telepon selular dan situs internet) dan "Telkomsel Cash (T-Cash)" (layanan *mobile wallet* yang dapat membantu pengguna melakukan transaksi mikro seperti membeli barang, isi ulang kartu prabayar, tiket bis atau kereta). Pendapatan dari layanan-layanan tersebut dikategorikan sebagai "Layanan-layanan Internet dan Data).

Tabel berikut menyajikan jumlah pelanggan Telkomsel pada periode yang disebutkan:

	Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember,		
	2005	2006	2007[1]
Pelanggan Selular			
kartuHALO (Pascabayar)	1.470.755	1.661.925	1.913.130
simPATI (Prabayar)	16.004.631	21.377.995	23.985.823
Kartu As (Prabayar)	6.793.967	12.557.251	21.991.186
Deaktivasi/pemutusan[2]			
kartuHALO (Pascabayar)	372.921	376.748	355.839
simPATI (Prabayar)	15.836.633	27.256.632	36.417.396
Kartu As (Prabayar)	12.105.848	17.724.133	26.906.156
Rata-rata tingkat pemutusan bulanan[3]			
kartuHALO (Pascabayar)	2,1%	2,0%	1,7%
simPATI (Prabayar)	8,2%	11,9%	13,8%
Kartu As (Prabayar)	14,9%	16,8%	12,8%
ARPU(4)			
kartuHALO (Pascabayar) (Rp '000)	291	274	264
simPATI (Prabayar) (Rp '000)	84	83	84
Kartu As (Prabayar) (Rp '000)	45	54	57

(1) Pada tahun 2007, pelanggan prabayar dapat membeli kartu SIM seharga Rp 10.000 dan voucher isi ulang seharga Rp 5.000 sampai Rp 1.000.000.

(2) Termasuk deaktivasi/pemutusan sukarela atau terpaksa.

(3) Rata-rata pemutusan bulanan selama setahun dihitung dengan cara menambahkan tingkat pemutusan tiap bulan dalam satu tahun, kemudian dibagi 12. Tingkat pemutusan bulanan dihitung dengan cara membagi jumlah pemutusan selama sebulan dengan jumlah pelanggan pada awal bulan.

(4) Average Revenue per User (rata-rata pendapatan per pengguna) dihitung dengan menjumlahkan ARPU tiap bulan dalam setahun dan dibagi 12. ARPU dihitung dengan cara membagi total pendapatan selular baik prabayar maupun pascabayar (kecuali fee koneksi, pendapatan interkoneksi, pendapatan roaming internasional dari non-pelanggan dan potongan dealer) tiap bulan dengan rata-rata jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar pada bulan bersangkutan.

Kerja Sama Operasi (KSO)

Sejak akuisisi mitra KSO terakhir, KSO VII, pada bulan Oktober 2006, TELKOM menghentikan kerja sama operasi. Lihat Catatan 3 dari laporan konsolidasi keuangan untuk rincian lebih lanjut tentang akuisisi dan konsolidasi dari operasi.

Layanan Interkoneksi

TELKOM menerima pendapatan dari operator telekomunikasi lain yang menyediakan layanan telepon tidak bergerak, selular, sambungan langsung jarak jauh, internasional dan layanan lain yang berinterkoneksi dengan jaringan TELKOM.

Pada bulan Desember 2006, sebagai hasil dari pelaksanaan pola interkoneksi berbasis-biaya, yang diundangkan pada 8 Pebruari 2006, TELKOM melakukan perubahan pada seluruh perjanjian interkoneksinya dengan para operator jaringan domestik lainnya untuk menyesuaikan sehingga sesuai dengan pola interkoneksi berbasis biaya. Perubahan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Pada bulan Desember 2007, TELKOM dan seluruh operator jaringan menandatangani kesepakatan-kesepakatan interkoneksi baru yang mengganti seluruh perjanjian interkoneksi antara TELKOM dengan operator jaringan lain, termasuk amendemennya yang ditandatangani pada bulan Desember 2006. Kesepakatan-kesepakatan baru ini menekankan persyaratan DPI TELKOM. Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur penyesuaian-penyesuaian tarif mengacu pada tarif interkoneksi berbasis biaya yang diperkenalkan pada 1 Januari 2007. Berdasarkan regulasi itu, TELKOM dan Telkomsel bersama 10 penyedia layanan telekomunikasi lainnya di Indonesia wajib menyesuaikan tarif interkoneksi sesuai skema baru paling lambat 1 April 2008.

Volume interkoneksi TELKOM berdasarkan periode, sebagai berikut:

	Akhir Tahun 31 Desember,				
	2003	2004	2005	2006	2007
	(juta menit)				
Interkoneksi Telepon Selular[1]					
Menit masuk yang dibayar	3.463,7	4.235,1	4.863,6	5.162,2	4.970,0
Menit keluar yang dibayar	4.872,1	6.448,0	7.514,9	7.704,2	7.251,8
Interkoneksi Sambungan Tidak Bergerak[2]					
Menit masuk yang dibayar	130,1	136,7	612,3	864,9	923,5
Menit keluar yang dibayar	30,9	51,1	493,5	965,2	1.437,1
Interkoneksi Telepon Satelit					
Menit masuk yang dibayar	16,1	14,7	10,7	9,3	5,1
Menit keluar yang dibayar	7,5	8,2	6,5	4,5	2,3
Interkoneksi Internasional[3]					
Menit masuk yang dibayar	444,1	427,6	596,4	861,9	1.208,5
Menit keluar yang dibayar	149,7	158,1	185,5	177,6	162,9
Total					
Total menit masuk yang dibayar	4.054,0	4.814,1	6.083,0	6.898,3	7.107,2
Menit keluar yang dibayar	5.060,2	6.665,4	8.200,4	8.851,5	8.854,1

(1) Termasuk interkoneksi dengan Telkomsel.

(2) Menit interkoneksi telepon tidak bergerak mencerminkan interkoneksi dengan jaringan PT Bakrie Telecom (semula PT Radio Telepon Indonesia atau Ratelindo), PT Batam Bintan Telekomunikasi, dan mulai 2004, Indosat.

(3) Menit interkoneksi internasional didapat dari interkoneksi dengan jaringan internasional Indosat dan, mulai tahun 2004, panggilan masuk dan keluar juga menggunakan TIC-007.

	Akhir tahun Desember 31,				
	2003	2004	2005	2006	2007
	(juta menit)				
Menit masuk terbayar	2.011,8	2.354,1	2.709,1	2.914	2.663,2
Menit keluar terbayar	2.610,3	3.422,1	4.251,5	4.546	4.188,0

Layanan Jaringan

TELKOM menyediakan sewa transponder satelit, siaran satelit, VSAT, distribusi audio, sirkit langganan berbasis satelit dan sirkit langganan berbasis teresterial. Pelanggan untuk layanan jaringan TELKOM mencakup para pelaku bisnis dan operator telekomunikasi lain. Pelanggan dapat mengadakan perjanjian untuk layanan singkat seperti siaran beberapa menit atau perjanjian untuk jangka waktu yang lama untuk periode layanan satu sampai lima tahun.

Layanan Data dan Internet

TELKOM menyediakan SMS untuk telepon tidak bergerak, telepon tidak bergerak nirkabel dan telepon selular, akses *internet dial-up* dan pita lebar, layanan jaringan data (termasuk VPN *frame relay* dan IP VPN), layanan VoIP untuk panggilan internasional, sambungan ISDN dan layanan multimedia lainnya.

TELKOMNet Instan, suatu layanan premium akses internet dial-up tersedia di semua kota di Indonesia. Tahun 2007, sebanyak 661.661 pelanggan telepon mengakses TELKOMNet Instan, sebuah penurunan sebesar 2,7% dibanding tahun sebelumnya. Pelanggan TELKOM menggunakan TELKOMNet Instan selama 3,7 miliar menit.

TELKOM juga menyediakan layanan internet pita lebar yang dioperasikan pada kabel tembaga yang telah ada dan menggunakan teknologi ADSL. Pada tanggal 31 Desember 2007, sekitar 240.765 pelanggan TELKOM mengakses internet pita lebar, terjadi peningkatan 158% dari tahun sebelumnya.

TELKOM menawarkan layanan VoIP internasional premium bernama “TELKOMGlobal-01017 (yang semula bernama TELKOMGlobal-017), dan layanan panggilan internasional standar bernama “TELKOMSave”. Layanan-layanan VoIP TELKOM memungkinkan para pelanggan melakukan akses secara global. TELKOM melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan delapan carrier global yang terdiri dari empat carrier untuk panggilan keluar, satu untuk panggilan ke dalam, dan tiga untuk panggilan keluar dan kedalam. Semua carrier global itu adalah para *wholeseller* yang memperbolehkan TELKOM mengakses jaringan internasional mereka. VoIP adalah layanan telepon murah untuk melakukan panggilan internasional yang dapat diakses dengan memutar satu awalan khusus untuk panggilan internasional.

Pada tahun 2007, terpakai sejumlah 205,1 juta menit panggilan keluar (menggunakan TELKOMSave dan TELKOMGlobal-01017) dan VoIP panggilan ke dalam (dari para mitra global TELKOM), terjadi penurunan dari 70,8 juta menit, atau 25,7% dari tahun sebelumnya. Panggilan ke dalam menurun 45,5% dari 232,3 juta menit pada tahun 2006 menjadi 126,7 juta menit pada tahun 2007. Namun demikian, panggilan VoIP keluar meningkat 79,4% dari 43,7 juta menit pada tahun 2006 menjadi 78,4 juta menit pada tahun 2007. Pendapatan VoIP TELKOM (masuk dan keluar) menurun sebesar Rp 79,7 miliar atau 28,7% pada tahun 2007 akibat penurunan trafik panggilan keluar VoIP internasional sebesar 105,6%.

Informasi tentang layanan-layanan VoIP TELKOM dijelaskan pada tabel berikut:

Jenis	TELKOMGlobal-01017	TELKOMSave
Dial	Satu tahap	Dua tahap
Kualitas/Teknologi	VoIP Premium	VoIP Standard

Pola Bagi Hasil (PBH)

TELKOM memasuki kesepakatan terpisah dengan beberapa penanam modal berdasarkan pola bagi hasil untuk mengembangkan telepon tidak bergerak, telepon umum kartu

sekaligus pemeliharaannya dan fasilitas-fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Rincian lebih lanjut tentang PBH, lihat Catatan 47 dari laporan keuangan konsolidasi.

Layanan Lain

TELKOM juga menyediakan beragam layanan seperti:

- Layanan buku petunjuk telepon, melalui anak perusahaan, Infomedia; dan
- Televisi kabel dan berlangganan serta layanan terkait (terdapat 67.175 pelanggan sampai dengan 31 Desember 2007), melalui anak perusahaan, Indonusa.

Infrastruktur Jaringan

Jaringan Telepon Tidak Bergerak dan Backbone

a. Jaringan telepon tidak bergerak kabel

Jaringan telepon tidak bergerak kabel TELKOM terdiri dari susunan sentral telepon mulai dari sentral telepon lokal sampai sentral jarak jauh. Tiap sentral telepon lokal dihubungkan dengan perangkat pelanggan melalui perangkat dan fasilitas yang dinamakan *outside plant*. *Outside plant* mencakup sambungan kabel (serat optik dan tembaga) dan penghubung-penghubung transmisi lokal nirkabel, serta fasilitas-fasilitas distribusi yang menyatukan mereka. Semua fasilitas *switching* di sentral telepon lokal dan jarak jauh telah *digital*. Peningkatan-peningkatan substansial ini akan meningkatkan efisiensi jaringan, kinerja dan fleksibilitas *routing* panggilan.

TELKOM memiliki 8,7 juta sambungan telepon tidak bergerak kabel yang masih berfungsi di semua divisi sampai dengan 31 Desember 2007.

	Selama dan pada akhir tahun 31 Desember,				
Statistik Operasi	**2003[1]**	**2004[2]**	**2005[2]**	**2006[3]**	**2007[3]**
Kapasitas sentral					
Divisi-divisi Non-KSO	7.810.766	8.786.887	9.138.167	10.439.658	10.732.304
Divisi-divisi KSO[8]	1.608.455	954.465	1.045.366	–	–
Total	**9.419.221**	**9.741.352**	**10.183.533**	**10.439.658**	**10.732.304**
Sambungan terpasang					
Divisi-divisi Non-KSO	7.235.035	8.264.999	8.497.255	9.634.910	9.704.576
Divisi-divisi KSO[8]	1.548.070	931.999	998.901	–	–
Total	**8.783.105**	**9.196.998**	**9.496.156**	**9.634.910**	**9.704.576**
Sambungan terpakai[4]					
Divisi-divisi Non-KSO	6.792.300	7.714.977	7.787.693	8.709.211	8.684.888
Divisi-divisi KSO[8]	1.422.028	844.373	898.438	–	–
Total	**8.214.328**	**8.559.350**	**8.686.131**	**8.709.211**	**8.684.888**
Sambungan berbayar					
Divisi-divisi Non-KSO	6.441.973	7.323.304	7.413.769	8.328.179	8.324.197
Divisi-divisi KSO[8]	1.365.114	816.208	869.631	–	–
Total	**7.807.087**	**8.139.512**	**8.283.400**	**8.328.179**	**8.324.197**
Telepon umum					
Divisi-divisi Non-KSO	350.327	391.673	373.924	381.032	360.691
Divisi-divisi KSO[8]	56.914	28.165	28.807	–	–
Total	**407.241**	**419.838**	**402.731**	**381.032**	**360.691**
Sambungan sirkit sewa terpakai					
Divisi-divisi Non-KSO[5]	8.213	8.887	11.333	7.476	6.338
Divisi-divisi KSO[8]	1.162	382	575	–	–
Total	**9.375**	**9.269**	**11.908**	**7.476**	**6.388**
Produksi pulsa telepon tidak bergerak kabel[6] (juta)					
Divisi-divisi Non-KSO	50.848	58.314	57.926	64.012	75.451
Divisi-divisi KSO	11.413	6.838	9.743	–	–
Total	**62.261**	**65.152**	**67.669**	**64.012**	**75.451**
Tingkat kegagalan[7]					
Divisi-divisi Non-KSO	4,4	3,4	3,8	3,6	3,8
Divisi-divisi KSO[8]	3,5	1,9	2,0	–	–
Gabungan	**4,1**	**3,2**	**3,6**	**3,6**	**3,8**

(1) Tahun 2003, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, V dan VI, sedangkan Divisi KSO adalah Divisi IV and VII.

(2) Tahun 2004 dan 2005, Divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V dan VI, sedangkan Divisi KSO adalah Divisi VII.

(3) Tahun 2006 dan 2007, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V, VI dan VII.

(4) Sambungan yang berfungsi terdiri dari sambungan pelanggan dan sambungan telepon umum, juga termasuk sejumlah sambungan yang kami fungsikan untuk pola bagi hasil. Sambungan untuk pola bagi hasil mencapai 511.108, 396.926, 201.485, 166.142 dan 162.052 hingga 31 Desember 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007, secara berurutan.

(5) Kecuali sirkit sewa untuk jaringan dan bisnis multimedia TELKOM.

(6) Terdiri dari pulsa panggilan lokal and SLJJ, kecuali telepon umum koin dan telepon selular bergerak.

(7) Kegagalan per 100 kali sambung setiap bulan.

(8) Divisi yang tergolong KSO berbeda dari tahun ke tahun karena akuisisi di tahun tertentu. Lihat catatan kaki (1) to (3) di atas.

Tabel berikut menunjukkan statistik yang berkaitan dengan jaringan telepon tidak bergerak sampai dengan 31 Desember 2007:

	Divisi I (Sumatra)	Divisi II (Jakarta)	Divisi III (Jawa Barat dan Banten)	Divisi IV (Jawa Tengah)	Divisi V (Jawa Timur)	Divisi VI (Kalimantan)	Divisi VII (Indonesia Timur)	Total
Kapasitas sentral lokal	3.524.041	7.439.808	2.919.460	1.817.533	4.639.638	1.466.128	1.757.537	23.564.145
Total sambungan terpakai	2.204.151	4.100.258	1.244.192	1.535.555	3.553.412	828.546	1.581.618	15.047.732
Kapasitas penggunaan(%)(1)	62,5%	55,1%	42,6%	84,5%	76,6%	56,5%	90,0%	63,9%
Sambungan terpasang(2)	3.028.824	5.377.317	2.076.745	1.742.624	4.045.001	1.093.830	1.724.159	19.088.500
Tingkat utilisasi (%)(1)	72,8%	76,3%	59,9%	88,1%	87,8%	75,7%	91,7%	78,8%
Karyawan(3)	2.752	5.030	1.312	1.519	1.911	712	2.144	15.380
Populasi (juta)(4)	56,8	31,7	27,8	48,3	40,1	15,0	34,7	254,3
Tingkat penetrasi TELKOM (%)(5)	3,9	13,0	4,5	3,2	8,9	5,5	4,6	5,9

(1) Penggunaan kapasitas (sambungan terpakai/kapasitas sentral) dan tingkat penggunaan (sambungan terpakai/sambungan terpasang) terdiri dari sambungan telepon tidak bergerak kabel dan nirkabel. Tingka-tannnya dapat mencapai 100% karena kapasitas sentral telepon tidak bergerak nirkabel (MSC and BTS) dihitung dengan asumsi bahwa alokasi trafik percakapan per pelanggan mencapai 60 mE (mill Erlang).

(2) Total mencakup 701.911 BTS kapasitas sambungan telepon tidak bergerak dalam skema PBH.

(3) Tidak gerak nirkabel, multimedia dan konstruksi.

(4) Sumber: jumlah indeks dari Badan Pusat Statistik Indonesia (angka perkiraan).

(5) Penetrasi TELKOM berdasarkan perkiraan populasi

.

b. Jaringan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel. Jaringan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM terdiri dari susunan sentral telepon yang berasal dari *Mobile Switching Center* (MSC) dan koneksi dengan setiap sentral jarak jauh lainnya.Setiap MSC dihubungkan dengan *Base Station Sub System* (BSS) yang terdiri dari *Base Station Controller* (BSC) dan *Base Transceiver Station* (BTS), yang menghubungkan perangkat di pihak pelanggan (perangkat telepon genggam dan terminal telepon tidak bergerak nirkabel) ke jaringan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM.

Jumlah sambungan aktif telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM bertambah dari 4,2 juta pada 31 Desember 2006 menjadi 6,4 juta sampai dengan 31 Desember 2007.

Tabel berikut menunjukkan statistik jaringan telepon tidak bergerak nirkabel sejak 2003:

	Hingga akhir tahun 31 Desember				
	2003(1)	2004(2)	2005(2)	2006(3)	2007(3)
Kapasitas sentral (MSC)(7)					
Divisi-divisi Non-KSO	666.050	1.952.644	2.687.348	6.655.891	12.831.841
Divisi-divisi KSO Divisions(6)	61.550	179.700	329.708	-	-
Total	727.600	2.132.344	3.017.056	6.655.891	12.831.841
Sambungan terpasang (BTS)(7)					
Divisi-divisi Non-KSO	659.497	2.291.212	3.332.893	7.698.039	9.383.924
Divisi-divisi KSO(6)	116.150	179.717	340.568	-	-
Total	775.647	2.470.929	3.673.461	7.698.039	9.383.924
Sambungan terpakai(4)					
Divisi-divisi Non-KSO	237.749	1.317.673	3.750.821	4.175.853	6.362.844
Divisi-divisi KSO(6)	27.038	111.695	311.046	-	-
Total	264.787	1.429.368	4.061.867	4.175.853	6.362.844
Sambungan berbayar					
Divisi-divisi Non-KSO	237.200	1.313.978	3.739.095	4.163.284	6.335.452
Divisi-divisi KSO(6)	27.038	111.695	311.046	-	-
Total	264.238	1.425.673	4.050.141	4.163.284	6.335.452
Telepon umum					
Divisi-divisi Non-KSO	549	3.695	11.726	12.569	27.392
Divisi-divisi KSO(6)	-	-	-	-	-
Total	549	3.695	11.726	12,569	27.392
Produksi pulsa telepon tidak bergerak nirkabel/produksi menit(5)(8) (juta)					
Divisi-divisi Non-KSO	214	989	3.254	5.512	9.144
Divisi-divisi KSO(6)	4	125	299	-	-
Total	218	1.114	3.553	5.512	9.144

(1) Tahun 2003, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, V dan VI, sedangkan Divisi KSO adalah Divisi IV and VII.

(2) Tahun 2004 dan 2005, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V dan VI, sementara Divisi KSO adalah Divisi VII.

(3) Tahun 2006 dan 2007, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V, VI dan VII.

(4) Sambungan yang berfungsi terdiri dari sambungan pelanggan dan telepon umum, termasuk sambungan yang kami operasikan untuk pola bagi hasil. Sambungan untuk bagi hasil mencapai jumlah 130.947, 113.048, dan 230.121 sampai dengan 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, secara berurutan.

(5) Pemakaian telepon tidak bergerak nirkabel diukur berdasarkan pulsa pelanggan sebelum 2004, dan berdasarkan menit mulai 2004 karena ada pemasangan peralatan baru. Karena itu, penggunaan telepon tidak bergerak nirkabel mulai 2004 dan sebelum 2004 tidak dapat diperbandingkan.

(6) Divisi-divisi yang tergolong KSO beragam dari tahun ke tahun akibat akuisisi KSO pada tahun-tahun tertentu. Lihat catatan kaki (1) to (3) di atas.

(7) Sebelum tahun 2006, kapasitas BTS dan MSC dihitung berdasarkan asumsi alokasi trafik percakapan per pelanggan sebesar 60 mE (mili Erlang). Namun, rata-rata trafik per pelanggan pada tahun 2005 hanya berkisar antara 18 sampai 30 mE. Karena itu, kapasitas BTS dan MSC pada 2006 dan 2007 dihitung dengan asumsi trafik percakapan per pelanggan sebesar 30 mE.

(8) bergerak.

TELKOM menawarkan "TELKOMFlexi", layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA dengan mobilitas terbatas. Sampai 31 Desember 2007, sambungan aktif TELKOMFlexi berjumlah 6,4 juta sambungan.

c. *Backbone*. *Backbone* jaringan telekomunikasi TELKOM terdiri dari transmisi, sentral (*switch*) jarak jauh dan *core routers* yang menghubungkan beberapa simpul-simpul akses jaringan. Sambungan-sambungan transmisi antara simpul-simpul dan fasilitas *switching* mencakup gelombang mikro, kabel bawah laut, satelit, serat optik dan teknologi transmisi lainnya.

Tabel berikut menyajikan kapasitas transmisi *backbone* TELKOM sampai 31 Desember 2007:

	Kapasitas	
	Jumlah sirkit medium transmisi	Persentase
Kabel serat optik	24.913	76,1%
Gelombang mikro	4.924	15,0%
Kabel bawah laut	2.341	7,2%
Satelit	563	1,7%
Total	32.741	100,0%

Jaringan Selular

Telkomsel memiliki cakupan jaringan terbesar dibandingkan operator selular mana pun di Indonesia. Saat ini Telkomsel mengoperasikan GSM/DCS, GPRS, EDGE dan jaringan selular 3G. Jaringan GSM/DCS terdiri dari gelombang 7.5 MHz pada frekuensi 900 MHz dan gelombang 22.5 MHz pada frekuensi 1800 MHz. Kedua jaringan beroperasi sebagai sebuah jaringan dual band yang terintegrasi. Jaringan 3G Telkomsel menggunakan satu lebar gelombang 5 MHz pada frekuensi 2,1 GHz.

Hingga 31 Desember 2007, jaringan *digital* Telkomsel telah memiliki 20.858 BTS, 100 cellular *switching* center dan 537 BSC, dengan kapasitas keseluruhan jaringan mampu mendukung 50,51 juta pelanggan.

Jaringan Data dan Internet

TELKOM mulai mengoperasikan layanan jaringan data pada tahun 1997 serta terus mengembangkan dan memperluas jaringannya secara progresif. Sampai dengan 31 Desember 2007, jaringan berbasis-IP TELKOM mencakup 310 lokasi dengan 372 simpul *router* dalam lingkup nasional. Kami akan terus meningkatkan kecepatan dan kualitas jaringan berbasis-IP. Jaringan berbasis-IP berfungsi sebagai jaringan penghantar yang digunakan untuk VPN berkualitas tinggi, VoIP, layanan internet *dial-up* dan layanan internet pita lebar. TELKOM memiliki server dengan akses jarak jauh (*remote access server*) di 103 lokasi dengan 137 simpul dalam lingkup nasional yang digunakan sebagai layanan internet *dial-up* "TELKOMNet Instan" dan layanan internet *dial-up* korporasi.

Sejak tahun 2004, TELKOM telah menyediakan layanan akses pita lebar berbasis telepon tidak bergerak kabel dengan merek dagang "Speedy" yang menggunakan teknologi DSL. Sampai dengan 31 Desember 2007, terdapat lebih dari 240.765 pelanggan di Divisi I sampai VII. Pelanggan Speedy biasanya adalah pengguna dial-up rumahan dengan penggunaan bulanan mencapai lebih dari Rp 250.000, perusahaan skala kecil - menengah, agen perjalanan, warung internet dan sekolah-sekolah.

Jaringan Internasional

TELKOM menawarkan layanan sambungan langsung internasional (SLI) tidak bergerak dengan nama "TIC-007". Untuk mengarahkan SLI outgoing dan incoming, TELKOM memiliki tiga *gateway* internasional: di Batam, Jakarta dan Surabaya. Saat ini TELKOM belum ada rencana untuk mengembangkan *gateway* baru.

Untuk memfasilitasi interkoneksi panggilan internasional, TELKOM membuat kesepakatan layanan telekomunikasi internasional dengan operator telekomunikasi di beberapa negara. Sebagai tambahan, karena TELKOM tidak mempunyai kesepakatan dengan operator telekomunikasi di setiap negara tujuan SLI, TELKOM membuat kesepakatan dengan SingTel Mobile, Telekom Malaysia, MCI, dan entitas lainnya untuk bertindak sebagai pusat untuk mengarahkan panggilan internasional ke tujuannya. Pada tanggal 31 Desember 2007, TELKOM membuat kesepakatan layanan telekomunikasi internasional dengan 26 operator internasional di 16 negara, dibandingkan dengan 21 operator internasional di 16 negara pada 31 Desember 2007. TELKOM merencanakan untuk membuat kesepakatan layanan telekomunikasi internasional tambahan dengan operator telekomunikasi untuk interkoneksi langsung, terutama operator di 20 tujuan teratas untuk trafik tujuan SLI TELKOM.

Infrastruktur Jaringan Lainnya

Kami mengoperasikan satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 beserta 270 stasiun bumi, termasuk satu sistem kendali satelit. Satelit TELKOM-1 mempunyai 36 transponder, termasuk 12 transponder *extended* C-band dan 24 transponder C-band standar, sedangkan satelit TELKOM-2 memiliki 24 transponder C-band standar. TELKOM menggunakan kedua satelit itu untuk hal-hal berikut:

- *Backbone* jaringan transmisi;
- Layanan telekomunikasi pedesaan;
- Kapasitas transmisi cadangan untuk jaringan telekomunikasi nasional;
- Penyiaran satelit, VSAT dan layanan-layanan multimedia;
- Penyewaan kapasitas transponder satelit;
- Sirkit sewa berbasis satelit; dan
- *Teleport* (layanan *uplinking* dan *downlinking* stasiun bumi ke dan dari satelit-satelit lain).

Pengembangan Jaringan

Pengembangan Jaringan Telepon Tidak Bergerak

a. Pada tahun 2007, kami terus membangun dan memperluas infrastruktur jaringan telepon tidak bergerak kabel. Kami telah memulai pengembangan infrastruktur NGN berdasarkan roadmap dari rencana induk INSYNC 2014, yang mencakup pengembangan:
   - Perluasan kapasitas infrastruktur *backbone* bawah laut Jawa-Sumatra-Kalimantan (Jasuka);
   - Perluasan kapasitas *backbone* Jawa;
   - Sambungan regional serat optik di Sumatera, Jawa dan Kalimantan;
   - Proyek IP DSLAM yang menawarkan akses pita lebar kepada semua pengguna di Indonesia;
   - Perluasan kapasitas sentral telepon lokal;
   - Jaringan akses kabel di Divisi I sampai VI;

- Perluasan jaringan berbasis IP; dan
- Pembangunan jaringan-jaringan Ethernet Metro di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.

Untuk lebih mengembangkan layanan-layanan komunikasi, kami berencana:

- melanjutkan penggelaran unit-unit sambungan tambahan;
- melanjutkan implementasi *next generation network* melalui penggelaran dan perluasan sistem switch, IP transport, jaringan ethernet metro, serta akses pita lebar dan jaringan transmisi;
- terus memperbaiki kualitas jaringan melalui peningkatan-peningkatan jaringan akses kabel tembaga, jaringan transmisi sistem cincin dan sistem redundan untuk semua perangkat, termasuk batere dan *rectifier*; dan
- melanjutkan integrasi jaringan dan memperbaiki kualitas melalui sistem pendukung operasi nasional.

b. **Pengembangan Jaringan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel**
Pada tahun 2006, TELKOM melakukan perjanjian dengan PT Samsung Telecommunication Indonesia untuk pengadaan layanan dan peralatan CDMA 2000-1X di Divisi V; suatu kesepakatan bersama konsorsium Samsung untuk pengadaan dan pemasangan peralatan bagi perluasan NSS, BSS dan proyek sistem PDN FWA CDMA di Divisi Regional V (Jawa Timur); kesepakatan dengan konsorsium Huawei untuk perluasan FWA CDMA di Divisi Ihingga IV; dan suatu kesepakatan dengan konsorsium ZTE untuk perluasan FWA CDMA di Divisi VI. Pada tahun 2007, TELKOM bersepakat dengan konsorsium Samsung untuk penggelaran FWA CDMA NSS, BSS dan proyek sistem PDN di Divisi Regional VII Bali dan Nusa Tenggara dan dengan konsorsium ZTE untuk penggelaran NSS, BSS FWA CDMA dan proyek sistem PDN di Divisi Regional VII Sulawesi, Maluku dan Papua. Kami pun terus mengembangkan kapasitas di Divisi Regional I, II, III, IV, V dan VI. Pada tahun 2007, kami menyelesaikan migrasi jaringan FWA CDMA TELKOMFlexi dari frekuensi 1900 MHz ke 800 MHz di Divisi Regional II (Jakarta) dan Divisi Regional III (Jawa Barat dan Banten).

Pengembangan Jaringan Selular

Cakupan GSM Telkomsel menyebar ke semua kota/kabupaten di Indonesia. Pada tahun 2007, Telkomsel telah menambah, selain perangkat lain, 4.801 BTS (termasuk 998 simpul untuk layanan 3G) dan 37.399 sentral pemancar dan penerima, dan memperluas jaringan selularnya untuk menjangkau semua kecamatan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Telkomsel berencana melanjutkan pemasangan BTS tambahan untuk memperluas jangkauannya hingga ke kecamatan-kecamatan di Kalimantan, Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas di wilayah padat penduduk, mengembangkan jaringan 3G, terus mengembangkan *backbone* transmisi serat optik di kota-kota besar Jawa, memasang sel-sel mikro tambahan dan sentral-sentral pemancar dan penerima, terutama di wilayah provinsi, terus memperbaiki kualitas cakupannya, meningkatkan peralatan *switching* untuk meningkatkan kapasitas jaringan, dan untuk meluaskan jaringan pintarnya yang dipakai dalam koneksi dengan produk-produk prabayarnya.

Pengembangan Jaringan Data

Pada tahun 2007, kami terus memperbaiki kualitas jaringan data dengan menambah kapasitas dan cakupan. Penggelaran baru meliputi perluasan IP *core* yang ada dengan tambahan empat *node* tambahan gerbang Internet, tambahan 12 *node IP transit router* untuk layanan transit bagi ISP lokal dan pelanggan korporat, dan kami berencana menerapkan 150 simpul jaringan *ethernet metro*.

Pada tahun 2007, kami juga memperbaiki kualitas dan cakupan jaringan akses Internet pita lebar dengan melanjutkan perluasan jaringan akses pita lebar DSL secara nasional. Kami terus memperbaiki program peningkatan kualitas jaringan akses pita lebar untuk memodernisasi jaringan akses pita lebar dan memperbaiki kualitas jaringan akses. Pada tahun 2007, jumlah jaringan akses kabel yang dapat mendukung layanan-layanan DSL adalah 2,4 juta unit sambungan.

Strategi Perusahaan

TELKOM berupaya menjadi perusahaan penyedia jaringan dan layanan telekomunikasi lengkap yang terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan komunikasi. Visi TELKOM adalah menjadi perusahaan *InfoComm* terkemuka di kawasan regional, dengan misi menyediakan layanan *InfoComm* terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif dan menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

TELKOM meyakini pasar telekomunikasi di Indonesia masih belum dibangun secara maksimal dengan tingkat penetrasi yang masih rendah untuk sambungan telepon tidak bergerak namun tingkat moderat untuk sambungan telepon selular bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kami yakin bahwa permintaan yang besar akan layanan telekomunikasi telah mengakibatkan pertumbuhan bisnis sambungan telepon tidak bergerak dan layanan telepon tidak bergerak nirkabel pada tahun-tahun terakhir dan akan terus menawarkan peluang pertumbuhan yang menguntungkan di masa mendatang. Kami berharap bahwa layanan sambungan telepon tidak bergerak maupun layanan telepon tidak bergerak nirkabel akan terus memberi kontribusi pada mayoritas substansial pendapatan usaha dalam waktu dekat. Kami telah mengembangkan strategi yang luas untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, meraih pelanggan baru dan merebut kembali pelanggan yang telah pindah kepada pesaing serta terus melakukan penetrasi pasar melalui *customer relationship management* (antara lain membangun Divisi Enterprise dan tim *account management*/AM), *product leadership* dan diversifikasi produk, penetapan harga yang kompetitif dan kanal distribusi satu pintu (*one-gate distribution channel*).

Unsur-unsur utama strategi TELKOM adalah:

a. Memperkuat dan Mengoptimalkan Bisnis Telepon Tidak Bergerak Kabel

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat penetrasi sambungan telepon tidak bergerak kabel terendah di Asia Tenggara. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, mayoritas sambungan layanan berada di daerah kota besar utama: Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan Denpasar.

TELKOM bermaksud memperkuat bisnis telepon tidak bergerak kabel dengan cara:

- meningkatkan tingkat penetrasi sambungan telepon tidak bergerak dengan lebih cepat dan dengan belanja modal yang lebih rendah per sambungan melalui penggunaan teknologi telepon tidak bergerak nirkabel secara pesat;
- meningkatkan penggunaan TELKOMFlexi dan layanan bernilai-tambah pada produk telepon tidak bergerak kabel;
- memperkuat bisnis interkoneksi melalui pembangunan pusat layanan yang dikhususkan untuk operator telekomunikasi dan pelanggan interkoneksi lainnya, membuka lebih banyak gerbang ke operator telekomunikasi lain, menawarkan harga yang lebih menarik dan menyediakan layanan *billing* yang lebih baik;
- memperkuat Plasa TELKOM sebagai titik penjualan untuk layanan TELKOM;

- mengembangkan dan memperluas bisnis Sambungan Langsung Internasional; dan
- meningkatkan jaringan akses telepon tidak bergerak kabel untuk menyediakan kemampuan pita lebar.

b. Memperkuat Jaringan Backbone

Untuk menyediakan layanan dengan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan, kami bermaksud untuk terus meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas jaringan backbone antara lain dengan menggunakan jaringan optik untuk infrastruktur transmisi *backbone* kecepatan tinggi seperti *backbone* optik Jawa, Trans Borneo dan Trans Sulawesi, konfigurasi ring di *backbone* bawah laut Jawa-Sumatera-Kalimantan, Jasuka dan *backbone* bawah laut Surabaya-Ujung Pandang-Banjarmasin.
Selain itu, untuk pengembangan infrastruktur, kami tengah menerapkan teknologi *Next Generation Network* (*platform* berbasis IP) di dalam TELKOMGroup untuk dapat memberikan berbagai layanan.

c. Mempertahankan Keunggulan Telkomsel di Industri Selular

Kami memandang bisnis selular memberikan peluang terbesar bagi pertumbuhan pendapatan. Kami menyediakan layanan selular melalui Telkomsel, pemimpin pasar dalam bisnis selular di Indonesia. Berdasarkan data statistik industri pada 31 Desember 2007, Telkomsel diperkirakan memiliki pangsa pasar sekitar 51% dari pasar selular secara keseluruhan yang mempertahankan posisinya sebagai operator berlisensi selular GSM tingkat nasional terbesar di Indonesia. Kami bermaksud mengembangkan lebih lanjut bisnis Telkomsel antara lain dengan menawarkan tarif yang kompetitif dan melakukan promosi, layanan nilai tambah untuk produk dan layanan, dan mengembangkan kapasitas dan jangkauan jaringan Telkomsel. Kami meyakini bahwa 35% saham SingTel Mobile di Telkomsel dapat memperbesar kemampuan Telkomsel untuk mengakses perkembangan teknologi dan pemasaran SingTel Mobile dalam bisnis selular dan meningkatkan peluang kerjasama di antara Telkomsel dan SingTel Mobile dalam mengembangkan produk baru, sehingga memperkuat dan membuat posisi Telkomsel lebih baik lagi dalam menghadapi persaingan dari operator telepon selular lain.

Unsur-unsur utama dalam strategi bisnis Telkomsel terdiri dari:
- memanfaatkan sinergi jaringan, operasional dan pemasaran dengan TELKOM dan berbagi praktik terbaik dan know how dengan SingTel Mobile;
- memperbesar kapasitas dan memperluas jangkauan pada tingkat kualitas yang telah ditentukan untuk menangani pertumbuhan pelanggan;
- mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan terus menerus menyelaraskan karakteristik dan fitur penawaran layanan Telkomsel dengan berkembangnya kebutuhan pelanggan, meningkatkan produk dan portofolio layanan (termasuk layanan GPRS dan 3G), memperluas kapasitas jaringan dan memperbaiki kualitas layanan;
- memastikan bahwa Telkomsel memiliki infrastruktur IT yang dapat memenuhi visi dan misi, dengan fokus khusus pada bidang-bidang seperti penagihan, penyampaian layanan dan layanan kepada pelanggan; dan
- mencapai tingkat layanan setara dengan penyedia layanan mobile kelas dunia melalui *call center footprint* dan sasaran berorientasi layanan.

d. Mengembangkan Bisnis Telepon Tidak Bergerak Nirkabel

Kami menawarkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis CDMA dengan mobilitas terbatas dengan merek dagang "TELKOMFlexi". TELKOM berencana untuk terus memperluas jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA di seluruh divisi regional dengan membangun jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA. Dibandingkan dengan jaringan telepon tidak bergerak, jaringan berbasis-CDMA pada umumnya lebih cepat dan lebih mudah dibangun dan memberikan fleksibilitas serta mobilitas yang lebih besar kepada pelanggan. TELKOM yakin bahwa pembangunan jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA dan bisnis TELKOMFlexi akan memberikan keunggulan kompetitif kepada TELKOM dalam menghadapi liberalisasi dan meningkatkan persaingan di pasar sambungan telepon tidak bergerak.
Kami juga mengembangkan program pemakaian bersama infrastruktur (*sharing joint infrastructure program*) antara TELKOMFlexi dan Telkomsel untuk mempercepat pembangunan jaringan telepon tidak bergerak nirkabel dan memberikan lebih banyak nilai bagi TELKOMGroup.

e. Mengembangkan Bisnis Data dan Internet

Kami bermaksud menumbuhkan bisnis data dan internet dengan, antara lain:
- meningkatkan investasi di infrastruktur pita lebar TELKOM (seperti DSL dan satelit);
- fokus pada upaya mempertahankan dan meraih pelanggan yang memiliki tuntutan tinggi atas layanan data dengan menawarkan harga yang kompetitif untuk layanan data dan internet kecepatan tinggi (termasuk layanan bernilai-tambah) dan full VPN IP, dan memperluas *backbone* TELKOM serta teknologi akses jaringan;
- memberikan kepada pelanggan pilihan akses internet yang lebih luas seperti melalui teknologi *hotspot* nirkabel dan bundling layanan akses internet dengan produk TELKOMFlexi dan produk Telkomsel;
- mengembangkan dan menawarkan layanan bernilai-tambah dan produk baru, seperti layanan korporasi terintegrasi untuk bank dan pelanggan korporasi lainnya;
- memperluas jangkauan layanan internasional data dan internet TELKOM dengan mengadakan perjanjian dengan operator dan *wholesaler* global; and
- memperluas jangkauan dan kualitas *internet protocol backbone* untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas data dan internet.

f. Mengurangi Biaya Modal

Kami mengakui bahwa semakin kompetitifnya pasar telekomunikasi Indonesia, mengharuskan kami mengembangkan kapasitas jaringan tambahan, meningkatkan efisiensi operasi dan mendiversifikasi sumber pembiayaan. Arus kas yang dihasilkan oleh TELKOM dari bisnis serta pinjaman langsung dari bank dan pihak pemberi pinjaman lain mungkin tidak memadai dalam mendanai rencana untuk menumbuhkan bisnis. Oleh karena itu, sejak akhir tahun 2002, TELKOM telah berupaya melaksanakan pola "*pay as you grow*" untuk penambahan kapasitas jaringannya untuk:
- berbagi risiko investasi dengan para pemasok;
- mengurangi basis aktiva dan menggunakan jasa pihak ketiga untuk bisnis yang bukan bisnis inti; dan
- mengurangi risiko pembiayaan, operasional, pemasaran, teknis dan kapasitas.

Skema "*pay as you grow*" mencakup ketentuan yang di dalamnya TELKOM dan pemasok perangkat sepakat bahwa persentase tertentu dari biaya kontrak akan dibayar di muka (misalnya 25%) dan sisanya akan dibayar setelah sambungan aktif. TELKOM dan para pemasok juga sepakat untuk bekerja sama merencanakan dan merancang jaringan, kebutuhan kapasitas akses dan menentukan jadwal pengadaan. Pola "*pay as you grow*" memungkinkan TELKOM membayar kepada pemasok peralatan berdasarkan pencapaian jumlah pelanggan

tertentu di daerah / fasilitas terkait atau dalam waktu satu tahun sejak tanggal penyelesaian mana yang lebih dahulu. Hanya sedikit pemasok peralatan yang diundang untuk turut serta dalam program "*pay as you grow*" dan telah memenuhi sebagian besar kebutuhan infrastruktur dan perangkat lain TELKOM.

g. Meningkatkan Sinergi TELKOM dan Telkomsel

Kami berupaya meningkatkan sinergi dengan Telkomsel dan meningkatkan fasilitas dan informasi, memadukan sumber daya dan meningkatkan koordinasi. Sumber daya ini mencakup jaringan, pemasaran, dukungan infrastruktur (seperti teknologi informasi, logistik, pengembangan sumber daya manusia dan pengadaan) serta produk dan layanan (seperti pengembangan produk baru, pengemasan/bundling layanan dan interkoneksi). Contoh khususnya mencakup:

- berbagi fasilitas produksi seperti lokasi, menara BTS, peralatan mekanik dan elektrikal secara agresif untuk mengembangkan jangkauan TELKOMFlexi;
- memanfaatkan basis pelanggan gabungan TELKOMGroup untuk saling memberikan produk yang relevan satu kepada lainnya (seperti menawarkan layanan TELKOMSLI 007 kepada pelanggan Telkomsel dengan keuntungan khusus dan kampanye promosi bersama);
- meningkatkan kualitas TELKOMSLI 007 untuk pengguna telepon selular baik pelanggan Telkomsel maupun pengguna *roaming* internasional dengan menyediakan tambahan sambungan *signaling* langsung ke mitra *roaming* internasional Telkomsel.
- Menyediakan skema harga interkoneksi untuk TELKOMSLI 007 dan VoIP 01017 yang menguntungkan TELKOM dan Telkomsel. Dengan memanfaatkan skema ini, Telkomsel dapat menawarkan kepada pelanggan berbagai layanan SLI dan VoIP dengan harga terjangkau yang akan meningkatkan trafik TELKOMSLI dan VoIP.
- kegiatan promosi dan pemasaran bersama untuk kondisi tertentu yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat tambahan bagi TELKOMGroup;
- memanfaatkan sambungan distribusi yang tersedia untuk memperbaiki layanan dan kegiatan penjualan kepada pelanggan (seperti petugas *customer service officer* bersama); dan
- berbagi fasilitas lainnya seperti fasilitas pelatihan, fasilitas penelitian dan pengembangan.

h. Mengembangkan Industri Terkait

TELKOM mencari peluang-peluang untuk mendapatkan sumber pendapatan baru dengan mengembangkan industri terkait, misalnya layanan dan media hiburan berbasis TI. Pengembangan ini juga menawarkan peluang pertumbuhan baru yang signifikan, meningkatkan kemampuan dari bisnis utama TELKOM.

Layanan kepada Pelanggan

TELKOM

TELKOM menyediakan layanan kepada pelanggan melalui:

- *Walk-in customer service points.* Plasa TELKOM menyediakan kenyamanan dan akses yang lengkap kepada pelanggan TELKOM yang mencakup permintaan informasi mengenai produk, layanan dan keluhan, aktivasi layanan, penagihan kepada pelanggan, pembayaran, penangguhan akun, fitur layanan dan promosi pemasaran. Sampai dengan 31 Desember 2007, kami memiliki 861 *customer service point*. Selain itu kami memiliki 11 Plasa TELKOM yang digunakan bersama dengan GraPARI, pusat layanan pelanggan Telkomsel. Sementara Telkomel memiliki 44 GraPARI yang digunakan bersama dengan Plasa TELKOM. Sejak bulan Juni 2006, kami memperluas layanannya di *customer service point* sehingga mencakup layanan pembayaran elektronik melalui *Electronic Data Capture* yang menggunakan terminal di kurang lebih 101 Plasa TELKOM.
- *Call centers* dan internet. TELKOM mengoperasikan *call center* di banyak kota di Indonesia, pelanggan menggunakan / menghubungi nomor panggil "147" untuk berbicara langsung dengan operator layanan kepada pelanggan yang telah dilatih menangani permintaan dan keluhan pelanggan serta untuk memberikan informasi terkini mengenai hal-hal seperti tagihan, promosi dan fitur layanan. Pelanggan korporasi di lokasi tertentu diberi nomor bebas pulsa tambahan "08001TELKOM" ("0800183556"). Pelanggan juga mendapat akses ke directory services dengan dipungut biaya. Kami mempromosikan penggunaan *call center*, SMS dan internet pada *walk-in customer service point* untuk pelanggan ritel.
- Layanan *Enterprise* dan tim AM. Untuk fokus pada pelanggan korporasi yang memberi kontribusi antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta pada pendapatan bulanan TELKOM, terutama perusahaan dengan operasi nasional, kami telah mengembangkan Divisi Enterprise di Jakarta pada bulan Agustus 2004, yang berupaya mengembangkan bisnisnya dalam segmen pasar ini. Kami menyediakan kepada pelanggan korporasi tim AM, yang masing-masing terdiri dari *account manager* yang didukung oleh personil dari unit operasional yang bersangkutan, untuk memberikan *point of contact* tersendiri untuk seluruh kebutuhan komunikasi pelanggan, termasuk solusi komunikasi terpadu. Sejak bulan Agustus 2004, TELKOM juga telah membagi layanan korporasi dan tim AM menjadi enam segmen, yaitu: (i) keuangan dan perbankan, (ii) Pemerintah, tentara & polisi, (iii) manufaktur, (iv) pertambangan & konstruksi, (v) kawasan industri & perdagangan dan (vi) perdagangan & pelayanan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ini, divisi korporasi bekerja memadukan berbagai penawaran produk dan layanan dalam upaya menghasilkan solusi total telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi suara, layanan multimedia dan layanan otomatisasi kantor dan pemantauan serta kontrol jaringan tertentu. Kami juga telah menetapkan AM team serupa di tingkat regional untuk fokus pada korporasi yang beroperasi di wilayah tertentu di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2007, Divisi Enterprise Service Center TELKOM memiliki 637 account manager tingkat nasional dan regional yang mencakup Divisi I sampai VII.
- *Carrier and Interconnection Service* dan tim AM. TELKOM memiliki layanan kepada pelanggan untuk operator telekomunikasi berlisensi lainnya melalui tim AM di Divisi Carrier and Interconnection Service yang terdiri dari 50 AM yang kelompok pelanggan sesuai lisensi yang mereka miliki.
- Program Jaminan Tingkat Layanan. Kami memiliki program jaminan tingkat layanan untuk pelanggan sambungan telepon tidak bergerak sejak bulan Juni 2002 dan telah menerapkan program jaminan tingkat layanan untuk TELKOMFlexi dan Speedy sejak bulan Agustus 2006. Program jaminan tingkat layanan memberikan jaminan tingkat layanan pada tingkat minimum tertentu terkait dengan, antara lain, pemasangan sambungan baru, pemulihan sambungan yang terputus dan keluhan tagihan, dan memberikan kompensasi non-tunai, seperti langganan gratis untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan kepada pelanggan apabila tingkat layanan minimum tersebut tidak terpenuhi.

Telkomsel

Telkomsel menyediakan pelayanan untuk pelanggan melalui:

- Pusat layanan pelanggan GraPARI: Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Telkomsel memiliki 68 pusat layanan pelanggan GraPARI ("Pusat GraPARI"). Pusat GraPARI Telkomsel menyediakan akses yang nyaman dan lengkap untuk layanan

pelanggan Telkomsel. Pusat GraPARI menangani informasi produk dan layanan, permintaan dan keluhan serta umumnya terfokus pada aktivasi layanan, tagihan , pembayaran, penangguhan akun, fitur layanan, jangkauan jaringan, SLI, informasi roaming dan promosi pemasaran.

- Outlet layanan gerai HALO: outlet layanan gerai HALO adalah gerai layanan yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sampai dengan 31 Desember 2007, Telkomsel memiliki 242 outlet layanan Gerai HALO
- Caroline: "Caroline" atau *Customer Care on-Line*, adalah layanan telepon bebas-pulsa 24 jam. Pelanggan Telkomsel dapat berbicara langsung dengan operator layanan yang terlatih untuk menangani permintaan dan keluhan pelanggan dan memberikan informasi terkini mengenai hal-hal seperti tagihan, pembayaran, promosi dan fitur layanan.
- Anita: "Anita", atau Aneka Informasi dan Tagihan, adalah layanan SMS yang tersedia hanya untuk pelanggan KartuHALO Telkomsel. Pelanggan dapat menggunakan sambungan telepon Anita untuk mendapatkan informasi mengenai tagihan selain informasi mengenai penggunaan melalui SMS.

Penjualan, Pemasaran, dan Distribusi

TELKOM

Kami mendistribusikan dan menjual produk dan layanan utamanya, termasuk layanan telepon tidak bergerak nirkabel, tetapi tidak termasuk layanan telepon selular, melalui sambungan distribusi utama berikut ini:

- *Walk-in customer service points*. Pelanggan memiliki akses ke produk dan layanan tertentu dalam *walk-in customer service point* ini.
- *Tim account management*. *Tim account management* mempromosikan produk dan layanan TELKOM dengan cara yang terpadu untuk pelanggan bisnis dan operator telekomunikasi berlisensi lainnya.
- Warung telekomunikasi umum. Kami telah mendirikan warung telekomunikasi umum ("wartel") di seluruh Indonesia bersama dengan pelaku bisnis skala-kecil. Pelanggan dapat mengakses layanan telekomunikasi dasar, termasuk telepon lokal, SLJJ dan internasional, mengirim faksimile, mengakses internet dan membeli kartu telepon serta paket perdana dan *voucher* TELKOMFlexi. Kami secara umum memberikan potongan harga kepada wartel tersebut sebesar 30% dibandingkan dengan tarif telepon pelanggan. Wartel beroperasi secara non-eksklusif dan juga dapat menyediakan produk dan layanan operator lain.
- Dealer resmi dan gerai ritel. Tersebar di seluruh Indonesia dan terutama menjual kartu telepon dan langganan, paket perdana dan *voucher* TELKOMFlexi. Dealer independen dan gerai ritel membayar untuk seluruh produk yang mereka terima dengan potongan harga, beroperasi secara non-eksklusif dan juga dapat menjual produk dan layanan operator lain.
- Situs web. Melalui situs web TELKOM, pelanggan dapat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan utama dari TELKOM dan mendapatkan akses ke produk multimedia.
- Telepon Umum. Pelanggan dapat melakukan panggilan lokal telepon umum.

Program komunikasi pemasaran TELKOM mencakup penggunaan iklan cetak dan televisi, layanan untuk pelanggan dan personil distribusi, infrastruktur dan kampanye promosi khusus untuk memperkuat merek dagang, meningkatkan profil dan mendidik masyarakat umum mengenai TELKOM dan produk serta layanannya. TELKOM terus mengembangkan program komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seluruh bisnis utamanya, karena TELKOM tengah berupaya mengembangkan diri menjadi penyedia telekomunikasi dengan layanan lengkap.

Telkomsel

Telkomsel menjual layanan selular melalui sambungan distribusi utama berikut ini:

(i) pusat GraPARI;
(ii) outlet layanan Gerai HALO;
(iii) jaringan dealer resmi yang terutama menjual kartu SIM prabayar dan *voucher*;
(iv) gerai bersama dengan Plasa TELKOM dan PT Pos Indonesia; dan
(v) gerai lainnya seperti bank dan toko foto.

Dealer mandiri dan gerai lain membayar untuk seluruh produk yang mereka terima seperti paket perdana dan *voucher* prabayar dengan potongan harga. Dealer mandiri menjual layanan selular Telkomsel secara non-eksklusif dan juga dapat menjual produk dan layanan operator selular lain.

Telkomsel memasarkan produk dan layanan KartuHALO kepada kelompok sasaran tertentu, yang terpusat pada pengguna akhir korporasi, dan HALOkeluarga, produk dan layanan untuk kaum profesional yang cenderung menghasilkan tingkat penggunaan yang lebih tinggi dan, dengan demikian akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Telkomsel telah membentuk tim akun korporasi khusus untuk memasarkan layanannya kepada pelanggan korporasi skala-besar dan untuk mengelola hubungan berkelanjutan dengan klien. Produk dan layanan prabayar ditargetkan pada basis pelanggan yang jauh lebih luas.

Telkomsel memasang iklan melalui berbagai media untuk *branding* dan promosi strategis. Selain itu, Telkomsel menerapkan metode pemasaran seperti sisipan tagihan dan tayangan *point-of-sale* untuk menargetkan program, *event* dan promosi pada segmen pasar tertentu. Strategi pemasaran Telkomsel mencakup analisis pasar yang berkelanjutan untuk lebih memahami pelanggan yang menjadi sasaran dan untuk menghimpun umpan-balik mengenai preferensi pelanggan. Telkomsel juga melaksanakan analisis dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperkenalkan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah ada dan untuk menarik pelanggan baru.

Tagihan, Pembayaran dan Penagihan

Pelanggan kami ditagih secara bulanan. Pelanggan ditagih sesuai dengan divisi regional tempat mereka berada, meskipun mereka dapat meminta tagihan gabungan dari beberapa wilayah regional. Proses penagihan terkomputerisasi di setiap wilayah. Pembayaran dapat dilakukan di wilayah terkait, melalui ATM yang telah ditetapkan, di kantor pos dan bank yang bertindak sebagai agen penagih dan di daerah tertentu dengan setoran langsung melalui transfer dari telepon atau melalui debet otomatis, melalui bank dan internet banking. Namun, untuk pembayaran yang lewat tempo tiga bulan atau lebih, pelanggan diharuskan melakukan pembayaran hanya di *customer service point* TELKOM. Apabila pembayaran tidak diterima pada saat tanggal jatuh tempo tagihan, maka pelanggan akan diberi peringatan melalui panggilan telepon otomatis dan surat peringatan, serta diterapkannya biaya keterlambatan dan tingkat pemblokiran pada panggilan. Layanan akan diputus apabila tidak ada pembayaran yang diterima setelah dua bulan sejak tanggal jatuh tempo, walaupun kami tidak melakukan pemutusan layanan terhadap pelanggan pemerintah. Setelah layanan diputus, maka pelanggan dapat memperoleh kembali layanannya setelah melakukan seluruh pembayaran yang tertunggak, termasuk pembayaran biaya keterlambatan dan dengan melengkapi permohonan baru.

TELKOM saat ini menyediakan layanan tagihan untuk Indosat dalam hubungannya dengan layanan SLI Indosat dengan pembebanan biaya tetap untuk setiap tagihannya.

Manajemen Piutang Pelanggan

TELKOM

TELKOM tidak menerima deposit dari pelanggan. Kecuali untuk pelanggan Pemerintah, polisi dan militer, pelanggan yang menunggak terkena biaya keterlambatan, dikenakan pemblokiran panggilan dan pada akhirnya, pemutusan layanan setelah kurang lebih tiga bulan menunggak. Karena tagihan bulanan untuk rata-rata pelanggan tidak signifikan dan pelanggan diharuskan membayar biaya pemasangan kembali, pembayaran lewat tempo dan semua biaya keterlambatan sewaktu pelanggan bermaksud berlangganan kembali, maka hanya ada insentif yang sedikit bagi pelanggan untuk tidak membayar tagihan yang terhutang. Selain itu, kami menyaring calon pelanggan untuk sambungan telepon tidak bergerak dengan jalan mengkaji kartu identitas dan laporan tagihan listrik dan dengan mengunjungi tempat kediaman calon pelanggan tersebut. Dengan demikian, kami yakin bahwa tertagihnya piutang dapat dipastikan.

Dalam hal pelanggan ritel pribadi, umumnya kami menyisihkan 100% piutang pelanggan apabila piutang telah berumur lebih dari tiga bulan. Dalam hal pelanggan non ritel yang melebihi jumlah tagihan tertentu, kami mengevaluasi tingkat keberhasilan penagihan secara individual, kecuali untuk Pemerintah. Untuk instansi pemerintah, polisi dan militer, kami umumnya menyisihkan 25% dari jumlah tagihan yang telah berumur antara 7 sampai 12 bulan, 50% dari jumlah tagihan antara yang telah berumur 13 dan 24 bulan dan 100% dari jumlah tagihan yang telah berumur lebih dari 24 bulan. Kami tidak membebankan biaya atau bunga keterlambatan atas akun yang lewat tempo untuk pelanggan Pemerintahan.

Telkomsel

Telkomsel menagih pelanggan pascabayar KartuHALO setiap bulan sesudah pemakaian berdasarkan: (i) jumlah menit penggunaan untuk layanan selular; (ii) layanan nilai-tambah yang dapat dikenakan biaya yang digunakan selama jangka waktu yang bersangkutan; dan (iii) biaya langganan untuk layanan dasar dan layanan lain yang tercakup dalam rencana langganan mereka. Pelanggan pascabayar dapat memilih di antara empat pilihan: (a) tarif khusus untuk panggilan ke lima nomor favorit di dalam jaringan Telkomsel; (b) 150 SMS gratis per bulan; (c) pembebasan biaya langganan bulanan; atau (d) tarif tetap dalam lingkup nasional.

Telkomsel menawarkan kepada pelanggan pascabayar KartuHALO berbagai pilihan pembayaran, termasuk pembayaran tunai, dengan cek, kartu kredit, setoran langsung melalui transfer telepon atau debet otomatis melalui bank dan perusahaan kartu kredit yang berpartisipasi. Pembayaran dapat dilakukan di pusat GraPARI Telkomsel, ATM yang telah ditunjuk atau melalui *over-the-counter facility* (kebanyakan di kantor pos dan bank yang mempunyai perjanjian dengan Telkomsel).

Telkomsel menerbitkan tagihan kepada para pelanggan non-korporasi pada salah satu dari lima siklus penagihan. Perusahaan menerbitkan tagihan kepada masing-masing pelanggan pada siklus penagihan tiap bulan. Apabila pembayaran tidak diterima pada jatuh tempo tagihan, maka pelanggan akan diberi peringatan melalui panggilan telepon otomatis atau SMS dan pelanggan tidak diperbolehkan melakukan panggilan keluar atau menerima panggilan *roaming* masuk. Apabila tidak ada pembayaran jumlah yang lewat jatuh tempo dalam waktu satu bulan sejak tanggal jatuh tempo dari tagihan yang bersangkutan, maka pelanggan selanjutnya tidak diperbolehkan menerima seluruh panggilan masuk. Apabila pembayaran tidak diterima dalam waktu dua bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka nomor pelanggan ditutup, meskipun Telkomsel terus mengupayakan penagihan dan dapat meminta bantuan instansi penagih utang. Setelah nomor pelanggan ditutup, pelanggan hanya dapat berlangganan kembali setelah membayar tunggakan dan mengajukan permohonan baru. Telkomsel tidak membebankan biaya atau bunga atas keterlambatan.

Asuransi

Pada tanggal 31 Desember 2007, aktiva tetap milik TELKOM dan anak-anak perusahaannya, kecuali untuk tanah, diasuransikan terhadap kebakaran, pencurian dan risiko tertentu lainnya. Jumlah nilai aktiva yang diasuransikan mencapai Rp 33.207,8 miliar dan US$ 5.173 juta, yang ditanggung Berdasarkan Jumlah Tertanggung (*Sum Insured Basis*) dengan maksimal klaim kerugian sebesar Rp 1.956.843 juta dan ditanggung *First Loss Basis* sebesar US$ 254,1 juta dan Rp 824.000 juta, termasuk pemulihan usaha dengan Klausul Pemulihan Kerugian Otomatis (*Automatic Reinstatement of Loss Clause*). Selain itu, satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 diasuransikan secara terpisah masing-masing sebesar Rp 525,0 miliar (US$ 39,2 juta) dan Rp 1.426,3 miliar (US$ 55,1 juta). Manajemen TELKOM meyakini bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai.

Anak perusahaan TELKOM secara terpisah mengasuransikan aktiva tetap mereka sebesar jumlah tertentu dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh masing-masing anak perusahaan. Telkomsel memiliki polis asuransi peralatan elektronik dan risiko industri. Polis menetapkan perlindungan untuk fasilitas, infrastruktur, bangunan dan perakitan jaringan Telkomsel dengan pengecualian kerugian yang diderita sebagai akibat perang, perang saudara, pemberontakan, revolusi, terorisme, huruhara atau kekuatan militer atau perebutan kekuasaan, di antara pengecualian lainnya. Telkomsel memiliki asuransi umum untuk pertanggungan kendaraan bermotor dan pertanggungan umum secara lengkap. Sampai dengan 31 Desember 2007, aktiva tetap Telkomsel diasuransikan berdasarkan polis yang memberikan perlindungan atas kerusakan aktiva tetap dan gangguan atas penyelenggaraan bisnis, dengan *first loss basis* sebesar US$ 499,1 juta, ditambah Rp 8,8 miliar untuk kerusakan kendaraan dan Rp 324,0 miliar untuk gangguan terhadap penyelenggaraan bisnis. Manajemen yakin bahwa pertanggungan penutupan asuransi ini sudah memadai untuk memberikan perlindungan atas kemungkinan kerugian.

Merek Dagang, Hak Cipta dan Paten

TELKOM memiliki sejumlah hak kekayaan intelektual terdaftar yang terdiri dari merek dagang, hak cipta dan paten. TELKOM telah mendaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (i) merek dagang untuk nama perseroan, logo dan layanan tertentu, termasuk nama produk TELKOM, seperti Flexi, Speedy, i-VAS, Ventus, dan TIC, (ii) hak cipta buku, lagu, program komputer dan karya seni, dan (iii) paten untuk layanan group SMS, inovasi kabel, dan teknologi lainnya. Hak kekayaan intelektual tersebut sangat penting bagi bisnis TELKOM.

Risiko yang Terkait dengan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

TELKOM telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan TELKOM untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2005, 2006, dan 2007. Dari hasil identifikasi tersebut, Manajemen menyimpulkan bahwa, untuk setiap periode tersebut, pengendalian dan prosedur pengungkapan TELKOM belum efektif untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan-laporan tersebut, yang dikumpulkan dan diajukan oleh TELKOM sesuai dengan *The Exchange Act*, telah dicatat, diproses, dirangkum, dan dilaporkan sesuai dengan yang disyaratkan, dan diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen TELKOM, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan di TELKOM, yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat waktu mengenai pengungkapan yang diperlukan. Selain itu, Manajemen TELKOM menyimpulkan bahwa karena teridentifikasinya kelemahan-kelemahan material, pengendalian internal atas pelaporan keuangan sampai dengan 31 Desember 2007 belum efektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam *The Internal Control-Integrated Framework*, yang dikeluarkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). TELKOM telah melakukan analisis tambahan dan prosedur setelah tutup buku untuk memastikan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PABU. Berdasarkan hal tersebut, Manajemen TELKOM menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian yang terdapat dalam laporan tahunan dalam Form 20-F ini disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan TELKOM, hasil usaha, dan arus kas untuk seluruh periode yang disajikan.

Sejak teridentifikasinya kelemahan-kelemahan material, TELKOM terus memperbaiki struktur pengendalian internal dan prosedur pengendalian atas pelaporan keuangan, termasuk yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan, dan juga memperbaiki sejumlah pengendalian dan prosedur pengungkapan, dan telah mengambil tindakan yang diperlukan atas permasalahan ini. Untuk melihat pembahasan mengenai kelemahan-kelemahan material dan upaya perbaikannya, lihat bab “Pengendalian dan Prosedur.” Setiap sistem pengendalian, seberapa baikpun dirancang, dijalankan dan dievaluasi, hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, namun tidak mutlak, bahwa tujuan pengendalian tersebut dapat dicapai. Di masa mendatang, TELKOM mungkin mengidentifikasi sejumlah kelemahan material atau kekurangan yang signifikan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau dalam pengendalian dan prosedur pengungkapan yang belum teridentifikasi saat ini. Selain itu, TELKOM tidak bisa memastikan bahwa TELKOM akan mampu mempertahankan kecukupan pengendalian atas proses dan pelaporan keuangan pada masa mendatang. Setiap kegagalan dalam melaksanakan pengendalian baru yang diperlukan atau yang sudah diperbaiki, atau kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dapat memberikan dampak yang merugikan pada kemampuan TELKOM untuk melaporkan hasil keuangan secara akurat dan tepat waktu, atau menyebabkan TELKOM gagal memenuhi kewajiban laporannya. Ketidakcukupan pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau pengendalian dan prosedur pengungkapan juga dapat menyebabkan para investor kehilangan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh TELKOM, yang dapat berdampak buruk pada harga saham TELKOM.

Risiko yang Terkait dengan Indonesia

Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia dapat memberi dampak merugikan pada kegiatan bisnis di Indonesia

Indonesia mengalami proses pergolakan demokrasi, yang mengakibatkan timbulnya peristiwa sosial dan politik yang menimbulkan ketidakpastian peta politik di Indonesia. Peristiwa ini secara umum telah menimbulkan ketidakstabilan politik, di samping gejolak sosial dan sipil yang tercermin dengan adanya sejumlah kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada Oktober 2005, sesudah terjadi kenaikan substansial pada harga pasar minyak mentah, Pemerintah menaikkan harga bahan bakar kurang lebih sebesar 80%, yang menimbulkan sejumlah demo dan pemogokan. Kemudian, Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir telah memberikan sinyal kemungkinan naiknya harga minyak dan listrik, yang mungkin menimbulkan demonstrasi dan pemogokan. Perkembangan sosial dan politik di Indonesia pada umumnya stabil sepanjang tahun 2007, meskipun tidak ada jaminan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa mendatang, atau gangguan tersebut tidak akan, baik yang secara langsung atau tidak langsung, memberi dampak material yang merugikan pada TELKOM atau pada nilai investasi di ADS atau saham biasa.

Kegiatan Teroris di Indonesia dapat membuat Indonesia tidak stabil, yang dapat memberi dampak merugikan pada bisnis TELKOM

Peristiwa pemboran terjadi beberapa tahun yang lalu di beberapa kedutaan asing, klub malam, dan lokasi lainnya di Indonesia. Misalnya, pada bulan Oktober 2005, beberapa bom meledak di dua lokasi di Bali, mengakibatkan 22 orang tewas dan sedikitnya 50 orang terluka. Pemerintah telah mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah telah mendeteksi, menempatkan, dan menahan beberapa pelaku teroris. Meski tidak ada kegiatan teroris di Indonesia pada tahun 2007, namun tidak terdapat jaminan bahwa tindakan teroris tidak akan terjadi di masa mendatang.

Melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia dapat memberi dampak material yang merugikan pada kegiatan bisnis di Indonesia

Kebijakan Pemerintah terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain, termasuk perubahannya di masa mendatang, dapat memberi dampak yang merugikan kinerja keuangan dan operasional TELKOM. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dapat memberi dampak merugikan, antara lain, terhadap biaya Rupiah dari pembelian peralatan jaringan TELKOM, nilai Dolar dari setiap jumlah yang akan diterima oleh pemegang atau pemilik resmi ADS dalam hal pembagian dividen, nilai Dolar Amerika Serikat dari hasil yang akan diterima oleh pemegang atau pemilik resmi pada penjualan saham biasa di Indonesia dan harga pasar sekunder ADS atau nilai Dolar AS pada obligasi TELKOM. Nilai tukar mata uang Indonesia relatif stabil dalam dua tahun terakhir, namun tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi atau pelemahan yang berkelanjutan; atau yang dapat memberikan dampak merugikan pada kinerja keuangan dan hasil operasi TELKOM.

Peringkat hutang Indonesia terus dikaji dan direvisi oleh lembaga pemeringkatan internasional

Pada tanggal 14 Pebruari 2008, hutang valuta asing jangka panjang Pemerintah mendapatkan peringkat Ba3 dari Moody's, BB dari Fitch Ratings, dan BB- dari Standard & Poor's. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas seluruh kemampuan Pemerintah untuk membayar kewajiban dan kesediaan untuk memenuhi komitmen keuangan Pemerintah pada saat jatuh tempo. Tidak ada jaminan bahwa pemeringkatan tersebut tidak akan diturunkan di masa depan. Setiap penurunan tersebut akan memberi dampak merugikan pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan kemampuan perusahaan Indonesia, termasuk TELKOM, untuk menghimpun pembiayaan tambahan dan suku bunga untuk tersedianya pembiayaan tambahan tersebut.

Indonesia rentan terhadap bencana alam dan peristiwa lain yang berada di luar pengendalian TELKOM, yang dapat menimbulkan gangguan serius pada operasi normal bisnis TELKOM dan memberi dampak merugikan pada hasil operasi TELKOM

TELKOM beroperasi di Indonesia yang sebagian wilayahnya rentan terhadap bencana alam. Gangguan operasional yang terjadi akibat bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, padamnya listrik atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian TELKOM pada masa lalu dan mendatang dapat mengganggu operasional dan mengakibatkan kerusakan peralatan yang memberi dampak merugikan pada kinerja keuangan dan hasil operasi TELKOM.

Pada tanggal 2 Pebruari 2007, hampir seluruh wilayah Jakarta dilanda banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Akibatnya, beberapa fasilitas TELKOM di daerah yang terkena banjir rusak dan sambungan telepon TELKOM untuk beberapa wilayah terhenti hingga 72 jam. Pada akhir 2007, hujan lebat juga terjadi di hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemudian menyebabkan banjir sedikitnya di lima kota besar sepanjang tepi Bengawan Solo.

Pada tanggal 6 Maret 2007, gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter melanda wilayah Padang yang merupakan bagian dari Divisi Regional I Sumatera, klaim asuransi untuk bencana tersebut mencapai Rp 17.600 juta. Secara operasional, seluruh fasilitas berangsur-angsur kembali berfungsi sejak September 2007. Pada tanggal 12 September 2007, gempa bumi besar dengan estimasi 7,9 skala Richter terjadi di Sumatera Barat dan Bengkulu.

TELKOM menerapkan rencana keberlanjutan usaha dan rencana pemulihan bencana untuk mengurangi risiko-risiko di atas. TELKOM juga memiliki polis asuransi yang mencukupi untuk melindungi TELKOM dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan peristiwa lain yang terjadi di luar kendali. Tetapi tidak ada jaminan bahwa pertanggungan asuransi akan cukup melindungi TELKOM dari potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan kejadian lainnya yang di luar kendali kami.

Risiko yang terkait dengan TELKOM dan anak perusahaan

Rencana pengembangan TELKOM dapat menguras sumber daya utama dan dapat memberi dampak merugikan pada prospek bisnis dan kinerja keuangan TELKOM

Untuk menjaga tingkat persaingan dan posisi TELKOM dalam merebut persaingan dan mempertahankan pangsa pasar, TELKOM telah menetapkan visi perusahaan untuk menjadi *full service network provider*. Untuk mencapai tujuan ini, TELKOM berencana meningkatkan fokus pada multimedia dan jenis layanan lain di samping tetap konsentrasi pada bisnis inti TELKOM yaitu layanan lokal, jarak jauh domestik dan telepon selular. Pelaksanaan atas rencana dalam rangka untuk mencapai sasaran ini dapat menguras sumber daya manajerial, keuangan dan sumber daya lain dari TELKOM, yang berpotensi memberi dampak yang merugikan prospek bisnis dan kinerja keuangan TELKOM.

Kepentingan sebagai Pemegang Saham Pengendali dapat berbeda dengan kepentingan Pemegang Saham TELKOM lainnya

Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali sebesar 51,82% dari jumlah saham TELKOM yang dikeluarkan dan beredar dan memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan dari hampir seluruh tindakan yang memerlukan persetujuan dari para pemegang saham TELKOM. Pemerintah juga merupakan pemegang satu lembar saham Dwiwarna TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto untuk hal tertentu, termasuk pemilihan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris TELKOM. Melalui Menkominfo, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi Indonesia. Dimungkinkan adanya situasi kepentingan Pemerintah selaku regulator dan pemegang saham pengendali TELKOM mengalami benturan kepentingan dengan kepentingan bisnis TELKOM. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan memberikan peluang kepada operator telekomunikasi lain yang sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah.

Kegagalan sistem tertentu, jika terjadi, dapat berdampak merugikan pada hasil operasi TELKOM

TELKOM mengoperasikan jaringan telepon tidak bergerak kabel (PSTN), jaringan telepon tidak bergerak nirkabel, jaringan data dan pita lebar, dan jaringan selular. Jaringan terpadu tersebut terdiri dari jaringan akses tembaga, jaringan akses optik, BTS, switch, transmisi optik, jaringan IP core, satelit dan server aplikasi. TELKOM berupaya untuk menjaga sistem dan jaringan tersebut dalam keadaan baik untuk dioperasikan dan ditingkatkan atau diganti jika diperlukan. TELKOM menerapkan rencana keberlanjutan usaha dan rencana pemulihan bencana komprehensif yang secara teratur diuji, namun tidak ada jaminan bahwa kegagalan material dari jaringan terpadu TELKOM, server atau link transmisi tidak akan mengakibatkan gangguan pelayanan TELKOM, atau ketika gangguan tersebut berasal dari gangguan operasi, bencana alam atau lainnya, tidak dapat merugikan kemampuan TELKOM dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan dan memberi dampak merugikan pada hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek TELKOM.

Pihak regulator dan operator telekomunikasi lain dapat mempertanyakan kemampuan TELKOM dalam menerapkan tarif PSTN untuk layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA-nya yang baru, yang dipasarkan dengan merek dagang TELKOMFlexi

Pada bulan Desember 2002, TELKOM memperkenalkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA, yang dipasarkan dengan merek dagang TELKOMFlexi untuk pesawat telepon tidak bergerak dan nirkabel. Teknologi telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA memungkinkan dikembangkannya jaringan telepon dengan cepat dan mengurangi belanja modal per sambungan dengan meniadakan kebutuhan akan instalasi kabel bawah tanah. TELKOMFlexi

menawarkan kepada pelanggan kemampuan menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan mobilitas terbatas (di dalam kode area yang sama). Pelanggan pada umumnya memiliki seluruh fitur yang ditawarkan oleh layanan selular kecuali roaming ke kode area lain dan dalam lingkup internasional. Pelanggan TELKOMflexi pascabayar dibebani tarif yang sama dengan angka tarif PSTN sedangkan pelanggan prabayar dibebani tarif yang sedikit lebih tinggi dari tarif pascabayar tetapi tanpa biaya bulanan. Dalam segala hal, baik tarif pascabayar maupun prabayar. Regulator telekomunikasi, operator selular dan asosiasi perdagangan selular telah berupaya dan di masa mendatang dapat berupaya mengenakan batasan sesuai kemampuan TELKOM untuk menyediakan layanan telepon tidak bergerak nirkabel dengan tarif PSTN. Apabila batasan tersebut dikenakan, maka TELKOM dapat kehilangan sebagian atau seluruh keuntungan dari investasinya di jaringan yang mendukung layanan TELKOMFlexi. TELKOM dapat menimbulkan sengketa dengan regulator atau pesaing.

Jika TELKOM atau anak perusahaan membutuhkan dana baik untuk keperluan yang sesuai atau untuk keperluan di luar cara bisnis yang lazim, tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tersebut tidak menyebabkan TELKOM atau anak perusahaan terkena biaya tinggi, berpotensi terkena persyaratan yang keras dan/atau perjanjian yang membatasi atau, anak perusahaan meminta TELKOM memberikan jaminan

TELKOM atau anak perusahaan mungkin perlu melakukan penghimpunan dana tambahan yang besar untuk mendukung pertumbuhan bisnis TELKOM, melaksanakan akuisisi, menghadapi kejadian yang tidak diduga, dan mengembangkan perbaikan layanan atau produk baru. TELKOM mungkin juga perlu melakukan sesuatu untuk menghadapi tekanan persaingan, mengembangkan bisnis pendukung atau teknologi yang tepat, atau memanfaatkan peluang bisnis. TELKOM tidak dapat memastikan bahwa kebutuhan penghimpunan dana tambahan tersebut, pada saat dibutuhkan, akan pasti tersedia berdasarkan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh TELKOM. Selain itu, suatu fasilitas perjanjian pinjaman, jika ada, dapat mengandung adanya persyaratan pembatasan ("*restrictive covenant*"), yang dapat membatasi fleksibilitas operasional TELKOM untuk keperluan bisnis tertentu. Apabila tidak terdapat ketersediaan dana yang memadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh TELKOM, maka dimungkinkan TELKOM tidak akan mampu mengembangkan atau meningkatkan layanannya. TELKOM juga mungkin tidak akan mampu memperoleh keuntungan dari peluang bisnis di masa mendatang atau menghadapi tekanan persaingan, semua itu dapat memberi dampak kerugian yang material pada bisnis, hasil kinerja operasi dan kondisi keuangan TELKOM.

Teknologi baru dapat memberi dampak yang merugikan pada kemampuan TELKOM agar tetap kompetitif

Perubahan teknologi di bidang industri telekomunikasi bersifat cepat dan signifikan. TELKOM mampu menghadapi peningkatan persaingan di bidang perkembangan teknologi saat ini dan masa mendatang. Teknologi, layanan atau standar baru dapat mengakibatkan perubahan signifikan pada bisnis TELKOM. Selain itu, apabila terjadi perubahan kebutuhan pelanggan atau tidak efisiennya jaringan infrastruktur yang ada, maka TELKOM perlu melakukan upgrade teknologi ke jaringan generasi baru (*next generation network*) untuk menerapkan teknologi dan layanan yang terpadu dan efektivitas biaya. Selain itu, TELKOM juga perlu untuk meng-upgrade sistem sistem pelayanan pelanggan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan penerapan teknologi dan layanan baru. Kecuali TELKOM secara terus menerus memoderenisasi teknologi yang ada, produk dan layanan baru mungkin dinilai terlalu mahal untuk dikembangkan dan dapat mengakibatkan pesaing-pesaing dapat mengambil keuntungan dari kondisi itu. TELKOM tidak dapat memprediksi secara akurat pengaruh dari perubahan teknologi di masa kini dan masa mendatang terhadap operasi atau daya saing layanan TELKOM. Sama halnya, TELKOM tidak dapat menjamin bahwa teknologi yang digunakan sekarang tidak akan segera usang atau mampu mengimbangi persaingan dari teknologi-teknologi baru di masa mendatang.

TELKOM beroperasi dalam suatu industri yang hukum dan peraturannya mengalami reformasi signifikan dan dapat berdampak merugikan pada bisnis TELKOM

Peraturan di bidang industri telekomunikasi di Indonesia mengandung sejumlah ketidakpastian. Pada dasarnya, Undang-Undang Telekomunikasi mengatur tentang kerangka utama reformasi industri telekomunikasi, antara lain liberalisasi industri, pemberian fasilitas untuk masuknya operator baru dan perubahan struktur kompetisi. Undang-Undang Telekomunikasi hanya menguraikan kerangka dan prinsip dasar untuk liberalisasi industri telekomunikasi. TELKOM melihat adanya ketidakpastian dalam peraturan di bidang telekomunikasi di Indonesia, di antaranya berkaitan dengan hal-hal berikut:

- Interkoneksi: Pada tanggal 5 Pebruari 2008 Pemerintah menetapkan peraturan No. 009/DJPT.3/KOMINFO/II/2008 mengenai penyesuaian tarif berdasarkan interkoneksi berbasis biaya yang telah diperkenalkan pada 1 Januari 2007. Berdasarkan peraturan tersebut, TELKOM dan Telkomsel, bersama dengan 10 penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia, diwajibkan melakukan penyesuian terhadap tarif interkoneksinya pada tanggal 1 April 2008 untuk mematuhi skema baru tarif interkoneksi. Meski kami meyakini bahwa TELKOM telah mematuhi peraturan ini, kami tidak dapat memberi jaminan bahwa regulator akan menyetujui penilaian atau perubahan tarif interkoneksi TELKOM. Lebih jauh, kami tidak dapat menjamin dampak penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya interkoneksi TELKOM, dan dampak tersebut dapat mengakibatkan kerugian material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek TELKOM.

- Lisensi: Lisensi TELKOM untuk menyediakan layanan sambungan telepon tidak bergerak, layanan SLJJ dan layanan SLI yang semula terpisah diganti dan disatukan menjadi lisensi tunggal yang dikeluarkan pada 13 Mei 2004. TELKOM juga memegang lisensi multimedia yang mencakup layanan seperti penyedia layanan internet, penyedia komunikasi data, akses jaringan dan VoIP. Pemerintah dapat mengubah persyaratan-persyaratan dari lisensi dan wewenang bisnis TELKOM sesuai keinginannya. Hal ini juga dapat menimbulkan kewajiban tertentu bagi pemegang lisensi. Pada tahun 2007, Menkominfo mengumumkan cetak biru kerangka kerja baru lisensi untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Saat ini, lisensi TIK disampaikan kepada para operator dalam kategori berikut: internet, PSTN, selular, akses telepon tidak bergerak nirkabel, dan televisi kabel. Kerangka baru akan menggantikan kategori lisensi yang ada pada tahun 2011 dengan kategori sebagai berikut: layanan (e-mail, televisi, internet, dan suara), jaringan (softswitch, jaringan IP), akses (kabel, 3G/4G. WiFi, WiMAX), dan peralatan milik pelanggan (personal komputer, PDA, handset, modem). TELKOM telah mengeluarkan biaya yang signifikan untuk lisensi yang terkait dengan teknologi termasuk lisensi 3G Telkomsel yang diperoleh pada bulan Pebruari 2006, yang belum dapat memberikan tingkat pengembalian

investasi yang memadai.Keluarnya lisensi untuk teknologi baru, seperti WiMAX, kemungkinan dibutuhkan oleh Telkomsel guna meningkatkan investasi dibidang teknologi baru. Sebagai hasilnya, TELKOM mungkin mendapatkan kerugian dari investasi sebelumnya dalam teknologi dan dan tidak dapat menutup investasi teknologi TELKOM di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa TELKOM akan dapat memperoleh atau memperbaharui isi lisensi yang sebanding dengan lisensi kerangka baru tersebut. Kemudian, TELKOM mungkin saja mengalami kehilangan atas eksklusivitas di bidang teknologi, yang dapat mengakibatkan kerugian yang material di bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek TELKOM.

- Tarif: Pada tahun 1995, Pemerintah memberlakukan formula untuk menetapkan penyesuaian tarif layanan telekomunikasi sambungan telepon tidak bergerak domestik. Namun demikian, penyesuaian tarif tersebut tidak diterapkan secara konsisten, dan hal itu bisa saja terjadi ketika Pemerintah memutuskan kenaikan tarif yang berdasarkan atas kepentingan publik, pengawasan atas industri atau pertimbangan lainnya. Pada tanggal 8 Pebruari 2006, Pemerintah mengeluarkan Keputusan No. 09/Per/M.KOMINFO/02/2006 mengenai Prosedur Penentuan Tarif Saat ini dan Tarif Yang Disesuaikan dari Telefoni Dasar Jaringan Tetap, yang menetapkan formula baru untuk menghitung kenaikan tarif selanjutnya. Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan melaksanakan kenaikan tarif lebih lanjut atau tarif tersebut akan sejalan dengan biaya seiring dengan berjalannya waktu. Setiap kegagalan Pemerintah dalam melaksanakan kenaikan tarif rutin dapat memberi dampak material yang merugikan pada bisnis, kinerja keuangan dan hasil operasi TELKOM. Selanjutnya, perubahan pada rezim tarif atau proses dimana pemerintah menaikkan tarif dapat menyebabkan ketidakpastian dan dapat memberikan dampak merugikan yang material pada bisnis kami, kondisi keuangan, serta hasil dan prospek usaha.

- Migrasi Frekuensi untuk Penyedia Jasa Layanan 3G: Pada tahun 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa untuk memenuhi standar internasional industri dan sebagaimana yang direkomendasikan oleh International Telecommunications Union — Radiocommunication Sector ("ITU-R"), spektrum frekuensi 1900 MHz hanya akan digunakan untuk jaringan 3G. Menkominfo juga mengumumkan bahwa jaringan teknologi berbasis CDMA yang digunakan oleh TELKOM untuk layanan telepon tidak bergerak nirkabel hanya diperbolehkan beroperasi di spektrum frekuensi 800 MHz. Sebagai akibat dari keputusan Pemerintah tersebut, peralatan Base Station System ("BSS") TELKOM di Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan bagian dari instalasi dan perangkat transmisi untuk jaringan telepon tidak bergerak nirkabel tidak lagi dapat digunakan mulai akhir tahun 2007. TELKOM telah mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mengganti perangkat BSS dan telah mendepresiasikan secara penuh perangkat yang terpengaruh tersebut pada bulan Juni 2007 dan mengakui biaya penyusutan sebesar Rp 159,0 miliar dan Rp 173,8 miliar masing-masing untuk tahun 2005 dan 2006, tidak ada jaminan bahwa TELKOM tidak akan mengalami kerugian lebih lanjut akibat dari kebijakan Pemerintah ini.

- Terminasi Lisensi Wireless Local Loop ("WLL"): Pada tahun 2005, Pemerintah melakukan pengaturan kembali spektrum frekuensi di bidang industri telekomunikasi. Hal ini berakibat, jaringan kabel, yang menggunakan spektrum frekuensi tertentu, yang terutama terdiri dari WLL dan perangkat approach link (suatu perangkat transmisi untuk menghubungkan antara BTS dan sentral lokal), yang harus diganti terhitung sampai dengan akhir tahun 2006. TELKOM telah mengeluarkan biaya untuk penggantian fasilitas WLL dengan layanan Flexi Home. TELKOM tidak dapat menjamin bahwa tidak akan mengalami kerugian lebih lanjut akibat dari kebijakan pemerintah ini.

- Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"): Undang-Undang telekomunikasi memperkenankan Pemerintah untuk mendelegasikan wewenangnya untuk mengatur, mengawasi dan mengontrol sektor telekomunikasi di Indonesia kepada badan regulasi independen, pada saat bersamaan tetap mempertahankan wewenang untuk merumuskan kebijakan atas industri telekomunikasi. Pendelegasian wewenang tersebut kepada BRTI dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 31/2003, tertanggal 11 Juli 2003, yang telah diperbaharui oleh Keputusan Menkominfo No. 25/P/M.Kominfo/11/2005 tertanggal 29 Nopember 2005. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun ini, BRTI telah mengeluarkan peraturan mengenai skema tarif interkoneksi. Tidak ada jaminan bahwa BRTI tidak akan menempuh tindakan yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi atau prospek TELKOM.

- KPPU: TELKOM termasuk dalam subyek kewenangan KPPU, yaitu suatu lembaga independen untuk pengawasan atas kompetisi yang wajar di Indonesia. Pada tahun 2007, KPPU mengenakan sanksi kepada Temasek Holdings Pte. Ltd. ("Temasek"), sebuah badan usaha penanaman modal milik pemerintah Singapore, dan juga kepada Telkomsel atas pelanggaran anti-monopoli dan praktek bisnis tidak wajar. Pada tanggal 19 Nopember 2007, KPPU mengeluarkan keputusan bahwa Temasek melanggar peraturan kepemilikan silang di industri telekomunikasi di Indonesia melalui kepemilikan tidak langsung di Telkomsel dan Indosat. KPPU mengenakan denda kepada Telkomsel sebesar Rp 15 miliar dan memerintahkan Telkomsel untuk mengurangi tarif sebesar minimum 15%. Berdasarkan keputusan tersebut, Temasek diperintahkan untuk menjual kepemilikan sahamnya di Telkomsel kepada pihak yang tidak teraffiliasi dalam kurun waktu 2(dua) tahun. Pada tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan banding Temasek dan memerintahkan Temasek untuk mendivestasikan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau Indosat, atau mengurangi 50% kepemilikannya pada kedua perusahaan tersebut dalam kurun waktu 12 bulan. Telkomsel tetap dikenakan penalti berupa denda sebesar Rp 15 miliar, namun keputusan penurunan tarif 15% kepada Telkomsel dari KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap keputusan ini dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tidak ada jaminan bahwa banding yang dilakukan oleh Temasek maupun oleh Telkomsel akan berhasil atau bahwa KPPU dan pengadilan Indonesia akan mengambil langkah atau sanksi yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil atau prospek usaha.

- Layanan SLJJ: Pada tahun 2004, Indosat menerima lisensi komersial untuk menyelenggarakan layanan SLJJ, yang sebelumnya TELKOM mempunyai hak eksklusif. Pada tanggal 17 Mei 2005, Menkominfo mengeluarkan Keputusan No. 6/2005 tentang penggunaan tiga digit akses kode yaitu "01X" dan "0" akses kode untuk layanan SLJJ. Kode akses "0" akan digunakan oleh pelanggan yang tidak memilih operator layanan jarak jauh, sementara akses kode "01X" akan diimplementasikan secara bertahap di area lokal yang telah mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung layanannya.

Pada tanggal 3 Desember 2007, Menkominfo mengeluarkan keputusan No. 43/2007 perihal tahapan implementasi peraturan kode akses. Berdasarkan keputusan tersebut, penggunaan "01X" untuk layanan SLJJ harus dimulai pada 3 April 2008 di Balikpapan dan 27 September 2011 untuk seluruh area guna mengakomodasi pelanggan agar dapat memilih operator sambungan jarak jauh. Kompetisi besar yang terjadi di pasar SLJJ, sebagai akibat dari perubahan pada akses kode, dapat mengurangi jumlah pelanggan kami dan pendapatan dari layanan SLJJ disebabkan pelanggan dapat memilih layanan dari operator lainnya. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menerbitkan lisensi layanan SLJJ kepada operator telekomunikasi lainnya.

- Risiko Kompensasi: Undang-undang telekomunikasi menetapkan bahwa TELKOM akan menerima kompensasi atas terminasi dini hak ekslusif untuk layanan lokal dan SLJJ. Di bawah skema kompensasi tersebut, Pemerintah sepakat untuk membayar sebesar Rp 478,0 miliar kepada TELKOM untuk jangka waktu lima tahun. Pemerintah telah membayar Rp 90,0 miliar pada tahun 2005, 2006 dan 2007 dan sisanya diperkirakan akan dibayar dengan cara mengangsur atau dalam bentuk pembayaran sekaligus, tergantung dari ketersediaan anggaran Pemerintah. Selain itu, kami diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana yang diterima tersebut untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. TELKOM tidak dapat memberikan jaminan apakah Pemerintah akan memenuhi janji untuk membayar sisa nilai kompensasi dalam waktu lima tahun ke depan.

Bisnis selular yang merupakan segmen penting bagi pendapatan Perusahaan menghadapi kendala dan tekanan persaingan yang signifikan

Perusahaan menyediakan layanan telekomunikasi selular terutama melalui anak perusahaannya, Telkomsel. Dalam tahun-tahun terakhir, Telkomsel mengalami pertumbuhan jumlah pelanggan yang pesat dan pendapatannya telah menjadi salah satu komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perusahaan. Pertumbuhan Telkomsel kedepan bergantung pada kemampuannya dalam mengelola kendala kapasitas dan spektrum. Telkomsel mengalami kendala tersebut di masa lalu dengan demikian, telah menempatkan sumber daya yang signifikan untuk menghilangkan kendala tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Telkomsel tidak akan menghadapi kendala tersebut di masa mendatang, yang dapat mengakibatkan kepadatan jaringan, berkurangnya kualitas layanan dan ketidakmampuan meningkatkan dan mempertahankan basis pelanggannya.

Pasar telekomunikasi selular Indonesia sangat kompetitif. Saat ini, Telkomsel berkompetisi dengan Indosat dan PT Excelcomindo Pratama ("Excelcomindo") dalam menarik dan mempertahankan pelanggan untuk layanan telekomunikasi selular. Khususnya, Telkomsel menghadapi persaingan yang semakin meningkat dan substansial dari Excelcomindo, yang kinerjanya mengungguli Indosat pada tahun terkait dengan pertumbuhan pelanggan dan infrastruktur jaringan. Terdapat juga beberapa pesaing baru lainnya, misalnya, PT Hutchison CP Telecommunications meluncurkan merek "3" pada 30 Maret 2007 menggunakan lisensi 3G UMTS. Pada tanggal 3 September 2007, PT Smart Telecom meluncurkan "SMART" yang menggunakan lisensi CDMA. Sampai dengan 31 Desember 2007, terdapat sebelas operator yang menggunakan GSM (full mobility) dan CDMA (sambungan tetap nirkabel) di Indonesia.

Operator selular CDMA baru akan menjadi kekuatan dan bersaing dengan Telkomsel. Berdasarkan hal itu, kami memperkirakan kompetisi di pasar selular akan semakin ketat. Meningkatnya persaingan dapat merugikan pangsa pasar dan hasil usaha Telkomsel. Persaingan antara Telkomsel dengan berbagai operator didasarkan pada berbagai faktor, seperti harga, kualitas dan jangkauan jaringan, aneka layanan yang ditawarkan dan pelayanan untuk pengguna. Sampai saat ini, kami meyakini bahwa Telkomsel berhasil memelihara pangsa pasarnya, namun tidak ada jaminan bahwa Telkomsel akan berhasil bersaing di pasar selular pada masa mendatang.

Satelit Perusahaan memiliki rentang hidup yang terbatas dan terdapat risiko yang substansial untuk TELKOM-1 dan TELKOM-2 karena dapat mengalami kerusakan atau gangguan selama operasi berlangsung dan satelit mungkin hilang atau kinerja yang berkurang yang dapat memberi dampak merugikan pada kondisi keuangan, hasil operasi dan kemampuan dalam menyediakan layanan tertentu

Satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 milik kami memiliki masa operasi yang terbatas. Sejumlah faktor mempengaruhi masa operasi dari satelit, termasuk kualitas pembuatannya, daya tahan bagian-bagian komponennya, jumlah bahan bakar, kendaraan peluncur yang digunakan dan cara pemantauan dan pengoperasian satelit. Satelit dapat mengalami kegagalan sebelum batas akhir masa operasionalnya dan perbaikan di orbit mungkin tidak bisa dilakukan. Meskipun telah mengasuransikan satelitnya, namun tidak dapat dipastikan bahwa asuransi tersebut akan memberikan penggantian yang memadai. Hilangnya satelit mungkin dapat mengakibatkan dampak terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan kemampuan untuk menyediakan layanan tertentu, terutama di kawasan Indonesia bagian timur yang tergantung pada luasnya area cakupan satelit untuk jasa telekomunikasi.

TELKOM berkewajiban memenuhi standar akuntansi dan pengungkapan yang berlaku di Indonesia, yang dalam beberapa hal yang signifikan berbeda dengan standar yang berlaku di negara lain

Kemungkinan terdapat lebih sedikit informasi tentang perusahaan publik Indonesia, termasuk TELKOM, dibandingkan dengan apa yang umumnya diungkapkan oleh perusahaan publik di negara-negara yang pasar modalnya lebih mapan. Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan yang telah diaudit disiapkan atas dasar Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia yang dalam beberapa hal terdapat perbedaan signifikan dari U.S. GAAP. Ringkasan perbedaan antara PABU Indonesia dengan U.S. GAAP dapat dilihat dalam catatan 55 dalam laporan keuangan Konsolidasian.

Kemampuan TELKOM untuk memenuhi kebutuhan keuangan adalah kritikal dalam mendukung pembelanjaan modal

Industri telekomunikasi adalah industri yang padat modal. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menyediakan layanan dan teknologi yang sebanding dan sesuai dengan operator layanan telekomunikasi lainnya, kami harus memperluas dan memodernisasi jaringan kami, yang akan melibatkan investasi modal yang substansial. Kami percaya arus kas internal kami sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan operasi dan perencanaan pembelanjaan modal, tetapi mungkin saja di masa depan kami akan pembiayaan pihak ketiga, termasuk pembiayaan dari pemasok, untuk mendukung pengembangan jaringan kami. Jika kami tidak memiliki cukup dana internal atau tidak dapat memperoleh pembiayaan pihak ketiga atau dari pemasok untuk pemenuhan pembelanjaan

modal yang sudah direncanakan, atau membiayai pengeluaran melalui pengaturan pembiayaan lainnya, kami dapat mengalami keterlambatan atau penundaan sebagian pengeluaran modal. Hal ini dapat mencegah kami untuk meningkatkan kapasitas jaringan yang memadai dan pada akhirnya dapat memberikan dampak kerugian kepada pendapatan dan pertumbuhan kami.

"*Forward-looking statement*" mengandung unsur proteksi yang mungkin tidak tepat.

Laporan Tahunan ini menyertakan beberapa forward-looking statement, termasuk pernyataan tentang target dan proyeksi kami saat ini untuk kinerja operasi dan prospek bisnis ke masa mendatang. Kalimat-kalimat seperti: "yakin", "ekspektasi", "antisipasi", "estimasi", "proyeksi" dan kata lain yang sejenis merupakan forward-looking statement. Selain itu, seluruh pernyataan selain pernyataan yang bersifat fakta historis yang tercantum dalam dokumen ini adalah forward-looking statement. Pernyataan-pernyataan ini merupakan ekspektasi kami. Meskipun kami meyakini bahwa ekspektasi yang tertuang dalam forward-looking statement bersifat wajar (*reasonable*), kami tidak dapat menjamin bahwa ekpektasi akan terbukti kebenarannya. Pernyataan tersebut mengandung sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk perubahan ekonomi, lingkungan sosial dan politik di Indonesia. Mengingat berbagai risiko dan ketidakpastian yang melingkupi Indonesia dan pasar dimana kami beroperasi, para investor ADS atau saham biasa harus mempertimbangkan bahwa kami tidak dapat menjamin bahwa forward-looking statement yang diuraikan dalam dokumen ini akan terwujud. Seluruh *forward-looking statement*, baik tertulis maupun lisan yang bersumber dari kami atau orang yang bertindak atas nama kami secara keseluruhan dianggap merujuk pada risiko ini.

Beberapa mantan karyawan TELKOM, termasuk mantan Direksi tengah menjalani penyelidikan oleh polisi dan dakwaan pidana

Terdapat beberapa kasus litigasi, tuntutan kriminal, dan investigasi yang masih berlangsung terhadap beberapa mantan karyawan dan Direksi TELKOM dan anak perusahaan. Lihat "Informasi Keuangan Tambahan – Kasus Hukum". Tidak ada jaminan bahwa Kepolisian tidak akan menemukan bukti tentang adanya tindakan pelanggaran hukum, sehingga tidak ada jaminan bahwa tuntutan atau tuntutan tambahan tidak akan diajukan terkait dengan hal tersebut di atas atau para pihak tersebut di atas atau karyawan TELKOM yang lain tidak akan diputuskan bersalah atas tuntutan tersebut. Meskipun TELKOM berkeyakinan bahwa penyelidikan tersebut belum terbukti, tidak ada kepastian bahwa karyawan TELKOM tersebut akan diputuskan tidak bersalah atau menghadapi tuduhan lainnya. TELKOM tidak yakin bahwa akan ada akibat keuangan yang signifikan bagi TELKOM dan anak perusahaan dari penyidikan tersebut.

TELKOM dan beberapa anak perusahaan, termasuk Telkomsel, tengah menjalani sejumlah litigasi yang masih berlangsung

Telkom telah dan kemungkinan yang akan datang akan tetap menjadi subyek litigasi. Kasus litigasi tersebut mencakup gugatan *class action* kasus di bidang sengketa pertanahan dan kasus sengketa tagihan telepon premium serta keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2008 berkaitan dengan proses banding terhadap keputusan KPPU atas Temasek dan Telkomsel pada tanggal 19 Nopember 2007. Lihat "Informasi Keuangan Tambahan – Kasus Hukum". Tidak ada jaminan bahwa banding terhadap keputusan KPPU akan dimenangkan. Tidak ada jaminan bahwa penundaan perkara lainnya selain banding terhadap KPPU dapat selesai atau bahwa keputusan tersebut memberikan keputusan yang menguntungkan TELKOM atau anak perusahaan. TELKOM tidak yakin bahwa adanya penundaan perkara ini akan ada akibat keuangan yang signifikan bagi TELKOM atau anak perusahaan.

TELKOM berdomisili di Indonesia dan para investor mungkin tidak bisa melakukan proses hukum atau memaksakan dikenakannya vonis di Amerika Serikat pada TELKOM

TELKOM adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di Indonesia, yang menjalankan usaha sesuai kerangka hukum Indonesia yang berlaku bagi perusahaan publik. Seluruh aktiva utama Perseroan berada di Indonesia. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian dari aktiva yang bersangkutan berada diluar Amerika Serikat. Oleh karena itu, dimungkinkan bahwa investor tidak dapat mengajukan proses hukum atau menerapkan suatu penafsiran, terhadap Perseroan atau Pribadi yang bersangkutan di Amerika Serikat termasuk penafsiran berdasarkan hukum pidana undang-undang pasar modal Amerika Serikat atau peraturan pasar modal negara bagian di Amerika Serikat, atau berdasarkan bentuk lain dari peradilan di Amerika Serikat.

TELKOM telah memperoleh nasihat dari penasihat hukumnya bahwa vonis yang diputuskan di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat, termasuk sejumlah vonis yang dinyatakan dalam hukum pidana dalam hukum keamanan federal Amerika Serikat, tidaklah bisa diberlakukan di pengadilan-pengadilan Indonesia, meskipun vonis-vonis tersebut dapat dimasukkan sebagai bukti nonconclusive dalam proses hukum atas underlying claim di pengadilan Indonesia. Terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan mengambil keputusan atas tindakan yang dibawa ke pengadilan Indonesia, yang sesuai dengan hukum pidana dalam hukum keamanan federal Amerika Serikat. Akibatnya, para pemegang ADS atau Common Stock akan diharuskan mengajukan tuntutan pada TELKOM atau para Komisaris dan Direktur di pengadilan Indonesia.

Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif Mengenai Risiko Pasar

Umum

Perusahaan memiliki risiko pasar yang terutama ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing, perubahan suku bunga dan risiko harga ekuitas atas nilai investasi jangka panjangnya. Perusahaan secara umum tidak melakukan lindung-nilai atas kewajiban mata uang asing jangka panjangnya karena pihaknya yakin bahwa biaya yang terkait dengan nilai-lindung penuh atas kewajiban tersebut tidak berdasar. Sebaliknya, Perusahaan melakukan lindung-nilai atas kewajiban untuk tahun berjalan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, deposito berjangka dalam mata uang asing mencakup 69,71% terhadap kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing. Tingkat risiko Perusahaan terhadap suku bunga dikelola dengan mempertahankan campuran kewajiban dan aktiva dengan tingkat suku bunga tetap dan bervariabel, termasuk aktiva dengan tingkat suku bunga tetap jangka pendek, tingkat suku bunga tersebut dapat ditetapkan ulang secara berkala. Tingkat risiko Perusahaan terhadap risiko pasar tersebut berfluktuasi secara signifikan sepanjang tahun 2005, 2006 dan 2007 karena ekonomi di Indonesia telah dipengaruhi oleh fluktuasi yang signifikan atas rupiah dan suku bunga. Perusahaan tidak dapat memprediksi apakah kondisi tersebut akan berlanjut selama sisa tahun 2008 atau sesudahnya.

Risiko Suku Bunga

Tingkat risiko Perusahaan terhadap fluktuasi suku bunga ditimbulkan terutama dari hutang jangka panjang dengan suku bunga mengambang sesuai program pinjaman Pemerintah yang telah digunakan untuk mendanai pembelanjaan modal Perusahaan dengan suku bunga untuk porsi Rupiah berdasarkan pada rata-rata enam bulan terakhir sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah 1% atau berdasarkan suku bunga mengambang yang dikenakan oleh pemberi pinjaman ditambah 5,25% dan untuk bagian bukan rupiah yang berdasarkan suku bunga mengambang yang dikenakan oleh pemberi pinjaman ditambah 0,5%. Lihat Catatan 20 pada Laporan Keuangan Konsolidasian. Apabila tingkat suku bunga di Indonesia berfluktuasi secara signifikan, kewajiban bunga Perusahaan atas hutang jangka panjangnya dapat bertambah.

Tabel berikut memberikan informasi mengenai instrumen keuangan Perusahaan yang material, sebagian instrumen tersebut peka terhadap perubahan suku bunga. Untuk kewajiban hutang dan deposito berjangka, tabel berikut menampilkan arus kas pokok dan suku bunga rata-rata tertimbang terkait berdasarkan tanggal jatuh tempo yang diharapkan. Informasi disajikan dalam nilai setara Rupiah, yaitu mata uang pelaporan Perusahaan. Arus kas sebenarnya dari instrumen tersebut adalah dalam Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Euro dan Yen Jepang, sesuai dengan dan sebagaimana ditunjukkan dalam

	Saldo per 31 Desember, 2007			Tanggal Jatuh Tempo						
	Mata Uang Asing (dalam jutaan)	Setara Rp (Rp dalam jutaan)	Suku Bunga (%)	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2025	Nilai Wajar
				(Rp dalam jutaan)						
AKTIVA										
Suku Bunga Tetap										
Kas dan setara kas										
Deposito berjangka										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	—	7.017.425	—	7.017.425	—	—	—	—	—	7.017.425
Bunga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dolar AS										
Pokok Pinjaman	163,71	1.537.069	—	1.537.069	—	—	—	—	—	1.537.069
Bunga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Euro										
Pokok Pinjaman	60,28	829.373	—	829.373	—	—	—	—	—	829.373
Bunga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Investasi Sementara — Tersedia untuk Dijual										
Rupiah	—	85.996	—	85.996	—	—	—	—	—	85.996
Dolar AS	7,83	73.508	—	73.508	—	—	—	—	—	73.508
KEWAJIBAN										
Pinjaman bank jangka pendek										
Suku Bunga Variabel										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	—	533.333	—	533.333	—	—	—	—	—	525.869
Bunga	—	16.886	9,40	16.886	—	—	—	—	—	—
Suku Bunga Tetap										
Rupiah	—	40.335	—	40.335	—	—	—	—	—	40.747
Pokok Pinjaman	—	2.752	12,55	2.752	—	—	—	—	—	—
Bunga										
Hutang jangka panjang[1]										
Suku Bunga Variable										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	—	7.724.236	—	2.929.326	2.730.831	1.207.431	140.028	142.045	574.575	7.572.984
Bunga	—	1.499.652	9,42	601.708	369.884	149.808	73.717	61.278	243.257	—
Dolar AS										
Pokok Pinjaman	120,18	1.129.596	—	175.670	136.275	136.275	136.275	136.275	408.826	1.106.511
Bunga	—	344.372	7,34	80.050	67.957	57.886	47.815	37.855	52.809	—
Suku Bunga Tetap										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	—	1.349.231	—	371.452	426.130	488.766	47.600	4.416	10.867	1.441.188
Bunga	—	357.442	15,25	177.194	117.613	49.913	3.402	2.661	6.659	—
Dolar AS									-	
Pokok Pinjaman	403,57	3.793.274	—	1.146.825	1.018.965	997.223	216.280	41.602	372.379	3.657.675
Bunga	—	568.322	6,63	224.322	153.025	73.159	30.969	16.190	70.657	—
Yen Jepang										
Pokok Pinjaman	13,241,76	1.099.596	—	79.337	63.766	63.766	63.766	63.766	765.195	1.002.472
Bunga	—	327.415	3,10	66.397	31.130	29.153	27.176	25.270	148.289	—
Euro										
Pokok Pinjaman	7,34	100.949	—	100.949	—	—	—	—	—	100.122
Bunga	—	1.340	4,99	1.340	—	—	—	—	—	—

(1) Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman yang dikenakan bunga; yaitu Pinjaman Penerusan (two-step loans), wesel bayar dan obligasi, nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan dan hutang bank jangka panjang, masing-masing termasuk kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun.

tabel. Informasi yang tersaji dalam tabel ditentukan berdasarkan asumsi sebagai berikut: (i) suku bunga tetap atas deposito berjangka dalam Rupiah berdasarkan suku bunga rata-rata yang dikenakan untuk penempatan tiga bulan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2007 oleh bank-bank tempat deposito tersebut disimpan; (ii) suku bunga variabel atas kewajiban jangka panjang dalam Rupiah dihitung pada tanggal 31 Desember 2007 dan berdasarkan suku bunga yang ditetapkan berdasarkan syarat-syarat kontraktual yang berdasarkan suku bunga rata-rata enam bulan terakhir sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan atau berdasarkan suku bunga rata-rata deposito berjangka waktu tiga bulan yang dikenakan oleh para peminjam; (iii) suku bunga tetap atas deposito dalam Dolar Amerika Serikat berdasarkan suku bunga rata-rata yang dikenakan untuk penempatan tiga bulan oleh berbagai lembaga pemberi pinjaman tempat deposito tersebut disimpan pada tanggal 31 Desember 2007, dan (iv) nilai sekuritas yang dapat dipasarkan berdasarkan atas nilai sekuritas tersebut pada tanggal 31 Desember 2007. Namun tidak ada kepastian bahwa asumsi tersebut tepat untuk jangka waktu di masa mendatang. Asumsi tersebut dan informasi yang diuraikan dalam tabel bisa saja terpengaruh oleh sejumlah faktor, termasuk perubahan suku bunga di Indonesia dan dampak faktor moneter dan ekonomi makro lainnya di Indonesia. Asumsi tersebut berbeda dari suku bunga yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan, dengan sendirinya, jumlah yang diperlihatkan dalam tabel bisa saja berbeda dari jumlah yang diperlihatkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan.

Risiko Nilai Tukar

Tingkat risiko Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama ditimbulkan oleh kewajiban hutang jangka panjang dan piutang dan hutang, yang terutama dibayar melalui penarikan berdasarkan program pinjaman Pemerintah dan dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Euro, Dolar Singapura dan Pound sterling Inggris. Untuk mengetahui uraian mengenai aktiva dan kewajiban mata uang asing Perusahaan, lihat Catatan 51 pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Sebagian dari kewajiban ini dapat diimbangi oleh kenaikan nilai deposito berjangka dalam mata uang asing dan kenaikan nilai piutang dalam mata uang asing, dengan asumsi bahwa pihak rekanan juga memenuhi kewajiban mata uang asing mereka kepada Perusahaan pada suku bunga pasar.

Tabel berikut memberikan informasi mengenai instrumen keuangan Perusahaan berdasarkan mata uang fungsional dan menghadirkan informasi tersebut dalam Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan Perusahaan. Informasi mengenai instrumen dan transaksi yang peka terhadap nilai tukar asing, termasuk kewajiban hutang dalam Dolar Amerika Serikat, Euro, Dolar Singapura, Pound Sterling Inggris dan Yen Jepang dan deposito berjangka serta hutang dan piutang Perusahaan. Tabel tersebut menyajikan arus kas pokok berdasarkan tanggal jatuh tempo yang diperkirakan. Informasi yang tersaji dalam tabel ditentukan berdasarkan asumsi nilai tukar Dolar Amerika Serikat dan mata uang lain, yang didasarkan atas kurs jual dan beli yang dikutip oleh Reuters pada tanggal 28 Desember 2007, yang berlaku masing-masing untuk aktiva dan kewajiban moneter. Kurs penjualan dan pembelian pada tanggal 28 Desember 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 9.389 dan Rp 9.399 terhadap US$ 1. Telkomsel mengunakan kurs tengah jual dan beli Bank Indonesia untuk aktiva dan kewajiban moneternya yaitu sebesar Rp 9.419 terhadap US$ 1 pada tanggal 28 Desember 2007. Namun, tidak ada kepastian yang dapat diberikan bahwa asumsi tersebut benar untuk jangka waktu di masa mendatang. Asumsi tersebut serta informasi yang diuraikan dalam tabel dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk fluktuasi dan/atau depresiasi Rupiah dalam jangka waktu di masa mendatang.

	Saldo per 31 Desember, 2007		Tanggal Jatuh Tempo						
	Mata Uang Asing (dalam juta)	Setara Rp (Rp juta)	2008	2009	2010	2011	20012	2013-2025	Nilai Wajar
			(Rp dalam jutaan)						
AKTIVA									
Kas dan setara kas									
Dolar AS	169,40	1.592.379	–	–	–	–	–	–	1.592.379
Euro	62,59	861.190	–	–	–	–	–	–	861.190
Yen Jepang	9,55	792	–	–	–	–	–	–	792
Investasi sementara									
Dolar AS	7,83	73.508	–	–	–	–	–	–	73.508
Piutang usaha									
Dolar AS	52,35	491.993	–	–	–	–	–	–	491.993
Piutang lain-lain									
Dolar AS	0,15	1.394	–	–	–	–	–	–	1.394
Euro	0,01	88	–	–	–	–	–	–	88
Pound Sterling	0,01	231	–	–	–	–	–	–	231
Aktiva lancar lainnya									
Dolar AS	3,93	36.897	–	–	–	–	–	–	36.897
Euro	0,05	659	–	–	–	–	–	–	659
Uang muka dan aktiva tak lancar lainnya									
Dolar AS	2,54	23.949	–	–	–	–	–	–	23.949
KEWAJIBAN									
Hutang usaha yang mempunyai hubungan istimewa									
Dolar AS	1,51	14.204	–	–	–	–	–	–	14.204
Euro	0,50	6.927	–	–	–	–	–	–	6.927
Dolar Singapura	–	22	–	–	–	–	–	–	22
Pihak ketiga									
Dolar AS	29,29	275.319	–	–	–	–	–	–	275.319
Euro	6,06	83.379	–	–	–	–	–	–	83.379
Pound Sterling	0,01	260	–	–	–	–	–	–	260
Swiss Franc	0,01	86	–	–	–	–	–	–	86
Dolar Singapura	0,14	932	–	–	–	–	–	–	932
Dolar Hongkong	0,16	190	–	–	–	–	–	–	190
Hutang lain-lain									
Dolar AS	0,50	4.673	–	–	–	–	–	–	4.673
Pound Sterling	–	2	–	–	–	–	–	–	2
Dolar Singapura	–	10	–	–	–	–	–	–	10
Beban yang masih harus dibayar									
Dolar AS	163,34	1.538.362	–	–	–	–	–	–	1.538.362
Euro	67,78	933.328	–	–	–	–	–	–	933.328
Yen Jepang	46,85	3.890	–	–	–	–	–	–	3.890
Dolar Singapura	0,37	2.394	–	–	–	–	–	–	2.394
Pound Sterling	0,05	854	–	–	–	–	–	–	854
Uang Muka dari pelanggan dan pemasok									
Dolar AS	1,28	12.001	–	–	–	–	–	–	12,001
Hutang jangka panjang[1]									
Dolar AS	523,75	4.922.870	1.322.496	1.155.240	1.133.498	352.555	177.877	781.205	4.764.186
Yen Jepang	13.241,76	1.099.596	79.337	63.766	63.766	63.766	63.766	765.195	1.002.472
Euro	7,34	100.949	100.949	–	–	–	–	–	100.122

(1) Hutang jangka panjang dalam tabel terdiri dari pinjaman dalam mata uang asing, pinjaman penerusan (*two step loans*), kewajiban penggabungan usaha, pinjaman bank jangka panjang yang masing-masing termasuk kewajiban yang jatuh tempoi dalam satu tahun.

Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang Perusahaan terutama terdiri dari investasi minoritas pada ekuitas perusahaan swasta Indonesia. Berkenaan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia tempat Perusahaan memiliki investasi, kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi ekonomi makro dan sosial seperti tingkat kegiatan ekonomi, nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, laju inflasi dan suku bunga.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, dan 2007 yang disajikan dalam buku Laporan Tahunan. Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan berdasarkan PSAK Indonesia (Indonesian GAAP) yang dalam beberapa hal berbeda dengan U.S. GAAP. Lihat Catatan 55 dan 56 laporan keuangan konsolidasian untuk penyesuaian dengan U.S. GAAP.

Tinjauan Hasil Usaha

Perusahaan adalah penyedia utama layanan telekomunikasi lokal, domestik, dan internasional di Indonesia, serta penyedia layanan telepon selular terkemuka melalui kepemilikan mayoritas Perusahaan pada anak perusahaan, Telkomsel. Pada tanggal 31 Desember 2007, Perusahaan memiliki 15,1 juta sambungan telepon tidak bergerak yang terdiri dari 8,7 juta sambungan telepon tidak bergerak kabel dan 6,4 juta sambungan telepon tidak bergerak nirkabel dan Telkomsel memiliki 47,9 juta pelanggan telepon selular. Perusahaan juga menyediakan beragam layanan komunikasi lain, yaitu layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data dan internet serta layanan terkait, sewa transponder satelit, sirkit langganan, jaringan pintar dan layanan terkait, televisi kabel dan layanan VoIP.

Hasil usaha Perusahaan selama tiga tahun untuk periode 2005-2007 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan pada pendapatan usaha, terutama untuk telepon tidak bergerak nirkabel, selular, interkoneksi, dan data dan internet. Pertumbuhan pendapatan usaha pada layanan telepon tidak bergerak nirkabel mencerminkan pertumbuhan produksi pulsa pelanggan nirkabel. Pertumbuhan pendapatan selular terutama mencerminkan pertumbuhan jumlah pelanggan selular Telkomsel. Pertumbuhan pendapatan data dan internet terutama disebabkan meningkatnya trafik SMS dari pelanggan Telkomsel dan meningkatnya penggunaan layanan multimedia. Pendapatan interkoneksi pun turut meningkat seiring dengan meningkatnya biaya interkoneksi yang diterima dari operator telepon selular dan sambungan langsung internasional TELKOM (TELKOM SLI-007). Pada tahun 2007, Perusahaan tidak memperoleh pendapatan dari KSO sehubungan dengan akuisisi KSO VII.

Hasil usaha Perusahaan tahun 2005-2007 juga menunjukkan pertumbuhan signifikan pada beban operasi. Sejak tahun 2005 sampai 2006, pertumbuhan beban operasi terutama dipicu oleh meningkatnya beban karyawan, beban penyusutan, operasi serta pemeliharaan dan jasa telekomunikasi. Pertumbuhan beban operasi sejak tahun 2006 sampai 2007 terutama dipicu oleh pertumbuhan operasi, beban pemeliharaan jasa dan telekomunikasi, beban penyusutan, dan beban pemasaran.

Pertumbuhan Pasar Selular di Indonesia dan Peningkatan Pendapatan Telkomsel

Pasar selular Indonesia mengalami kenaikan signifikan pada tahun-tahun terakhir. Telkomsel mengalami pertumbuhan pendapatan operasi bersih sebesar 25,8% sejak 2006 sampai 2007 sebagai akibat pertumbuhan jumlah pelanggan selular sebesar 34,5%. Pendapatan Telkomsel dari jasa telepon selular (*airtime charges*, abonemen, biaya penyambungan, dan fitur) mencakup 38,1% dari total pendapatan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, dibandingkan dengan 40,2% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dan 34,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

Seiring dengan pertumbuhan pasar selular, persaingan telah meningkat di antara para operator selular, terutama pada segmen prabayar. Para operator selular ini pun sedikit bersaing dengan operator sambungan telepon tidak bergerak nirkabel, seiring dengan berkembangnya jumlah layanan tersebut. Lihat ”Faktor Risiko - Bisnis selular yang merupakan segmen penting bagi pendapatan Perusahaan menghadapi kendala dan tekanan persaingan yang signifikan”.

Peningkatan Pendapatan Interkoneksi TELKOM

Pendapatan interkoneksi-bersih memberikan kontribusi terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perusahaan sebesar 16,2% pada tahun 2007, 16,9% pada tahun 2006 dan 18,5% pada tahun 2005. Sejak tahun 2006 sampai 2007 dan 2005 sampai 2006, kenaikan pendapatan interkoneksi bersih sebesar 11,2% dan 12,1% terutama disebabkan kenaikan jumlah pelanggan selular dan sambungan telpon tidak bergerak. Pada tanggal 8 Pebruari 2006, Menkominfo menerbitkan Kepmen No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 yang menetapkan skema tarif interkoneksi berbasis biaya untuk seluruh operator jaringan dan layanan telekomunikasi dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2007. Dengan skema baru tersebut, operator jaringan tempat panggilan telepon berakhir akan menentukan besaran biaya interkoneksi yang akan diterimanya berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga pada akhirnya para operator akan menentukan biaya percakapan telepon berdasarkan biaya yang harus ditanggung untuk percakapan tersebut. Pada tanggal 28 Desember 2006, seluruh operator jaringan menandatangani perubahan perjanjian interkoneksi untuk jaringan telepon tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan selular untuk menerapkan kewajiban skema tarif berbasis biaya tersebut.

Peningkatan pada Pendapatan Data dan Internet TELKOM

Pendapatan data dan internet memberikan kontribusi terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian 24,7% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2007, 17,7% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 16,6% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2005. Pendapatan Perusahaan dari layanan data dan internet meningkat sebesar 62,0% dari tahun 2006 ke 2007 dan sebesar 30,7% dari tahun 2005 ke 2006. Kenaikan pendapatan data dan internet pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan SMS sebesar 87,8% dan koneksi internet sebesar 51,5%. Kenaikan pendapatan data dan internet pada tahun 2006 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan SMS sebesar 26,8%, komunikasi data sebesar 83,9% dan koneksi internet sebesar 27,6%. Dari tahun 2006 ke 2007, pendapatan dari layanan VoIP mengalami penurunan sebesar 28,7% menjadi Rp 198,4 miliar (US$ 21,1 juta) karena menurunnya jumlah trafik panggilan masuk VoIP.

Akuisisi dan Konsolidasi KSO VII

Pendapatan usaha dan beban usaha Perusahaan sejak tahun 2006 sampai 2007 dipengaruhi oleh akuisisi dan konsolidasi KSO VII pada taggal 19 Oktober 2006. Sehubungan dengan akuisisi KSO VII, pendapatan KSO telah menurun mulai dari tahun 2006. TELKOM tidak memiliki pendapatan KSO

pada tahun 2007. Lihat Catatan 4 dari laporan keuangan konsolidasian.

Penurunan Nilai Aktiva, Beban Penyusutan, Rugi atas Komitmen Pengadaan, Beban Operasi, Pemeliharaan dan Layanan Telekomunikasi

Beban penyusutan dan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi telah meningkat secara signifikan dalam periode tiga tahun, dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Peningkatan ini terutama terkait dengan pengembangan kapasitas jaringan Telkomsel karena pertumbuhan basis pelanggan dan peningkatan aktiva tetap TELKOM karena pembangunan telepon tidak bergerak nirkabel. Selain itu, TELKOM melakukan pengembangan yang agresif atas telepon tidak bergerak nirkabel di KSO IV dan KSO VII setelah TELKOM melakukan akuisisi KSO IV pada tanggal 20 Januari 2004 dan KSO VII pada tanggal 19 Oktober 2006. Pelanggan Telkomsel mengalami peningkatan dari 24.269.353 pelanggan pada posisi 31 Desember 2005 menjadi 35.597.171 pelanggan pada posisi 31 Desember 2006, dan 47.890.139 pelanggan pada posisi 31 Desember 2007. Sedangkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM tumbuh dari 4.061.867 sst pada posisi 31 Desember 2005 menjadi 4.175.853 sst pada posisi 31 Desember 2006 dan 6.362.844 sst pada posisi 31 Desember 2007.

Dengan adanya keputusan Pemerintah pada triwulan pertama tahun 2005 yang mengatur spektrum frekuensi yang digunakan oleh penyelenggara layanan telekomunikasi, TELKOM tidak lagi dapat menggunakan spektrum frekuensi untuk mendukung jaringan telepon tidak bergerak kabel sejak akhir tahun 2006. Akibatnya, fasilitas jaringan kabel TELKOM untuk telepon tidak bergerak kabel yang terdiri dari WLL dan *approach link equipment* yang beroperasi pada spektrum frekuensi tersebut tidak dapat lagi digunakan sejak akhir tahun 2006. Dengan ketentuan tersebut, TELKOM memperpendek perkiraan masa manfaat untuk perangkat WLL dan *approach link equipment* pada triwulan pertama tahun 2005 dan memulai menyusutkan nilai buku bersih dari aktiva tersebut sampai dengan 31 Desember 2006. Dampak dari perubahan ini adalah kenaikan beban penyusutan sebesar Rp 471,2 miliar di tahun 2005 dan Rp 240,4 miliar pada tahun 2006.

Pada bulan Agustus 2005, Menkominfo menetapkan bahwa spektrum frekuensi 1900 MHz khusus untuk layanan 3G dan spektrum frekuensi 800 MHz khusus untuk penggunaan jaringan teknologi berbasis CDMA yang dimulai pada akhir tahun 2007. Akibat ketentuan tersebut, peralatan BSS milik TELKOM di wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang menggunakan spektrum frekuensi 1900 Mhz dan merupakan bagian dari peralatan dan instalasi untuk jaringan telepon tidak bergerak nirkabel dengan total nilai perolehan Rp.1.330,8 miliar, tidak dapat lagi digunakan lagi sejak akhir tahun 2007. Pada tanggal 13 Januari 2006, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 yang menegaskan kembali keputusan Pemerintah bahwa jaringan telepon tidak bergerak nirkabel milik TELKOM hanya dapat beroperasi pada spektrum frekuensi 800 Mhz, dan spektrum 1900 Mhz akan dialokasikan untuk jaringan 3G. Menindaklanjuti Keputusan Menkominfo, TELKOM melakukan evaluasi atas nilai kas yang dapat direalisasikan atas aktiva telepon tidak bergerak nirkabel. Nilai kas yang dapat direalisasikan diestimasi dengan menggunakan nilai kini dari taksiran aliran kas masa depan dari kas yang diharapkan akan diterima dengan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 16,89% yang merupakan rata-rata tertimbang biaya modal pada tanggal 31 Desember 2005.TELKOM mengakui kerugian penurunan nilai aktiva untuk perangkat ini sebesar Rp 616,8 miliar pada tahun 2005. Selanjutnya, TELKOM mengubah estimasi umur ekonomis peralatan BSS di Jakarta dan Jawa Barat, dan menyusutkan sisa nilai buku bersih aktiva tersebut sampai 30 Juni 2007, yaitu pada saat semua peralatan BSS TELKOM pada frekuensi 1900 MHz akan tergantikan seluruhnya dengan peralatan BSS yang beroperasi pada frekuensi 800 MHz. Perubahan estimasi ini meningkatkan biaya penyusutan sebesar Rp 159,0 miliar dan Rp 173,8 miliar masing-masing pada tahun 2005 dan 2006. Pada bulan Juni 2007, TELKOM mendepresiasikan penuh seluruh aset tersebut. Selain itu, TELKOM mengakui kerugian sehubungan dengan kontrak yang tidak dapat dibatalkan atas pengadaan instalasi transmisi dan peralatan pada frekuensi 1900 MHz di Jakarta dan Jawa Barat senilai Rp 79,4 miliar pada tahun 2005.

Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva tidak berwujud terdiri dari aktiva tidak berwujud yang berasal dari anak perusahaan dan penggabungan usaha (lihat Catatan 2d, 2j, 3, 13, dan 37 dari laporan keuangan konsolidasian) dan lisensi. Aktiva tidak berwujud akan diakui jika kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dari aktiva tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Aktiva tidak berwujud dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada). Aktiva tidak berwujud diamortisasi selama umur manfaatnya. Perusahaan melakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas aktiva tidak berwujud pada tanggal neraca. Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aktiva tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Pada tahun 2006, Telkomsel memperoleh hak untuk mengoperasikan lisensi 3G. Telkomsel diharuskan membayar uang muka (*up-front fee*) dan iuran tahunan biaya hak penggunaan (BHP) selama sepuluh tahun mendatang. *Upfront fee* dicatat sebagai aktiva tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa hak pengoperasian lisensi 3G (10 tahun). Amortisasi diakui sejak aktiva tersebut tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan interpretasi manajemen atas persyaratan lisensi dan konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, diyakini bahwa lisensi dapat dikembalikan setiap waktu tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa BHP. Berdasarkan kenyataan tersebut, manajemen berpendapat bahwa Telkomsel dapat memperoleh hak mengoperasikan 3G dengan membayar iuran tahunan. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui BHP sebagai biaya pada saat terjadi.

Ringkasan Kebijakan Akuntansi yang Signifikan dan Beberapa Keputusan Akuntansi yang Baru

Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan beberapa keputusan akuntansi yang baru dapat ditemukan pada Catatan 2 dan 53 Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

Pendapatan Usaha TELKOM

Tabel berikut menunjukkan pendapatan usaha TELKOM, yang dikelompokkan sesuai dengan produk dan jasa utama TELKOM selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Setiap *item* dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha.

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Usaha							
Telepon							
Tidak Bergerak	10.781,3	25,8	10.979,0	21,4	11.001,2	18,5	1.171,1
Selular	14.570,9	34,9	20.622,6	40,2	22.638,1	38,1	2.409,8
Pendapatan Kerja Sama Operasi (KSO)	588,7	1,4	489,4	1,0	-	-	-
Interkoneksi							
Pendapatan	10.723,8	25,6	11.793,8	23,0	12.705,9	21,3	1.352,6
Beban	(2.981,7)	7,1	(3.112,3)	6,1	(3.054,6)	5,1	(325,2)
Bersih	7.742,1	18,5	8.681,5	16,9	9.651,3	16,2	1.027,4
Data dan Internet	6.934,3	16,6	9.065,2	17,7	14.684,1	24,7	1.563,1
Jaringan	586,6	1,4	718,7	1,4	707,4	1,2	75,3
Pola bagi Hasil (PBH)	302,3	0,7	415,5	0,8	428,0	0,7	45,6
Pendapatan Lain-lain	301,0	0,7	322,1	0,6	329,9	0,6	35,1
Jumlah Pendapatan Usaha	41.807,2	100,0	51.294,0	100,0	59.440,0	100,0	6.327,4

Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan telepon tidak bergerak selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak							
Percakapan lokal dan SLJJ	7.223,1	17,3	7.130,9	13,9	7.023,0	11,8	747,6
Pendapatan abonemen bulanan	3.289,8	7,9	3.491,5	6,8	3.700,6	6,2	393,9
Biaya pasang baru	197,3	0,5	170,2	0,3	123,7	0,2	13,2
Kartu telepon	10,9	0,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,1
Lainnya	60,2	0,1	182,4	0,4	152,9	0,3	16,3
Jumlah	10.781,3	25,8	10.979,0	21,4	11.001,2	18,5	1.171,1

Pendapatan Telepon Selular

Pendapatan telepon selular selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Telepon Selular							
Pendapatan pulsa	13.666,3	32,7	19.257,3	37,5	21.823,2	36,8	2.323,1
Pendapatan abonemen bulanan	383,5	0,9	297,4	0,6	371,8	0,6	39,5
Pendapatan jasa penyambungan	64,1	0,2	109,2	0,2	130,4	0,2	13,9
Fitur	457,0	1,1	958,7	1,9	312,7	0,5	33,3
Jumlah	14.570,9	34,9	20.622,6	40,2	22.638,1	38,1	2.409,8

Pendapatan Kerja Sama Operasi (KSO)

Pendapatan Kerja Sama Operasi selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan KSO							
Pendapatan minimum TELKOM	268,6	0,6	207,5	0,4	-	-	-
Bagian atas pendapatan KSO yang harus dibagi	318,6	0,8	274,6	0,6	-	-	-
Amortisasi pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan	1,5	0,0	7,3	0,0	-	-	-
Jumlah	588,7	1,4	489,4	1,0	-	-	-

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Interkoneksi	10.723,8	25,6	11.793,8	23,0	12.705,9	21,3	1.352,6
Beban Interkoneksi	2.981,7	7,1	3.112,3	6,1	3.054,6	5,1	325,2
Jumlah Pendapatan Interkoneksi – bersih	7.742,1	18,5	8.681,5	16,9	9.651,3	16,2	1.027,4

Pendapatan Data dan Internet

Pendapatan data dan internet selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Data dan Internet							
SMS	5.309,2	12,7	6.730,5	13,1	12.639,3	21,3	1.345,5
Internet	711,4	1,7	907,5	1,8	1.374,8	2,3	146,3
Komunikasi data	610,4	1,5	1.122,3	2,2	443,2	0,8	47,2
VoIP	292,7	0,7	278,0	0,5	198,3	0,3	21,1
e-*business*	10,6	0,0	26,9	0,1	28,5	0,0	3,0
Jumlah	6.934,3	16,6	9.065,2	17,7	14.684,1	24,7	1.563,1

Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Jaringan							
Sewa transponder satelit	239,5	0,6	294,1	0,6	233,9	0,4	24,9
Sirkit langganan	347,1	0,8	424,6	0,8	473,5	0,8	50,4
Jumlah	586,6	1,4	718,7	1,4	707,4	1,2	75,3

Pendapatan Pola Bagi Hasil

Pendapatan pola bagi hasil selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Pola Bagi Hasil							
Pendapatan pola bagi hasil	165,6	0,4	263,5	0,5	114,2	0,2	12,2
Amortisasi pendapatan pola bagi hasil yang ditangguhkan	136,7	0,3	152,0	0,3	313,8	0,5	33,4
Jumlah	302,3	0,7	415,5	0,8	428,0	0,7	45,6

Pendapatan Layanan Telekomunikasi Lainnya

Pada tahun 2007, pendapatan dari layanan telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp 7,8 miliar, atau 2,4% dari Rp 322,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 329,9 miliar pada tahun 2007. Peningkatan jasa telekomunikasi lainnya ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan layanan direktori sejumlah Rp 37,8 miliar, atau 12,4% dari Rp 304,2 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 342,0 miliar pada tahun 2007.

Beban Usaha TELKOM

Tabel berikut menampilkan beban usaha TELKOM selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 yang setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Usaha							
Penyusutan	7.570,7	18,1	9.178,3	17,9	9.545,0	16,1	1.016,1
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	5.916,3	14,1	7.495,7	14,6	9.590,6	16,1	1.020,9
Karyawan	6.563,0	15,7	8.513,8	16,6	8.494,9	14,3	904,3
Umum dan administrasi	2.764,0	6,6	3.271,5	6,4	3.567,7	6,0	379,8
Pemasaran	1.126,2	2,7	1.241,5	2,4	1.769,1	3,0	188,3
Penurunan nilai aktiva	616,8	1,5	–	–	–	–	–
Kerugian atas komitmen pembelian	79,4	0,2	–	–	–	–	–
Jumlah Beban Usaha	**24.636,4**	**58,9**	**29.700,8**	**57,9**	**32.967,3**	**55,5**	**3.509,4**

Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 ditampilkan sebagai berikut, dengan setiap *item* juga dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi							
Operasi dan pemeliharaan	3.075,1	7,3	4.209,1	8,2	5.415,8	9,1	576,5
Beban pemakaian frekuensi radio	548,2	1,3	722,6	1,4	1.138,5	1,9	121,2
Beban hak penyelenggaraan dan kewajiban pelayanan universal	709,2	1,7	881,8	1,7	1.026,3	1,7	109,2
Beban kartu telepon, SIM dan RUIM	582,3	1,4	579,3	1,1	582,1	1,0	62,0
Listrik, gas dan air	372,5	0,9	417,3	0,8	481,7	0,8	51,3
Sewa kendaraan bermotor dan fasilitas pendukung	217,2	0,5	246,2	0,5	236,3	0,4	25,1
Asuransi	136,4	0,3	145,1	0,3	342,7	0,6	36,5
Sirkit langganan	124,2	0,3	236,4	0,5	298,7	0,5	31,8
Beban perjalanan dinas	33,5	0,1	39,1	0,1	50,2	0,1	5,3
Call center	105,0	0,3	14,7	0,0	11,2	0,0	1,2
Lainnya	12,7	0,0	4,1	0,0	7,1	0,0	0,8
Jumlah	5.916,3	14,1	7.495,7	14,6	9.590,6	16,1	1.020,9

Beban Karyawan

Beban karyawan selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Karyawan							
Gaji dan tunjangan	2.165,9	5,2	2.400,6	4,7	2.760,8	4,6	293,9
Tunjangan cuti, insentif dan tunjangan lainnya	1.615,6	3,8	2.209,1	4,3	2.488,3	4,2	264,9
Pensiun dini	486,4	1,2	1.461,2	2,9	-	-	-
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala – bersih	488,6	1,2	604,7	1,2	723,2	1,2	77,0
Beban pensiun berkala – bersih	532,3	1,3	438,4	0,9	859,5	1,5	91,5
Pajak penghasilan karyawan	856,4	2,0	889,1	1,7	1.511,2	2,5	160,9
Beban penghargaan masa kerja	134,7	0,3	139,7	0,3	(359,8)	(0,5)	(38,3)
Perumahan	113,7	0,3	168,4	0,3	219,7	0,4	23,4
Bantuan peningkatan kesejahteraan	-	-	-	-	123,3	0,2	13,1
Beban imbalan pasca kerja lainnya	67,2	0,2	76,2	0,1	84,7	0,1	9,0
Pengobatan	18,0	0,0	25,1	0,0	28,1	0,0	3,0
Imbalan karyawan lainnya	6,0	0,0	14,3	0,0	13,6	0,0	1,4
Lain-lain	78,2	0,2	87,0	0,2	42,3	0,1	4,5
Jumlah	6,563,0	15,7	8.513,8	16,6	8.494,9	14,3	904,3

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Umum dan Administrasi							
Jasa profesional	131,0	0,3	221,0	0,4	156,9	0,3	16,7
Beban penagihan	379,1	0,9	542,5	1,1	598,6	1,0	63,7
Amortisasi *goodwill* dan aktiva tidak berwujud lainnya	918,2	2,2	944,4	1,8	1.049,5	1,8	111,7
Pelatihan, pendidikan dan perekrutan	177,9	0,4	224,3	0,4	222,7	0,4	23,7
Perjalanan dinas	171,7	0,4	229,7	0,5	254,1	0,4	27,1
Keamanan dan skrining	164,4	0,4	197,4	0,4	236,0	0,4	25,1
Sumbangan sosial dan umum	204,3	0,5	301,8	0,6	237,4	0,4	25,3
Sewa kendaraan bermotor	-	-	-	-	103,0	0,2	11,0
Alat tulis dan cetak	50,2	0,1	51,9	0,1	79,9	0,1	8,5
Rapat	40,3	0,1	64,0	0,1	88,9	0,1	9,5
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang	489,0	1,2	458,2	0,9	500,8	0,8	53,3
Penelitian dan pengembangan	8,4	0,0	8,7	0,0	6,7	0,0	0,7
Lain-lain	29,5	0,1	27,6	0,1	33,0	0,1	3,5
Jumlah	2.764,0	6,6	3.271,5	6,4	3.567,7	6,0	379,8

Beban Pemasaran

Beban pemasaran selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut, untuk setiap *item* juga dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2005		2006		2007		2007
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Pemasaran							
Iklan	795,6	1,9	944,3	1,8	1.300,7	2,2	138,5
Edukasi pelanggan	305,3	0,7	267,7	0,5	424,8	0,7	45,2
Lain-lain	25,3	0,1	29,5	0,1	43,6	0,1	4,6
Jumlah	1.126,2	2,7	1.241,5	2,4	1.769,1	3,0	188,3

Hasil Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

A. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha meningkat sebesar Rp 8.146,0 miliar atau 15,9% dari Rp 51.294,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 59.440,0 miliar pada tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan data dan internet, selular, interkoneksi, dan telepon tetap nirkabel.

1. Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak meningkat sebesar Rp 22,2 miliar atau 0,2% dari Rp 10.979,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 11.001,2 miliar pada tahun 2007. Peningkatan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari layanan telepon tetap nirkabel yang diimbangi dengan penurunan pada pendapatan telepon tidak bergerak kabel. Pendapatan telepon tetap nirkabel meningkat sebesar Rp 325,5 miliar atau 30,7% dari Rp 1.058,4 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.383,9 miliar pada tahun 2007. Pendapatan telepon tidak bergerak kabel menurun sebesar Rp 303,3 miliar atau 3,1%, dari Rp 9.920,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 9.617,3 miliar pada tahun 2007.

Peningkatan pendapatan telepon tidak bergerak nirkabel terutama disebabkan pertumbuhan produksi pulsa nirkabel sebesar 62,5% dari 5,6 miliar menit pada tahun 2006 menjadi 9,1 miliar menit pada tahun 2007. Peningkatan ini diimbangi oleh penurunan pendapatan telepon tidak bergerak kabel terutama karena penurunan pendapatan lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri sebesar 7,2% dari Rp 6.413,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 5.951,2 miliar pada tahun 2007. Penurunan pendapatan telepon tidak bergerak kabel terutama disebabkan penurunan produksi pulsa sambungan kabel selular sebesar 12,3% dari 44,9 miliar pulsa pada tahun 2006 menjadi 39,4 miliar pulsa pada tahun 2007.

2. Pendapatan Telepon Selular

Pendapatan telepon selular meningkat sebesar Rp 2.015,5 miliar atau 9,8% dari Rp 20.622,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 22.638,1 miliar pada tahun 2007 terutama disebabkan karena meningkatnya biaya *air time* sebesar Rp 2.565,9 miliar atau 13,3% dari Rp 19.257,3 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 21.823,2 miliar pada tahun 2007. Pendapatan jasa penyambungan meningkat sebesar Rp 21,2 miliar atau 19,4% dari Rp 109,2 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 130,4 miliar pada tahun 2007 yang disebabkan oleh peningkatan (bersih) pelanggan KartuHALO. Pendapatan fitur menurun sebesar Rp 646,0 miliar atau 67,4% dari Rp 958,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 312,7 miliar pada tahun 2007 yang disebabkan karena adanya penurunan pendapatan penggunaan layanan fitur-fitur baru, di antaranya *ring-backtone*, *message boards* dan jasa fax bergerak. Pendapatan abonemen bulanan meningkat sebesar Rp 74,4 miliar atau 25,0% dari Rp 297,4 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 371,8 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini terutama karena adanya peningkatan jumlah pelanggan KartuHALO.

Peningkatan pendapatan selular terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan Telkomsel sebesar 34,6% dari 35,6 juta pelanggan pada tahun 2006 menjadi 47,9 juta pelanggan pada tahun 2007. Peningkatan jumlah pelanggan ini karena terjadinya peningkatan pelanggan bersih sebesar 9,0% dari 11,3 juta pelanggan pada tahun 2006 menjadi 12,3 juta pelanggan pada tahun 2007. Pelanggan pascabayar tumbuh sebesar 15,0% menjadi 1,9 juta pelanggan, sedangkan pelanggan prabayar meningkat sebesar 35,5% menjadi 46,0 juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2007.

Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pelanggan prabayar menyebabkan komposisi pelanggan prabayar terhadap total jumlah pelanggan meningkat dari 95,3% pada tahun 2006 menjadi 96,0% pada tahun 2007. Akibat perubahan komposisi pelanggan tersebut menyebabkan kenaikan persentase jumlah pelanggan prabayar terhadap total jumlah pelanggan, ARPU bulanan menurun dari sekitar Rp 84.000 pada tahun 2006 menjadi sekitar Rp 80.000 pada tahun 2007. ARPU untuk SMS/*non-voice* pelanggan pascabayar meningkat dari sekitar Rp 47.000 pada tahun 2006 menjadi sekitar Rp 49.000 pada tahun 2007.

3. Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi-bersih meningkat sebesar Rp 969,8 miliar atau 11,2% dari Rp 8.681,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 9.651,3 miliar pada tahun 2007. Pendapatan interkoneksi bersih terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak kami dan pendapatan interkoneksi bersih dari jaringan selular Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung internasional *incoming* dari layanan SLI (TELKOMSLI-007).

Pendapatan interkoneksi bersih memberikan kontribusi 16,2% dari total pendapatan usaha konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dibandingkan 16,9% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2006.

4. Pendapatan KSO (Kerja Sama Operasi)

Pendapatan KSO menurun sebesar Rp 489,4 miliar, atau 100,0%, dari Rp 489,4 miliar pada tahun 2006 dan Rp 0 pada tahun 2007 disebabkan karena adanya akuisisi KSO VII pada bulan Oktober 2006.

5. Pendapatan Data dan Internet

Pendapatan Data dan Internet meningkat sebesar Rp 5.618,9 miliar atau 62,0% dari Rp 9.065,2 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 14.684,1 miliar di tahun 2007. Peningkatan pendapatan data dan internet terutama disebabkan peningkatan yang signifikan dari pendapatan SMS dan pendapatan koneksi internet. Pendapatan SMS meningkat sebesar Rp 5.908,8 miliar atau 87,8% dari Rp 6.730,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 12.639,3 miliar pada tahun 2007 terutama disebabkan pertumbuhan yang signifikan dari trafik SMS pelanggan

Telkomsel. Pendapatan internet meningkat sebesar Rp 467,3 miliar atau 51,5% dari Rp 907,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.374,8 miliar pada tahun 2007, terutama karena peningkatan usaha pemasaran untuk mendorong peningkatan penjualan terhadap layanan data dan internet, peningkatan pemakaian *dial-up* internet dari TELKOMNet Instant dan peningkatan pelanggan Speedy pada tahun 2007. Pendapatan layanan e-*Business* meningkat sebesar Rp 1,6 miliar atau 6,0% dari Rp 26,9 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 28,5 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi layanan e-*payment*. Pendapatan VoIP menurun sebesar Rp 79,6 miliar atau 28,6% dari Rp 278,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 198,4 miliar pada tahun 2007, disebabkan menurunnya trafik *incoming* dan *outgoing* VoIP internasional.

6. Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan menurun sebesar Rp 11,3 miliar atau 1,6% dari Rp 718,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 707,4 miliar pada tahun 2007. Pendapatan sewa transponder satelit turun sebesar Rp 60,2 miliar atau 20,5% dari Rp 294,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 233,9 miliar pada tahun 2007. Pendapatan sirkit langganan meningkat sebesar Rp 48,9 miliar atau 11,5% dari Rp 424,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 473,5 miliar pada tahun 2007 disebabkan karena meningkatnya jumlah operator telekomunikasi yang menggunakan jaringan TELKOM.

7. Pendapatan Pola Bagi Hasil (PBH)

Pendapatan Pola Bagi Hasil meningkat sebesar Rp 12,5 miliar atau 3,0% dari Rp 415,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 428,0 miliar pada tahun 2007. Amortisasi pendapatan yang ditangguhkan dari PBH meningkat sebesar Rp 161,8 miliar atau 106,5% dari Rp 152,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 313,8 miliar pada tahun 2007. Pendapatan Pola Bagi Hasil-bersih menurun sebesar Rp 149,3 miliar atau 56,7% dari Rp 263,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 114,2 miliar pada tahun 2007. Jumlah kontrak PBH sebanyak 90 dengan 67 mitra pada tanggal 31 Desember 2006 dan sejumlah 55 kontrak dengan 45 mitra pada tanggal 31 Desember 2007.

8. Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pendapatan dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp 7,8 miliar atau 2,4% dari Rp 322,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 329,9 miliar pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan layanan direktori.

B. Beban Usaha

Jumlah beban usaha meningkat sebesar Rp 3.266,5 miliar atau 11,0% dari Rp 29.700,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 32.967,3 miliar pada tahun 2007. Peningkatan total beban usaha terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, beban pemasaran, beban penyusutan dan beban adminstrasi dan umum sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah.

1. Beban Karyawan

Beban karyawan menurun sebesar Rp 18,9 miliar atau 0,2% dari Rp 8.513,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 8.494,9 miliar pada tahun 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peniadaan beban pensiun dini pada tahun 2007 dan penurunan beban penghargaan masa kerja. Penurunan beban karyawan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- beban pensiun dini sebesar Rp (1.461,2 miliar) ditiadakan karena tidak adanya pelaksanaan program pensiun dini pada tahun 2007.
- beban penghargaan masa kerja menurun sebesar Rp 499,5 atau 357,6% dari Rp 139,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp (359,8) miliar pada tahun 2007, sejak program ini tidak dilanjutkan pada tahun 2007.

Penurunan ini diimbangi oleh peningkatan:

- tunjangan cuti, insentif dan tunjangan lainnya yang meningkat sebesar Rp 279,2 miliar atau 12,6% dari Rp 2.209,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 2.488,3 miliar pada tahun 2007;
- gaji dan tunjangan yang meningkat sebesar Rp 360,2 miliar atau 15,0% dari Rp 2.400,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 2.760,8 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan meningkatnya gaji dasar rata-rata sebesar 8,0%;
- beban pensiun berkala bersih yang meningkat sebesar Rp 421,1 miliar, atau 96,1% dari Rp 438,4 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 859,5 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan oleh implementasi program masa persiapan pensiun pada tahun 2007 (lihat catatan 41 laporan keuangan konsolidasian);
- beban imbalan kesehatan pascakerja berkala bersih yang meningkat sebesar Rp 118,5 miliar atau 19,6% dari Rp 604,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 723,2 miliar pada tahun 2007;
- beban pajak pendapatan karyawan yang meningkat sebesar Rp 622,1 miliar atau 70,0% dari Rp 889,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.511,2 miliar pada tahun 2007; dan
- bantuan peningkatan kesejahteraan yang meningkat sebesar Rp 123,3 miliar pada tahun 2007.

Komponen lainnya dari beban karyawan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban usaha tahun 2007.

2. Beban Penyusutan

Beban penyusutan meningkat sebesar Rp 366,7 miliar atau 4,0% dari Rp 9.178,3 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 9.545,0 miliar pada tahun 2007. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah BTS Telkomsel sebanyak 4.801 unit pada tahun 2007, peningkatan kapasitas stasiun transmisi dan penerima, *switching* dan peralatan jaringan pintar dan juga peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur jaringan (jaringan transmisi, *backbone* dan jaringan akses).

3. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi meningkat sebesar Rp 2.094,9 miliar atau 27,9% dari Rp 7.495,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 9.590,6

miliar pada tahun 2007. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh:

- peningkatan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 1.206,7 miliar atau 28,7%, dari Rp 4.209,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 5.415,8 miliar pada tahun 2007 yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas jaringan Telkomsel yang mendukung peningkatan jumlah pelanggan dari 35,6 juta pada tahun 2006 menjadi 47,9 juta pelanggan pada tahun 2007. Jumlah BTS Telkomsel tumbuh sebesar 30% dari 16.057 unit pada tahun 2006 menjadi 20.858 unit pada tahun 2007. Telkomsel juga meningkatkan kapasitas stasiun transmisi dan penerima dan *switching* serta peralatan jaringan pintar;
- beban penyelenggaraan dan *Universal Service Obligation* (USO) yang meningkat sebesar Rp 144,5 miliar, dari Rp 881,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.026,3 miliar pada tahun 2007, atau meningkat sebesar 16,4% yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban penyelenggaraan yang dibayarkan oleh Telkomsel dan TELKOM kepada Pemerintah (untuk sambungan telepon tidak bergerak dan bisnis selular) dari Rp 497,9 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 587,8 miliar pada tahun 2007, meningkat sebesar 18,0% atau Rp 89,8 miliar;
- beban pemakaian frekuensi radio meningkat sebesar Rp 415,9 miliar atau 57,6%, dari Rp 722,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.138,5 miliar pada tahun 2007 yang disebabkan oleh peningkatan BTS Telkomsel dan TELKOM, dan tambahan biaya hak penyelenggaraan (BHP) tahunan untuk lisensi 3G. Jumlah BTS TELKOM meningkat sebesar 25% dari 1.531 unit pada tahun 2006 menjadi 1.911 unit pada tahun 2007. Jumlah BTS Telkomsel meningkat sebesar 30% dari 16.057 unit pada tahun 2006 menjadi 20.858 unit pada tahun 2007; dan
- beban asuransi aktiva tetap meningkat sebesar Rp 197,6 miliar atau 136,2%, dari Rp 145,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 342,7 miliar pada tahun 2007 yang disebabkan oleh peningkatan aktiva tetap yang di asuransikan.

Komponen lain dari beban operasi, pemeliharaan dan layanan telekomunikasi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban operasi tahun 2007

4. Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi meningkat sebesar Rp 296,2 miliar atau 9,1% dari Rp 3.271,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 3.567,7 miliar pada tahun 2007, yang disebabkan oleh:

- peningkatan beban penagihan sebesar Rp 56,1 miliar atau 10,3%, dari Rp 542,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 598,6 miliar pada tahun 2007 yang sejalan dengan pertumbuhan pelanggan telepon tidak bergerak dan pelanggan selular Telkomsel yang mengakibatkan peningkatan beban penagihan yang harus dibayar kepada pihak ketiga sebagai agen penagihan;
- peningkatan beban keamanan dan skrining sebesar Rp 38,6 miliar, atau 19,6%, dari Rp 197,4 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 236,0 miliar pada tahun 2007, yang terutama disebabkan oleh peningkatan gaji petugas keamanan;
- peningkatan beban perjalanan dinas sebesar Rp 24,4 miliar atau 10,6%, dari Rp 229,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 254,1 miliar pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh peningkatan beban perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 28,1 miliar; dan
- peningkatan beban amortisasi *goodwill* dan aktiva tidak berwujud sebesar Rp 105,1 miliar atau 11,1%, dari Rp 944,4 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.049,5 miliar pada tahun 2007, yang disebabkan oleh peningkatan amortisasi atas hak pengelolaan KSO sebagai hasil akuisisi KSO VII dan pembayaran *up-front fee* untuk lisensi 3G.

Peningkatan di atas diimbangi oleh:

- penurunan dari beban jasa profesional sebesar Rp 64,1 miliar atau Rp 29,0%, dari Rp 221,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 156,9 miliar pada tahun 2007 yang terutama disebabkan oleh penurunan beban konsultan manajemen sebesar Rp 67,1 miliar; dan
- penurunan beban sumbangan sosial dan umum sebesar Rp 64,4 miliar atau 21,3%, dari Rp 301,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 237,4 miliar pada tahun 2007 yang terutama disebabkan oleh penurunan implementasi program kemitraan.

Komponen lain dari beban umum dan administrasi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban operasi tahun 2007.

5. Beban Pemasaran

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp 527,6 miliar atau 42,5% dari Rp 1.241,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.769,1 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan sebesar Rp 356,4 miliar atau 37,7% dan peningkatan beban edukasi pelanggan sebesar Rp 157,1 miliar atau 58,7%.

C. Laba Usaha dan Marjin Usaha

Laba usaha meningkat sebesar Rp 4.879,5 miliar atau 22,6% dari Rp 21.593,2 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 26.472,7 miliar pada tahun 2007. Marjin usaha Perusahaan sedikit meningkat dari 42,1% pada tahun 2006 menjadi 44,5% pada tahun 2007.

D. Penghasilan (Beban) Lainnya

Penghasilan lainnya turun sebesar Rp 1.277,5 miliar atau 319,1% dari laba sebesar Rp 400,4 miliar pada tahun 2006 menjadi beban sebesar Rp 877,1 miliar pada tahun 2007, terutama yang disebabkan oleh:

- laba selisih kurs (bersih) menurun sebesar Rp 1.131,1 miliar atau 135,2% dari laba Rp 836,3 miliar pada tahun 2006 menjadi rugi sebesar Rp 294,8 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan oleh depresiasi Rupiah yang diakibatkan oleh rugi translasi dari pinjaman dalam mata uang dolar AS;
- beban bunga meningkat sebesar Rp 149,8 miliar atau 11,6% dari Rp 1.286,4 miliar pada tahun 2006 menjadi

Rp 1.436,2 miliar pada tahun 2007, terutama karena meningkatnya pinjaman bank jangka pendek dan jangka menengah Telkomsel;
- pendapatan bunga turun sebesar Rp 136,3 miliar atau 20,8% dari Rp 655,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 518,7 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan turunnya suku bunga deposito; dan
- pendapatan lain-lain (bersih) meningkat sebesar Rp 126,6 miliar atau 62,6% dari Rp 202,0 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 328,6 miliar pada tahun 2007.

Komponen lain tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan (beban) lain-lain pada tahun 2007.

E. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 3.602,1 miliar atau 16,4% dari Rp 21.993,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 25.595,7 miliar pada tahun 2007. Marjin laba sebelum pajak meningkat dari 42,9% pada tahun 2006 menjadi 43,1% pada tahun 2007.

F. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp 887,9 miliar atau 12,6% dari Rp 7.039,9 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 7.927,8 miliar pada tahun 2007, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan sebelum pajak sebesar pada tahun 2007.

G. Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan

Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan meningkat sebesar Rp 862,7 miliar atau 21,9% dari Rp 3.948,1 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 4.810,8 miliar pada tahun 2007. Terutama disebabkan karena meningkatnya kinerja keuangan Telkomsel (35% saham Telkomsel dimiliki SingTel Mobile).

H. Laba Bersih

Laba bersih perusahaan meningkat sebesar Rp 1.851,4 miliar atau 16,8% dari Rp 11.005,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 12.857,0 miliar pada tahun 2007. Marjin laba bersih meningkat dari 21,5% pada tahun 2006 menjadi 21,6% pada tahun 2007.

I. Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 5.679,9 miliar atau 20,2% dari Rp 28.068,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 33.748,6 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih sebesar Rp 1.851,4 miliar pada tahun 2007, yang diimbangi dengan peningkatan dividen tunai sebesar Rp 676,3 miliar. Selama tahun 2007, TELKOM telah membeli kembali Saham Seri B yang diterbitkan dan beredar sebanyak 244.740.500 lembar, yang merupakan 1,21% dari saham yang diterbitkan dan beredar dengan jumlah nilai sebesar Rp 2.176,6 miliar (termasuk biaya *broker* dan kustodian). Pembelian ini mempengaruhi penurunan ekuitas sebesar Rp 1.224,4 miliar.

J. Saldo Laba

Saldo laba baik yang sudah ditentukan penggunaannya maupun belum ditentukan penggunaannya meningkat sebesar Rp 6.809,6 miliar dari Rp 22.105,4 miliar pada 31 Desember 2006 menjadi Rp 28.915,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2007, yang disebabkan karena laba bersih sebesar Rp 12.857,0 miliar tahun 2007 dan dikurangi dividen tunai sebesar Rp 6.047,5 miliar.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005

A. Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha meningkat sebesar Rp 9.486,8 miliar atau 22,7% dari Rp 41.807,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 51.294,0 miliar pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan usaha tahun 2006 terutama disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan selular, interkoneksi dan pendapatan data dan internet.

1. Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak meningkat sebesar Rp 197,7 miliar atau 1,8% dari Rp 10.781,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 10.979,0 miliar pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari layanan telepon tetap nirkabel yang diimbangi dengan penurunan pada pendapatan telepon tidak bergerak kabel. Pendapatan telepon tetap nirkabel meningkat sebesar Rp 548,5 miliar atau 107,6% dari Rp 509,9 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 1.058,4 miliar pada tahun 2006. Pendapatan telepon tidak bergerak kabel menurun sebesar Rp 350,8 miliar atau 3,4%, dari Rp 10.271,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 9.920,6 miliar pada tahun 2006.

Peningkatan pendapatan telepon tetap nirkabel terutama disebabkan pertumbuhan produksi pulsa nirkabel sebesar 55,6% dari 3,6 miliar menit pada tahun 2005 menjadi 5,6 miliar menit pada tahun 2006. Peningkatan ini diimbangi oleh penurunan pendapatan telepon tidak bergerak kabel yang disebabkan penurunan pendapatan lokal dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) sebesar 7,3% dari Rp 6.920,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 6.413,8 miliar pada tahun 2006.

2. Pendapatan Telepon Selular

Pendapatan telepon selular meningkat sebesar Rp 6.051,7 miliar atau 41,5% dari Rp 14.570,9 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 20.622,6 miliar pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan telepon selular terutama disebabkan meningkatnya biaya air time, yang diimbangi oleh penurunan pendapatan abonemen bulanan. *Airtime* meningkat sebesar Rp 5.591,0 miliar atau 40,9% dari Rp 13.666,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 19.257,3 miliar pada tahun 2006. Pendapatan jasa penyambungan meningkat sebesar Rp 45,1 miliar atau 70,4% dari Rp 64,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 109,2 miliar pada tahun 2006 disebabkan oleh pertumbuhan (bersih) pelanggan KartuHALO. Pendapatan fitur meningkat sebesar Rp 501,7 miliar atau 109,8% dari Rp 457,0 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 958,7 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini karena adanya peningkatan penggunaan layanan fitur-fitur baru, di antaranya *ring-back tone*, *message boards,* dan jasa fax bergerak. Pendapatan abonemen bulanan menurun sebesar Rp 86,1 miliar atau 22,4% dari Rp 383,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 297,5 miliar pada tahun 2006. terutama karena adanya pembebasan biaya abonemen bulanan untuk pelanggan tertentu yang ditawarkan oleh Telkomsel guna menyaingi tawaran serupa dari para pesaing Telkomsel. Peningkatan pendapatan selular

terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan Telkomsel sebesar 47% dari 24,3 juta pelanggan pada tahun 2005 menjadi 35,6 juta pelanggan pada tahun 2006. Peningkatan jumlah pelanggan ini karena terjadinya peningkatan pelanggan (bersih) sebesar 41% dari 8,0 juta pelanggan pada tahun 2005 menjadi 11,3 juta pelanggan pada tahun 2006. Pelanggan pascabayar tumbuh sebesar 13,0% menjadi 1,7 juta pelanggan, sedangkan pelanggan prabayar tumbuh sebesar 48,8% menjadi 33,9 juta pelanggan pertanggal 31 Desember 2006.

Pertumbuhan yang lebih tinggi dari pelanggan prabayar menyebabkan komposisi pelanggan tersebut terhadap total jumlah pelanggan meningkat dari 93,9% pada tahun 2005 menjadi 95,3% pada tahun 2006. Akibat perubahan komposisi pelanggan tersebut berupa kenaikan persentase jumlah pelanggan prabayar terhadap jumlah pelanggan, ARPU bulanan turun dari sekitar Rp 87.000 pada tahun 2005 menjadi sekitar Rp 84.000 pada tahun 2006. ARPU untuk SMS/*non-voice* pelanggan pascabayar untuk tahun 2005 dan 2006 relatif stabil, yaitu masing-masing sebesar Rp 47.000.

3. Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan intekoneksi-bersih meningkat sebesar Rp 939,4 miliar atau 12,1% dari Rp 7.742,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 8.681,5 miliar pada tahun 2006. Pendapatan interkoneksi-bersih terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak dan pendapatan interkoneksi dari jaringan selular Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk panggilan *incoming* sambungan langsung internasional dari layanan TELKOMSLI-007 bersih dari biaya interkoneksi untuk panggilan SLI *outgoing*.

Pendapatan interkoneksi memberikan kontribusi terhadap pendapatan usaha konsolidasian masing-masing sebesar 16,9% dan 18,5% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005.

4. Pendapatan KSO (Kerja Sama Operasi)

Pendapatan KSO turun sebesar Rp 99,2 miliar atau 16,9% dari Rp 588,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 489,4 miliar pada tahun 2006. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya konsolidasi KSO VII pada tanggal 19 Oktober 2006. Pendapatan minimum TELKOM (MTR) turun sebesar Rp 61,1 miliar atau 22,7% dari
Rp 268,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 207,5 miliar pada tahun 2006. Pendapatan KSO yang harus dibagi (DKSOR) turun sebesar Rp 43,9 miliar atau 13,8% dari Rp 318,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 274,6 miliar pada tahun 2006. Amortisasi pendapatan KSO yang ditangguhkan meningkat sebesar Rp 5,8 miliar atau 386,7% dari Rp 1,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 7,3 miliar pada tahun 2006.

5. Pendapatan Data dan Internet

Pendapatan data dan internet meningkat sebesar Rp 2.130,9 miliar atau 30,7% dari Rp 6.934,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 9.065,2 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan peningkatan yang signifikan dari pendapatan SMS, internet, komunikasi data dan dari layanan e-bisnis. Peningkatan pendapatan SMS sebesar Rp 1.421,3 miliar atau 26,8% dari Rp 5.309,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 6.730,5 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan pertumbuhan yang signifikan dari trafik SMS pelanggan Telkomsel. Pendapatan internet meningkat sebesar Rp 196,1 miliar atau 27,6% dari Rp 711,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 907,5 miliar pada tahun 2006, terutama karena peningkatan usaha pemasaran untuk mendorong peningkatan penjualan terhadap layanan data dan internet, peningkatan pemakaian *dial up* internet dari TELKOMNet Instan dan peningkatan pelanggan Speedy pada tahun 2006. Pendapatan komunikasi data meningkat sebesar Rp 511,9 miliar atau 83,9% dari Rp 610,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 1.122,3 miliar pada tahun 2006, terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan baru atas layanan jaringan data berupa *frame relay*, IP VPN yang terutama digunakan untuk jaringan data internal dari bank-bank komersial. Pendapatan e-bisnis meningkat sebesar Rp 16,3 miliar atau 153,8% dari Rp 10,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 26,9 miliar pada tahun 2006 terutama karena terjadinya peningkatan transaksi pembayaran elektronik. Pendapatan VoIP menurun sebesar Rp 14,7 miliar atau 5,0% dari Rp 292,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 278,0 miliar pada tahun 2006 disebabkan menurunnya trafik *outgoing* VoIP internasional, dan sedikit diimbangi oleh peningkatan jumlah trafik *incoming* VoIP internasional.

6. Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan meningkat sebesar Rp 132,1 miliar atau 22,5% dari Rp 586,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 718,7 miliar pada tahun 2006. Pendapatan sewa transponder satelit meningkat sebesar Rp 54,6 miliar atau 22,8% dari Rp 239,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 294,1 miliar pada tahun 2006 disebabkan karena meningkatnya penggunaan transponder satelit.

Pendapatan sirkit langganan meningkat sebesar Rp 77,5 miliar atau 22,3% dari Rp 347,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 424,6 miliar pada tahun 2006 disebabkan karena meningkatnya jumlah operator telekomunikasi yang menggunakan jaringan TELKOM.

7. Pendapatan PBH (Pola Bagi Hasil)

Pendapatan Pola Bagi Hasil meningkat sebesar Rp 113,2 miliar atau 37,4% dari Rp 302,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 415,5 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan pendapatan PBH setelah dilakukannya konsolidasi KSO VII. Amortisasi pendapatan yang ditangguhkan dari PBH meningkat sebesar Rp 15,3 miliar atau 11,2% dari Rp 136,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 152,0 miliar pada tahun 2006. Pendapatan Pola Bagi Hasil-bersih meningkat sebesar Rp 97,9 miliar atau 59,1% dari Rp 165,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 263,5 miliar pada tahun 2006. Jumlah kontrak PBH sebanyak 90 kontrak dengan 63 mitra pada akhir tahun 2005 dan 90 kontrak dengan 67 mitra pada akhir tahun 2006.

8. Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pendapatan TELKOM dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp 21,1 miliar atau 7,0% dari Rp 301,0 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 322,1 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan layanan direktori, yang diimbangi dengan penurunan pada pendapatan layanan operator.

B. Beban Usaha

Jumlah beban usaha meningkat sebesar Rp 5.064,4 miliar atau 20,6% dari Rp 24.636,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 29.700,8 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban usaha terutama disebabkan oleh meningkatnya beban karyawan, beban penyusutan, dan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi.

1. Beban Karyawan

Beban karyawan meningkat sebesar Rp 1.950,8 miliar atau 29,7% dari Rp 6.563,0 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 8.513,8 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan peningkatan beban pensiun dini dikarenakan implementasi program pensiun dini pada bulan Desember 2006, peningkatan tunjangan cuti, insentif dan biaya tunjangan lainnya, biaya gaji dan tunjangan sebagai akibat perbaikan kinerja keuangan tahun 2006, premi manajemen, dan konsolidasi biaya karyawan KSO VII sehubungan akuisisi KSO VII pada tanggal 19 Oktober 2006. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya karyawan tahun ini sebagai berikut:

- beban pensiun dini sebesar Rp 974,8 miliar atau 200,4% dari Rp 486,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 1.461,2 miliar pada tahun 2006 disebabkan peningkatan jumlah karyawan yang mengambil pensiun dini dari 1.017 orang pada tahun 2005 menjadi 1.873 orang pada tahun 2006;
- beban tunjangan cuti, insentif dan tunjangan lainnya meningkat sebesar Rp 593,5 miliar atau 36,7% dari Rp 1.615,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 2.209,1 miliar pada tahun 2006;
- beban gaji dan tunjangan lainnya meningkat sebesar Rp 234,7 miliar atau 10,8% dari Rp 2.165,9 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 2.400,6 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan peningkatan gaji pokok; dan
- beban tunjangan pensiun meningkat sebesar Rp 116,1 miliar atau 23,8% dari Rp 488,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 604,7 miliar pada tahun 2006.

Beban penghargaan masa kerja meningkat sebesar Rp 5,0 miliar atau 3,7% dari Rp 134,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 139,7 miliar pada tahun 2006. Beban pensiun menurun sebesar Rp 93,9 miliar atau 17,6% dari Rp 532,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 438,4 miliar pada tahun 2006.

Komponen biaya karyawan lainnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban usaha tahun 2006.

2. Beban Penyusutan

Beban penyusutan meningkat sebesar Rp 1.607,6 miliar atau 21,2% dari Rp 7.570,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 9.178,3 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan oleh penambahan jumlah BTS Telkomsel 6.162 unit pada tahun 2006, peningkatan kapasitas stasiun transmisi dan penerima, *switching* dan peralatan jaringan pintar dan juga peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur jaringan (jaringan transmisi, *backbone* dan jaringan akses).

3. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp 1.579,4 miliar atau 26,7% dari Rp 5.916,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 7.495,7 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- peningkatan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 1.134,0 miliar menjadi Rp 4.209,1 miliar atau meningkat sebesar 36,9% yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas jaringan Telkomsel yang mendukung peningkatan pelanggan dari 24,3 juta pada tahun 2005 menjadi 35,6 juta pada tahun 2006. Jumlah BTS Telkomsel tumbuh sebesar 62,3% dari 9.895 unit pada tahun 2005 menjadi 16.057 unit pada tahun 2006. Telkomsel juga meningkatkan kapasitas transmisi, stasiun penerima dan *switching* serta peralatan jaringan pintar;
- beban hak penyelenggaraan dan *Universal Service Obligation* (USO) meningkat sebesar Rp 172,6 miliar menjadi Rp 881,8 miliar pada tahun 2006, atau meningkat sebesar 24,3%, terutama disebabkan oleh peningkatan beban USO sebesar 24,7% atau Rp 75,9 miliar yang dibayarkan oleh TELKOM dan Telkomsel kepada Pemerintah dari Rp 307,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 383,8 miliar pada tahun 2006;
- beban pemakaian frekuensi radio meningkat sebesar Rp 174,4 miliar menjadi Rp 722,6 miliar atau meningkat sebesar 31,8% yang disebabkan oleh peningkatan BTS TELKOM dan Telkomsel, dan tambahan biaya hak penyelenggaraan (BHP) tahunan untuk lisensi 3G. Jumlah BTS TELKOM meningkat sebesar 5,7% dari 1.448 unit pada tahun 2005 menjadi 1.531 unit pada tahun 2006. Jumlah BTS Telkomsel meningkat sebesar 62,3% dari 9.895 unit pada tahun 2005 menjadi 16.057 unit pada tahun 2006;
- beban sirkit sewa meningkat sebesar Rp 112,2 miliar menjadi Rp 236,4 miliar atau meningkat sebesar 90,3% disebabkan karena TELKOM melakukan peningkatan kapasitas jaringan data.

Komponen lain dari beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban operasi pada tahun 2006.

4. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp 507,5 miliar atau 18,4% dari Rp 2.764,0 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 3.271,5 miliar pada tahun 2006, disebabkan oleh:

- peningkatan beban penagihan sebesar Rp 163,4 miliar menjadi Rp 542,5 miliar atau meningkat 43,1% yang sejalan dengan peningkatan pelanggan telepon tidak bergerak dan pelanggan selular Telkomsel yang mengakibatkan peningkatan beban penagihan yang harus dibayar kepada pihak ketiga sebagai agen penagihan;

- peningkatan beban keamanan dan skrining sebesar Rp 33,0 miliar atau meningkat sebesar 20,1% terutama disebabkan oleh peningkatan gaji untuk petugas keamanan sebesar Rp 27,8 miliar;
- peningkatan beban pelatihan, pendidikan dan rekrutmen sebesar Rp 46,4 miliar atau 26,1% menjadi Rp 224,3 miliar pada tahun 2006, sejalan dengan peningkatan program pelatihan bagi karyawan TELKOM;
- peningkatan beban sumbangan sosial dan umum sebesar Rp 97,5 miliar atau meningkat sebesar 47,7%, menjadi Rp 301,8 miliar pada tahun 2006, terutama disebabkan oleh peningkatan beban bina lingkungan dan program kemitraan sebesar Rp 48,9 miliar menjadi Rp 159,7 miliar pada tahun 2006;
- peningkatan beban perjalanan sebesar Rp 58,0 miliar atau 33,8% terutama disebabkan oleh meningkatnya beban perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 48,5 miliar;
- peningkatan beban jasa profesional sebesar Rp 90,0 miliar atau meningkat sebesar 68,7% terutama disebabkan oleh meningkatnya beban konsultan manajemen sebesar Rp 87,7 miliar;
- peningkatan beban amortisasi aktiva tidak berwujud sebesar Rp 26,2 miliar atau 2,9% disebabkan oleh peningkatan amortisasi hak pengelolaan KSO sebagai hasil akuisisi KSO VII dan pembayaran *up-front fee* lisensi 3G.

Peningkatan di atas diimbangi oleh penurunan dari beban penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang sebesar Rp 30,8 miliar atau 6,3% menjadi Rp 458,2 miliar pada tahun 2006 sebagai hasil adanya program pengurangan piutang tak tertagih pada tahun 2006.

Komponen lain dari beban umum dan administrasi tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada beban usaha pada tahun 2006.

5. Beban Pemasaran

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp 115,3 miliar atau 10,2% dari Rp 1.126,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 1.241,5 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pemasaran Telkomsel sebesar Rp 206,7 miliar atau 41,9%, terutama karena meningkatnya beban iklan dan promosi.

Peningkatan ini diimbangi oleh penurunan beban pemasaran TELKOM sebesar Rp 128,3 miliar atau 24,5% terutama disebabkan karena menurunnya beban iklan dan promosi.

6. Laba Usaha dan Marjin Usaha

Laba usaha meningkat sebesar Rp 4.422,4 miliar atau 25,8% dari Rp 17.170,8 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 21.593,2 miliar pada tahun 2006. Marjin usaha TELKOM sedikit meningkat dari 41,1% pada tahun 2005 menjadi 42,1% pada tahun 2006.

7. Penghasilan (Beban) Lainnya

Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp 1.329,7 miliar atau 143,1% dari beban lainnya sebesar Rp 929,3 miliar pada tahun 2005 menjadi penghasilan lainnya sebesar Rp 400,4 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- peningkatan laba bersih selisih kurs sebesar Rp 1.353,1 miliar atau 261,8% dari rugi bersih selisih kurs sebesar Rp 516,8 miliar pada tahun 2005 menjadi laba bersih selisih kurs sebesar Rp 836,3 miliar pada tahun 2006 yang disebabkan oleh apresiasi nilai tukar rupiah yang diakibatkan oleh translasi laba atas pinjaman dalam dolar AS;
- beban bunga meningkat sebesar Rp 109,1 miliar atau 9,3% dari Rp 1.177,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 1.286,4 miliar pada tahun 2006 terutama karena meningkatnya pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman jangka menengah Telkomsel;
- pendapatan bunga meningkat sebesar Rp 310,3 miliar atau 90,0% dari Rp 344,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 655,0 miliar pada tahun 2006, terutama disebabkan meningkatnya saldo rata-rata penempatan deposito berjangka. Lihat Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian.
- pendapatan lain-lain (bersih) menurun sebesar Rp 207,2 miliar atau 50,6% dari Rp 409,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 202,0 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian dari penjualan aktiva tetap dan penurunan pendapatan denda pemasok tetapi juga diimbangi oleh peningkatan pendapatan denda keterlambatan serta pendapatan pengelolaan gedung.

Komponen lain dari penghasilan (beban lainnya) tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada tahun 2006.

C. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 5.752,2 miliar atau meningkat 35,4% dari Rp 16.241,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 21.993,6 miliar pada tahun 2006. Marjin laba sebelum pajak meningkat dari 38,8% pada tahun 2005 menjadi 42,9% pada tahun 2006.

D. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp 1.856,0 miliar atau 35,8% dari Rp 5.183,9 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 7.039,9 miliar pada tahun 2006, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan sebelum pajak sebesar Rp 5.752,2 miliar atau 35,4% dari Rp 16.241,4 miliar tahun 2005 menjadi Rp 21.993,6 miliar pada 2006.

E. Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan

Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan meningkat sebesar Rp 884,1 miliar atau 28,9% dari Rp 3.064,0 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 3.948,1 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya kinerja keuangan Telkomsel.

F. Laba Bersih

Laba bersih perusahaan meningkat sebesar Rp 3.012,0 miliar atau meningkat 37,7% dari Rp 7.993,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 11.005,6 miliar pada tahun 2006. Marjin laba bersih meningkat dari 19,1% pada tahun 2005 menjadi 21,5% pada tahun 2006.

G. Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 4.776,3 miliar atau meningkat 20,5% dari Rp 23.292,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 28.068,7 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih menjadi Rp 11.005,6 miliar pada tahun 2006 dikurangi dengan dividen tunai sebesar Rp 5.371,1 miliar. Selama tahun 2006, TELKOM telah membeli kembali saham Seri B sebanyak 118.376.500 lembar, yang merupakan 0,59% dari saham yang diterbitkan dan beredar dengan jumlah nilai sebesar Rp 952,2 miliar (termasuk biaya broker dan kustodian). Pembelian ini mempengaruhi penurunan ekuitas sebesar Rp 952,2 miliar.

H. Saldo Laba

Saldo laba baik yang sudah ditentukan penggunaannya maupun belum ditentukan penggunaannya meningkat sebesar Rp 5.634,4 miliar dari Rp 16.471,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp 22.105,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya laba bersih menjadi Rp 11.005,6 miliar dan dikurangi dividen tunai yang diumumkan sebesar Rp 5.371,1 miliar.

Hasil Operasi TELKOM Berdasarkan Segmen

TELKOM memiliki tiga segmen bisnis utama,yaitu: telepon tidak bergerak kabel, telepon tidak bergerak nirkabel dan selular. Segmen operasi yang kontribusinya terhadap total pendapatan usaha TELKOM kurang dari 10% dikelompokkan sebagai "Lain-lain" yang meliputi usaha buku petunjuk telepon dan pengelolaan gedung. Lihat catatan 45 laporan keuangan konsolidasian.

	Tahun yang Berakhir 31 Desember			
	2005	2006	2007	2007
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	US$ (juta)
Telepon Tidak Bergerak Kabel				
Hasil segmen				
Pendapatan usaha eksternal	19.637,4	20.137,8	20.246,2	2.155,2
Pendapatan antar segmen	305,4	514,6	942,2	100,3
Jumlah pendapatan segmen	19.942,8	20.652,4	21.188,4	2.255,5
Beban usaha segmen	(14.378,8)	(16.257,5)	(16.253,8)	(1.730,2)
Hasil segmen	5.564,0	4.394,9	4.934,6	525,3
Penyusutan dan amortisasi	(4.006,2)	(4.290,9)	(3.468,4)	369,2
Amortisasi *goodwill* dan aktiva tak berwujud lainnya	(896,9)	(932,7)	(1.002,8)	(106,7)
Beban non-kas lain-lain	(292,4)	(325,1)	(397,3)	(42,3)
Telepon Tetap Nirkabel				
Hasil segmen				
Pendapatan usaha eksternal	1.449,7	2.806,2	3.221,2	342,9
Pendapatan antar segmen	(167,9)	(253,4)	(74,8)	(8,0)
Jumlah pendapatan segmen	1.281,8	2.552,8	3.146,4	334,9
Beban usaha segmen	(2.174,7)	(1.815,8)	(1.628,3)	(173,3)
Hasil segmen	(892,9)	737,0	1.518,1	161,6
Penyusutan dan amortisasi	(537,3)	(452,8)	(343,3)	(36,5)
Penurunan nilai aktiva dan rugi atas komitmen pembelian	(696,1)	–	–	–
Beban non-kas lain-lain	(21,6)	–	–	–
Selular				
Hasil segmen				
Pendapatan usaha eksternal	20.384,9	28.205,0	35.574,6	3.787,0
Pendapatan antar segmen	691,2	863,3	1.042,4	111,0
Jumlah pendapatan segmen	21.076,1	29.068,3	36.617,0	3.897,9
Beban usaha segmen	(8.775,0)	(12.839,5)	(16.796,4)	(1.788,0)
Hasil segmen	12.301,1	16.228,8	19.820,6	2.109,9
Penyusutan dan amortisasi	(3.046,6)	(4.427,8)	(5.725,3)	(609,5)
Amortisasi *goodwill* dan aktiva tak berwujud lainnya	–	(11,7)	(46,7)	(5,0)
Beban non-kas lain-lain	(171,2)	(127,5)	(101,7)	(10,8)
Lain-lain				
Hasil segmen				
Pendapatan usaha eksternal	335,2	144,9	398,0	42,4
Pendapatan antar segmen	70,5	333,9	264,8	28,2
Jumlah pendapatan segmen	405,7	478,8	662,8	70,6
Beban usaha segmen	(328,2)	(384,3)	(610,4)	(65,0)
Hasil segmen	77,5	94,5	52,4	5,6
Penyusutan dan amortisasi	(23,3)	(34,5)	(51,0)	(5,4)
Amortisasi *goodwill* dan aktiva tak berwujud lainnya	(21,3)	-	-	-
Beban non-kas lain-lain	(4,8)	(5,7)	(1,8)	(0,2)

Hasil Segmen

Tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2006

Segmen Telepon Tidak Bergerak Kabel

Pendapatan segmen telepon tidak bergerak kabel meningkat sebesar Rp 536,0 miliar atau 2,6% dari Rp 20.652,4 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 21.188,4 miliar pada tahun 2007. Peningkatan pendapatan segmen ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data dan internet sebesar Rp 598,6 miliar terutama karena meningkatnya pendapatan koneksi

internet dari TELKOMNet Instan dan *broadband access*. Kontribusi kenaikan ini juga berasal dari pendapatan interkoneksi sebesar Rp 79,9 miliar. Peningkatan pendapatan segmen telepon tidak bergerak kabel ini diimbangi oleh penurunan pendapatan percakapan telepon tidak bergerak kabel sebesar Rp 461,4 miliar karena menurunnya volume panggilan, dan penurunan pendapatan dari kerjasama operasi sebesar Rp 489,4 miliar akibat akuisisi KSO VII.

Beban segmen telepon tidak bergerak kabel menurun sebesar Rp 3,7 miliar, atau 0,0% dari Rp 16.257,5 pada tahun 2006 menjadi Rp 16.253,8 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan karena penurunan pada biaya penyusutan Rp 840,9 miliar atau 19,7% dari Rp 4.266,4 miliar pada tahun 2006 menjadi 3.425,5 miliar pada tahun 2007 dan adanya penurunan beban karyawan sebesar Rp 315,8 miliar, atau 4,6%, dari Rp 6.840,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 6.524,9 miliar pada tahun 2007. Penurunan beban karyawan disebabkan oleh tidak adanya beban pensiun dini pada tahun 2007.

Segmen Telepon Tidak Bergerak Nirkabel
Pendapatan segmen telepon tidak bergerak nirkabel meningkat sebesar Rp 593,7 miliar atau 23,3% dari Rp 2.552,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 3.146,5 miliar pada tahun 2007, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan panggilan telepon tetap nirkabel sebesar Rp 196,2 miliar yang sejalan dengan peningkatan pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel sebesar 52,4% dari 4.175.853 sst pada 31 Desember 2006 menjadi 6.362.844 sst pada 31 Desember 2007. Peningkatan ini juga berasal dari peningkatan pendapatan interkoneksi telepon tidak bergerak nirkabel sebesar Rp 268,8 miliar atau 28,1% dari pendapatan interkoneksi telepon tidak bergerak nirkabel dan kenaikan sejumlah Rp 128,6 miliar atau 34,1% dari pendapatan data dan internet.

Beban segmen telepon tidak bergerak nirkabel menurun sebesar Rp 187,5 miliar atau 10,3% dari Rp 1.815,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.628,3 miliar pada tahun 2007, terutama karena menurunnya beban penyusutan dan beban karyawan sebesar Rp 109,4 miliar dan Rp 156,9 miliar masing-masing pada tahun 2006 dan 2007, yang diimbangi dengan kenaikan beban pemasaran sebesar Rp 108,4 miliar pada tahun 2007.

Segmen Selular
Pendapatan segmen selular meningkat sebesar Rp 7.548,7 miliar atau 26,0% dari Rp 29.068,3 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 36.617,0 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan percakapan selular sebesar Rp 2.015,4 miliar dan pendapatan SMS sebesar Rp 5.758,6 miliar yang sejalan dengan peningkatan pendapatan selular sebesar 34,5% dari total pelanggan selular sebanyak 35,6 juta pelanggan pada 31 Desember 2006 menjadi 47,9 juta pada 31 Desember 2007.

Beban segmen selular meningkat sebesar Rp 3.956,9 miliar atau 30,8% dari Rp 12.839,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 16.796,4 miliar pada tahun 2007, terutama karena meningkatnya beban operasi, pemeliharaan, layanan telekomunikasi, dan beban penyusutan masing-masing sebesar Rp 2.114,9 miliar dan Rp 1.297,6 miliar, yang sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan selular dari 35,6 juta pada akhir tahun 2006 menjadi 47,9 juta pada akhir tahun 2007. Peningkatan beban ini juga disebabkan oleh karena meningkatnya BTS Telkomsel dari 16.057 unit pada akhir tahun 2006 menjadi 20.858 unit pada 31 Desember 2007.

Segmen Lain-lain
Pendapatan segmen lain-lain meningkat sebesar Rp 184,0 miliar atau 38,4% dari Rp 478,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 662,8 miliar pada tahun 2007, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan layanan *call center* Infomedia sebesar Rp 145,9 miliar.

Beban segmen lain-lain meningkat sebesar Rp 226,1 miliar atau 58,8% dari Rp 384,3 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 610,4 miliar pada tahun 2007, terutama karena meningkatnya beban karyawan sebesar Rp 234,7 miliar.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir 31 Desember 2005

Segmen Telepon Tidak Bergerak Kabel
Pendapatan segmen telepon tidak bergerak kabel meningkat sebesar Rp 709,6 miliar atau 3,6% dari Rp 19.942,8 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 20.652,4 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pelanggan telepon tidak bergerak kabel sebesar 0,3% dari 8.686.131 satuan sambungan telepon pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi 8.709.211 satuan sambungan telepon pada tanggal 2006. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan data dan internet sebesar Rp 364,8 miliar yang berasal dari peningkatan koneksi internet dari TELKOMNet Instan dan akses *broadband*. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jaringan sebesar Rp 132,1 miliar. Peningkatan pendapatan telepon tidak bergerak kabel diimbangi dengan penurunan pendapatan percakapan sebesar Rp 382,0 miliar karena menurunnya volume percakapan.

Beban usaha segmen telepon tidak bergerak kabel meningkat sebesar Rp 1.878,7 miliar atau 13,1% dari Rp 14.378,8 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 16.257,5 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban usaha segmen telepon tidak bergerak kabel terutama disebabkan oleh meningkatnya beban karyawan sebesar Rp 1.192,0 miliar atau 21,1% dari Rp 5.648,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 6.840,7 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban karyawan ini disebabkan oleh peningkatan beban pensiun dini, gaji dan tunjangan terkait lainnya, tunjangan cuti, insentif dan tunjangan lain-lainnya. Peningkatan beban usaha segmen telepon tidak bergerak kabel juga disebabkan oleh kenaikan beban administrasi dan umum sebesar Rp 144,5 miliar.

Segmen Telepon Tetap Nirkabel
Pendapatan segmen telepon tetap nirkabel meningkat sebesar Rp 1.271,0 miliar atau 99,2% dari Rp 1.281,8 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 2.552,8 miliar pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan segmen telepon tetap nirkabel disebabkan karena meningkatnya pendapatan dari percakapan telepon tetap nirkabel sebesar Rp 590,9 miliar sejalan dengan pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel sebesar 2,8% dari 4.061.867 sst pada akhir tahun 2005 menjadi 4.175.853 satuan sambungan telepon pada akhir tahun 2006. Peningkatan ini juga memberikan kontribusi pada meningkatnya pendapatan interkoneksi telepon tetap nirkabel sebesar Rp 521,7 miliar.

Beban usaha segmen telepon tetap nirkabel menurun sebesar Rp 358,9 miliar atau 16,5% dari Rp 2.174,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 1.815,8 miliar pada tahun 2006. Penurunan beban usaha segmen telepon tetap nirkabel ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar Rp 642,8 miliar.

Segmen Selular
Pendapatan segmen selular meningkat sebesar Rp 7.992,2 miliar atau 37,9% dari Rp 21.076,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 29.068,3 miliar pada akhir tahun 2006. Peningkatan pendapatan segmen selular terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan percakapan selular sebesar Rp 6.051,7 miliar, pendapatan SMS selular sebesar Rp 1.267,0 miliar dan pendapatan komunikasi data selular sebesar Rp 340,6 miliar yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah pelanggan Telkomsel sebesar 46,7% dari 24.269.353 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi 35.597.171 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan pendapatan segmen selular juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan interkoneksi selular sebesar Rp 333,0 miliar.

Beban usaha segmen selular meningkat sebesar Rp 4.064,5 miliar atau 46,3% dari Rp 8.775,0 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 12.839,5 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban usaha segmen selular terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi dan beban penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.676,2 miliar dan Rp 1.381,1 miliar yang sejalan dengan pertumbuhan pelanggan Telkomsel dari 24,3 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi 35,6 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2006. Sementara itu, jumlah BTS Telkomsel meningkat dari 9.895 unit pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi 16.057 unit pada tanggal 31 Desember 2006.

Segmen Lain-lain
Pendapatan segmen lainnya meningkat sebesar Rp 73,1 miliar atau 18,0% dari Rp 405,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 478,8 miliar pada tahun 2006, karena meningkatnya pendapatan layanan *call center* Infomedia sebesar Rp 49,1 miliar.

Beban usaha segmen lain meningkat sebesar Rp 56,1 miliar atau 17,1% dari Rp 328,2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 384,3 miliar pada tahun 2006, terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya jasa profesional Infomedia.

Ringkasan Perbedaan Signifikan antara Indonesia GAAP dan U.S GAAP
Lihat catatan 55 Laporan Keuangan Konsolidasian

Likuiditas dan Sumber Permodalan

TELKOM berharap memperoleh likuiditas dan sumber permodalan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk terus berupaya mengembangkan dan memperluas usaha, termasuk untuk mengembangkan bisnis baru. Belanja modal TELKOM akan menjadi faktor yang penting dalam menghadapi persaingan yang ketat seiring dengan deregulasi pada industri telekomunikasi di Indonesia dan upayanya untuk mempertahankan posisi sebagai *full service network provider* dan sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia.

TELKOM berharap likuditas dan sumber permodalannya di samping untuk modal kerja dan pembayaran dividen dan pajak juga untuk keperluan sebagai berikut:
- belanja modal untuk jaringan yang telah ada dan jaringan baru serta untuk infrastruktur *backbone*, meliputi jaringan transmisi *backbone* pada lingkar Jasuka (Jawa, Sumatra dan Kalimantan), kabel laut JDM (Jember-Denpasar-Mataram), ekspansi jaringan akses telepon tetap nirkabel, ekspansi kabel laut SUB (Surabaya-Ujung Pandang-Banjarmasin), dan penambahan ground satelit di Jakarta, jaringan transmisi serat optik Medan-Padang, pembangunan *softswitch*, instalasi dan peningkatan sambungan telepon tidak bergerak serta peningkatan kapasitas layanan selularnya melalui Telkomsel;

- kebutuhan sehubungan dengan hutang saat ini meliputi *two-step loans*, pinjaman jangka pendek pada Bank Central Asia, Bank Niaga, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri, serta wesel bayar jangka menengah sebesar Rp 465 miliar, obligasi dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 1 triliun, fasilitas hutang dari Bank Central Asia sehubungan dengan pembangunan jaringan *backbone* Sumatera, pinjaman dari konsorsium bank untuk proyek *junction* Divre V, pinjaman dari Citibank N.A. melalui fasilitas Ekspor Hermes, fasilitas *high performance backbone* dan fasilitas EKN dan pinjaman dari Bank Ekspor Impor Korea sehubungan dengan proyek CDMA dan pinjaman jangka menengah pada Bank Mandiri, Bank Central Asia, Citibank, Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia;

- pembayaran cicilan pembelian saham AriaWest yang diharapkan akan dilunasi seluruhnya pada tanggal 31 Januari 2009;

- pembayaran kontribusi untuk program pensiun manfaat pasti dan program imbalan kesehatan pascakerja;

- pembayaran bulanan tetap kepada MGTI sesuai dengan perjanjian yang sudah diamandemen dan dinyatakan kembali untuk KSO IV, sejak Februari 2004 yang akan berakhir pada tahun 2010; dan

- pembayaran bulanan tetap kepada PT. Bukaka Singtel Internasional (BSI) sesuai dengan perjanjian yang sudah diamandemen dan dinyatakan kembali untuk KSO VII, sejak Oktober 2006 yang akan berakhir pada tahun 2010.

Sumber likuiditas dan modal juga diperlukan oleh TELKOM untuk mengubah kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) karena berakhirnya hak eksklusif TELKOM dalam layanan sambungan langsung jarak jauh, dengan pengeluaran yang mungkin untuk database rute baru (*new routing*) serta biaya untuk edukasi pelanggan dan pemasaran. TELKOM dipersyaratkan untuk menerapkan perubahan dalam kode akses SLJJ tersebut secara penuh pada tanggal 1 April 2010.

Selain itu, sumber likuiditas dan modal akan dibutuhkan untuk rencana pembelian kembali saham.

Sumber utama pendanaan yang tersedia bagi TELKOM terdiri dari: (i) arus kas dari kegiatan operasi, (ii) pembiayaan dari penerbitan obligasi; (iii) pembiayaan dari bank atau badan kredit ekspor (yang mencakup pembiayaan yang diperoleh dari pemasok); dan (iv) pengaturan pembayaran yang ditangguhkan kepada pemasok.

TELKOM meyakini bahwa sumber-sumber pembiayaan ini akan memadai untuk mendanai pembelanjaan modal sesuai rencana, mengantisipasi kebutuhan modal kerja dan kewajiban kontrak dan komitmen yang mungkin terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Meski demikian, jika keadaan ekonomi dunia dan Indonesia memburuk, tingkat kompetisi atau produk pengganti meningkat di luar perkiraan saat ini atau nilai Rupiah terdepresiasi secara signifikan terhadap Dolar AS, arus kas bersih TELKOM dari kegiatan usahanya bisa menurun dan jumlah yang dibutuhkan untuk belanja modal dalam Rupiah

mungkin meningkat. Hal-hal tersebut bisa membawa dampak negatif pada likuiditas TELKOM.

TELKOM mengelola likuiditas untuk semua usahanya, yang mencakup KSO yang dikendalikan oleh TELKOM secara bersama-sama. Namun, Telkomsel mengelola likuiditasnya sendiri dan akses ke sumber modal, terpisah dari TELKOM. Manajemen Telkomsel berharap untuk tetap fokus pada peningkatan dan perluasan kapasitas jaringan dan infrastruktur Telkomsel. Diharapkan pembelanjaan ini mendorong Telkomsel untuk mempertahankan posisinya sebagai penyelenggara jasa selular terkemuka di Indonesia dalam pasar yang semakin ketat persaingannya untuk jasa sejenis. Pada beberapa tahun terakhir, sumber utama pembiayaan Telkomsel adalah berasal dari arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank. Manajemen Telkomsel meyakini bahwa Telkomsel akan terus menghasilkan arus kas yang memadai dari kegiatan usahanya untuk mendanai pembelanjaan modal sesuai rencana dalam jangka pendek dan jangka panjang dan bila memerlukan tambahan pendanaan, Telkomsel dapat menggunakan pendanaan eksternal seperti fasilitas pinjaman dari bank atau instrumen hutang seperti obligasi atau *medium term notes* (MTN).

Wanprestasi dan Pengabaian Wanprestasi dalam Fasilitas Pinjaman

Pada tahun 2005 dan 2006, TELKOM telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tertentu atas perjanjian fasilitas hutang Bank Central Asia (BCA) untuk membiayai *High Performance Backbone* dan kewajiban yang berhubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 1 triliun, sedangkan untuk fasilitas hutang untuk membiayai *High Performance Backbone* yang dibiayai oleh Citibank, TELKOM melakukan penyimpangan hanya pada tahun 2005. Berdasarkan ketentuan tersebut, TELKOM diwajibkan untuk tidak memberikan pinjaman atau untuk kepentingan kepada pihak manapun, yang melampaui jumlah batas akumulasi tertentu. TELKOM telah memperoleh pengecualian secara tertulis dari Citibank International plc, yang bertindak sebagai pemberi pinjaman dalam perjanjian fasilitas BCA dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi perseroan.

Arus Kas Bersih

Tabel berikut menyajikan informasi yang berhubungan dengan arus kas konsolidasi Perusahaan, seperti yang disajikan dalam (dan dipersiapkan dalam basis yang sama seperti) laporan keuangan konsolidasian TELKOM.

	Tahun yang Berakhir 31 Desember,			
	2005 Rp (miliar)	2006 Rp (miliar)	2007 Rp (miliar)	2007 US$ (juta)
Arus Kas Bersih:				
dari aktivitas operasi	21.102,7	26.695,2	28.114,4	2.992,8
dari kegiatan investasi	(12.212,7)	(16.461,1)	(15.138,9)	(1.611,5)
dari kegiatan pendanaan	(8.339,4)	(7.382,8)	(10.957,0)	(1.166,4)
Perubahan dalam kas dan setara kas	550,6	2.851,3	2.018,5	214,9
Dampak perubahan kurs tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(32,0)	89,9	(193,6)	(20,6)
Kas dan setara kas, awal tahun	4.856,1	5.374,7	8,315,8	885,2
Kas dan setara kas, akhir tahun	5.374,7	8.315,8	10.140,7	1.079,5

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Sumber likuiditas TELKOM yang utama pada beberapa tahun terakhir adalah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 21.102,7 miliar pada tahun 2005, Rp 26.695,2 miliar pada tahun 2006 dan Rp 28.114,4 miliar pada tahun 2007. Pertumbuhan arus kas operasi terutama karena meningkatnya penerimaan kas dari pendapatan operasi sebagai akibat pertumbuhan bisnis selular Telkomsel, peningkatan pendapatan interkoneksi dari operator selular dan operator sambungan langsung internasional (TELKOMSLI-007), peningkatan pendapatan data dan internet karena meningkatnya SMS, dan penggunaan jaringan akses internet *broadband*.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006, meningkat sebesar Rp 1.032,1 miliar atau 5,3%, terutama disebabkan oleh:

- peningkatan penerimaan dari bisnis selular sebesar Rp 1.877,8 miliar atau 9,0% yang terutama disebabkan oleh meningkatnya bisnis selular Telkomsel;
- peningkatan penerimaan dari jasa interkoneksi bersih sebesar Rp 965,7 miliar atau 11,16% yang terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya interkoneksi selular sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan selular di Indonesia; dan
- peningkatan penerimaan pendapatan data dan internet sebesar Rp 5.908,5 miliar atau 66,3% yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan SMS dari pelanggan Telkomsel dan peningkatan jumlah pelanggan Speedy.

Peningkatan di atas diimbangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- peningkatan pembayaran beban operasi sebesar Rp 7.147,4 miliar atau 43,4% sejalan dengan peningkatan beban operasi (di luar beban penyusutan dan amortisasi).

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2005

Arus kas bersih dari operasi pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 meningkat sebesar Rp 5.592,5 miliar atau 26,5% terutama disebabkan oleh:

- peningkatan penerimaan dari bisnis selular sebesar Rp 6.017,0 miliar atau 40,6% yang terutama disebabkan oleh meningkatnya bisnis selular Telkomsel;
- peningkatan penerimaan dari layanan interkoneksi sebesar Rp 1.252,6 miliar atau 16,9% yang terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya interkoneksi selular sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan selular di Indonesia; dan
- peningkatan penerimaan dari layanan data dan internet sebesar Rp 1.961,7 miliar atau 28,2% yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan SMS dari pelanggan Telkomsel dan peningkatan jumlah pelanggan Speedy.

Peningkatan tersebut diimbangi dengan:

- peningkatan pembayaran beban operasi sebesar Rp 1.510,6 miliar atau 10,1% sejalan dengan peningkatan beban operasi (diluar beban penyusutan dan amortisasi); dan
- peningkatan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp 2.236,8 miliar atau 45,3% yang sejalan dengan peningkatan laba bersih.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 12.212,7 miliar, Rp 16.461,1 miliar dan Rp 15.138,9 miliar, masing-masing untuk tahun 2005, 2006, dan 2007. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk belanja modal.

Selain kas dan bank, TELKOM menginvestasikan sebagian besar dari kelebihan kasnya dalam bentuk deposito berjangka. Sejak 14 Mei 2004 TELKOM juga menginvestasikan sebagian dari kelebihan uang kasnya dalam bentuk reksadana berbasis mata uang Rupiah dan surat berharga lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2007 tidak ada deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari tiga bulan, dan investasi senilai Rp 159,5 miliar dalam bentuk reksadana, dan surat berharga lainnya yang masih *outstanding*.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006

Dibandingkan dengan tahun 2006, arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2007 menurun sebesar Rp 1.322,2 miliar atau 8,0%, terutama disebabkan oleh :

- penurunan akuisisi aktiva tetap sebesar Rp 843,8 miliar atau 5,3% sehubungan dengan pembelian aktiva tetap terutama perubahan instalasi stasiun transmisi, stasiun bumi dan perangkatnya, jaringan kabel dan investasi dalam peralatan pemprosesan data;
- penurunan sebesar Rp 436,0 miliar, terutama disebabkan oleh pembayaran *up-front fee* lisensi 3G oleh Telkomsel.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2005

Dibandingkan dengan tahun 2005, arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2006 meningkat sebesar Rp 4.248,4 miliar atau 34,8% terutama disebabkan oleh :

- peningkatan sebesar Rp 3.793,7 miliar atau 31,3% karena pengadaan aktiva tetap terutama penambahan instalasi stasiun transmisi, stasiun bumi dan perangkatnya, jaringan kabel, dan investasi dalam peralatan pemrosesan data; dan
- peningkatan sebesar Rp 436,0 miliar, terutama disebabkan oleh pembayaran *up front fee* lisensi 3G oleh Telkomsel.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing berjumlah Rp 8.339,4 miliar, Rp 7.382,8 miliar dan Rp 10.957,0 miliar. Selama tiga tahun terakhir aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan berasal dari pinjaman, pembayaran hutang, dan pembayaran dividen tunai. Pada tahun 2007, arus kas dari aktivitas pendanaan bertambah sebesar Rp 3.574,2 miliar atau 48,4% terutama disebabkan oleh peningkatan sebesar Rp 2.586,7 miliar yang berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang dan Rp 110,4 miliar dari penerimaan pinjaman jangka pendek, yang diimbangi dengan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 2.301,8 miliar dan pelunasan obligasi sebesar Rp 1.000,0 miliar, dan Rp 272,2 miliar untuk pembelian kembali saham, pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp 1.642,9 miliar, dan pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp 726,2 miliar.

Pembayaran Hutang Jangka Pendek

Pada posisi 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, komposisi hutang lancar perusahaan (terdiri dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan pinjaman bank jangka pendek) dalam mata uang asing terutama Dolar AS masing-masing sebesar 72,7%, 28,8% dan 27,8%. Jumlah pembayaran hutang jangka panjang secara signifikan dipengaruhi oleh depresiasi rupiah pada tahun 2007 dibandingkan apresiasi rupiah yang terjadi pada tahun 2006 dan depresiasi rupiah pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, 2006 dan 2007 TELKOM melakukan pembayaran hutang lancarnya masing-masing sebesar Rp 4.096,8 miliar, Rp 2.542,1 miliar dan Rp 6.241,5 miliar. Arus kas keluar pada tahun 2007 terutama digunakan untuk:

- hutang jangka pendek sebesar Rp 1.233,3 miliar;
- wesel bayar jangka menengah sebesar Rp 465,0 miliar;
- hutang jangka panjang sebesar Rp 3.317,4 miliar;
- wesel bayar sebesar Rp 199,4 miliar dan kewajiban sewa guna usaha sebesar Rp 26,4 miliar; dan
- pelunasan obligasi sebesar Rp 1.000,0 miliar

Escrow Account

Lihat catatan 14 Laporan Keuangan Konsolidasian

Modal Kerja

Modal kerja bersih, merupakan selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar, pada tanggal 31 Desember 2006 dan pada tanggal 31 Desember 2007 masing-masing berjumlah Rp (6.614,9) miliar dan Rp (4.696,5) miliar. Penurunan modal kerja bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya hutang usaha pihak ketiga, hutang pajak, dan pendapatan diterima dimuka,dan kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Peningkatan ini diimbangi dengan peningkatan kas dan setara kas, biaya dibayar di muka, piutang restitusi pajak aktiva lancar lainnya dan penurunan piutang usaha.

Aktiva Lancar

Aktiva lancar berjumlah Rp 13.920,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2006 dan Rp 15.978,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 terjadi kenaikan sebesar Rp 2.057,3 miliar, atau 14,8% yang disebabkan oleh:

- Peningkatan sebesar Rp 1.825,0 miliar, atau 21,9%, pada kas dan setara kas dari Rp 8.315,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 10.140,8 miliar pada tahun 2007.
- Peningkatan sebesar Rp 334,1 miliar atau 31,1%, atas beban yang dibayar dimuka dari Rp 1.073,3 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 1.407,4 miliar pada tahun miliar 2007;
- Peningkatan sebesar Rp 61,0 miliar atau 17,0% atas pengembalian piutang pajak dari Rp 359,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 420,6 miliar pada tahun 2007;
- Peningkatan sebesar Rp 75,0 miliar atau 88,8% atas investasi sementara dari Rp 84,5 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 159,5 miliar pada tahun 2007;
- Peningkatan sebesar Rp 71,9 miliar atau 1.057,4% atas *restricted time deposit* dari Rp 6,8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 78.7 miliar pada tahun 2007; dan
- Peningkatan sebesar Rp 2,8 miliar atau 1,9%, atas piutang lainnya dari Rp 147,7 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 150,5 miliar pada tahun 2007.

Peningkatan di atas diimbangi dengan:

- penurunan Rp 355,8 miliar atau 9,6% atas piutang usaha dari Rp 3.717,3 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 3.361,5 miliar pada tahun 2007; dan
- penurunan Rp 1,9 miliar atau 0,9%, atas persediaan dari Rp 213,3 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 211,4 miliar pada tahun 2007.

Pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, dan 2007 komposisi aktiva lancar terutama dalam Dolar AS, Euro, dan Yen Jepang pada tahun 2007, masing-masing sebesar 17,8%, 19,4% dan 19,2%, Dolar AS dan Euro pada tahun 2006 dan Dolar AS pada tahun 2005. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pada tahun-tahun tersebut mempengaruhi aktiva lancar perusahaan.

Piutang Usaha

Untuk rincian piutang tercantum dalam catatan 5 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Deposito berjangka waktu
Untuk rincian Lihat catatan 8 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Hutang Lancar
Hutang lancar posisi pada tanggal 31 Desember 2006 dan pada tanggal 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp 20.535,7 miliar dan Rp 20.674,6 miliar yang merupakan peningkatan sebesar Rp 138,9 miliar atau 0,7%, terutama karena peningkatan kewajiban lancar dalam mata uang Rupiah. Peningkatan ini berasal dari: (a) hutang pajak; (b) pendapatan yang ditangguhkan; (c) hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun; dan (d) hutang dagang untuk pihak ketiga.

Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Untuk rincian lihat catatan 19a Laporan Keuangan Konsolidasian

Beban yang Ditangguhkan
Untuk rincian lihat catatan 16 Laporan Keuangan Konsolidasian

Hutang
Saldo hutang konsolidasian (terdiri dari hutang jangka panjang, hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, hutang bank jangka pendek dan nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan) pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, tercantum pada tabel berikut:

	Pada tanggal 31 Desember,			
	2005 Rp (miliar)	2006 Rp (miliar)	2007 Rp (miliar)	2007 US$ (juta)
Rupiah Indonesia[1]	4.009,0	8.260,0	9.876,3	1.318,0
Dolar Amerika Serikat[2],[3]	7.993,9	6.002,8	4.922,4	523,7
Yen Jepang[4]	1.302,6	1.088,6	1.099,6	116,9
Euro[5]	427,7	261,0	100,9	10,7
Total	13.733,2	15.612,4	15.999,8	1.969,3

(1) Untuk tahun 2005, 2006 and 2007, jumlah juga termasuk biaya penerbitan obligasi untuk obligasi TELKOM masing-masing sebesar Rp 8.15 miliar, Rp 2.9 miliar and Rp 0.0 miliar.

(2) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, dan 2007, masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs Rp 9.835, Rp 9.005, dan Rp 9.399 = US$ 1, yaitu nilai jual Reuters untuk Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal tersebut.

(3) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2005, termasuk nilai kini dari pembayaran di masa datang untuk nilai perolehan penggabungan usaha yang di tangguhkan terkait: (a.) akuisisi TII (akumulasi bunga sepanjang periode penangguhan sebesar Rp 57,3 miliar); (b.) pembelian sisa kepemilikan di Dayamitra sebesar 9,68% (akumulasi bunga sepanjang periode penangguhan sebesar Rp 2,5 miliar); dan (c.) akuisisi KSO IV (akumulasi bunga sepanjang periode penangguhan sebesar Rp 717,1 miliar).
Jumlah pada tanggal 31 Desember 2006, termasuk nilai kini dari pembayaran di masa datang untuk nilai perolehan penggabungan usaha yang di tangguhkan terkait akuisisi TII (akumulasi bunga sepanjang periode penangguhan sebesar Rp 26,1 miliar) dan akuisisi KSO IV (akumulasi bunga sepanjang periode penangguhan sebesar Rp 437,7 miliar).

(4) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, yang dijabarkan ke dalam Rupiah pada Rp 83,9, Rp 75,7, dan Rp 83,0 = Yen 1, yaitu nilai tukar jual Reuters untuk Yen pada setiap tanggal tersebut.

(5) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007, yang dijabarkan ke dalam Rupiah pada Rp 11.651,5, Rp 11.853,3, dan Rp 13.769,5 = Euro 1, yaitu nilai tukar jual Reuters untuk Euro pada setiap tanggal tersebut.

Dari seluruh hutang pada tanggal 31 Desember 2007, pembayaran dijadwalkan pada tahun 2008, 2009, dan 2010-2025 masing-masing sebesar Rp 5.404,5 miliar, Rp 4.410,7 miliar dan Rp 6.184,6 miliar.

Dari jumlah tersebut, Telkomsel dijadwalkan membayarkan Rp 3.465,5 miliar pada tahun 2008, Rp 2.540,0 miliar pada tahun 2009 dan Rp 1.040,0 miliar pada tahun 2010. Infomedia dijadwalkan membayar Rp 35,3 miliar, Rp 6,1 miliar dan Rp 1,6 miliar masing-masing pada tahun 2008, 2009 dan 2010-2012.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai hutang TELKOM dan Telkomsel, lihat Catatan 18-23 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Hutang Akuisisi Bisnis dan Opsi Harga Pembelian
Lihat catatan 3 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Belanja Modal
Sampai dengan 31 Desember 2007, belanja modal TELKOM (induk perusahaan) sebesar Rp 3.508,1 miliar, lebih kecil dari anggaran belanja modal sebesar Rp 4.983,3 miliar.

Saat melakukan proses perencanaan anggaran tahun 2008, TELKOM mengelompokkan kembali kategori belanja modal sebagai berikut:
- *Optimizing Legacy*, terdiri dari telepon tidak bergerak kabel, telepon tetap nirkabel, simpul layanan (termasuk sentral lokal dan *softswitch*) dan satelit.
- *New Wave*, terdiri dari pita lebar, komunikasi data dan IT, aplikasi dan konten.
- Infrastruktur, terdiri dari transmisi *backbone*, *Metro and Regional Metro Junction* (RMJ), dan IP *backbone*.
- Unit pendukung, terdiri dari TELKOM *Center Units*, fasilitas pendukung, dan *Standby/Contingency*.

Pengelompokan baru tersebut mencerminkan keterkaitan antara belanja modal dengan pendapatan dan beban operasi.

Selain itu, belanja modal Telkomsel sebesar Rp 13.922,0 miliar untuk infrastruktur jaringan dan investasi lainnya dan anak perusahaan lainnya sebesar Rp 150,6 miliar.

Tabel berikut ini berisi realisasi dan rencana kebutuhan belanja modal untuk periode dimaksud, termasuk kebutuhan belanja modal untuk Telkomsel, Dayamitra dan beberapa anak perusahaan yang dikonsolidasi lainnya.

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember,				
	2005[1] Rp (miliar)	2006[1] Rp (miliar)	2007[1] Rp (miliar)	2008[2] Rp (miliar)	2009[3] Rp (miliar)
TELKOM (Induk Perusahaan):					
Optimalisasi Bisnis *Legacy*:					
Telepon Tidak Bergerak Nirkabel	1.222,5	334,5	855,7	3.975,6	3.402,8
Telepon Tidak Bergerak Kabel	1.009,6	573,7	1.060,2	1.413,6	1.875,7
Satelit	313,6	44,1	38,0	131,7	1.244,0
Subtotal Optimalisasi Bisnis *Legacy*	2.545,7	952,3	1.953,9	5.520,9	6.522,5
Bisnis *New Wave*:					
Pita Lebar	46,0	37,2	216,1	1.497,7	1.444,3
Komunikasi Data	74,5	119,9	152,9	466,3	552,9
TI, Aplikasi & Konten	48,5	152,0	246,7	408,9	377,0
Subtotal Bisnis *New Wave*	169,0	309,1	615,7	2.372,9	2.374,2
Infrastruktur:					
Backbone	158,7	595,9	211,4	1.805,6	1.991,8
Metro dan RMJ	224,1	148,6	368,4	1.042,9	919,9
IP *Backbone*	77,3	36,9	176,5	357,3	178,6
Subtotal Infrastruktur	460,1	781,4	756,3	3.205,8	3.090,3
Pendukung:					
Unit TELKOM	28,9	38,0	59,2	61,4	60,0
Fasilitas Pendukung	164,1	122,9	123,0	258,4	260,9
Standby/Contingency	–	–	–	1.388,9	1.000,0
Subtotal Pendukung	193,0	160,9	182,2	1.708,7	1.320,9
Subtotal untuk TELKOM (Induk Perusahaan)	3.367,8	2.203,7	3.508,1	12.808,3	13.307,9
Anak Perusahaan TELKOM:					
Telkomsel	10.085,7	14.838,6	12.132,2	16.529,0	17.589,0
Dayamitra	–	–	–	105,6	167,6
Infomedia Nusantara	37,9	89,1	58,7	97,9	69,7
Pramindo Ikat Nusantara	29,4	12,0	13,6	22,9	15,0
Indonusa Telemedia	8,9	–	16,5	26,3	52,0
Graha Sarana Duta	2,4	2,1	28,7	45,1	49,7
Metra	19,3	45,4	22,0	54,2	46,0
Telkom Indonesia International	1,1	47,9	0,3	51,6	60,0
Napsindo	0,5	–	–	–	-
Subtotal untuk anak perusahaan	10.185,2	15.035,1	12.272,0	16.932,6	18.049,0
Jumlah untuk TELKOM (konsolidasian)	13.553,0	17.238,8	15.780,1	29.740,9	31.356,9

(1) Jumlah untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah pengeluaran modal aktual berdasarkan barang yang diterima.
(2) Jumlah untuk tahun 2008 adalah pengeluaran modal terencana yang tercakup dalam anggaran TELKOM dan dapat disesuaikan baik ke atas atau ke bawah.
(3) Jumlah untuk tahun 2009 adalah pengeluaran modal yang diproyeksikan untuk tahun tersebut dan pengeluaran modal sebenarnya secara signifikan mungkin berbeda dari jumlah yang diproyeksikan.

Realisasi belanja modal masa yang akan datang mungkin berbeda dengan jumlah yang tercantum pada tabel di atas yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk di antaranya perekonomian Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, Euro, dan mata uang lainnya, ketersediaan dari pemasok atau sumber pendanaan lainnya, teknis atau masalah lainnya dalam memperoleh atau instalasi peralatan yang mungkin terjadi apabila TELKOM memasuki lini bisnis baru.

Investasi yang direncanakan pada tahun 2008

Pada tahun 2008, TELKOM berencana melakukan investasi pada *optimizing legacy*, *new wave*, infrastruktur, dan pendukung.

Rencana Investasi pada *Optimizing Legacy*

Rencana investasi pada *optimizing legacy* untuk tahun 2008 berjumlah Rp 5.520,9 miliar, yang akan dipergunakan untuk:

- investasi besar dalam jaringan akses telepon nirkabel CDMA, termasuk MSC, BSC, BTS, menara BTS, layanan nilai tambah, dan seluruh fasilitas pendukung yang berhubungan dengan jaringan akses telepon nirkabel;
- investasi dalam infrastruktur akses untuk jaringan telepon tidak bergerak termasuk pengembangan kabel tembaga dan serat optic untuk menambah kapasitas dan penyebaran Multi Service Access Network (MSAN);
- investasi dalam simpul layanan untuk jaringan telepon tidak bergerak, termasuk *softswitches* # 4 dan 5, *Local Exchange* (ISDN dan *Quality Enhancement*), *Trunk Expansion, Signaling* CCS#7; dan
- investasi stasiun bumi satelit, termasuk perluasan layanan VSAT dan *Intermediate Date Rate (IDR)*, dan mengganti beberapa perangkat yang sudah tidak terpakai.

Rencana Investasi pada bisnis *New Wave*

Rencana investasi pada bisnis *new wave* untuk tahun 2008 sebesar Rp 2.372,9 miliar, yang akan dipergunakan untuk:

- investasi jaringan pita lebar, termasuk penyebaran IP DSLAM, modernisasi jaringan akses dan memperluas kabel serat optik untuk remote IP DSLAM, peningkatan kualitas jaringan akses, MSAN berbasis xDSL, dan BRAS, serta penggantian dan perluasan jaringan pita lebar nirkabel;
- investasi komunikasi data, termasuk penyebaran akses VPN IP (xDSL based and *inverse multiplexing* (IMUX) based) dan akses *metro ethernet for ethernet based services* (E-Line and E-LAN); dan
- investasi IT, aplikasi & konten, termasuk investasi sistem informasi untuk menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan sistem pendukung IT, *billing systems*, *operating support system* ("OSS"), *customer care and billing system* ("CCBS"), layanan nilai tambah internet untuk layanan komersial seperti B2B *e-commerce access, NGN platform services* serta konten dan aplikasi pita lebar.

Rencana Investasi pada Infrastruktur

Rencana investasi pada infrastruktur untuk tahun 2008 berjumlah Rp 3.205,8 miliar, yang akan digunakan untuk investasi pada infrastruktur transmisi termasuk jaringan transmisi serat optik, perluasan jaringan transmisi *backbone* di Jawa, Sumatera dan Kalimantan (Jasuka), sistem kabel laut di Kalimantan (*Ring* 4), sistem kabel laut antara Kalimantan dan Sulawesi (*Ring* 8), dan sistem kabel laut antara Jember, Denpasar dan Mataram. Investasi dalam jumlah yang cukup besar juga dilakukan untuk investasi pada sistem kabel internasional AAG termasuk aksesnya dari Batam ke Singapura.

Rencana Investasi pada Unit Pendukung

Rencana investasi pada unit pendukung untuk tahun 2008 berjumlah Rp 1.708,7 miliar yang akan dipergunakan untuk:

- investasi pada TELKOM 's *Center Unit*, termasuk *Research* & *Development Center* (RDC), *Maintenance Center*, *Training Center*, dan *Supply Center*;
- investasi fasilitas pendukung termasuk bangunan (untuk operasi dan peralatan) dan *power supply*, piranti pengukuran jaringan, dan fasilitas kantor; dan
- anggaran siaga*/contingency* untuk mendukung dinamika pasar *High End Market* (HEM) dan konsumen *wholesale*, jaringan telepon tetap nirkabel, dan akses pita lebar nirkabel.

Teknik Pembiayaan Lain

Pada umumnya beberapa BUMN di Indonesia termasuk TELKOM mengandalkan pendanaan dari Pemerintah dalam bentuk *two-step loan* dan Pola Bagi Hasil dengan investor untuk pendanaan investasi dalam aktiva tetap. Namun, pada beberapa tahun terakhir

TELKOM mendanai investasinya dari arus kas yang berasal dari operasi dan pinjaman dari bank-bank komersial. Sebagai tambahan, pada beberapa tahun terakhir, TELKOM memenuhi kebutuhan pendanaannya dari pasar. TELKOM saat ini sedang mencari berbagai alternatif pendanaan yang akan digunakan untuk investasi termasuk pendanaan dari pemasok dan bank, serta potensi sumber pendanaan lainnya.

Bagi Hasil

Untuk rincian penjelasan, lihat Catatan 47 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Kebijakan Akuntansi yang Signifikan, Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian TELKOM berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang direkonsiliasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat (U.S. GAAP), mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Manajemen secara berkala mengevaluasi estimasi dan pertimbangan termasuk estimasi masa manfaat dan nilai tercatat aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, perhitungan atas penyisihan piutang, pensiun dan Imbalan pascakerja lain, pajak penghasilan dan kontinjensi hukum. Manajemen membuat estimasi dan pertimbangan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain yang relevan. Untuk pembahasan yang lengkap atas penggunaan estimasi dan pertimbangan serta kebijakan akuntansi yang signifikan lainnya, lihat Catatan 2 pada Laporan Keuangan Konsolidasian. Realisasi dari estimasi tersebut dapat berbeda dengan asumsi dan kondisi yang berbeda. TELKOM percaya bahwa kebijakan akuntansi yang signifikan di bawah ini dapat melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang signifikan dari laporan keuangan konsolidasian.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu mencerminkan estimasi terbaik Perusahaan atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang Perusahaan. Beban penyisihan tersebut dicatat sebagai bagian dari beban operasi dan beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi konsolidasian. Perusahaan menentukan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perusahaan mengevaluasi penyisihan piutang ragu-ragunya secara bulanan. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari untuk pelanggan ritel sepenuhnya disisihkan, dan piutang yang telah jatuh tempo untuk pelanggan non-ritel yang melebihi jumlah tertentu dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Saldo piutang dihapuskan dari neraca setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil. Perusahaan tidak memiliki risiko kredit atas piutang yang terkait dengan pelanggan yang tidak dicerminkan di neraca (*off-balance sheet credit exposure*).

Aktiva Tetap, *Goodwill* dan Aktiva Tidak Berwujud Lainnya

TELKOM menggunakan estimasi masa manfaat aktiva tetap, *goodwill* dan aktiva tidak berwujud lainnya untuk menentukan beban penyusutan dan amortisasi yang dicatat selama suatu periode laporan. Masa manfaat aktiva ditaksir pada saat perolehan aktiva dan berdasarkan pada pengalaman masa lalu untuk asset yang sejenis dengan memperhatikan teknologi atau perubahan lain dan, dalam hal hak atas aktiva tidak berwujud, sisa jangka waktu perjanjian KSO. Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali karena, antara lain, perubahan teknologi, perubahan yang signifikan di bidang hukum dan bisnis, kompetisi yang tidak diperkirakan, perubahan kondisi industri atau kerusakan, masa manfaat aktiva diperpendek yang menyebabkan peningkatan beban penyusutan dan amortisasi pada masa mendatang atau perubahan ini menyebabkan pengakuan penurunan nilai aktiva. TELKOM mengkaji adanya penurunan nilai aktiva secara periodik, apabila terdapat kejadian yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aktiva selama sisa masa manfaat aktiva. Penetapan atas waktu dan/atau jumlah penurunan nilai tersebut merupakan suatu proses pertimbangan yang signifikan. Di dalam menguji penurunan nilai aktiva, TELKOM menggunakan arus kas yang didiskontokan sebagai dasar bagi manajemen untuk mengestimasi operasi di masa datang. Estimasi terpenting yang digunakan TELKOM dalam memproyeksikan arus kas masa depan adalah dengan menggunakan taksiran harga masa depan, pada saat jasa tersebut akan dijual, jumlah jaringan akses yang akan dioperasikan, serta tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari arus kas masa depan yang diproyeksikan. Harga dari jasa yang dijual TELKOM dibebankan berdasarkan peraturan pemerintah. Jumlah jaringan akses yang dimiliki TELKOM di masa depan akan tergantung pada kemampuan TELKOM untuk menyediakan pendanaan guna membangun jaringan akses yang baru.

Pada tahun 2006, Telkomsel diberikan lisensi 3G. Telkomsel diharuskan membayar uang muka (*up-front fee*) dan iuran tahunan biaya hak penggunaan (BHP) untuk sepuluh tahun ke depan setelah memperoleh lisensi 3G. Uang muka (*up-front fee*) dicatat sebagai aktiva tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa lisensi pengoperasian 3G (10 tahun). Amortisasi dimulai sejak aktiva terkait dengan pengoperasian tersebut tersedia untuk digunakan. Berdasarkan interpretasi manajemen Telkomsel terhadap ketentuan ijin tersebut dan konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, manajemen berkeyakinan bahwa ijin tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa BHP. Berdasarkan fakta tersebut, manajemen Telkomsel berpendapat bahwa dalam memperoleh hak untuk menggunakan lisensi 3G tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara tahunan. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui BHP sebagai beban pada saat terjadinya.

Pensiun dan Manfaat Pascakerja

TELKOM mempunyai komitmen, terutama melalui dana pensiun TELKOM, untuk membayar pensiun dan imbalan pascakerja lainnya kepada para karyawan dan mantan karyawan yang telah mencapai usia 56 tahun. Biaya atas imbalan kerja dan nilai kini dari kewajiban pensiun dan imbalan pascakerja lainnya tergantung pada beberapa hal yang ditetapkan oleh aktuaria berdasarkan pengalaman dan asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menetapkan laba atau rugi aktuaria bersih untuk pensiun dan imbalan pascakerja adalah termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan (*expected long-term rate of return*) atas aktiva program dan tingkat diskonto. Dalam hal menghitung rencana imbalan kesehatan pascakerja, juga memperhitungkan perkiraan tingkat pertumbuhan biaya kesehatan. Perubahan atas asumsi tersebut akan berdampak pada pencatatan laba atau rugi aktuaria bersih atas biaya pensiun dan imbalan pascakerja.

TELKOM menggunakan tingkat pengembalian jangka panjang pada masa lalu dan estimasi tingkat pengembalian investasi jangka panjang pada masa depan dengan mengacu pada sumber-sumber data eksternal, sambil mempertimbangkan alokasi-alokasi aktiva lancar dan yang diharapkan, untuk mengembangkan tingkat pengembalian yang diharapkan pada aktiva program.

Pada setiap akhir tahun TELKOM menetapkan tingkat diskonto yang mencerminkan tingkat bunga yang digunakan untuk menetapkan nilai kini dari estimasi arus kas di masa depan sebagai dasar penilaian kewajiban pensiun dan imbalan pascakerja. TELKOM belum dapat mengidentifikasi investasi di Indonesia yang sesuai dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pascakerja, oleh karena itu TELKOM menggunakan waktu jatuh tempo obligasi pemerintah Indonesia pada akhir tahun. Pada tanggal 31 Desember 2007, TELKOM menggunakan tingkat diskonto sebesar 10,25%. Berdasarkan kenyataan bahwa hanya ada sedikit instrumen-instrumen hutang yang berkualitas tinggi di Indonesia dan kurangnya kemampuan untuk memperkirakan tingkat bunga, maka TELKOM yakin bahwa obligasi pemerintah Indonesia cukup mewakili sebagian besar tingkat diskonto untuk mengukur nilai kini dari kewajiban imbalan pascakerja pada akhir tahun. Perubahan dalam tingkat diskonto terkait dengan perubahan tingkat diskonto obligasi pemerintah Indonesia sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi di Indonesia dan dunia pada umumnya, akan mempengaruhi besarnya pengakuan biaya pensiun dan kewajiban imbalan pascakerja, dan sebagai konsekuensi hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha TELKOM secara material.

Perkiraan tingkat biaya kesehatan ditetapkan dengan cara membandingkan data masa lalu antara kenaikan biaya kesehatan aktual dengan tingkat inflasi pada umumnya dalam perekonomian Indonesia dan pola pemanfaatan fasilitas kesehatan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa biaya kesehatan aktual tumbuh rata-rata sebesar 2% di atas tingkat inflasi pada umumnya. Proyeksi biaya kesehatan TELKOM berturut-turut sebesar 12% dan 14% pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007. Lihat Catatan 43 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pertumbuhan biaya kesehatan diasumsikan berdampak signifikan pada besarnya rencana biaya kesehatan. Perubahan satu persen dari tingkat pertumbuhan beban kesehatan, akan berdampak seperti pada tabel berikut:

	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Dampak pada beban jasa dan beban bunga	209.881	(173.203)
Dampak pada akumulasi kewajiban imbalan kesehatan pascakerja	1.644.000	(1.363.108)

Asumsi lainnya termasuk harapan hidup dari karyawan, tingkat pertumbuhan kompensasi dan sisa rata-rata masa kerja.

Beban pensiun dini diakui pada saat TELKOM berkomitmen untuk memberi imbalan pensiun dini yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan TELKOM agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. TELKOM dianggap berkomitmen untuk melakukan pensiun dini jika dan hanya jika TELKOM telah memiliki rencana pensiun dini formal yang tidak dapat dibatalkan dan rencana tersebut tanpa kemungkinan yang realitis untuk ditarik.

Pajak Penghasilan

TELKOM mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer aktiva dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer pengurang pajak sepanjang laba kena pajak akan tersedia di masa yang akan datang sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan atau aktiva pajak tangguhan tersebut akan dapat direalisasikan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada tanggal laporan tahunan ini, dividen yang didistribusikan oleh TELKOM kepada para pemegang saham dengan kepemilikan saham minimum 25% dan mempunyai bisnis selain dari *holding company*, maka tidak merupakan subyek pajak, karena laba penjualan saham sudah merupakan subyek pajak yang berlaku pada perhitungan pajak badan normal. Selama TELKOM berkomitmen untuk tetap melakukan investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan saham minimum sebesar 25% dan mempunyai bisnis lain selain daripada *holding company*, serta pembagian dividen dari perusahaan afiliasi kepada TELKOM sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka tidak akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, TELKOM tidak perlu mencatat kewajiban pajak tangguhan terkait dengan laba ditahan dari perusahaan afiliasi tersebut.

Setiap perubahan untuk mempertahankan investasi/kondisi lainnya yang dapat menyebabkan TELKOM tidak dapat merealisasikan bagian dalam laba ditahan perusahaan afiliasi, sehingga TELKOM dapat menggunakan tingkat pajak 0% untuk pembagian dividen. Setiap perubahan kepemilikan pada anak perusahaan dapat berdampak pada pengakuan kewajiban pajak tangguhan dan akan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian TELKOM.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal neraca konsolidasian. Apabila tarif pajak berubah, maka TELKOM akan menyesuaikan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang dibebankan ke dalam beban pajak penghasilan pada periode perubahan untuk mencerminkan tarif pajak yang berlaku pada saat pengembalian pajak tangguhan.

Kontinjensi Hukum

Sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, TELKOM terlibat dalam beberapa permasalahan hukum dan telah melakukan pencadangan yang merupakan estimasi terhadap kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut. Estimasi biaya tersebut berdasarkan konsultasi dengan konsultan hukum melalui penilaian strategi litigasi dan penyelesaian hukum. Meskipun TELKOM percaya bahwa pencadangan biaya tersebut telah memadai, namun apabila terdapat perubahan kejadian ataupun fakta serta kondisi yang membutuhkan tambahan pencadangan maka TELKOM akan melakukan penyesuaian laporan laba rugi konsolidasian TELKOM di masa yang akan datang. Lihat catatan 50 laporan keuangan konsolidasian.

Riset dan Pengembangan dan Kekayaan Intelektual

Perusahaan melakukan investasi untuk meningkatkan produk dan layanan. Pengeluaran yang telah dilakukan mencapai Rp 8,4 miliar, Rp 8,7 miliar, dan Rp 6,7 miliar masing-masing untuk tahun 2005, 2006 dan 2007. Pada tahun 2007, pengeluaran dilakukan terkait dengan riset dan pengembangan *video conferencing*, SMS, sistem CMS, CDMA lab, sistem pengukuran dan pengembangan konten lainnya.

Informasi Tren

Serangkaian pengembangan memiliki dan kemungkinan akan memiliki dampak yang material di masa yang akan datang terhadap hasil operasi, kondisi keuangan dan belanja modal. Pengembangan ini meliputi:

- pengembangan jaringan akses pita lebar;
- mempercepat pengembangan, penyebaran sambungan telepon tetap nirkabel, penggunaan bersama menara BTS dengan Telkomsel, dan pengembangan unit bisnis Flexi;
- peningkatan kontribusi Telkomsel, Metra, dan TII terhadap pendapatan konsolidasian;
- kemampuan Pemerintah untuk menerapkan perubahan-perubahan peraturan yang terkait dengan kode akses, implementasi tarif interkoneksi berbasis biaya, dan kemungkinan diterapkannya peraturan yang menetapkan diskon sebesar 15% untuk tarif selular;
- pengembangan layanan *triple play*, aplikasi dan layanan konten multimedia
- penerapan aplikasi *customer centric* terpadu;
- bergabung dengan konsorsium *Asia America Gateway* (AAG) untuk memperoleh kuota *bandwidth* internasional (AAG merupakan suatu konsorsium kabel bawah laut yang terdiri dari 19 perusahaan dari 17 negara di Asia Pasifik dan Amerika Serikat);
- akuisisi 80% saham PT Sigma Cipta Caraka senilai US$35 juta oleh anak perusahaan, Metra; dan
- dalam proses akuisisi 6,8% saham SCICOM Berhad Malaysia melalui anak perusahaan, TII.

Pengaturan Transaksi di Luar Neraca

Perusahaan melakukan berbagai penjanjian *operating lease*. *Operating lease* ini terkait dengan kendaraan bermotor, komputer, sirkit, tanah dan bangunan. Kami yakin bahwa beberapa perjanjian *operating lease* tersebut material bagi bisnis kami.

Kami telah melakukan beberapa perjanjian dengan Konsorsium Huawei, Konsorsium Alcatel-Inti, Konsorsium Opnet-Olexindo, dan PT Lintas Teknologi Indonesia terkait dengan perjanjian pengadaan dan instalasi *Optical Access Network* (OAN), Konsorsium Huawei, Samsung Corporation, Konsorsium ZTE terkait dengan pengadaan dan instalasi proyek perluasan FWA CDMA, NSS, BSS, dan sistem PDN; PT Infonet Telekomindo untuk pengadaan dan instalasi sistem komunikasi serat optik, perluasan wilayah *metro junction batch* 2; PT INTI untuk pengadaan dan instalasi sistem komunikasi serat optik, perluasan *metro junction batch* 1, PT Nokia Siemens Network untuk pengadaan dan instalasi ekspansi perangkat antarmuka E1-V5, E1-PARA Central EWSD;

Pada tanggal 10 November 2007, TELKOM melakukan kerjasama dalam Konsorsium Palapa Ring dengan menandatangani Perjanjian Konstruksi dan Pemeliharaan (*Construction & Maintenance Agreement* – C&MA) dengan lima perusahaan lainnya. Konsorsium ini dibentuk untuk membangun jaringan serat optik di 32 kota di kawasan Indonesia Timur dengan total investasi awal Rp 2.070.336 juta. Melalui konsorsium ini Perusahaan akan memperoleh *bandwidth* sebesar 4 lambda dari total kapasitas sebesar 8,44 lambda.

Pada tanggal 27 April 2007, TELKOM menjadi anggota Konsorsium AAG, konsorsium kabel di dalam laut yang beranggotakan 19 perusahaan, dengan menandatangani C&MA dan *Cable Network Supply Contract* AAG serta mengeluarkan dana sekitar US$ 40 juta. Melalui keanggotaan tersebut, Perusahaan akan memperoleh *bandwidth* internasional sebesar 40 Gbps pada akhir tahun 2008 dalam konfigurasi AAG dengan kapasitas total 8,44 lambda. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar US$ 4,87 juta (setara dengan Rp 45.528 juta) sebagai uang muka pembelian aktiva tetap. Lihat catatan 12 laporan keuangan konsolidasian.

Berdasarkan surat Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, Telkomsel sebagai salah satu pemenang tender diharuskan membayar BHP yang ditentukan berdasarkan formula tertentu untuk periode 10 tahun. BHP untuk tahun pertama dan kedua dibayar pada bulan Maret 2006 dan Maret 2007. Untuk tujuan memberikan layanan teknologi 3G pada bulan September dan Oktober 2006 Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Nokia Corporation dan PT Nokia Network, Ericsson AB dan PT Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Network, PT Ericsson Indonesia; dan Siemens Network GmbH dan Co. KG untuk jasa perawatan dan pengoperasian jaringan (*Managed Operations Agreement* dan *Technical Support Agreement*).

Perjanjian antara Telkomsel dengan Motorola Inc. dan PT Motorola Indonesia, Ericsson AB dan PT Ericsson Indonesia, Nokia Corporation, dan PT Nokia Network, dan Siemens AG sejak Agustus 2004 terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan perangkat dan layanan terkait:

- Perjanjian Perencanaan dan Pengerjaan Bersama (*Joint Planning and Process Agreement*).
- Perjanjian Penyediaan Peralatan (*Equipment Supply Agreement* (ESA)).
- Perjanjian Jasa Teknik (*Technical Service Agreement* (TSA)).
- Perjanjian Pengadaan Lokasi dan Sipil, Mekanik, dan Teknik (*Site Acquisition and Civil, Mechanical and Engineering Agreement*, (SITAC dan CME)).

Perjanjian-perjanjian meliputi daftar biaya yang digunakan dalam menentukan biaya terutang oleh Telkomsel untuk seluruh perangkat dan layanan terkait yang diperoleh selama periode berjalan sampai saat penerbitan *Purchase Orders* (PO). Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku efektif pada saat tanggal pelaksanaan oleh pihak-pihak yang terkait untuk periode tiga tahun, dengan catatan bahwa para pemasok dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada setiap PO. Jika pemasok gagal memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, Telkomsel dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan tertulis.

Sesuai perjanjian, para pihak juga sepakat bahwa biaya yang ditetapkan pada daftar harga berlaku untuk peralatan dan jasa (ESA dan TSA) dan jasa (SITAC dan CME) yang diperoleh dari para pemasok antara tanggal 26 Mei 2004 dan tanggal efektif, kecuali untuk peralatan dan jasa yang diperoleh dari Siemens berdasarkan TSA yang terkait dengan peralatan dan pemeliharaan sub-sistem *switching* (SSS) Telkomsel dan sub-sistem *Base Station* (BSS) yang diperoleh antara tanggal 1 Juli 2004 dan tanggal efektif. Harga-harga dikaji setiap triwulan.

Pada bulan Agustus 2007, disebabkan oleh telah berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut di atas, berdasarkan surat dari Ericsson AB dan Ericsson Indonesia dan Nokia Siemens Network (yang saat ini mewakili Nokia Corporation, Nokia Network dan Siemens AG), perusahaan-perusahaan tersebut menyetujui untuk:

- memperpanjang masa berlakunya perjanjian tersebut diatas sampai dengan perjanjian yang baru antara Telkomsel dan perusahaan-perusahaan lainnya ini telah dibuat; dan

- sebelum tanggal berlakunya perjanjian yang baru secara efektif, secara retroaktif berlaku harga berdasarkan perjanjian yang baru (penyesuaian harga retroaktif) terhadap PO untuk pengadaan peralatan dan jasa BSS yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah 1 Juli 2007 dengan menggunakan daftar harga sebelumnya

Telkomsel memiliki fasilitas impor sebesar US$ 20 juta, garansi bank dan *standby letter of credit* untuk fasilitas kredit, fasilitas pinjaman dan fasilitas valuta asing dengan Standard Chartered Bank Jakarta. Fasilitas ini akan berakhir pada bulan Juli 2008. Atas fasilitas tersebut, sampai dengan 31 Desember 2007, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi senilai Rp 20.000 juta untuk jaminan lisensi 3G *performance bond*.

Telkomsel tidak menyediakan jaminan untuk pinjaman bank, atau fasilitas kredit lainnya. Perjanjian dengan kreditor Telkomsel mengharuskan ketaatan terhadap beberapa persyaratan, baik persyaratan keuangan maupun persyaratan lainnya, antara lain batasan jumlah dividen dan pembagian laba lainnya yang dapat mempengaruhi kapasitas Telkomsel dalam memenuhi persyaratan-persyaratan fasilitas kredit tersebut.

Pada tanggal 24 Maret 2006, Telkomsel dan Serikat Pekerja Telkomsel menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Maret 2008. Berdasarkan perjanjian tersebut Telkomsel harus memberikan cuti besar dan asuransi pasca pensiun kepada para karyawannya. Manfaat antara Telkomsel dan Serikat Pekerja Telkomsel belum terlaksana hingga laporan ini disusun. Oleh karena itu besarnya manfaat belum dapat ditentukan pada tanggal 31 Desember 2007. Sampai dengan penyusunan laporan tahunan ini, Telkomsel masih melakukan proses perpanjangan PKB yang baru.

Selain *item* di atas, kami tidak memiliki transaksi di luar neraca lainnya yang material.

Pengungkapan dalam Bentuk Tabel untuk Kewajiban Kontraktual

Tabel berikut menyajikan ringkasan kewajiban kontraktual pada tanggal 31 Desember 2007 dan pengaruh dari kewajiban tersebut terhadap likuiditas dan arus kas pada masa yang akan datang.

Kewajiban Kontraktual	Jatuh Tempo Pembayaran				
	Jumlah (Rp miliar)	Kurang dari 1 tahun (Rp miliar)	1-3 tahun (Rp miliar)	3-5 tahun (Rp miliar)	Lebih dari 5 tahun (Rp miliar)
Hutang Jangka Pendek[1][6]	573,7	573,7	-	-	-
Hutang Jangka Panjang[2][6]	15.196,9	4.803,6	7.269,4	992,1	2.131,8
Kewajiban Sewa Guna Usaha[3]	229,2	27,2	78,4	107,8	15,8
Bunga atas Hutang Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang, dan Kewajiban Sewa Guna Usaha	3.282,5	1.222,2	1.178,2	359,0	523,1
Operating Leases[4]	4.109,3	1.355,9	1.613,5	598,2	541,7
Kewajiban Pengadaan yang Tidak Bersyarat[5]	8.818,5	8.818,5	-	-	-
Nilai Perolehan Penggabungan Usaha yang Ditangguhkan	4.228,8	1.454,0	2.666,9	107,9	-
Jumlah	36.438,9	18.255,1	12.806,4	2.165,0	3.212,4

(1) Terkait dengan hutang jangka pendek yang diperoleh dari Bank Central Asia, Bank Mandiri dan Bank BNI, lihat Catatan 18 pada Laporan Keuangan Konsolidasian
(2) Lihat Catatan 19, 20, 21, dan 22 pada Laporan Keuangan Konsolidasian
(3) Terkait dengan sewa guna usaha atas repeater untuk jaringan telekomunikasi TELKOMFlexi
(4) Terkait dengan sewa atas komputer, kendaraaan bermotor, tanah, bangunan, peralatan kantor dan sirkit
(5) Terkait dengan komitmen TELKOM kepada pemasok untuk pembelian peralatan dan infrastruktur telekomunikasi
(6) Tidak termasuk komitmen kontraktual untuk suku bunga

Sebagai tambahan atas kewajiban kontraktual di atas, pada tanggal 31 Desember 2007, TELKOM memiliki kewajiban jangka panjang untuk pensiun, imbalan kesehatan pascakerja dan penghargaan masa kerja. TELKOM mengalokasikan Rp 1.100,0 miliar untuk imbalan kesehatan pascakerja dan Rp 889,1 miliar untuk program pensiun manfaat pasti untuk tahun 2008. Lihat Catatan 42, 43, dan 55 pada laporan keuangan konsolidasian.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi Keuangan

Laporan Konsolidasian dan Informasi Keuangan Lain

Lihat "Laporan Keuangan Konsolidasian" TELKOM yang terdapat dalam lampiran laporan tahunan ini

Kasus Hukum

Keputusan KPPU

Pada tanggal 19 Nopember 2007, KPPU mengeluarkan keputusan sehubungan dengan kepemilikan silang Temasek di Telkomsel dan Indosat, yang dinilai telah melanggar undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan keputusan tersebut, Temasek harus melepas seluruh sahamnya di Telkomsel kepada pembeli yang tidak terasosiasi. KPPU juga memutuskan Telkomsel untuk menurunkan tarif minimal sebesar 15%, dan mengharuskan Telkomsel membayar denda sebesar Rp 25 miliar. Pada tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak banding yang diajukan oleh Temasek dan menghukum Temasek untuk menjual sahamnya di Telkomsel atau Indosat, atau mengurangi kepemilikan sahamnya di kedua perusahaan tersebut sebesar 50% dalam waktu 12 bulan. Telkomsel tetap dihukum untuk membayar denda Rp 15 miliar, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan keputusan KPPU atas Telkomsel yang menyatakan Telkomsel harus menurunkan tarifnya hingga 15%. Keputusan Pengadilan Negeri ini dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sembilan operator selular Indonesia, termasuk Telkomsel dan Indosat, tengah menjalani pemeriksaan oleh KPPU terkait dugaan pelanggaran UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia sehubungan dengan penetapan tarif SMS. KPPU belum mengeluarkan keputusan mengenai kasus ini.

Kasus yang Melibatkan Karyawan

Mantan Direktur SDM dan seorang karyawan TELKOM menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan undang-undang anti korupsi terkait dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan jasa konsultan yang menyebabkan kerugian Rp 789 juta. Pada tanggal 2 Mei 2007 Pengadilan Negeri Bandung menyatakan masing-masing terdakwa bersalah dan menjatuhi hukuman satu tahun penjara dan mendenda masing-masing sebesar Rp 50 juta. Terdakwa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pada tanggal 3 Oktober 2007, Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Bandung dan membebaskan kedua terdakwa dari segala tuduhan. Banding telah disampaikan kepada Mahkamah Agung terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sampai Laporan Tahunan ini disusun, belum ada keputusan yang diperoleh dari upaya banding tersebut.

Pada bulan Desember 2005, Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan investigasi terkait dengan tuduhan pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Korupsi, khususnya pada penyediaan layanan interkoneksi untuk Napsindo, anak perusahaan TELKOM dan Globalcom, sebuah perusahaan Malaysia, dalam masalah tarif yang tidak benar untuk jaringan TELKOM yang ditujukan untuk layananVoIP ilegal, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan perangkat telekomunikasi. Di samping itu ada juga penyidikan berkaitan dengan jaminan TELKOM atas pinjaman bank yang dilakukan Napsindo. Selama penyidikan, mantan direksi dan karyawan TELKOM ditahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat sambil menunggu penyelesaian proses penyidikan. Pada 10 Mei 2006, mereka dibebaskan dari tahanan polisi setelah jangka waktu maksimum 120 hari polisi menahan tersangka demi tujuan penyidikan, telah terlewati. Penyelidikan ini masih berjalan dan sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pada tanggal 2 Januari 2006, Kejaksaan Agung memulai penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi sehubungan dengan pengadaan layanan VoIP, yang melibatkan satu mantan karyawan dan empat karyawan TELKOM di KSO VII sebagai tersangka. Hasil dari penyidikan tersebut, satu mantan karyawan dan dua karyawan TELKOM dituntut di Pengadilan Negeri Makasar, dan dua karyawan lainnya dituntut di Pengadilan Negeri Denpasar atas dugaan korupsi mereka di KSO VII.

Pada tanggal 29 Januari 2008, Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan bahwa para terdakwa tidak bersalah. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Pada tanggal 3 Maret 2008, Pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan menghukum setiap terdakwa masing-masing 18 bulan dan 12 bulan penjara dan mendenda masing-masing sebesar Rp 50 juta. Para terdakwa telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bali melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Sampai dengan tanggal pelaporan laporan tahunan ini, belum ada keputusan mengenai pengajuan banding tersebut.

Gugatan *Class Action*

Sekelompok pelanggan Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo Pratama (XL) telah melakukan gugatan hukum kepada Telkomsel, TELKOM, Indosat, Pemerintah, Temasek Holding, dan perusahaan-perusahaan afiliasinya (Pihak Tergugat). Pihak Tergugat didakwa telah menerapkan tarif yang terlalu tinggi dari tarif yang sewajarnya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian cukup besar bagi para pelanggan. (Untuk informasi lebih *detail*, lihat catatan 51f dan 53n laporan keuangan konsolidasian). Sampai saat terbitnya laporan tahunan ini, proses persidangan di pengadilan masih berlangsung. Manajemen TELKOM meyakini bahwa Telkomsel telah menerapkan tarif kepada pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Kasus Hukum Lainnya

TELKOM dan anak perusahaannya menghadapi berbagai kasus hukum yang berhubungan dengan masalah tanah, tagihan *premium call*, dan jasa telekomunikasi. Berdasarkan perkiraan Manajemen terhadap kemungkinan hasil dari permasalahan ini, TELKOM telah meng-*accrue* sebesar Rp 30.479 juta sampai dengan 31 Desember 2007. Untuk lebih rinci, lihat catatan 50 laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

Perubahan Signifikan

Lihat Catatan 52 pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM untuk informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi sesudah tanggal 31 Desember 2007.

Memorandum dan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perusahaan ("Anggaran Dasar") telah didaftarkan di Departemen Kehakiman sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yang diubah berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia") dan diumumkan berdasarkan Keputusan Menteri nomor C2-7468.HT.01.04.TH.97 tahun 1997, yang diubah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. W7-HT.01.10-12858 tanggal 14 September 2007. Sesuai pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi serta informasi.

Sesuai undang-undang perseroan Indonesia, TELKOM memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Kedua Dewan tersebut terpisah dan tidak ada individu yang dapat menjadi anggota kedua Dewan. Setiap direktur juga menerima bonus tahunan dan insentif lainnya apabila TELKOM melampaui target keuangan dan operasional tertentu, yang jumlahnya ditentukan oleh para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lihat "Direksi, Manajemen Senior dan Karyawan – Direksi dan Manajemen Senior". Anggaran Dasar menyatakan bahwa setiap transaksi yang melibatkan benturan kepentingan antara Perusahaan dan Direksi, Komisaris dan pemegang sahamnya harus mendapat persetujuan dalam RUPS, dimana persetujuan ini diperlukan dari mayoritas pemegang saham independen.

Direksi diberi tanggung jawab memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai maksud dan tujuannya dan mengendalikan, menjaga dan mengelola aktiva Perusahaan. Dalam lingkup tanggung jawab yang demikian luas, Direksi diberi wewenang untuk meminta Perusahaan agar meminjam suatu jumlah sebagaimana yang diperlukan oleh pihaknya dari waktu ke waktu dengan tunduk pada batasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Wewenang Direksi untuk meminjam hanya dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar tidak mencantumkan persyaratan apapun bagi Direksi untuk (i) pensiun pada umur yang telah ditetapkan, atau (ii) memiliki suatu atau sejumlah tertentu saham Perusahaan yang telah ditetapkan. Hak, preferensi dan batasan yang menyertai setiap kelas saham Perusahaan sehubungan dengan hal yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut:

- hak dividen. Dividen harus dibayar berdasarkan kondisi keuangan TELKOM dan sesuai keputusan para pemegang saham pada rapat umum, yang juga menentukan bentuk dan waktu pembayaran dividen;
- hak suara. Pemegang setiap saham dengan hak suara berhak atas satu suara pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- hak berbagi atas laba Perusahaan. Lihat hak dividen;
- hak berbagi atas kelebihan pada saat likuidasi. Para pemegang saham berhak atas kelebihan pada saat likuidasi sesuai proporsi kepemilikan saham mereka, dengan ketentuan bahwa nilai nominal Saham Biasa yang mereka pegang sudah disetor penuh;
- ketentuan penebusan. Tidak ada ketentuan mengenai penebusan saham dalam Anggaran Dasar. Namun, berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia, TELKOM dapat membeli kembali maksimum 10% dari saham yang telah dikeluarkan;
- ketentuan dana cadangan. Laba ditahan hingga minimum 20% dari modal yang ditempatkan Perusahaan, harus disisihkan untuk menutup kemungkinan kerugian yang diderita Perusahaan. Apabila jumlah dalam dana cadangan lebih besar dari 20% dari modal yang ditempatkan Perusahaan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Perusahaan untuk menggunakan kelebihan dana tersebut sebagai dividen;
- kewajiban untuk peningkatan modal dari waktu ke waktu. Para pemegang saham Perusahaan dapat diminta untuk membeli saham baru di Perusahaan dari waktu ke waktu. Hak tersebut harus ditawarkan kepada para pemegang saham sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga dan dapat dialihkan atas opsi pemegang saham. Direksi TELKOM diberi wewenang untuk menawarkan saham baru kepada pihak ketiga dalam hal pemegang saham yang ada tidak dapat atau tidak bersedia membeli saham baru tersebut; dan
- ketentuan yang membedakan antara pemegang saham yang ada atau calon pemegang saham yang disebabkan karena pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang substansial. Anggaran Dasar tidak mencantumkan ketentuan tersebut.

Untuk mengubah hak para pemegang saham, diperlukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar terkait. Setiap perubahan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan dari pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan dua pertiga pemegang Saham Seri B yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat tersebut juga harus dihadiri oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Rapat Umum Pemegang Saham hanya boleh diadakan setelah perusahaan menyampaikan pemberitahuan seperti yang disyaratkan. Pemberitahuan harus diumumkan sekurang kurangnya dalam dua surat kabar dalam bahasa Indonesia dan satu surat kabar dalam bahasa Inggris yang memiliki peredaran luas di Indonesia. Jangka waktu pemberitahuan akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, masing-masing, adalah 21 hari dan 14 hari (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat). Kuorum untuk rapat umum adalah para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% dari modal saham yang beredar dari Perusahaan. Dalam hal kuorum tidak tercapai, harus diadakan rapat berikutnya, dimana rapat ini tidak memerlukan penyampaian pemberitahuan. Pada rapat kedua, kuorum untuk rapat adalah para pemegang saham yang mewakili sepertiga dari modal saham yang beredar dari Perusahaan. Dalam hal kuorum tidak tercapai pada rapat kedua, maka rapat ketiga dapat diadakan, dimana kuorum untuk rapat tersebut akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas TELKOM. Para pemegang saham dapat memberikan suara melalui kuasa. Seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan mayoritas sederhana, kecuali Anggaran Dasar mensyaratkan mayoritas yang lebih besar.

Anggaran Dasar tidak mencantumkan batasan apapun atas hak setiap orang untuk memiliki saham Perusahaan. Peraturan pasar modal Indonesia tidak mencantumkan batasan apapun atas hak setiap orang, baik WNI atau WNA, untuk memiliki saham di suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Setiap pengambilalihan TELKOM harus mendapat persetujuan dari pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan mayoritas yang merupakan 75% pemegang Saham Seri B pada rapat umum pemegang saham yang harus dihadiri oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Tidak ada ketentuan lain dalam Anggaran Dasar yang berdampak memperlambat, menangguhkan atau mencegah perubahan kendali atas TELKOM.

Setiap Direktur dan Komisaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam berkenaan dengan kepemilikan mereka serta perubahan kepemilikan mereka di Perusahaan dan kewajiban ini juga berlaku untuk para pemegang saham yang memiliki kepemilikan 5% atau lebih atas modal yang disetor dari Perusahaan. TELKOM yakin bahwa Anggaran Dasar tidak berbeda signifikan dari yang umum berlaku di Indonesia sehubungan dengan perusahaan publik yang tercatat di bursa efek Indonesia. TELKOM juga yakin bahwa ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang terkait dengan perubahan modal TELKOM tidak lebih ketat dari yang disyaratkan oleh hukum Indonesia.

Pada tanggal 29 Juni 2007, RUPS Tahunan menyetujui perubahan ketentuan mengenai (i) masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) wewenang Direksi untuk mewakili Perusahaan; (iii) penggunaan *telephone conference* dan *video conference* atau media lainnya sebagai sarana komunikasi dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi; (iv) perubahan ketentuan mengenai pemberitahuan RUPS; dan (v) beberapa perubahan untuk menjaga konsistensi.

Rangkuman perbedaan signifikan antara praktik tata kelola perusahaan Indonesia dan standar tata kelola perusahaan NYSE

Berikut ini diuraikan secara ringkas rangkuman umum mengenai perbedaan signifikan antara praktik tata kelola perusahaan yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, seperti TELKOM, dan yang disyaratkan oleh standar pencatatan New York Stock Exchange (NYSE) untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memiliki saham biasa yang tercatat di NYSE. Standar pencatatan NYSE tersedia di situs web NYSE di http://www.nyse.com.

Tinjauan hukum Indonesia

Perusahaan publik Indonesia diwajibkan untuk mematuhi dan memenuhi praktik tata kelola perusahaan yang telah ditentukan. Persyaratan dan standar praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan publik terutama tertuang dalam peraturan berikut: Undang-undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 ("Undang-undang Perseroan); Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-undang Pasar Modal"); Undang-undang No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M.MBU/2002 mengenai Pelaksanaan Praktik Tata Kelola Perusahaan; Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia ("Peraturan Bapepam"); dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain persyaratan berdasarkan undang-undang tersebut, Anggaran Dasar perusahaan publik umumnya menyertakan ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik tata kelola perusahaan mereka sendiri.

Seperti undang-undang Amerika Serikat, undang-undang Indonesia mengharuskan perusahaan publik mematuhi dan memenuhi standar praktik tata kelola perusahaan yang lebih ketat dari yang diterapkan pada perusahaan milik swasta. Perlu diperhatikan bahwa di Indonesia, istilah "perusahaan publik" belum tentu merujuk pada perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek. Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal, perusahaan yang tidak tercatat dapat dianggap perusahaan publik dan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang mengatur perusahaan publik, apabila perusahaan tersebut memenuhi atau melampaui persyaratan modal dan persyaratan pemegang saham yang berlaku ditetapkan untuk perusahaan terbuka.

Pada tahun 2000, Pemerintah mendirikan Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan (KNTKP), yaitu komite informal yang bertugas merumuskan standar tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Hasilnya, KNTKP merumuskan Peraturan Tata Kelola Perusahaan ("Peraturan") yang merekomendasikan standar tata kelola perusahaan yang lebih ketat untuk perusahaan-perusahaan Indonesia, seperti penunjukan komite audit independen dan komite kompensasi oleh Dewan Komisaris, serta peningkatan lingkup kewajiban pengungkapan perusahaan-perusahaan Indonesia. Meskipun KNTKP merekomendasikan agar Peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai dasar bagi reformasi hukum, namun sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, Pemerintah belum menerbitkan peraturan yang sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan. Misalnya, walaupun perusahaan publik seperti TELKOM saat ini diharuskan memiliki komite audit independen, namun mereka masih belum diharuskan memiliki komite kompensasi independen. Oleh karena itu, banyak dari ketentuan-ketentuan Peraturan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Standar pencatatan NYSE mensyaratkan bahwa Direksi perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat harus terdiri dari mayoritas direktur independen dan bahwa komite tertentu harus terdiri dari para direktur independen saja. Seorang Direktur memenuhi syarat sebagai independen hanya apabila dewan dengan tegas memutuskan bahwa Direktur tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung.

Tidak seperti halnya perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat, manajemen perusahaan Indonesia terdiri dari dua lembaga dengan status yang sama, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Pada umumnya Direksi bertanggung jawab atas kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan dan diberi wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, sementara Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab mengawasi Direksi dan berdasarkan undang-undang diberi mandat untuk memberikan saran kepada Direksi.

Berkenaan dengan Dewan Komisaris, Undang-undang Perseroan mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik sekurang-kurangnya terdiri dari dua anggota. Meskipun Undang-Undang Perusahaan tidak mengatur mengenai komposisi Dewan Komisaris, namun Peraturan Pencatatan No. 1A yang dikeluarkan oleh BEI menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari anggota Dewan Komisaris perusahaan publik (seperti TELKOM) harus independen.

Mengenai Direksi, Undang-undang Perseroan menyatakan bahwa Direksi memiliki wewenang untuk mengelola operasi sehari-hari perusahaan dan sekurang-kurangnya terdiri dari dua anggota, yang masing-masing harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan. Dengan adanya perbedaan antara peran anggota Direksi di perusahaan Indonesia dan mitranya di perusahaan Amerika Serikat, undang-undang Indonesia tidak mengharuskan independensi anggota direksi tertentu juga tidak mengharuskan dibentuknya komite tertentu yang sepenuhnya beranggotakan direktur independen.

Komite-komite

Standar pencatatan NYSE mengharuskan bahwa perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat memiliki komite audit, komite tata kelola perusahaan dan komite kompensasi. Masing-masing komite tersebut harus terdiri atas direktur independen dan mendapatkan pengakuan tertulis yang membahas hal-hal spesifik yang terdapat pada standar pencatatan.

Undang-undang Perusahaan tidak mengharuskan perusahaan publik Indonesia membentuk setiap komite yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE. Namun, Peraturan Pencatatan No. 1A yang dikeluarkan oleh BEI mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik tercatat (seperti TELKOM) membentuk komite yang akan mengawasi proses audit perusahaan (komite ini harus diketuai oleh anggota independen Dewan Komisaris).

TELKOM memiliki komite audit yang terdiri dari enam anggota: dua komisaris independen, dan empat anggota yang tidak berafiliasi dengan TELKOM. Peraturan pencatatan NYSE yang diterapkan sesuai Peraturan 10A-3 berdasarkan Exchange Act mengharuskan emiten swasta asing dengan efek yang tercatat di NYSE memiliki komite audit yang terdiri dari para direktur independen. Namun, berdasarkan Peraturan 10A-3 (c) (3), emiten swasta asing dikecualikan dari persyaratan independensi apabila (i) pemerintah atau bursa efek negara asal mengharuskan perusahaan memiliki komite audit; (ii) komite audit terpisah dari direksi dan memiliki anggota dari dalam maupun dari luar direksi; (iii) anggota komite audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif perusahaan yang menjadi anggota komite audit; (iv) pemerintah atau bursa efek negara asal memiliki persyaratan untuk komite audit yang terpisah dari manajemen perusahaan; dan (v) komite audit bertanggung jawab atas penunjukan, retensi dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal. TELKOM memandang dirinya dikecualikan dari hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 303A Penegasan Tertulis Tahunan yang diajukan ke NYSE. Standar pencatatan NYSE dan peraturan Komite Audit TELKOM bersama-sama bertujuan untuk menetapkan sistem pengawasan akuntansi perusahaan yang terpisah dari manajemen dan memastikan independensi auditor. Namun, tidak seperti halnya persyaratan yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE, Komite Audit TELKOM tidak memiliki tanggung jawab langsung atas penunjukan, kompensasi dan retensi auditor eksternal TELKOM. Komite Audit TELKOM hanya dapat merekomendasikan penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, dan keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.

Dewan Komisaris TELKOM menetapkan komite pencalonan dan remunerasi TELKOM. Komite diberi tugas merumuskan kriteria pemilihan dan prosedur pencalonan untuk komisaris dan direksi; dan sistem kompensasi untuk komisaris dan direksi.

Pengungkapan berkenaan dengan tata kelola perusahaan

Standar pencatatan NYSE mengharuskan perusahaan Amerika Serikat menerapkan seperangkat panduan tata kelola perusahaan, dan memasang di situs web mereka. Panduan tersebut, antara lain, harus mencantumkan: standar kualifikasi direktur, tanggung jawab direktur, akses direktur ke manajemen dan penasihat independen, kompensasi direktur, orientasi direktur dan pendidikan yang berkelanjutan, suksesi manajemen, serta evaluasi kinerja tahunan itu sendiri. Selain itu, CEO perusahaan Amerika Serikat harus menyatakan kepada NYSE setiap tahunnya bahwa ia tidak menemukan adanya pelanggaran apapun oleh perusahaan terhadap standar pencatatan tata kelola perusahaan NYSE. Sertifikasi harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham. Tidak ada persyaratan pengungkapan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mirip dengan standar pencatatan NYSE yang diuraikan di atas. Namun, Undang-undang Pasar Modal pada umumnya mengharuskan perusahaan publik Indonesia mengungkapkan jenis informasi tertentu kepada para pemegang saham dan kepada Bapepam, khususnya informasi yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan saham perusahaan publik dan fakta material yang bisa mempengaruhi keputusan para pemegang saham dalam mempertahankan kepemilikan saham mereka di perusahaan publik tersebut.

Peraturan Perilaku dan Etika Bisnis

Standar pencatatan NYSE mengharuskan setiap perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat untuk menerapkan dan memasukkannya di situs web mereka, peraturan perilaku dan etika bisnis bagi direksi, pejabat dan karyawannya. Tidak ada persyaratan serupa berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, perusahaan yang diharuskan menyampaikan laporan berkala ke SEC, termasuk TELKOM, harus mengungkapkan dalam laporan tahunan mereka tentang penerapan peraturan etika untuk pejabat keuangan senior mereka. Meskipun persyaratan mengenai isi peraturan etika berdasarkan peraturan SEC tidak identik dengan yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE, namun terdapat kemiripan yang signifikan. Berdasarkan peraturan SEC, peraturan etika harus dirancang untuk mendorong: (a) perbuatan yang jujur dan etis, termasuk penanganan benturan kepentingan antara hubungan pribadi dan profesional; (b) pengungkapan yang lengkap, wajar, tepat dan tepat waktu dalam laporan dan dokumen yang diajukan kepada atau diserahkan kepada SEC; (c) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku; (d) menyegerakan pelaporan internal mengenai pelanggaran terhadap peraturan; dan (e) pertanggung jawaban atas kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, para pemegang saham harus diberikan akses ke salinan fisik atau elektronik dari peraturan tersebut. Lihat “Peraturan Perilaku.”

Kontrak Material

Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan pada Konsorsium AAG

Pada tanggal 27 April 2007, TELKOM menjadi anggota dari Konsorsium AAG, sebuah konsorsium kabel bawah laut dengan 19 perusahaan yang telah mengadakan kesepakatan kontrak pembangunan dan pemeliharaan serta pengadaan jaringan kabel dan dibayar sebesar US$ 40 juta. Lihat catatan 49c pada laporan keuangan konsolidasian TELKOM.

Kontrak Pembelian untuk Perluasan FWA CDMA

Pada Tahun 2006 dan 2007, TELKOM mengeluarkan serangkaian kontrak pembelian kepada Konsorsium Huawei, Samsung, dan Konsorsium ZTE terkait rencana perluasan FWA CDMA di seluruh Divisi Regional TELKOM. Lihat catatan 49a pada laporan keuangan konsolidasian TELKOM.

Perluasan IP *Core* dengan Siemens dan Juniper Networks, Inc.

Pada tanggal 28 Juni 2007, TELKOM melakukan kesepakatan dengan Nokia Siemens Networks untuk memperluas jaringan IP core TELKOM senilai Rp 72,93 miliar. TELKOM memperluas infrastruktur IP *core* / MPLS dengan penambahan Juniper *networks* M-*series multi service routing platform*, termasuk M320. Peningkatan kapasitas, yang dilaksanakan oleh Siemens, dibangun di atas router M-series yang telah tersedia, mulai dilaksanakan pada 2005 sebagai awal peluncuran NGN. Pembangunan baru mencakup 43 titik di 28 kota di seluruh Indonesia, yang menghubungkan jaringan *metro ethernet*, sistem *softswitch* dan *router* yang telah ada saat ini.

Pengembangan *Metro Ethernet Network* di Empat Divisi Regional

Pada tanggal 6 Nopember 2007, TELKOM menerbitkan surat kesepakatan dengan (i) PT Abimata Citra Abadi untuk penggunaan teknologi Tellabs senilai Rp 49,30 miliar dan (ii) PT Datacomm Dian Graha untuk penggunaan teknologi Alcatel dengan nilai Rp 34,94 miliar untuk pengembangan awal jaringan metro Ethernet TELKOM di empat Divisi Regional (II, III, IV dan VII). Pengembangan ini mencakup 155 titik dan bagian dari pembangunan jaringan IP regional menuju peluncuran NGN.

Ekspansi Backbone Ring Jakarta-Sumatera-Kalimantan (Jasuka) dengan Konsorsium NEC-NSN

Pada tanggal 10 Agustus 2007, TELKOM melakukan kesepakatan dengan Konsorsium NEC-NSN, sebuah konsorsium yang terdiri dari NEC Corporation dan PT Nokia Siemens Network untuk pengadaan dan instalasi Ekspansi Lambda untuk *Backbone Ring* Jasuka senilai US$3,25 juta dan Rp 17,40 miliar. Ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kesepakatan ini meliputi ekspansi kapasitas sebesar dua lambda untuk mencukupi trafik internet broadband dan internasional, yang terdiri dari (i) 1 lambda untuk *Ring* I (Jakarta-Tanjung Pandan-Pontianak-Batam-Dumai-Pekanbaru-Palembang-Jakarta) dan (ii) 1 lambda untuk *Ring* II (*link* Medan-Padang-Pekanbaru-Medan). Pada tanggal 10 Oktober 2007, TELKOM melakukan kesepakatan dengan Konsorsium NEC-NSN, sebuah konsorsium yang terdiri dari NEC Corporation dan PT Nokia Siemens Network untuk pengadaan dan instalasi Transponder *Terrestrial* untuk *Backbone Ring* Jasuka senilai Rp 15 miliar. Ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kesepakatan meliputi *upgrade* transponder transmisi *terrestrial backbone* Jasuka untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan transmisi DWDM.

Ekspansi Kapasitas *Backbone* Jawa dengan Konsorsium NEC-NSN

Pada tanggal 18 Juni 2007, TELKOM melakukan kontrak pengadaan dengan NEC Corporation untuk memperluas kapasitas dan meningkatkan kinerja *Backbone* Jawa senilai Rp 28,16 miliar, termasuk PPN 10%. Lingkup pekerjaan dalam kontrak ini meliputi perluasan kapasitas lambda, penambahan splitter dan konfigurasi ulang *repeater*. Berdasarkan perubahan kontrak tanggal 14 Nopember 2007 nilai kontrak dirubah menjadi Rp 28,68 miliar, termasuk PPN 10%.

Backbone Submarine Jember-Denpasar

Pada tanggal 29 Desember 2006, TELOM melakukan kontrak pengadaan dengan ZTE Konsorsium untuk pembangunan sistem kabel bawah laut (*submarine cable*) Jember-Denpasar senilai US$10,19 juta dan Rp 16,14 miliar (termasuk PPN 10%). Untuk mempercepat pembangunan tersebut, TELKOM melakukan perubahan kontrak untuk meniadakan *marine portion*. Nilai sisa kontrak (di luar *marine portion*) adalah sebesar US$1,82 juta dan Rp 13,30 juta. *Marine portion* akan dikerjakan bersama dengan proyek-proyek lainnya seperti *backbone Ring* 8 dan *Ring* 4 yang rencananya akan diselesaikan pada akhir tahun 2008.

Untuk penjelasan mengenai kontrak perjanjian lainnya, silahkan lihat catatan 49a pada laporan keuangan konsolidasian TELKOM.

Akuisisi Sigma oleh Metra

Pada tanggal 22 Pebruari 2008, anak perusahaan TELKOM bernama Metra menyelesaikan proses akuisisi 80% saham Sigma, sebuah perusahaan IT di Indonesia, dari Trozenin Management Plc. (Malaysia) and PT Sigma Citra Harmoni. Akuisisi saham PT.Sigma ini menelan biaya sebesar US$35 juta dan sebagian besar dibiayai oleh dana internal TELKOM.

Perubahan dan Penataan ulang kontrak Kerjasama Operasi ("KSO") di Divisi Regional VII (KSO VII)

Pada tanggal 19 Oktober, 2006, TELKOM dan PT Bukaka SingTel International, investor di KSO VII, melakukan kesepakatan untuk merubah dan menata ulang kontrak kerjasama operasi keduanya. Lihat catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian TELKOM.

Kesepakatan Penerbitan Wesel Bayar Jangka Menengah (MTN)

Pada tanggal 13 Desember 2004, TELKOM membuat kontrak perjanjian dengan PT ABN AMRO Asia Securities Indonesia, PT Bahana Securities, PT BNI Securities dan PT Mandiri Sekuritas untuk menerbitkan MTN senilai Rp 1.125 miliar. Penerbitan MTN ini terdiri atas empat seri, setiap seri MTN masing-masing akan dilunasi kembali pada tanggal 15 Juni 2005, 15 Desember 2005, 15 Juni 2006 dan 15 Juni 2007. Lihat catatan 21b pada laporan keuangan konsolidasian TELKOM.

Perubahan Perjanjian Interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2007, TELKOM melakukan perubahan atas kontrak kesepakatan interkoneksi dengan (i) Indosat, terkait interkoneksi jaringan telepon tetap TELKOM untuk lokal dan SLJJ dengan jaringan telepon bergerak Indosat; (ii) HCPT, terkait interkoneksi jaringan telepon tetap TELKOM untuk lokal dan SLJJ dengan jaringan telepon bergerak HCPT; (iii) Excelcomindo, terkait interkoneksi jaringan telepon tetap TELKOM untuk lokal dan SLJJ dengan jaringan telepon bergerak Excelcomindo; (iv) Natrindo, terkait interkoneksi jaringan telepon tetap TELKOM untuk lokal dan SLJJ dengan jaringan telepon bergerak Natrindo; (v) Telkomsel, terkait interkoneksi jaringan telepon tetap TELKOM untuk lokal dan SLJJ dengan jaringan telepon bergerak Telkomsel; dan (vi) BBT, terkait interkoneksi jaringan telepon tetap nirkabel TELKOM untuk lokal dan SLJJ dengan jaringan telepon tetap lokal BBT. Semua kontrak kesepakatan ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2008 dan akan berlaku selama dua tahun.

Kesepakatan Interkoneksi dengan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Pada tanggal 19 Desember 2007, TELKOM membuat kontrak perjanjian dengan STI, terkait interkoneksi jaringan telepon tetap TELKOM untuk lokal dan SLJJ dengan jaringan telepon bergerak STI. Kontrak perjanjian ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2008 dan akan berlaku selama dua tahun.

Penunjukan PwC sebagai Auditor Eksternal TELKOM tahun 2007

Pada tanggal 31 Oktober 2007, TELKOM mengumumkan telah menunjuk KAP Haryanto Sahari & Rekan, firma anggota dari jaringan global Pricewaterhouse Coopers (PwC), sebagai auditor independen perseroan untuk melaksanakan *integrated audit* tahun 2007 yang meliputi audit untuk laporan keuangan konsolidasian dan audit untuk pengendalian internal atas pelaporan keuangan TELKOM tahun 2007.

Pengendalian Nilai Tukar

Informasi Nilai Tukar

Tabel berikut memuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berdasarkan nilai tukar tengah pada akhir setiap bulan untuk jangka waktu yang bersangkutan. Nilai tukar tengah Rupiah dihitung berdasarkan kurs jual dan beli Bank Indonesia.

Tahun	Pada akhir periode	Rata-rata[1]	Atas[2]	Bawah[2]
	(Rp per US$1)			
2003	8.465	8.573	9.120	8.165
Kuartal Pertama	8.919	8.907	9.120	8.836
Kuartal Kedua	8.285	8.488	8.906	8.165
Kuartal Ketiga	8.389	8.427	8.665	8.166
Kuartal Keempat	8.465	8.471	8.583	8.365
2004	9.290	8.935	9.430	8.323
Kuartal Pertama	8.587	8.465	8.465	8.323
Kuartal Kedua	9.415	8.992	9.430	8.574
Kuartal Ketiga	9.170	9.151	9.389	8.825
Kuartal Keempat	9.290	9.126	9.355	8.960
2005	9.830	9.711	10.800	9.133
Kuartal Pertama	9.480	9.276	9.520	9.133
Kuartal Kedua	9.713	9.548	9.755	9.435
Kuartal Ketiga	10.310	10.006	10.800	9.735
Kuartal Keempat	9.830	9.992	10.300	9.735
2006	9.020	9.167	9.795	8.720
Kuartal Pertama	9.075	9.304	9.795	9.030
Kuartal Kedua	9.300	9.107	9.520	8.720
Kuartal Ketiga	9.235	9.121	9.245	9.030
Kuartal Keempat	9.020	9.134	9.228	9.020
2007	9.419	9.136	9.479	8.672
Kuartal Pertama	9.118	9.099	9.225	8.950
Kuartal Kedua	9.054	8.973	9.120	8.672
Kuartal Ketiga	9.137	9.246	9.479	8.990
Kuartal Keempat	9.419	9.234	9.434	9.045
November	9.376	9.264	9.405	9.078
Desember	9.419	9.334	9.434	9.240
2008				
Januari	9.291	9.406	9.486	9.291
Pebruari	9.051	9.181	9.269	9.051
Maret	9.217	9.185	9.325	9.072
April	9.234	9.209	9.239	9.179

(1) Rata-rata dari nilai tukar tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang berlaku untuk jangka waktu yang bersangkutan.
(2) Nilai atas dan bawah ditentukan berdasarkan nilai tukar tengah harian yang diumumkan oleh Bank Indonesia selama jangka waktu yang berlaku.
Sumber: Bank Indonesia

Nilai tukar mata uang asing yang digunakan untuk translasi aktiva dan kewajiban moneter adalah nilai beli dan jual yang dipublikasikan oleh Reuters pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Nilai jual dan beli yang dipublikasikan oleh Reuters untuk aktiva dan kewajiban moneter masing-masing sebesar Rp 9.825 dan Rp 9.835 per US$ 1 posisi 31 Desember 2005, Rp 8.995 dan Rp 9.005 per US$ 1 posisi 31 Desember 2006 dan Rp 9.389 dan Rp 9.399 per US$ 1 posisi 28 Desember 2007.

Penyajian laporan keuangan konsolidasi dijabarkan dalam Rupiah. Pencantuman konversi Rupiah ke dalam Dolar AS semata-mata demi kemudahan dalam membaca dan telah dikonversi menggunakan kurs rata-rata jual dan beli Rp 9.394 per US$1 seperti yang dipublikasikan oleh Reuters pada tanggal 28 Desember 2007.

Pada tanggal 16 Mei 2008, kurs beli dan jual Dolar AS berdasarkan Reuters masing-masing sebesar Rp 9.308 dan Rp 9.310 per US$1.

Pengendalian Valuta Asing

Kontrol Valuta Asing dihapuskan pada tahun 1971 dan Indonesia saat ini menerapkan sistem valuta asing liberal yang memungkinkan aliran bebas valuta asing. Transaksi modal, termasuk pengiriman modal, laba, dividen dan bunga, bebas dari kontrol pertukaran. Bagaimanapun, beberapa peraturan mempunyai dampak terhadap sistem nilai tukar. Misalnya, hanya bank yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi atas valuta asing dan melaksanakan transaksi pertukaran terkait dengan impor dan ekspor barang. Selain itu, bank-bank Indonesia (termasuk cabang bank asing di Indonesia) diharuskan melapor ke Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia) setiap transfer dana yang melebihi US$ 10,000. Sebagai perusahaan milik negara, TELKOM, berdasarkan ketetapan Ketua Team Koordinasi Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), diharuskan mendapatkan persetujuan dari PKLN sebelum mendapatkan pinjaman komersial asing dan harus menyerahkan laporan berkala kepada PKLN selama jangka waktu pinjaman.

Bank Indonesia berwenang menerbitkan mata uang Rupiah dan bertanggung jawab mempertahankan stabilitas Rupiah. Sebelum tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia mempertahankan stabilitas Rupiah melalui kebijakan *trading band*, yang merupakan dasar bagi Bank Indonesia untuk memasuki pasar valuta asing dan membeli atau menjual Rupiah, apabila diperlukan ketika perdagangan dalam Rupiah melampaui harga jual dan beli yang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap harinya. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia mengakhiri kebijakan trading band, yang secara efektif membebaskan Rupiah mengambang terhadap mata uang lain. Sejak tanggal itu, Rupiah mengalami depresiasi signifikan terhadap mata uang-mata uang dunia.

Selama 25 tahun terakhir, Rupiah telah mengalami devaluasi tiga kali terhadap Dolar Amerika Serikat. Penyesuaian ke bawah ini terjadi pada bulan November 1978, sewaktu nilai tukar diselaraskan kembali dari Rp 415 menjadi Rp 623 terhadap Dolar Amerika Serikat; pada bulan Maret 1983, sewaktu nilai tukar naik dari Rp 703 menjadi Rp 970 terhadap Dolar Amerika Serikat; dan pada bulan September 1986, sewaktu nilai tukar jatuh dari Rp 1.134 menjadi Rp 1.644 terhadap Dolar Amerika Serikat. Antara waktu devaluasi 1986 dan 14 Agustus 1997, nilai Rupiah secara bertahap disesuaikan ke bawah terhadap Dolar

Amerika Serikat sebesar kurang lebih 4% setiap tahunnya. Sejak regim mengambang bebas diberlakukan pada bulan Agustus 1997, fluktuasi Rupiah terjadi signifikan. Selama tahun 2007, nilai rata-rata Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat adalah sebesar Rp 9.136, dengan nilai tertinggi dan terendah, masing-masing, sebesar Rp 9.479 dan Rp 8.672.

Perpajakan

BERIKUT INI ADALAH IKHTISAR PAJAK PENGHASILAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT YANG BERISI URAIAN MENGENAI KONSEKUENSI PAJAK INDONESIA DAN US FEDERAL TERHADAP PEMBELIAN, KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN ADS ATAU SAHAM BIASA. PARA INVESTOR HARUS BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PAJAK MEREKA MENGENAI KONSEKUENSI PAJAK INDONESIA DAN US FEDERAL TERHADAP PEMBELIAN, KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN ADS ATAU SAHAM BIASA.

Perpajakan Indonesia

Berikut ini adalah ikhtisar dari konsekuensi pajak Indonesia atas kepemilikan dan pelepasan saham biasa atau ADS kepada perorangan bukan penduduk atau badan bukan penduduk yang memiliki saham biasa atau ADS (Pemegang bukan warga negara Indonesia). Sebagaimana yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, “perorangan bukan penduduk” adalah warga negara asing yang secara fisik tidak berada di Indonesia selama 183 hari atau lebih selama jangka waktu dua belas bulan dimana selama jangka waktu tersebut perorangan bukan penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS, dan “badan bukan penduduk” adalah badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau terorganisasi berdasarkan hukum yurisdiksi selain Indonesia dan tidak memiliki tempat berbisnis tetap atau menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia selama tahun pajak Indonesia dimana badan bukan Indonesia tersebut menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS. Dalam menentukan kedudukan perorangan atau badan, yang dipertimbangkan adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia merupakan salah satu pihak yang berpartisipasi.

Dividen

Dividen yang diumumkan oleh Perusahaan dari laba ditahan dan dibagikan kepada pemegang bukan warga negara Indonesia sehubungan dengan saham biasa atau ADS terkena wajib pungut pajak penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia yang, pada tanggal laporan tahunan ini, adalah pada tarif 20% atas jumlah pembagian (dalam hal dividen tunai) atau atas saham proporsional dari para pemegang saham dari nilai pembagian. Tarif yang lebih rendah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda dapat diberlakukan dengan ketentuan bahwa penerima adalah pemilik manfaat dari dividen dan telah menyerahkan kepada Perusahaan (dengan salinan yang ditembuskan kepada Kantor Pelayanan Pajak Indonesia dimana Perusahaan terdaftar) Surat Keterangan Domisili Pajak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau pihak yang ditetapkannya dari yurisdiksi dimana pemegang bukan warga negara Indonesia berkedudukan (Surat Keterangan Domisili Pajak). Indonesia telah mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan sejumlah negara termasuk Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Mauritius, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan AS. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda AS-Indonesia, wajib pungut pajak penghasilan atas dividen, dengan tidak adanya hak suara 25%, pada umumnya dikurangi menjadi 15%.

Capital Gains

Penjualan atau pengalihan Saham Biasa melalui BEI adalah merupakan subyek wajib pungut pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang melakukan transaksi diwajibkan memotong pajak tersebut. Kepemilikan saham pihak pendiri atau penjualan atau pengalihan saham pihak pendiri melalui bursa efek Indonesia, berdasarkan peraturan pajak Indonesia yang berlaku saat ini, dapat terkena tambahan pajak penghasilan yang bersifat final 0,5%.

Dengan tunduk pada diundangkannya peraturan pelaksanaan, perkiraan penghasilan bersih yang diterima atau masih akan diterima dari penjualan aktiva bergerak di Indonesia, yang dapat mencakup saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia atau ADS, oleh pemegang saham bukan warga negara Indonesia (kecuali penjualan aktiva berdasarkan Pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan Indonesia) dapat terkena pajak wajib pungut pajak penghasilan di Indonesia dengan tarif 20%. Pada tahun 1999, Departemen Keuangan mengeluarkan Keputusan yang menyatakan perkiraan penghasilan bersih untuk penjualan saham yang diterima oleh pembayar pajak bukan penduduk di perusahaan non-publik sebesar 25% dari harga jual, yang menghasilkan tarif wajib pungut pajak penghasilan efektif sebesar 5% dari harga penjualan. Pajak ini merupakan wajib pungut pajak penghasilan yang bersifat final dan kewajiban membayar terletak di pihak pembeli (apabila merupakan wajib pajak Indonesia) atau Perusahaan (apabila pembeli adalah wajib pajak bukan penduduk). Pembebasan dari wajib pungut pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di perusahaan non-publik dapat diberikan kepada penjual saham yang bukan penduduk tergantung ketentuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan. Agar mendapat manfaat dari pembebasan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan, penjual bukan penduduk harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili pajak kepada pembeli atau Perusahaan dan kepada Kantor Pajak Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas pembeli atau Perusahaan (apabila pembeli adalah wajib pajak bukan penduduk).

Dalam hal dimana pembeli atau pialang Indonesia, berdasarkan undang-undang pajak Indonesia, diharuskan memotong pajak atas pembayaran harga beli untuk Saham Biasa atau ADS, maka pembayaran tersebut dapat dibebaskan dari wajib pungut pajak penghasilan Indonesia atau pajak penghasilan Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia adalah merupakan salah satu pihak (termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda AS Indonesia). Namun, kecuali untuk penjualan atau pengalihan saham di perusahaan non publik, peraturan pajak saat ini di Indonesia tidak menetapkan prosedur khusus untuk meniadakan kewajiban pembeli atau pialang Indonesia untuk memotong pajak dari hasil penjualan tersebut. Agar dapat memperoleh manfaat dari perjanjian penghindaran pajak berganda, Pemegang saham bukan warga negara Indonesia mungkin dapat meminta pengembalian dari Kantor Pajak Indonesia dengan mengajukan permohonan tertentu yang disertai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan

yang berwenang atau pihak yang mengeluarkannya, dari yurisdiksi dimana Pemegang saham bukan warga negara Indonesia berkedudukan.

Meterai

Setiap dokumen yang dibuat dalam transaksi saham biasa di Indonesia, dimana dokumen ini akan digunakan sebagai bukti di Indonesia, harus diberi meterai Rp 6.000. Pada umumnya, meterai terhutang pada saat dokumen ditandatangani.

Pertimbangan Tertentu Mengenai Pajak Penghasilan Federal Amerika Serikat (AS)

Di bawah ini adalah ikhtisar beberapa konsekuensi pajak penghasilan AS yang berhubungan dengan akuisisi, kepemilikan, dan pengalihan ADS atau Saham Biasa oleh pemegang saham warga Amerika (seperti keterangan dibawah) yang memegang ADS atau Saham Biasa mereka sebagai *capital asset* (umumnya, *property held for investment*) di bawah peraturan pendapatan internal AS (peraturan pajak). Ikhtisar ini berdasarkan hukum federal AS berlaku, yang dapat diartikan secara berbeda atau perubahan, kemungkinan dengan dampak retroaktif.

Ringkasan berikut tidak mendiskusikan semua aspek pajak penghasilan federal AS yang mungkin penting bagi investor tertentu dalam kaitan dengan situasi investasi individual mereka, termasuk investor yang terkena aturan pajak khusus (misalnya institusi keuangan, perusahaan asuransi, *broker-dealers*, kemitraan dan mitra mereka, serta organisasi yang mendapat keringanan pajak (termasuk yayasan pribadi)), pemegang saham yang non Amerika, investor yang akan memegang ADS atau saham biasa sebagian dari *straddle*, lindung nilai, konversi, penjualan konstruktif, atau transaksi terpadu lain untuk tujuan pajak penghasilan AS, atau para investor yang memiliki mata uang selain dollar Amerika, mereka semua mungkin tunduk pada aturan pajak yang sangat berbeda dengan apa yang diringkas dibawah ini. Di samping itu, ringkasan berikut tidak membahas konsekuensi perpajakan non AS baik tingkat negara bagian, lokal atau negara. Tiap pemegang saham didesak untuk berkonsultasi dengan penasehat pajak mereka berkenaan dengan konsekuensi pajak penghasilan dan pajak lainnya baik perpajakan lokal, negara bagian, federal di Amerika Serikat maupun non Amerika Serikat berkaitan dengan investasi mereka pada ADS atau saham biasa.

Untuk keperluan rangkuman berikut, seorang pemegang saham AS adalah pemilik ADS atau saham biasa yang untuk keperluan pajak federal AS, (i) seseorang warga negara atau penduduk AS, (ii) sebuah perusahaan, atau entitas lain yang diperlakukan sebagai perusahaan untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, didirikan, atau dijalankan di bawah hukum AS atau salah satu negara bagian atau sub divisi politik, (iii) suatu estate yang penghasilannya tercakup dalam pendapatan kotor untuk keperluan pajak penghasilan AS tanpa memperdulikan darimana sumbernya, atau (iv) suatu *trustee* (A) yang administrasinya tunduk pada pengawasan utama pengadilan AS dan yang mempunyai satu atau lebih orang AS yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan semua keputusan penting trustee tersebut atau (B) yang sebaliknya dipilih untuk diperlakukan sebagai orang AS dibawah peraturan pajak.

Jika suatu kemitraan adalah pemilik ADS atau saham biasa, perlakuan pajak dari kemitraan secara umum akan tergantung pada status kemitraan dan kegiatannya.

Untuk keperluan pajak penghasilan di federal AS, orang AS pemegang ADS akan diperlakukan pemilik *underlying* saham biasa yang diwakili oleh ADS.

Tentang Klasifikasi Ambang PFIC

Suatu perusahaan non AS seperti perseroan, akan diperlakukan perusahaan sebagai investasi asing pasif (suatu PFIC), untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, jika 75% atau pendapatan kotor terdiri dari tipe penghasilan pasif atau 50% atau lebih asetnya adalah pasif. Berdasarkan pendapatan dan aset perusahaan kini, perusahaan menyatakan tidak yakin bahwa ia harus diklasifikasikan sebagai PFIC. Oleh karena status PFIC adalah ditentukan oleh fakta intensif yang dibuat dalam basis tahunan, tidak ada jaminan bahwa perusahaan tidak atau tidak akan diklasifikasikan sebagai PFIC. Diskusi di bawah ini tentang "Dividen" dan "Penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau saham biasa" ditulis dengan dasar bahwa perseroan tidak akan diklasifikasikan PFIC untuk keperluan pajak penghasilan federal AS.

Dividen

Pembagian tunai yang dibayar oleh perseroan dari keuntungan dan laba sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip pajak penghasilan federal AS, akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dividen dan akan dimasukkan dalam penghasilan kotor pemegang saham AS pada saat diterima. Karena Perusahaan tidak secara sengaja mendapatkan laba yang mengacu kepada prinsip pajak penghasilan federal AS, setiap pembagian laba yang dibayarkan secara umum akan diperlakukan sebagai "dividen" untuk pertimbangan pajak penghasilan federal AS. Penerima penghasilan dividen yang bukan perusahaan pada umumnya akan dikenakan pajak penghasilan dividen dari suatu "perusahaan asing *qualified*" dengan tingkat pajak federal pada maksimum 15% pajak federal AS dibandingkan tingkat pajak marjinal yang diterapkan pada penghasilan biasa mengingat terpenuhinya persyaratan periode kepemilikan tertentu. Suatu perusahaan non AS (yang bukan PFIC) pada umumnya dianggap sebagai perusahaan asing *qualified* (i) jika ia memenuhi syarat untuk manfaat suatu perjajian pajak lengkap dengan AS yang ditentukan memuaskan oleh Secretary of Treasury AS untuk tujuan perjanjian ini dan yang mencakup program pertukaran informasi atau (ii) berkenaan dengan dividen apapun yang dibayar oleh perusahaan atas saham (atau ADS yang didukung oleh saham tersebut) yang siap diperdagangkan di suatu bursa efek yang mapan di AS. Saat ini terdapat suatu perjanjian pajak yang berlaku antara AS dan Indonesia yang telah ditentukan sesuai untuk tujuan ini oleh Secretary of Treasury dan perseroan yakin dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat-manfaat perjanjian tersebut. Di samping itu oleh karena ADS tercatat di NYSE, suatu bursa efek yang mapan di AS, maka ADS tersebut dianggap siap diperdagangkan di NYSE.

Jumlah pembagian tunai dalam rupiah harus sama dengan nilai dolar AS sebagai mana rupiah pada tanggal kuitansi distribusi, berapapun nilai rupiah terhadap dolar AS pada saat itu. Keuntungan atau kerugian jika ada diakui pada kesempatan berikutnya baik penjualan, konversi, atau pengalihan lain rupiah pada umumnya merupakan sumber pendapatan biasa atau kerugian AS. Dividen yang diterima dari ADS atau saham biasa secara umum akan tidak memenuhi pengurangan dividen yang diterima yang diperbolehkan untuk perseroan.

Dividen secara umum akan diperlakukan sebagai pendapatan dari sumber-sumber asing untuk keperluan kredit pajak asing AS. Pemegang saham AS mungkin memenuhi syarat, tunduk pada sejumlah pembatasan yang rumit, untuk mengajukan klaim kredit pajak asing berkenaan dengan pajak kepemilikan asing yang dikenakan atas dividen yang diterima karena ADS atau saham biasa. Pemegang saham AS yang memilih tidak mengajukan klaim kredit pajak asing untuk pajak kepemilikan asing, mungkin saja mengajukan klaim pengurangan, untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, berkenaan dengan kepemilikan tersebut, tetapi untuk satu tahun yang kemudian pemegang saham memilih melakukannya untuk semua pajak penghasilan asing yang dikreditkan.

Penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau saham biasa

Pemegang saham AS secara umum akan mengakui keuntungan atau kerugian modal (*capital gain or loss*) dari penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau saham biasa dalam jumlah sama dengan perbedaan antara jumlah yang terealisasi dalam pengalihan dengan penyesuaian pemegang saham berbasis pajak dalam ADS atau saham biasa tersebut. Suatu keuntungan atau pun kerugian modal akan bersifat jangka panjang apabila ADS atau saham biasa telah dimiliki selama lebih dari satu tahun dan umumnya akan menjadi sumber keuntungan atau kerugian AS untuk keperluan kredit pajak asing AS. Pengurangan dari kerugian modal harus memenuhi kriteria tertentu.

Konsekuensi perusahaan investasi asing pasif (PFIC)

Jika perseroan ini diklasifikasikan sebagai PFIC pada suatu tahun pajak, pemegang saham AS tunduk pada aturan-aturan khusus yang umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapuskan manfaat-manfaat penangguhan pajak penghasilan federal AS yang oleh pemegang saham AS dapat diturunkan dari investasinya di suatu perusahaan non AS yang tidak membagikan semua labanya pada basis saat ini. Pada kejadian seperti ini, pemegang saham AS mungkin tunduk pada tingkat pajak penghasilan biasa atas (i) keuntungan yang diakui pada penjualan ADS atau saham biasa dan (ii) kelebihan distribusi yang dibayarkan karena ADS atau saham biasa (umumnya, suatu pembagian yang lebih 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang kami bayarkan selama tiga tahun pajak sebelumnya). Di samping itu pemegang saham AS mungkin tunduk pada pengenaan bunga terhadap keuntungan atau pembagian berlebih seperti itu. Akhirnya tingkat maksimum 15% terhadap dividen perseroan tidak akan dapat diterapkan jika perseroan diklasifikasikan menjadi PFIC. Setiap pemegang saham AS didorong untuk berkonsultasi dengan penasehat pajaknya berkenaan dengan potensi konsekuensi pajak atas kepemilikan jika perseroan menjadi diklasifikasikan sebagai PFIC, demikian juga pilihan-pilihan tertentu yang mungkin bersedia untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensi tersebut.

Dokumen yang Ditunjukkan

TELKOM menyampaikan laporan, termasuk laporan tahunan dalam Form 20-F dan informasi lain di SEC berdasarkan peraturan dan regulasi SEC yang berlaku untuk emiten swasta asing. Anda dapat membaca dan menyalin setiap materi yang disampaikan kepada SEC di *Public Reference Room* di 100 *Fifth Street*, N.E., Washington, D.C. 20459. Anda dapat memperoleh informasi mengenai operasi dari Public Reference Room dengan menghubungi SEC di 1-800-SEC-0330. Dengan tunduk pada beberapa pengecualian, TELKOM diharuskan menyampaikan laporan berkalanya secara elektronik melalui sistem EDGAR dari SEC. Setiap pengajuan yang dilakukan TELKOM secara elektronik tersedia bagi masyarakat melalui internet di situs web SEC di www.sec.gov.

Pengendalian dan Prosedur

Pengendalian dan Prosedur Pengungkapan

Di bawah pengawasan dan peran serta manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, manajemen melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan, sebagaimana dipersyaratkan dalam Rules 13a-15(e) dan 15d-15(e) Exchange Act tahun 1934, sampai dengan 31 Desember 2007. Berdasarkan evaluasi ini dan sebagai akibat dari kelemahan material-kelemahan material yang dibahas di bawah ini, Direktur Utama dan Direktur Keuangan TELKOM menyimpulkan bahwa, pada tanggal 31 Desember 2007, beberapa pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan belum efektif. Pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan termasuk, tanpa dibatasi, pengendalian dan pengungkapan yang dirancang untuk menjamin bahwa informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan dalam laporan yang disampaikan atau diajukan berdasarkan Exchange Act telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan dan format SEC, dan bahwa informasi tersebut dikumpulkan dan disampaikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu atas pengungkapan yang dipersyaratkan.

Dikarenakan kelemahan material-kelemahan material yang teridentifikasi dalam evaluasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan, Perusahaan melakukan analisis tambahan dan menjalankan prosedur setelah tutup buku, untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasilnya, manajemen menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian yang terdapat pada Form 20-F dalam laporan tahunan ini disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan TELKOM, hasil operasi, dan arus kas untuk seluruh periode yang disajikan.

Laporan Manajemen mengenai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara memadai, sebagaimana didefinisikan dalam Exchange Act Rules 13a-15(f) dan 15d-15(f). Pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan termasuk kebijakan dan prosedur yang: (1) berkaitan dengan pengelolaan pencatatan secara rinci, akurat, dan wajar yang mencerminkan transaksi dan pelepasan aktiva perusahaan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat sesuai kebutuhan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa pendapatan dan biaya perusahaan diterima dan dikeluarkan hanya berdasarkan kewenangan manajemen dan direksi perusahaan; dan (3) memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencegahan atau deteksi secara tepat waktu dalam hal perolehan, penggunaan atau pelepasan aktiva perusahaan yang tidak sah yang dapat memberikan dampak material terhadap laporan keuangan.

Karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, pengendalian internal atas pelaporan keuangan mungkin tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Di samping itu, proyeksi atas evaluasi efektivitas pada masa mendatang mengandung risiko bahwa pengendalian mungkin menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi, atau karena tingkat kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur mungkin menurun.

Manajemen Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan kriteria dalam Internal Control Integrated Framework yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO).

Kelemahan material adalah sebuah kelemahan pengendalian, atau gabungan dari beberapa kelemahan pengendalian, dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yang mengakibatkan adanya kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu.

Berkaitan dengan evaluasi manajemen terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kelemahan material-kelemahan material berikut telah diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2007:

1. Perusahaan belum menetapkan pengendalian yang efektif, termasuk pemantauan pengendalian dan penyebaran kebijakan dan prosedur atas proses tutup buku dan pelaporan keuangan. Secara spesifik,
   (i) Perusahaan tidak memiliki staf yang cukup dan lengkap yang benar-benar memahami secara menyeluruh kompleksitas bisnis Perusahaan untuk dapat menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum secara memadai; dan
   (ii) Perusahaan tidak merancang dan mengkaji secara memadai kelengkapan dan akurasi dari penerapan kebijakan dan prosedur akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, Perusahaan tidak menerapkan pemisahan tugas dan wewenang yang tepat terkait dengan proses buka tutup periode pembukuan dan pencatatan jurnal akhir periode.
2. Perusahaan belum menetapkan pengendalian yang efektif atas akuntansi aktiva tetap. Secara spesifik, Perusahaan belum menetapkan pengendalian untuk memastikan eksistensi, kelengkapan dan penilaian aktiva tetap.

Kelemahan-kelemahan material di atas mengakibatkan beberapa penyesuaian audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan pengungkapan-pengungkapan terkait, untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007 termasuk terhadap pendapatan, aktiva tetap, dan imbalan kerja. Sebagai tambahan, terdapat cukup kemungkinan bahwa kelemahan-kelemahan material sebagaimana dijelaskan di atas dapat berdampak pada terjadinya salah saji dalam pengungkapan dan akun-akun dalam laporan keuangan tersebut yang dapat mengakibatkan salah saji material atas laporan keuangan konsolidasian tahunan Perusahaan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu.

Karena kelemahan material-kelemahan material yang dipaparkan di atas, manajemen berkesimpulan bahwa Perusahaan belum melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara efektif pada tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan Internal Control Integrated Framework yang dikeluarkan oleh COSO.

Efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 yang diuraikan di atas telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan, firma akuntan publik independen dan terdaftar, seperti dinyatakan dalam laporan mereka pada halaman 148.

Perubahan pada Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Pembenahan atas Kelemahan-Kelemahan Material sebelumnya dan Rencana Pembenahan Ke Depan.

TELKOM telah menjalankan upaya substansial untuk mengatasi kelemahan material yang sebelumnya telah dilaporkan sehingga secara utuh dapat membenahi kelemahan material yang memerlukan perancangan pengendalian proses bisnis baru, serta mengujinya agar dapat dipastikan mampu mengatasi kelemahan tersebut. TELKOM terus mengkaji ulang dan melakukan perubahan yang diperlukan atas rancangan lingkungan pengendalian internal melalui berbagai penilaian secara kritis atas peran dan tanggung jawab setiap grup fungsional di dalam organisasi, meningkatkan dan mendokumentasikan kebijakan maupun prosedur serta memberi pelatihan yang memadai saat diperlukan.

Perseroan sebelumnya melaporkan pada Laporan Tahunan di Form 20-F untuk tahun buku 2006, kelemahan material terkait dengan: 1) Lingkungan pengendalian yang tidak efektif sesuai dengan kriteria COSO; 2) Pengendalian yang tidak efektif atas proses tutup buku dan pelaporan keuangan; 3) Pengendalian yang tidak efektif atas akuntansi untuk aktiva tetap; dan 4) Pengendalian yang tidak efektif atas akuntansi untuk pendapatan dan piutang usaha yang terkait.

Pada tahun 2007, Perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian berdasarkan kriteria COSO.
   Perusahaan telah menerapkan perbaikan-perbaikan dalam lingkungan pengendalian, sebagai berikut:
   - Membentuk Komite Remediasi, di bawah koordinasi Direktur Compliance and Risk Management yang terdiri dari anggota manajemen kunci dari berbagai fungsi organisasi, Komite ini memonitor dan secara berkala melaporkan kepada Direksi dan Komite Audit atas kemajuan dari kegiatan perbaikan tersebut;
   - Melakukan evaluasi atas pemberian wewenang dan tanggung jawab sehubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan dan lini komunikasi yang diperlukan di seluruh organisasi;
   - Menyelesaikan kajian atas hak akses semua personil untuk memastikan bahwa akses diberikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, dengan demikian akses yang tidak sesuai dicabut dan memastikan terdapatnya alasan bisnis yang kuat untuk memberikan hak akses yang signifikan;
   - Mengkaji dan menerapkan kebijakan dan prosedur teknologi informasi baru, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan serta akses terhadap aplikasi dan data Perusahaan;
   - Terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas staf akuntansi dan keuangan melalui pelatihan dan dengan mempekerjakan konsultan eksternal berkualifikasi; dan
   - Mengembangkan penilaian risiko di bawah koordinasi Direktur Compliance and Risk Management.

   Pelaksanaan pembenahan sebagaimana dijelaskan di atas yang telah diterapkan, dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi pada tahun sebelumnya.

2. Proses tutup buku dan pelaporan keuangan:
   Perusahaan telah menerapkan perbaikan-perbaikan dalam proses tutup buku dan pelaporan keuangan:
   - Menerapkan prosedur operasi standar secara rinci dalam proses tutup buku dan pelaporan keuangan, untuk memberikan panduan yang jelas kepada pemilik pengendalian;
   - Meningkatkan prosedur pemantauan dan proses supervisi atas proses tutup buku dan pelaporan keuangan yang telah ada, termasuk menyewa konsultan eksternal.

   Sampai dengan 31 Desember 2007, kami belum sepenuhnya berhasil melakukan pembenahan terhadap kelemahan-kelemahan material yang diidentifikasikan sebelumnya dalam pengendalian internal kami yang terkait dengan tutup buku dan proses pelaporan keuangan, sebagaimana diungkapkan dalam butir (1) Laporan Manajemen mengenai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Manajemen terus melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

3. Aktiva tetap
   Perusahaan telah menerapkan perbaikan-perbaikan dalam akuntansi untuk aktiva tetap, sebagai berikut:
   - Dengan bantuan konsultan eksternal melakukan kajian terhadap rancangan dan implementasi pengendalian atas akuntansi aktiva tetap dan menerapkan prosedur operasi standar baru;
   - Melakukan lokakarya internal untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap kebijakan dan prosedur baru, terutama mengenai pentingnya pengendalian yang berhubungan dengan transaksi; dan
   - Mencurahkan upaya dan sumber daya yang signifikan untuk melakukan verifikasi aktiva tetap secara rinci dan melakukan rekonsiliasi fisik ke dalam buku besar.

   Sampai dengan 31 Desember 2007, kami belum sepenuhnya melakukan pembenahan kelemahan material-kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang diidentifikasi sebelumnya terkait aktiva tetap, seperti diungkapkan dalam butir (2) Laporan Manajemen Mengenai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Manajemen terus melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

4. Pendapatan
   Perusahaan telah menerapkan perbaikan-perbaikan dalam akuntansi untuk pendapatan dan piutang yang berkaitan, sebagai berikut:
   - Menerapkan pengendalian untuk memastikan kelengkapan serta akurasi pendapatan sirkit sewa, pencadangan dari saldo piutang usaha yang tidak dapat ditagih serta pendapatan telepon tidak bergerak kabel dan telepon tidak bergerak nirkabel serta penagihannya;
   - Memusatkan pengendalian atas *billing* dan *collection* di tingkat Divisi Regional untuk memfasilitasi pemantauan terhadap pengendalian; dan
   - Memperbaiki dan melakukan standarisasi sistem *billing* yang ada.

   Pembenahan di atas telah berhasil mengatasi kelemahan material yang diidentifikasi pada tahun sebelumnya.

Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan atas proses pengendalian internal dan akan senantiasa melakukan review dan pemantauan pengendalian dan prosedur pelaporan keuangan secara terus menerus untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan SOA dan peraturan terkait yang dikeluarkan SEC. Perusahaan akan terus mencurahkan segenap sumber daya untuk memperbaiki pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan meningkatkan upaya pembenahan di tahun 2008.

Perubahan dalam Pengendalian Internal terhadap Pelaporan Keuangan

Selain yang sudah diungkapkan di atas, tidak ada perubahan lain dalam pengendalian internal TELKOM terkait pelaporan keuangan sepanjang tahun fiskal terakhir, yang dapat mempengaruhi secara material atau mungkin mempengaruhi secara material, pengendalian internal atas pelaporan keuangan TELKOM.

Ahli Keuangan Komite Audit

Dewan Komisaris telah memutuskan bahwa Sahat Pardede, yaitu anggota Komite Audit independen TELKOM, memenuhi syarat sebagai Ahli Keuangan Komite Audit sesuai dengan persyaratan atas poin 16A Form 20-F. Pardede menjadi anggota Komite Audit TELKOM sejak tanggal 17 Pebruari 2004. Sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit TELKOM, Sahat Pardede berpraktik, dan saat ini masih berpraktik, sebagai Akuntan Publik Bersertifikasi di Indonesia dan memberikan jasa audit dan jasa keuangan lain kepada berbagai perusahaan swasta dan lembaga pemerintah. Sahat Pardede lulus dengan gelar akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta dan mendapatkan gelar master dalam bidang *business administration* dari Saint Mary's University, Canada. Ia adalah Akuntan Publik Bersertifikasi dan juga anggota dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Kode Etik

Perusahaan menerapkan kode etik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Seksi 406 dari *Sarbanes-Oxley Act of* 2002. Kode etik Perusahaan berlaku untuk Direktur Utama, Direktur Keuangan (yaitu para pejabat Perusahaan pada posisi yang setara dengan Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer) dan orang-orang yang menjalankan fungsi serupa dan juga Komisaris, Direktur dan para pejabat serta karyawan lainnya. Kode etik Perusahaan dapat dilihat di situs web Perusahaan di www.telkom-indonesia.com/about-telkom/business-ethics. Apabila Perusahaan mengubah ketentuan-ketentuan kode etik Perusahaan yang berlaku untuk Direktur Utama, Direktur Keuangan dan orang-orang yang menjalankan fungsi serupa, atau apabila Perusahaan memberikan pengabaian dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka Perusahaan akan mengungkapkan perubahan atau pengabaian tersebut di situs web perusahaan di alamat yang sama.

Biaya dan Layanan Akuntan Utama

Biaya Jasa Perpajakan

PwC tidak melaksanakan jasa terkait dengan saran atau perencanaan perpajakan untuk TELKOM pada tahun 2006 dan 2007.

Semua Biaya Lain

PwC tidak melaksanakan jasa lainnya selain melakukan audit TELKOM pada tahun 2006. Semua jasa lainnya pada tahun 2007 terutama terdiri dari biaya-biaya yang ditagihkan untuk pelatihan-pelatihan akuntansi tertentu yang dilakukan oleh PwC.

Kebijakan dan Prosedur Pra-Persetujuan Komite Audit

TELKOM menerapkan kebijakan dan prosedur pra-persetujuan atas seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik independennya dan harus disetujui sebelumnya oleh komite audit TELKOM sebagaimana ditetapkan dalam piagam komite audit. Berdasarkan piagam tersebut, jasa non-audit yang diijinkan dapat dilaksanakan oleh kantor akuntan publik independen yang digunakan TELKOM dengan ketentuan bahwa: (a) Direksi TELKOM harus menyerahkan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian jasa non-audit yang harus dilaksanakan oleh kantor akuntan publik independen; dan (b) Komite Audit akan memutuskan apakah jasa non-audit yang diusulkan akan berpengaruh pada independensi kantor akuntan publik independen TELKOM atau akan menimbulkan benturan kepentingan.

Konsisten dengan Seksi 10(i) (1) (B) dari *Exchange Act* dan paragraf (c) (7) (i) (C) *Rule* 2-01 dari Regulation S-X yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang tersebut, *Charter* Komite Audit TELKOM mengabaikan persyaratan pra-persetujuan untuk jasa non-audit yang diijinkan (x) jika jumlah keseluruhan dari biaya untuk jasa non-audit tersebut tidak lebih dari lima persen dari jumlah biaya yang dibayarkan oleh TELKOM kepada kantor akuntan publik terdaftar independennya selama tahun buku yang jasanya disediakan atau (y) jasa yang diusulkan tidak dianggap sebagai jasa non-audit pada saat kontrak untuk melaksanakannya ditandatangani. Dalam setiap hal, pelaksanaan jasa non-audit tersebut selanjutnya harus disetujui oleh anggota Komite Audit yang telah mendapat pelimpahan wewenang pra persetujuan oleh Komite Audit lengkap atau oleh Komite Audit lengkap itu sendiri. Terlepas dari apapun yang tersebut di atas, tidak satupun dari kantor akuntan publik independen TELKOM yang melaksanakan jasa non-audit untuk TELKOM selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007.

Pengecualian dari Standar Pencatatan untuk **Komite Audit**

Sesuai dengan hukum Indonesia, Perusahaan memiliki struktur dewan dua tingkat, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dijalankan oleh Direksi, sementara kewajiban utama Dewan Komisaris adalah mengawasi kebijakan Direksi dalam operasi dan manajemen Perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi.

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (Peraturan Komite Audit BEI), komite audit TELKOM harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, yang salah satunya haruslah Komisaris Independen yang secara bersamaan juga menjabat sebagai ketua komite audit, sementara dua anggota lainnya harus pihak luar yang independen sekurang-kurangnya satu pihak tersebut memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan. Komite audit TELKOM terdiri dari enam anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota komite audit TELKOM ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

TELKOM bergantung pada pengecualian umum berdasarkan *Rule* 10A-3(c)(3) dari *Securities Exchange Act* of 1934 berkenaan dengan komposisi komite auditnya. TELKOM yakin bahwa ketergantungan pihaknya pada pengecualian tidak akan memberikan dampak merugikan yang material pada kemampuan komite audit untuk bertindak independen. TELKOM yakin bahwa maksud dari ketentuan yang mensyaratkan bahwa setiap anggota komite audit dapat menjadi anggota direksi atau komisaris, sebagaimana yang diberlakukan, adalah untuk memastikan bahwa komite audit bebas dari pengaruh manajemen dan dapat memberikan forum yang terpisah dari manajemen sehingga auditor dan pihak berkepentingan lainnya dapat membahas masalah dengan lugas. Peraturan Komite Audit BEI mengharuskan setiap anggota komite audit adalah independen. Peraturan Komite Audit BEI tetap mensyaratkan sekurang-kurangnya dua anggota, yaitu anggota independen luar, yang tidak saja independen dari manajemen tetapi juga dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta Perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, TELKOM yakin bahwa standar yang ditetapkan oleh Peraturan Komite Audit BEI sekurang-kurangnya sama efektifnya dalam memastikan kemampuan komite audit untuk bertindak independen.

Komitmen pada Kepatuhan

- **Tata Kelola Perusahaan**
- **Kepatuhan dan Pengendalian Risiko**
- **Laporan Komite Audit**
- **Laporan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko**
- **Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi**

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TELKOM berkewajiban mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK dan SEC. TELKOM telah menerapkan kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sesuai dengan standar pasar modal internasional. TELKOM menyadari pentingnya GCG sebagai perangkat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggannya.

Sebagai perusahaan yang terdaftar di SEC berdasarkan undang-undang pasar modal dan tercatat di NYSE, TELKOM harus mematuhi beberapa ketentuan kewajiban yang berkelanjutan yang dikeluarkan oleh SEC berdasarkan undang-undang pasar modal dan beberapa peraturan yang tercantum dalam SOA.

Pada tahun 2006, TELKOM, seperti juga perusahaan-perusahaan asing lainnya yang harus mematuhi ketentuan SOA, mulai mematuhi ketentuan SOA Seksi 404 berikut persyaratannya bagi manajemen untuk menilai *Internal Control Over Financial Reporting (*ICOFR). TELKOM menerapkan COSO framework untuk penilaian ICOFR tersebut. COSO framework terdiri dari lima persyaratan utama untuk pengembangan suatu sistem pengendalian internal yang efektif, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hal tersebut juga merupakan strategi TELKOM dalam menerapkan GCG.

Komitmen Manajemen atas kepatuhan terhadap SOA dan GCG terdiri dari beberapa kebijakan dan ketentuan. Hal ini merujuk pada beberapa topik seperti informasi mengenai unit SOA, penetapan tugas dan tanggung jawab dari setiap fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pengendalian internal perusahaan, menentukan tingkat yang tepat atas pengelolaan pengendalian internal perusahaan, dan pencapaian target; mensyaratkan karyawan yang memegang jabatan pada tingkat tersebut atau lebih tinggi untuk mengevaluasi, merencanakan, dan menerapkan pengendalian internal dan bertanggung jawab untuk bertindak pada bidang-bidang tersebut, merancang kebijakan prosedur dan pengendalian pengungkapan, dokumentasi, pelaporan, dan menyediakan pernyataan tertulis mengenai hasil efektivitas ICOFR dan hasil *self assessment* setiap triwulan.

Pengendalian internal perusahaan diimplementasikan melalui dua tahap: pengendalian internal pada tingkat entitas dan pengendalian internal tingkat transaksional.

Tahapan Penerapan Pengendalian intern dicapai melalui:
- Budaya perusahaan;
- Pembuatan kebijakan yang terkait dengan GCG;
- Pembentukan unit khusus yang terkait dengan GCG;
- Pengembangan Sistem Pengendalian Intern;
- Sosialisasi kepada seluruh jajaran unit kerja oleh pimpinan senior;
- Pemeriksaan pengendalian;
- Pelaksanaan audit;
- Evaluasi pemeriksaan dan hasil audit;
- Langkah-langkah perbaikan.

Struktur GCG

Penerapan GCG dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan sejumlah komite di bawahnya.

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemengang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemengang Saham Luar Biasa (RUPSLB) merupakan lembaga tertinggi perusahaan dan merupakan forum utama tempat para pemegang saham dapat menggunakan hak dan wewenang mereka atas manajemen perusahaan.

RUPST dan RUPSLB juga merupakan majelis yang memiliki kewenangan tertinggi tempat keputusan penting diambil dan menjadi kebijakan resmi perusahaan. Dalam RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham memiliki kuasa untuk menunjuk dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan, menetapkan jumlah remunerasi dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi, menilai kinerja perusahaan dalam tahun buku yang ditelaah, menentukan penggunaan laba Perusahaan, penentuan dan pembayaran dividen, dan perubahan Anggaran Dasar. RUPST diselenggarakan satu kali dalam satu tahun, sementara RUPSLB dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Kewenangan ini harus dipertimbangkan sebagai bentuk kekuatan Pemerintah sebagai pemegang satu lembar saham Dwiwarna dan pemegang mayoritas saham biasa.

Pada tahun 2007, TELKOM menyelenggarakan Rapat Pemegang Saham sebagai berikut:
- RUPSLB pada tanggal 28 Pebruari 2007, yang memberikan persetujuan atas perubahan rencana pembelian kembali saham, penyesuaian masa jabatan komisaris yang diangkat pada tanggal 10 Maret 2004 sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-undang No. 19 tahun 2003 yang baru tentang BUMN dan perubahan struktur organisasi Direksi; dan
- RUPST pada tanggal 29 Juni 2007 yang memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan tahun buku 2006 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2006, penggunaan laba bersih perusahaan tahun 2006 sebesar Rp 11.006 miliar, dan pembayaran dividen tahun 2006.

B. Direksi dan Manajemen Senior

Sesuai hukum Indonesia, Perusahaan memiliki struktur dewan dua tingkat, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dilakukan oleh Direksi, yang anggotanya terdiri dari para pejabat Perusahaan yang setara dengan chief executive officer, chief financial officer dan pejabat lain berdasarkan hukum negara bagian yang berlaku di Amerika Serikat.

1. Dewan Komisaris

Anggaran Dasar TELKOM ("Anggaran") menyatakan bahwa kewajiban utama dari Dewan Komisaris adalah mengawasi kebijakan Direksi dalam penerapan rencana bisnis dan operasi dan pengelolaan Perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasannya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada para pemegang saham Perusahaan.

Dewan Komisaris tidak memiliki fungsi atau wewenang pengelolaan Perusahaan sehari-hari, kecuali dalam situasi tertentu dimana semua anggota Direksi diberhentikan sementara karena suatu sebab.

Dewan Komisaris TELKOM kini terdiri dari satu orang komisaris utama dan empat orang komisaris, dua orang di antaranya merupakan komisaris independen. Profil anggota Dewan Komisaris disajikan pada halaman 32-33 laporan tahunan ini.

Sesuai Anggaran, setiap komisaris diangkat untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan oleh rapat umum pemegang saham hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima sesudah tanggal pengangkatan, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan komisaris pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir. Apabila posisi komisaris lowong karena suatu sebab, maka Anggaran menetapkan bahwa dalam jangka waktu 60 hari setelah terjadinya jabatan lowong tersebut, harus disampaikan pengumuman bahwa akan ada panggilan untuk rapat umum pemegang saham untuk mencalonkan seorang pengganti.

Sesuai Anggaran, rapat Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, maka rapat akan dipimpin oleh anggota lain dari Dewan Komisaris yang hadir.

Rapat Dewan Komisaris harus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tiga bulan dan pada setiap waktu atas permintaan: (i) Komisaris Utama, (ii) sepertiga anggota Dewan Komisaris, (iii) Direksi, atau (iv) pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya sepersepuluh saham TELKOM yang beredar dengan hak suara yang sah. Kuorum untuk seluruh rapat Dewan Komisaris adalah lebih dari separuh jumlah komisaris perseorangan atau melalui surat kuasa yang diberikan kepada salah satu komisaris lain yang hadir pada rapat tersebut.

Keputusan rapat Dewan Komisaris didasarkan atas suara mufakat. Apabila mufakat tidak dapat dicapai, maka didasarkan pada suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili pada rapat. Apabila jumlahnya berimbang, maka keputusan yang diusulkan dianggap ditolak.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi mencakup rencana pengembangan, pelaksanaan kerja dan anggaran, pelaksanaan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan pelaksanaan keputusan RUPS. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memberikan saran & pendapat kepada RUPS mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Persahaan, penunjukan akuntan untuk melakukan audit keuangan, dan hal-hal penting lainnya; Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan; Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera meminta Direksi untuk mengumumkan kepada para pemegang saham dan memberi saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

1. Tanri Abeng (Komisaris Utama)
   Selain memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, juga mempunyai tugas sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi.

2. P. Sartono (Komisaris Independen)
   Selain tugas dan tanggung Jawab sebagai Dewan Komisaris, juga mempunyai tugas sebagai Komisaris Independen, anggota Komite Audit, anggota Komite Pengkajian Perencanaan & Risiko, juga sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Arif Arryman (Komisaris Independen)
   Selain tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, juga mempunyai tugas sebagai Komisaris Independen, sebagai anggota Komite Pengkajian Perencanaan & Risiko (KPPR), juga sebagai Ketua Komite.

4. Anggito Abimanyu (Komisaris)
   Selain tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, juga sebagai Ketua Komite Pengkajian Perencanaan & Risiko.

5. Mahmuddin Yasin (Komisaris)
   Selain tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, juga sebagai anggota Komite Nominasi & Remunerasi, Sebagai anggota Komite Audit dan juga sebagai Wakil Ketua Komite Pengkajian Perencanaan & Risiko.

2. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
Saat ini, Dewan Komisaris memiliki tiga komite: Komite Audit, Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (KPPR) (sebelumnya Komite Pengkajian Perencanaan) dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komisaris Independen mengetuai setiap komite. Selain itu, anggota dari luar Komite Audit yang dianggap independen sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia: (i) tidak boleh menjadi anggota akuntan publik resmi di Indonesia yang telah melakukan jasa audit dan/atau jasa non audit kepada TELKOM dalam waktu satu tahun sebelum diangkat dalam Komite Audit; (ii) tidak boleh menjadi karyawan TELKOM dalam waktu satu tahun sebelum diangkat dalam Komite Audit; (iii) tidak boleh memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung, saham di TELKOM; dan (iv) tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun yang terkait dengan bisnis TELKOM.

a. Komite Audit
Komite Audit di bawah Dewan Komisaris terdiri dari enam anggota: (i) Arif Arryman, Komisaris Independen dan Ketua; (ii) P. Sartono, Komisaris Independen; (iii) Mohammad Ghazali Latief; (iv) Salam; (v) Sahat Pardede; dan (vi) Jarot Kristiono. Seluruh anggota Komite Audit (kecuali Arif Arryman dan Sartono) adalah anggota ekstern independen, dan Sahat Pardede adalah ahli di bidang akuntansi dan keuangan.

Peraturan 10A-3 dari *Exchange Act* menyatakan emiten asing yang tercatat di bursa efek AS wajib memiliki komite audit yang terdiri dari Direktur independen. Akan tetapi, emiten asing dikecualikan dari persyaratan independensi ini apabila: (i) Pemerintah atau bursa efek setempat mensyaratkan perusahaan untuk memiliki komite audit; (ii) komite audit terpisah dari Direksi dan memiliki anggota yang berasal dari dalam maupun dari luar Direksi; (iii) anggota komite audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat perusahaan yang menjadi anggota komite audit; (iv) Pemerintah atau bursa efek setempat memiliki syarat agar komite audit terpisah dari manajemen perusahaan; dan (v) komite audit bertanggung jawab atas penunjukan, penghentian dan pengawasan atas tugas auditor ekstern. Kami mengacu pada pengecualian dalam *Exchange Act* Peraturan 10 A-3 (C) (3) mengenai komposisi komite audit. Kami meyakini bahwa acuan pengecualian ini tidak akan berdampak kerugian material yang dapat mempengaruhi independensi Komite Audit. Kami berpendapat bahwa maksud dari pembatasan tiap anggota komite menjadi anggota Direksi atau Komisaris, dan menjadi independen, adalah untuk memastikan agar Komite Audit terbebas dari pengaruh manajemen dan dapat menyediakan forum yang terpisah dari manajemen sehingga auditor dan pihak berkepentingan lainnya dapat membahas masalah dengan lugas. Peraturan Komite Audit mensyaratkan setiap anggota komite audit independen. Peraturan Komite Audit juga mensyaratkan sekurang-kurangnya dua anggota, yaitu anggota independen eksternal, yang bukan hanya independen dari manajemen tetapi juga dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta Perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa standar yang ditetapkan oleh Peraturan Komite Audit memenuhi kebutuhan untuk memastikan kemampuan Komite Audit agar bertindak independen.

Piagam Komite Audit (piagam) yang telah diterapkan oleh Dewan Komisaris mengatur komite. Piagam tersebut secara garis-besar menguraikan maksud, fungsi dan tanggung jawab komite dan menspesifikasikan bahwa komite bertanggung jawab untuk:

- Mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan atas nama Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, komite akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, berdasarkan persetujuan para pemegang saham TELKOM;
- Mengadakan diskusi dengan auditor internal dan eksternal TELKOM mengenai lingkup keseluruhan dan rencana khusus untuk masing-masing audit. Komite juga akan mendiskusikan laporan keuangan konsolidasian TELKOM dan kecukupan pengendalian intern TELKOM;
- Mengadakan rapat rutin dengan auditor intern dan ekstern TELKOM, tanpa kehadiran manajemen, untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan, evaluasi atas pengendalian intern TELKOM dan kualitas keseluruhan pelaporan keuangan TELKOM; dan
- Melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan keuangan dan akuntansi.

Profil anggota Komite Audit disajikan pada halaman 129-130.

b. Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (KPPR)

Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (sebelumnya, Komite Pengkajian dan Perencanaan) didirikan pada tanggal 16 Juli 2003. Tujuan awal dari komite ini adalah mengkaji rencana jangka panjang perusahaan serta rencana anggaran bisnis tahunan, dimana selanjutnya rekomendasi akan disampaikan kepada Direksi. Komite juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau pelaksanaan rencana bisnis perusahaan. Pada tanggal 19 Mei 2006, Dewan Komisaris mendefinisikan kembali dan memperluas tujuan komite ini agar mencakup penilaian risiko strategis dan mengganti nama komite. Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko terdiri dari sembilan anggota: (i) Anggito Abimanyu (Ketua); (ii) Mahmuddin Yasin (wakil Ketua); (iii) Ario Guntoro (Sekretaris) ; (iv) P. Sartono ; (v) Arif Arryman (Komisaris Independen); (vi) Yuki Indrayadi; (vii) Adam Wirahadi; (viii) Widuri M. Kusumawati; dan (ix) Rama Kumala Sari. Seluruh anggota Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (kecuali untuk Abimanyu, Yasin, Arif Arryman, dan P. Sartono) merupakan anggota ekstern independen.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tanggal 20 Mei 2003, menyusul RUPST tahun 2003 TELKOM, Dewan Komisaris menetapkan kembali Komite Nominasi dan Remunerasi. Sampai dengan penyusunan Laporan Tahunan ini, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari: (i) Tanri Abeng, Komisaris Utama dan Ketua; (ii) P. Sartono, Komisaris Independen dan Sekretaris; dan (iii) Mahmuddin Yasin, Komisaris. Komite ini ditugaskan: (a) merumuskan kriteria pemilihan dan prosedur pencalonan untuk posisi strategis di Perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*; (b) membantu Dewan Komisaris dan berkonsultasi dengan Direksi dalam pemilihan calon untuk posisi strategis di Perusahaan; dan (c) merumuskan sistem remunerasi untuk direksi berdasarkan kewajaran dan kinerja.

Alamat kantor Dewan Komisaris adalah Lantai 5, Gedung Grha Citra Caraka, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia.

3. Direksi

Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham. Agar memenuhi syarat untuk pemilihan, calon direktur harus diajukan oleh pemegang Saham Dwiwarna Seri A. Setiap direktur diangkat untuk masa jabatan yang dimulai sejak tanggal pengangkatan oleh rapat umum pemegang saham hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan direktur pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Sampai dengan tahun 2007, Direksi terdiri dari delapan Direktur, termasuk Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Human Capital & General Affairs, Direktur Konsumen, Direktur Network & Solution, Direktur Enterprise & Wholesale, Direktur Information Technology & Supply, dan Direktur Compliance & Risk Management. Profil anggota Direksi disajikan pada halaman 34-35.

Fungsi utama Direksi adalah memimpin dan mengelola TELKOM dan mengendalikan serta mengelola aset TELKOM. Direksi bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari TELKOM di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggaran menetapkan bahwa direksi sekurang-kurangnya terdiri dari tiga direktur, salah satunya adalah Direktur Utama dan yang lainnya adalah Wakil Direktur Utama (berdasarkan pengangkatan).

Direktur Utama apabila berhalangan hadir, Wakil Direktur Utama atau Direktur lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar memiliki wewenang untuk mewakili dan menandatangani dokumen atas nama TELKOM dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Anggaran. Direktur Utama memimpin rapat direksi atau, apabila berhalangan hadir, anggota lain dari direksi yang ditunjuk dari dan oleh mereka yang hadir dapat memimpin rapat tersebut.

Anggaran menetapkan bahwa rapat Direksi dapat diadakan bilamana dianggap perlu atas permintaan (i) Direktur Utama, (ii) sekurang-kurangnya sepertiga anggota direksi, (iii) Dewan Komisaris, atau (iv) pemberitahuan tertulis dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya sepersepuluh dari saham TELKOM yang beredar dengan hak suara yang sah. Anggaran selanjutnya menetapkan bahwa kuorum untuk seluruh rapat Direksi harus lebih dari separuh anggota Direksi hadir atau diwakili langsung atau melalui surat kuasa yang diberikan kepada direktur lain dari TELKOM dalam rapat tersebut. Dalam rapat Direksi, setiap Direktur memiliki satu suara dan satu suara tambahan untuk setiap Direktur lain yang diwakilinya sebagai kuasa.

Keputusan rapat Direksi didasarkan atas mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka didasarkan atas suara mayoritas anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat. Apabila jumlahnya berimbang, maka keputusan ditentukan oleh Ketua rapat.

Piagam Direksi
Tugas Direksi dan mekanisme kerjanya ditetapkan dalam Piagam Direksi.

Piagam Direksi meliputi pengaturan mengenai :
- Penunjukan atau kuasa bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam mewakili Perusahaan;
- Mekanisme atau forum persetujuan pengambilan keputusan;
- Kriteria ketidakhadiran dan pejabat pengganti sementara anggota Direksi; dan
- Benturan kepentingan Direksi dalam transaksi pihak terkait.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi

1. Direktur Utama
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan; Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan serta mengikat perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perusahaan.

2. Direktur Keuangan
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Fokus dalam menjalankan penyelenggaraan fungsional korporasi di lingkungan Direktorat Keuangan; Menyelenggarakan fungsi keuangan secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan operasional keuangan di seluruh unit bisnis yang dilaksanakan melalui unit Finance Center, serta mengendalikan efektivitas investasi pada anak perusahaan.

3. Direktur Human Capital & General Affair
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Fokus dalam menjalankan penyelenggaraan fungsional korporasi di lingkungan Direktorat SDM; Menyelenggarakan fungsi SDM secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan operasional SDM di seluruh unit bisnis yang dilaksanakan melalui unit Human Resource Center. Juga bertanggung jawab dalam mengendalikan beberapa unit Corporate Service, Support Service dan Enterprise Service yaitu: Human Resource Center (HR Center), Training Center (TTC), Pusat Pelayanan Jasa Konsultan Manajemen (MCC), Pusat Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (CDC), Dana Pensiun, dan yayasan-yayasan.

4. Direktur Network & Solution
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Fokus dalam menjalankan penyelenggaraan pengelolaan Operating Business, sebagai unit bisnis dan fokus dalam menyelenggarakan pengelolaan infrastruktur dan jasa di Direktorat Network & Solution; Sebagai unit bisnis dan mengkonsolidasikan unit-unit bisnis yaitu: Divisi Long Distance, Divisi Multimedia, Divisi Fixed Wireless Network dan Unit-Unit Support Service yaitu: Pusat Riset dan Pengembangan (Research & Development (R&D) Center), Pusat Pelayanan Pemeliharaan & Perbaikan Alat Produksi Perusahaan (Maintenance Service Center (MSC)), dan Pusat Pelaksana Pembangunan (TELKOM Construction Center (TCC)).

5. Direktur Konsumer
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Fokus dalam menyelenggarakan pengelolaan delivery channel dan customer di Direktorat Konsumer; Sebagai unit bisnis yang fokus pada penyelenggaraan pengelolaan fungsi *delivery channel* dan customer segmen *retail*/*consumer*.

6. Direktur Enterprise & Wholesale
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Fokus dalam menyelenggarakan pengelolaan fungsi delivery channnel dan customer di Direktorat Enterprise & Wholesale; Sebagai unit bisnis yang fokus pada penyelenggaraan pengelolaan fungsi *delivery channel* dan *customer* segmen Corporate dan Wholesale, dan mengkonsolidasikan unit-unit bisnis di Divisi Enterprise Service (ESC) dan Divisi Pelayanan Mitra Operator & Interkoneksi (CISC).

7. Direktur Information Technology
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Fokus dalam pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi Perusahaan dan pengelolaan fungsi supply management di Direktorat IT & Supply; Mengendalikan Information Service Center dan Supply Center.

8. Direktur Compliance & Risk Management
   Ruang Lingkup dan tanggung jawab: Fokus dalam pengelolaan kepatuhan, hukum, dan pengelolaan risiko di Direktorat Compliance & Risk Management.

4. Komite-komite di bawah Direksi
Komite-komite dibentuk oleh Direksi dan diperlukan untuk memutuskan atau menyetujui kebijakan mengenai inisiatif. Direksi telah membentuk 11 komite.

Komite-komite

Komite	Ketua	Wakil	Sekretaris	Anggota	Objektif
1. Etika dan Disiplin	Direktur Utama	Direktur Human Capital and General Affair	VP Industrial Relation	Direktur Compliance and Risk Management, Direktur terkait, Internal Audit, Pejabat tinggi di Unit Kerja, Pejabat setingkat VP terkait.	Penerapan GCG, etika perusahaan, penegakan disiplin pegawai
2. Pembiayaan Barang Modal dan Investasi Jangka Panjang	Direktur Utama	Direktur Keuangan	VP Management Accountant	Direktur Network and Solution, Direktur IT, Direktur terkait, EVP SICP, Pejabat setingkat VP terkait	Persetujuan program-program investasi Perusahaan
3. Peraturan	Direktur Utama	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	VP Regulatory Management	Direktur Network and Solution, Direktur Enterprise & Wholesale dan atau Direktur Konsumen, HCA, Pejabat setingkat VP terkait	Persetujuan kebijakan Perusahaan dan rekomendasi atas usulan peraturan telekomunikasi
4. Risiko	Direktur Utama	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	VP Process Risk	Direktur Keuangan, Direktur terkait, Pejabat setingkat VP dan sekurang-kurangnya terdiri dari VP terkait	Pengidentifikasian profil risiko Perusahaan dan inisiatif pengelolaan risiko lainnya.
5. Perencanaan Jaringan Produksi	Direktur Network and Solution		VP Infrastruktur & Service Planning	Direktur. Konsumen, Direktur Enterprise & Wholesale, Pejabat setingkat VP dan sekurang-kurangnya terdiri dari VP terkait	Persetujuan kerangka kerja untuk alat produksi yang terintegrasi
6. *Marketing, cost & pricing*	Direktur Utama	Direktur Konsumen, Direktur Enterprise & Wholesale	VP Service dan tariff	Direktur Network and Solution, Direktur Keuangan, Pejabat setingkat VP terkait	Penetapan program-program marketing (termasuk promosi), *cost* dan *pricing*
7. Produk dan Jasa	Direktur Network and Solution	Direktur Konsumen, Direktur Enterprise & Wholesale	VP Infrastruktur & Service Planning	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Keuangan, EVP SICP, Pejabat setingkat VP terkait	Penetapan produk, inisiatif pengelolaan produk dan jasa termasuk rancangan penetapan tarif
8. *Disclosure*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan	VP Investor Relations	Direktur IT, Head of Corporate Communication, Kepala Internal Audit, Pejabat setingkat VP terkait	Persetujuan untuk pengungkapan atas laporan keuangan dan informasi perusahaan lainnya.
9. Tresuri & Keuangan	Direktur Utama	Direktur Keuangan	VP Tax & Tresuri Management	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Pejabat setingkat VP terkait	Persetujuan batas kewenangan atas transaksi-transaksi tresuri dan transaksi keuangan lainnya
10. Pengelolaan Anak Perusahaan	Direktur Utama	Direktur Keuangan	VP Subsidiary Performance	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Human Capital and General Affair, EVP SICP, Pejabat setingkat VP yang terkait	Pengawasan atas pengelolaan anak perusahaan
11. *Corporate Social Responsibility*	Direktur Utama	Direktur Keuangan	SGM Community Development Center	Direktur Keuangan, Head of Corporate Communication, Head of Corporate Affairs, Pejabat setingkat VP yang terkait	Persetujuan rencana dan anggaran program *corporate social responsibility*

Wewenang Komite Eksekutif adalah melekat kepada jabatan (*ex officio*) dan tidak dapat didelegasikan.

Hak dan tanggung jawab Komite Eksekutif

- Menetapkan kewenangan persetujuan transaksional atau inisiatif-inisiatif bisnis dalam rangka percepatan proses pengambilan keputusan dengan menjunjung GCG dan prinsip kehatian-hatian.
- Menyusun strategi, arah dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan bisnis serta pengelolaan risiko.

Pengambilan keputusan

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Komite Eksekutif.
- Pengambilan keputusan dipimpin oleh Ketua Komite dan apabila Ketua tidak dapat hadir, dipimpin oleh Wakil Ketua Komite.
- Kuorum dipersyaratkan dalam melakukan bisnis.
- Keputusan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Rapat Komite Eksekutif selama tahun 2007:

Komite eksekutif	Jumlah rapat	Jumlah peserta yang hadir
Etika dan Disiplin	1 (17 Desember 2007)	Direktur Human Capital and General Affair (1) dan Direktur Keuangan (1); Direktur Compliance & Risk Management (1)
Pembiayaan Barang Modal dan Investasi jangka panjang	-	-
Regulasi	1 (2 November 2007)	Direktur Utama, Direktur Network and Solutions, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Enterprise and Wholesale
Risiko	-	-
Perencanaan Alat Produksi	-	-
Marketing, Cost & Pricing	-	-
Product & Service	2 (3 Oktober dan 2 November 2007)	Direktur Network and Solutions (2); Direktur Keuangan (2); Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (2); Direktur Konsumer (1); Direktur Enterprise and Wholesale (1).
Pengungkapan	6 (17 September, 26 Oktober, 5, 14, 23 November, dan 10 Desember 2007)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Keuangan, Chief IT Officer.
Tresuri & Keuangan	-	-
Pengelolaan Anak Perusahaan	4 (26 Oktober, 9 November, 11-12 Desember 2007 Catatan: Dir.NWS, Dir. Konsumer dan Dir. ITS on-call	Direktur Utama (4); Direktur Network and Solutions (2), Direktur Konsumer (2); Direktur Keuangan (3), Direktur Human Capital and General Affairs (3); Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (4); Chief IT Officer (2)
Komite CSR	-	-

5. Unit Pendukung Direksi

Investor Relations and Corporate Secretary

Unit Investor Relation and Corporate Secretary (IRCS) dipimpin oleh Vice President, di bawah Head of Corporate Communication.

Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary:

Bertanggung jawab atas kesiapan penyajian informasi perusahaan, interrelasi antara perusahaan dengan *shareholders* dan komunitas pasar modal, memenuhi kebutuhan *shareholders* sesuai dengan aturan tata hubungan yang ditentukan, terpeliharnya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada manajemen agar mampu merespon dinamika *shareholders* dan pasar modal secara tepat dan efektif.

Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Corporate Secretary:

Selama tahun 2007 kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Corporate Secretary antara lain: penyelenggaraan RUPSLB dan RUPST sebanyak dua kali; sebagai *spoke person* dengan kegiatan *one on one meeting:* 110 kali, *investor conference*: tujuh kali, *roadshow*: dua kali, paparan publik: satu kali. Di samping itu juga melakukan pelaporan tahunan: satu kali, pelaporan tengah tahunan: dua kali, pelaporan keuangan tahunan: satu kali, dan pelaporan keuangan dan operasi triwulanan: empat kali bagi publik dan bagi otoritas pasar modal di Indonesia, Amerika, Inggris dan Jepang serta kegiatan administrasi lainnya yang terkait dengan komunitas pasar modal dalam dan luar negeri.

Vice President saat ini adalah Harsya Denny Suryo. Beliau menyandang gelar Bachelor of Arts dalam International Finance dari Chaminade University, Honolulu, Hawaii pada tahun 1982; mendapatkan gelar Master of Science dalam bidang manajemen dari Boston University Brussels, Belgia pada tahun 1989. Beliau menduduki berbagai posisi diantaranya pada PT PriceWaterhouse Indonesia (1982-1987), PT Multicor Bank (1989-1992), PT Surveyor Indonesia (1992-2000) sebagai General Manager di kantor cabang Rotterdam dan New York. Beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President Corporate Secretary pada PT Bank Century Tbk (2000-2005) dan PT Bank Bumiputera Tbk (2005-2006) sebelum bergabung dengan TELKOM.

Unit Risk Management, Legal & Compliance

Unit Risk Management Legal & Compliance berada di bawah Direktur Compliance & Risk Management. Unit Risk Management, Legal & Compliance beranggotakan sejumlah staf senior dari berbagai unit yang bertanggung jawab untuk membantu keseimbangan dan keselarasan antara strategi dengan risiko pada level yang dikehendaki serta merespon risiko dan memanfaatkan peluang, ketepatan dalam menentukan risiko perusahaan, ketepatan dalam memperhitungkan risiko atas kejadian yang berpotensi mempengaruhi Perusahaan.

Unit Strategic Investment & Corporate Planning

Unit Strategic Investment & Corporate Planning di bawah Direktur Utama, beranggotakan sejumlah staf senior dari berbagai unit yang bertanggung jawab untuk membantu dan memberikan saran kepada Direksi dengan menggunakan perumusan rencana bisnis TELKOM baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Proyek Integrated Internal Control (IIC)

Direksi dibantu oleh Proyek IIC yang terdiri dari beberapa staf senior dari bidang keuangan, akuntansi, pengendalian internal dan legal. Tanggung jawab utama proyek ini adalah mengintegrasikan rancangan dan pelaksanaan pengendalian dan prosedur pengungkapan untuk menjamin ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan perundangan.

Unit Internal Audit

Unit Internal Audit merupakan bagian dari struktur pengendalian internal TELKOM yang bertanggung jawab untuk melakukan audit dan penilaian secara independen mengenai kehandalan dan efektivitas sistem dan mekanisme pengendalian internal TELKOM serta membantu manajemen dan unit operasional untuk mencapai target mereka masing-masing, dengan fokus peranan: (i) kepatuhan terhadap SOA; (ii) Penerapan GCG; dan (iii) Penerapan pendekatan audit proses bisnis Berbasis Risiko.

TELKOM berhasil mengembangkan prosedur operasi standar untuk proses pengendalian intern terhadap pengungkapan pelaporan keuangan yang telah diterapkan pada persiapan laporan keuangan TELKOM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Karena luas dan kompleksnya proyek tersebut, TELKOM telah membentuk Kepala Proyek Integrasi Pengendalian Internal yang ditugaskan untuk menangani berbagai Proyek Pengendalian Internal.

6. Tata Kelola Pengurus

Direktur secara individu dikenakan tanggung jawab khusus. Apabila terjadi posisi lowong dalam direksi, selama posisi tetap lowong, maka salah satu dari direktur lain akan dicalonkan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pekerjaan Direksi yang tidak ada. Apabila, karena suatu alasan, Perusahaan tidak lagi memiliki Direktur, maka Dewan Komisaris menanggung kewajiban berjalan Direksi dan harus mengadakan RUPS untuk memilih Direksi baru dalam waktu 60 hari.

Direksi diwajibkan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk tindakan sebagai berikut: (i) membeli atau menjual saham perusahaan yang tercatat yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; (ii) turut serta dalam atau melepas investasi modal lain yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; (iii) menetapkan, mengalihkan haknya atas atau membubarkan anak perusahaan; (iv) mengalihkan, memperdagangkan, menjual atau mengakuisisi suatu bagian bisnis; (v) mengadakan perjanjian pemberian lisensi, kontrak manajemen atau perjanjian serupa dengan badan lain; (vi) menjual atau melepas aset tetap yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; (vii) menagih atau menghapus piutang tak tertagih dari pembukuan atau *inventory* Perusahaan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; (viii) mengikat Perusahaan sebagai jaminan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan (ix) menanggung atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan menanggung pinjaman jangka pendek yang tidak dalam praktik bisnis sehari-hari yang melebihi jumlah yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan, sebagaimana yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Selain itu, salah satu transaksi di atas yang melibatkan 10% atau lebih dari pendapatan Perusahaan atau 20% atau lebih dari ekuitas para pemegang saham atau jumlah lain sebagaimana

yang disebut dalam peraturan pasar modal Indonesia harus mendapat otorisasi dari para pemegang saham pada RUPS. Dalam pelaksanaan tugasnya, direksi harus bertindak untuk kepentingan Perusahaan.

Anggaran menetapkan bahwa anggota Direksi dilarang memegang jabatan sebagai berikut: (i) posisi sebagai direktur dari perusahaan milik negara lainnya atau perusahaan swasta atau posisi lainnya yang mengendalikan sebuah perusahaan; (ii) suatu posisi di dalam departemen struktural atau fungsional dari pemerintah pusat atau daerah; atau (iii) posisi lain di luar TELKOM yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan TELKOM dan/atau yang melanggar ketentuan-ketentuan dari hukum dan peraturan yang berlaku. Anggaran dasar selanjutnya menetapkan bahwa apabila anggota Direksi memegang jabatan di posisi lain yang tidak dilarang atau mendapatkan pengecualian dari larangan yang tersebut di atas, maka Direktur tersebut harus meminta ijin dari Dewan Komisaris. Selain itu, pengangkatan tersebut harus dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.

Selain itu, Anggaran melarang seorang Direktur dengan benturan kepentingan mewakili TELKOM dalam hal-hal yang menimbulkan benturan kepentingan. Dalam hal ini, TELKOM harus diwakili oleh seorang anggota lain dari Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. Apabila TELKOM menghadapi benturan kepentingan dengan semua anggota Direksinya, maka TELKOM harus diwakili oleh Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Komisaris dalam hal-hal yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut.

Setiap Direktur diangkat untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pengangkatan oleh RUPS sampai lima tahun setelah tanggal pengangkatan kecuali bila berakhir pada hari libur maka periodenya akan berakhir pada hari bisnis berikutnya, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan seorang Direktur pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Tidak satupun dari Direktur atau Komisaris yang memiliki kepentingan substansial apapun, baik langsung atau tidak langsung, pada perusahaan manapun yang melakukan usaha serupa dengan TELKOM.

C. Rapat Komisaris dan Direksi

TELKOM telah menyelenggarakan sejumlah rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi sepanjang tahun 2007.

Rapat Dewan Komisaris (16 kali rapat pada tahun 2007):

Komisaris	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Tanri Abeng	Komisaris Utama	16 dari 16
Arif Arryman	Komisaris Independen	15 dari 16
P. Sartono	Komisaris Independen	16 dari 16
Gatot Trihargo	Komisaris (hingga 28 Pebruari 2007)	6 dari 9
Anggito Abimanyu	Komisaris	4 dari 16
Mahmuddin Yasin	Komisaris (sejak 28 Pebruari 2007)	6 dari 7

Rapat Direksi (49 rapat pada tahun 2007) - delapan rapat Direksi dipimpin oleh Arwin Rasyid dan 41 rapat Direksi dipimpin oleh Rinaldi Firmansyah.

Direksi	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Arwin Rasyid	Direktur Utama/CEO*	6 dari 8
Garuda Sugardo	Wakil Direktur Utama/COO*	6 dari 8
Rinaldi Firmansyah	Direktur Keuangan* Direktur Utama/CEO*	6 dari 8 38 dari 41
John Welly	Direktur Human Resources Development**	7 dari 8
Arief Yahya	(sejak Juni 2005) Direktur Enterprise & Wholesale	40 dari 49
Guntur Siregar	Direktur Konsumer*	5 dari 8
Abdul Haris	Direktur Network & Solution*	7 dari 8
Sudiro Asno	Direktur Finance**	36 dari 41
Faisal Syam	Direktur Human Capital and General Affair**	36 dari 41
Ermady Dahlan	Direktur Konsumer**	36 dari 41
I Nyoman G. W	Direktur Network & Solution**	37 dari 41
Prasetio	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko**	38 dari 41
Indra Utoyo	Direktur Information Technology**	39 dari 41

* hingga tanggal 28 Pebruari 2007
** sejak tanggal 28 Pebruari 2007

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 18 kali. Empat rapat diadakan sampai dengan 28 Pebruari 2007 dan 14 rapat diadakan dalam kurun waktu antara 28 Pebruari 2007 – 31 Desember 2007.

Nama	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Tanri Abeng	Komisaris Utama	18 dari 18
Arief Arryman	Komisaris Independen	15 dari 18
P. Sartono	Komisaris Independen	18 dari 18
Gatot Trihargo	Komisaris*	3 dari 4
Anggito Abimanyu	Komisaris	6 dari 18
Mahmuddin Yasin	Komisaris**	13 dari 14
Arwin Rasyid	Direktur Utama/CEO*	3 dari 4
Garuda Sugardo	Wakil Direktur Utama/COO*	4 dari 4
Rinaldi Firmansyah	Direktur Keuangan* Direktur Utama/CEO**	4 dari 4 14 dari 14
John Welly	Direktur Human Resources Development*	2 dari 4
Arief Yahya	Direktur Enterprise & Wholesale (sejak Juni 2005)	15 dari 18
Guntur Siregar	Direktur Konsumer*	2 dari 4
Abdul Haris	Direktur Network & Solution*	4 dari 4
Sudiro Asno	Direktur Keuangan**	14 dari 14
Faisal Syam	Direktur Human Capital&General Affair**	10 dari 14
Ermady Dahlan	Direktur Konsumen**	14 dari 14
I Nyoman G. W	Direktur Network & Solution **	13 dari 14
Prasetio	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risikot**	13 dari 14
Indra Utoyo	Direktur Information Technology**	14 dari 14

* Hingga tanggal 28 Pebruari 2007
** Sejak tanggal 28 Pebruari 2007

D. Kompensasi

Setiap Komisaris TELKOM mendapatkan honorarium bulanan dan tunjangan tertentu dan mendapatkan bonus tahunan bila TELKOM melampaui target keuangan dan operasi tertentu, yang besarnya ditentukan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Setiap Komisaris juga memperoleh bonus yang diberikan pada saat Komisaris mengakhiri masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan yang diterapkan pada seluruh badan usaha milik negara. Setiap Direktur memperoleh gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan tertentu (termasuk tunjangan pensiun jika telah memenuhi syarat). Setiap Direktur juga mendapatkan bonus tahunan (tantiem) bila TELKOM melampaui target keuangan dan operasi tertentu, yang besarnya ditentukan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Bonus dan insentif dianggarkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada pemegang saham. Komisaris dan Direksi tidak mendapatkan uang kehadiran untuk rapat Dewan yang dihadirinya.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Penetapan Honor
  Honor bagi anggota Dewan Komisaris menggunakan acuan formula yang berlaku untuk gaji anggota Direksi namun besarannya menggunakan acuan prosentase terhadap gaji Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN No.S - 326/S.MBU/2002 tanggal 3 Mei 2002 yang kemudian disetujui oleh RUPS. Honor bagi anggota Dewan Komisaris yang saat ini berlaku adalah yang diputuskan RUPST tanggal 29 Juni 2007.
- Penetapan Tunjangan dan Fasilitas
  Tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris mengacu pada rumusan hasil kajian konsultan independen yang juga dipergunakan untuk menghitung tunjangan dan fasilitas anggota Direksi. Selanjutnya hasil dari kajian konsultan independent tersebut oleh Dewan Komisaris sesuai amanat RUPST tanggal 9 Mei 2003 dilaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna guna persetujuannya dan diberlakukan mulai 1 Januari 2003.

  Penetapan tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris yang berlaku mulai 1 Januari 2003 tersebut telah dilaporkan dalam RUPST tanggal 30 Juli 2004. Sesuai ketentuan yang berlaku honor, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris juga telah dilaporkan kepada otoritas pasar modal.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Penetapan Gaji Direksi
  Komite Nominasi & Remunerasi menyusun formula gaji anggota Direksi dan selanjutnya dibahas dalam rapat Direksi & Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Hasil kajian formula gaji Komite Nominasi & Remunerasi yang telah di setujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris tersebut selanjutnya disampaikan dalam RUPS untuk penetapannya.

  Penetapan gaji bagi anggota Direksi yang saat ini berlaku adalah yang diputuskan oleh RUPST tanggal 29 Juni 2007.
- Penetapan Tunjangan dan Fasilitas
  Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 9 Mei 2003, RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi berdasarkan kajian konsultan independen.

  Hasil kajian konsultan independen setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2003.

  Penetapan tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi oleh Dewan Komisaris tersebut juga dilaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan dalam RUPST Perseroan tanggal 30 Juli 2004. Tunjangan dan fasilitas anggota Direksi tersebut berlaku untuk tahun buku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan akan diusulkan tetap diberlakukan untuk tahun buku 2008.

  Sesuai ketentuan yang berlaku gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi telah dilaporkan kepada otoritas pasar modal dan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Remunerasi Dewan Komisaris 2007 (dalam jutaan Rupiah)

Komisaris	Gaji	Tantiem	Asuransi	Tunjangan Lainnya	Jumlah
Tanri Abeng	597,4	627,3	-	928,6	2.153,3
Anggito Abimanyu	537,7	564,5	-	794,8	1.897,0
Arif Arryman	537,7	564,5	-	867,7	1.969,9
P. Sartono	537,7	564,5	-	859,9	1.962,1
Gatot Trihargo	272,2	564,5	-	565,7	1.402,4
Mahmuddin Yasin	318,6	-	-	388,4	707,0

Remunerasi Direksi 2007 (dalam jutaan Rupiah)

Direksi	Gaji	Tantiem	Asuransi	Tunjangan Lainnya	Jumlah
Rinaldi Firmansyah	1.374,4	1.411,3	372,3	1.582,1	4.740,2
Arief Yahya	1.256,4	1.411,3	372,3	1.312,3	4.352,4
Faisal Syam	1.062,0	-	372,3	1.253,4	2.687,7
Ermady Dahlan	1.062,0	-	372,3	1.102,1	2.536,5
Indra Utoyo	1.062,0	-	372,3	1.192,8	2.626,4
I Nyoman G W.	1.062,0	-	372,3	1.462,5	2.896,8
Sudiro Asno	1.062,0	-	372,3	1.438,6	2.872,9
Prasetio	1.062,0	-	372,3	1.963,8	3.398,2
Arwin Rasyid	216,0	1.568,2	-	229,8	2.014,0
Garuda Sugardo	205,2	1.489,8	-	202,5	1.897,5
John Welly	194,4	1.411,3	-	213,4	1.819,1
Guntur Siregar	194,4	1.411,3	-	193,9	1.799,7
Abdul Haris	194,4	1.411,3	-	206,3	1.812,0

E. Kepemilikan Saham

Semua anggota Direktur dan Komisaris secara individual memiliki kurang dari 1% saham Perusahaan dan masing-masing kepemilikan saham mereka dalam Perusahaan belum diumumkan kepada para pemegang saham maupun kepada publik. Diantara para Direktur dan Komisaris, hanya dua orang yang memiliki saham Perusahaan. Sampai dengan penyusunan Laporan Tahunan ini, Ermady Dahlan memiliki 17.604 lembar saham dan Indra Utoyo memiliki 5.508 lembar saham.

F. Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Komisaris	Program	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Arif Arryman	2007 Conference On Sarbanes Oxley Act 404	London	10-11 Mei 2007
	SEC Conference	Amsterdam	27-28 Oktober 2007
P. Sartono	SEC Conference	Amsterdam	27-28 Oktober 2007

Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Direksi	Program	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Rinaldy Firmansyah	IBM IMPAC 2007	Washington DC	20-25 Mei 2007
	Initial Fact Finding Mission	Singapura	11-17 Nopember 2007
	Talent Management Summit 2007	Singapura	4-5 Desember 2007
Ermady Dahlan	The Asia Business Forum	Kuala Lumpur	23-25 April 2007
	Converse Technology	Singapura	16 Agustus 2007
	Web Methods Training (Integration Workshop)	California	5-7 Nopember 2007
Faisal Syam	Corporate Leadership forum 2007	Singapura	15-16 Maret 2007
	15th World Conference on Cooperative Education	Singapura	26-29 Juni 2007
	The Human Capital & Talent Management Conference	Kuala Lumpur	26 Juni 2007
	Intership Program ke SingTel Mobile	Singapura	08-10 Oktober 2007
	Enterprise Architecture	New York	22-26 Oktober 2007
	Louis Allen Worldwide Conference	Kuwait	1-9 Nopember 2007
	Benchmark Juara Lomba Dinas JARAKSES Tahun 2007 juara 1 dan 2	Seoul	4-9 Nopember 2007
	Benchmark Knowledge Management ke European MAKE Winner	Barcelona	10-11 Desember 2007
Sudiro Asno	Minimizing Churn and Building Customer Profitability	Singapura	21-24 Mei 2007
	Master class in Leadership	Singapura	1-2 Nopember 2007
I Nyoman G. Wiryanata	Telecommunications Strategy and Marketing	Paris	10-15 Desember 2007
	WRC-07 di ITU	Geneva	12-16 Nopember 2007
Prasetio	Training Effective Project Management	Kuala Lumpur	28-29 Maret 2007
	Study Banding anti fraud Program & Mekanisme Komunikasi & Supervisi Komite Audit	Singapura	06-07 September 2007
	Conference on Sarbanes -Oxley Act 404	Amsterdam	27-28 September 2007
	The Internal Communication Black Belt Program	Sydney	01-02 Nopember 2007
Arief Yahya	The Asia Business Forum	Kuala Lumpur	23-25 April 2007
	Seminar Strategies for optimising Telecoms CAPEX & OPEX	Bangkok	28-29 Nopember 2007
Indra Utoyo	OSS BSS Asia Pacific Summit 2007	Singapura	26-27 Maret 2007
	Integrated IT to Support Customer Centric Strategy (Reward Suspim 135)	Beijing	23-26 April 2007
	Benchmark ke British Telecom (BT)	London	06-07 September 2007
	IBM Executive Forum (GTEF) dan Frunhofer Institute for open Telecommunications		

Kebijakan Pengendalian dan Prosedur Pengungkapan

Kebijakan Pengendalian dan Prosedur Pengungkapan pada tanggal 28 Juni 2007, merupakan pengendalian dan prosedur yang dirancang dan dijalankan untuk memberikan keyakinan bahwa semua informasi keuangan dan non keuangan telah diungkapkan dalam laporan perusahaan yang diserahkan ke lembaga pasar modal dan kepada pemegang saham mayoritas, pihak-pihak yang berkepentingan, dan masyarakat telah dikumpulkan, ditelaah, dicatat, diproses, diikhtisarkan dan disampaikan secara tepat waktu, akurat, diakumulasi dan dikomunikasikan kepada manajemen Perusahaan dan dapat dihandalkan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan pasar modal.

Kebijakan Direksi tersebut mengatur, antara lain, sistem pengendalian pengungkapan, mekanisme penyusunan dan *review disclosure*, *disclosure committee*, evaluasi atas pengendalian dan prosedur pengungkapan, tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pengendalian dan prosedur pengungkapan.

Sistem Pengendalian Pengungkapan

Sistem ini dikembangkan untuk menyediakan penelaahan informasi penting dan penyebaran informasi Perusahaan pada investor dan komunitas investasi.

Mekanisme Penyusunan dan Review Disclosure

Mekanisme menggunakan jenjang dimana setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan *review disclosure* harus bekerjasama dan secara kolektif bertanggung jawab kepada *certifying officer/appover* untuk memastikan bahwa semua informasi yang material telah diungkapkan oleh Perusahaan kepada pemegang saham, investor, publik dan *stakeholders* secara konsisten, akurat, lengkap dan patuh terhadap regulasi ekstern maupun intern Perusahaan dan wajib menyediakan dokumentasi yang jelas dan lengkap serta tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi sebagai bukti proses penyusunan dan review *disclosure* telah dilakukan.

Disclosure Committee

Dalam Disclosure Comittee , keanggotaan diatur terdiri dari koordinator, wakil koordinator, ketua, anggota inti, anggota, anggota eksternal, *quality assurance reviewer*, *reviewer* atas kepatuhan dan sekretaris dan juga diatur berdasarkan tugas, tanggung jawab kewenangan serta prosedur kerja.

Evaluasi Pengendalian dan Prosedur Pengungkapan

Evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Ketua Sub *Disclosure Committee* dengan melibatkan pihak terkait. Setiap proses penyusunan dan *review* atas pengungkapan secara periodik.

Etika Bisnis Telkom

Etika Bisnis TELKOM terdiri dari seperangkat Kebijakan Etika Kerja dan Etika Bisnis yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan transformasi Perusahaan di masa depan.

Etika Kerja TELKOM dikenal dengan TELKOM Way (TTW) 135, menekankan sejumlah unsur yang merupakan bagian dalam perilaku setiap karyawan dan terdiri dari satu asumsi dasar, tiga nilai utama dan lima langkah perilaku. Satu asumsi dasar disebut "Committed to you" (Committed 2 U); Tiga nilai utama mencakup: nilai konsumen, pelayanan yang unggul, dan sumber daya manusia yang kompeten; Lima langkah perilaku: untuk memenangkan persaingan, menggapai tujuan, menyederhanakan, melibatkan tiap orang, kualitas dalam setiap pekerjaan dan penghargaan terhadap pemenang. TTW 135 diharapkan akan menciptakan pengendalian kebudayaaan yang efektif terhadap cara merasa, cara memandang, cara berpikir dan cara berperilaku, oleh seluruh karyawan TELKOM

Etika Bisnis TELKOM terdiri dari beberapa ketentuan yang menetapkan setiap karyawan untuk menjaga sikap profesional, jujur, adil, dan konsisten dengan praktik bisnis dengan seluruh *stakeholder* (pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, kompetitor, dan masyarakat). Etika Bisnis TELKOM juga menekankan komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai badan usaha milik negara dan *flagship* bisnis informasi dan komunikasi di Indonesia, TELKOM harus memelihara hubungan yang transparan dan konstruktif dengan Pemerintah sebagai pengatur dan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Untuk memperkuat penerapan Etika Bisnis Perusahaan, manajemen secara berkesinambungan berupaya meningkatkan pemahaman karyawan mengenai pentingnya memiliki etika praktik bisnis melalui Prosesi Silaturahmi Patriot 135 yang diselenggarakan setiap hari Rabu selama 30 menit dan dilaksanakan pada jam kerja awal di lokasi kerja. Pimpinan unit memberikan arahan dan memantau pelaksanaan Prosesi bulan sebelumnya dan setiap hari kelima setiap bulannya, Pimpinan unit melaporkan hasil pemantauannya kepada Direktorat *Human Capital and General Affairs*.

Sebagai tambahan Etika Bisnis diatas, Perusahaan juga menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi risiko dari kesepakatan yang tidak wajar dan *fraud* dengan mengeluarkan Kebijakan Larangan Gratifikasi, Kebijakan Pelaporan *Whistleblower*, dan Kebijakan *Anti-Fraud*.

Kebijakan Larangan Gratifikasi

Perusahaan telah menerapkan kebijakan larangan gratifikasi yang berlaku bagi seluruh karyawan dan direksi antara lain tidak memberi atau menerima uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun termasuk parsel kepada atau dari pejabat, rekan kerja, mitra bisnis atau pihak-pihak lain atau dari siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai petugas senior atau karyawan Perusahaan.

Kebijakan dan Prosedur Pelaporan (Whistleblower)

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan GCG dan penerapan nilai-nilai perusahaan serta memenuhi ketentuan SOA Section 404, Perusahaan telah menerapkan kebijakan dan prosedur pelaporan yang mencakup cara menampung dan menangani pengaduan dalam rangka membangun perusahaan yang lebih transparan dan profesional.

Proyek SOA 404 telah merancang ulang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menggunakan kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) yang mencakup pengendalian pada tingkat transaksi dan entitas. Komite Audit sebagai salah satu unsur pengendalian intern diwajibkan untuk menyelenggarakan kebijakan dan prosedur *whistleblower* untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan terutama yang disampaikan oleh karyawan TELKOM.

Kebijakan Anti Fraud

Direksi memiliki komitmen untuk mencegah dan memberantas fraud di lingkungan TELKOM, melalui pengelolaan secara terpadu manajemen dan pengendalian internal yang efektif. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Kebijakan Anti Fraud di TELKOM.

Informasi Mengenai Pengungkapan Perusahaan

TELKOM menyadari dua prinsip-prinsip penting GCG adalah akuntabilitas dan transparansi. Melalui unit investor relations dan unit marketing communication, kami secara berkelanjutan berupaya untuk memastikan bahwa penyebaran informasi dilakukan secara akurat, jelas, tepat waktu, dan selengkap mungkin untuk meningkatkan dan memelihara integritas pasar dan kepercayaan para *stakeholder*.

Berikut adalah daftar pengungkapan informasi selama tahun 2007:

Kegiatan Keterbukaan Informasi - Unit Investor Relations & Corporate Secretary	Jumlah Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Conference Call Laporan Kinerja	4	Setiap tiga bulan
Pertemuan analis/investor	110	Rata-rata seminggu 2 kali
Paparan Publik	1	29-31 Mei 2007
RUPSLB dan RUPST	2	28 Februari dan 30 Juni 2007
Siaran Pers	21	Januari - Desember 2007, kecuali Agustus 2007
Investor Conference	7	April, Mei, Juni, September, dan November 2007
Roadshow	2	4-12 Agustus 2007 dan 25-31 Agustus 2007
Pengumuman:		
a. RUPS	7	Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli 2007
b. Laporan Keuangan	2	24 Mei 2007 & 31 Juli 2007
c. Dividen Interim	1	12 November 2007
d. Keterbukaan Informasi	2	30 Januari 2007 dan 31 Mei 2007
Kegiatan Keterbukaan Informasi - Unit Marketing Communication	**Jumlah Kegiatan**	**Waktu Pelaksanaan**
Siaran Pers	100	Januari - Desember 2007 (rata-rata per bulan 4 siaran pers)
Konferensi Pers	7	April, Mei, Juni, September dan November 2007

Pengungkapan Perusahaan TELKOM dapat diakses melalui situs Perusahaan: http://www.telkom-indonesia.com.

Auditor Independen

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2007 diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan, firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers ("PwC"). Penunjukan auditor independen untuk tahun buku 2007 dilakukan sesuai dengan prosedur penunjukan yang tepat, dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen yang diperlukan oleh Perusahaan, seperti yang disebutkan dalam Laporan Komite Audit untuk tahun buku yang dimaksudkan.

Tabel berikut menyajikan tagihan yang disampaikan oleh PwC masing-masing untuk tahun 2006 dan 2007:

	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2006	2007
	(dalam jutaan Rp)	
Biaya Audit	55.558	53.500*
Biaya yang Terkait Audit	-	-
Biaya Jasa Perpajakan	-	-
Semua Biaya Lainnya	-	275,6**

* biaya belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
** biaya yang dibayarkan untuk Pelatihan Akunting Standar No. 5 (AS5) yang dilaksanakan oleh PwC dan belum termasuk PPN 10%.

Biaya audit di atas adalah biaya keseluruhan yang ditagih oleh PwC pada tahun 2006 dan 2007 dalam kaitannya dengan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO

Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, TELKOM menerapkan manajemen risiko pada seluruh unit usahanya. Untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko Perusahaan berjalan dengan baik, TELKOM mengembangkan lingkungan internal yang mendukung penerapan manajemen risiko, yang terdiri dari pengembangan fungsi koordinasi dan pengawasan, manajemen risiko perusahaan sebagai bagian dari keseluruhan proses manajemen Perusahaan, manajemen budaya risiko, kompetensi, dan penyusunan kebijakan-kebijakan pendukung.

Dalam menghadapi tantangan perkembangan bisnis dan layanan InfoComm yang cepat, dan memiliki peraturan yang belum sepenuhnya mendukung pesatnya perkembangan teknologi, maka sejak tanggal 4 April 2007, Direktorat *Compliance & Risk Management* (CRM) menetapkan visi 2006-2010 "Menjadikan Pengelolaan Risiko sebagai Budaya yang Melekat" dalam pelaksanaan proses bisnis dan operasional di TELKOM dan misi "Menjadi Sahabat bagi Seluruh Unit Bisnis dan Operasi di TELKOM".

Pengelolaan risiko telah diterapkan secara signifikan dengan baik sebagai suatu proses aktivitas operasional, yang diterapkan oleh karyawan sebelum mempertimbangkan kegiatan bisnis. Pada hakekatnya merupakan pertimbangan berdasarkan keseimbangan antara tujuan pencapaian target bisnis dengan penilaian karyawan terhadap risiko yang akan muncul atau dengan prinsip *Check & Balance*.

Tahapan penerapan visi dan implementasi dari tahun 2006-2009, adalah sebagai berikut :
- Tahun 2006: memetakan kebijakan, proses bisnis dan operasional;
- Tahun 2007: memastikan ketersedian kebijakan pada seluruh proses;
- Tahun 2008: menyusun manajemen risiko sebagai kebutuhan dalam setiap proses; dan
- Tahun 2009: memastikan penerapan manajemen risiko secara disiplin.

Dalam mencapai visi & misi tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :
- Membangun sikap disiplin terhadap proses bisnis berkualitas yang telah disepakati dan menjadi proses bisnis *end to end* yang telah dilakukan penilaian atas risiko. Kedisiplinan harus merupakan komitmen sekaligus tantangan bersama dan merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja di TELKOM;
- Sikap pro-aktif dari setiap unit bisnis, karena tiap area/unit dapat memiliki kondisi yang berbeda dan unik. Untuk itu sikap pro-aktif dari setiap unit PO-DC, sangatlah berarti untuk memberikan masukan dan usulan kebijakan yang dibutuhkan. Inisiatif merupakan pendekatan *bottom up* dan kebijakan merupakan pendekatan *top d*own, yang sesuai dengan kondisi pasar dan selalu menjunjung asas kehati-hatian; dan
- Orientasi bisnis harus selalu dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik dan perlu segera mengeliminasi berbagai proses yang tidak perlu, dengan menerapkan debirokratisasi atau *empowerment* sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan efektif, dan berhati-hati, serta menghindari hal-hal tak terduga yang berdampak negatif.

Fokus kegiatan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:
- Pemahaman dan pendalamam fungsi manajemen risiko, pengendalian internal & audit internal;
- Peran dan kebijakan yang jelas mengenai ketiga fungsi tersebut; dan
- Pengendalian kualitas terhadap proses bisnis dan operasi yang berlandaskan prinsip-prinsip kehati-hatian serta berorientasi pada pasar.

Program kegiatan tahun 2007 :
- Melanjutkan program tahun 2006 antara lain menetapkan kebijakan proses bisnis & operasional dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - Mengembangkan seluruh proses bisnis dan operasional yang terpetakan;
  - Mengeliminasi proses kebijakan persediaan yang telah selesai;
  - Mengurangi seluruh potensi risiko yang diidentifikasi;
  - Memperkuat pengembangan dan perbaikan kebijakan secara bertahap; dan
  - Menghilangkan birokrasi untuk mempercepat proses.
- Memastikan ketersediaan kebijakan pada seluruh proses :
  - Setiap sistem pelaporan risiko untuk proses pengendalian;
  - Pengembangan dan perbaikan kebijakan bisnis proses SOA & non SOA;
  - Desentralisasi beberapa proses dengan tetap berlandaskan prinsip manajemen risiko; dan
  - Seluruh proses operasional dan bisnis telah diterapkan melalui program manajemen risiko anti-fraud.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2007 antara lain:
- Sosialisasi implementasi *Integrated Audit* tahun 2007 pada tanggal 24 Agustus 2007 kepada seluruh *senior leader*. Dalam pelaksanaan *Integrated Audit* tahun 2007, digunakan standar PCAOB AS5. Dampaknya, audit akan lebih fokus kepada bidang risiko utama dan pengendalian utama (*key risk* & *key control*) yang signifikan;
- Sosialisasi implementasi ISMS pada tanggal 28 Agustus 2007. Information Security Management System (ISMS) antara lain sistem manajemen untuk mengelola kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi, termasuk di dalamnya memelihara keaslian, akuntabilitas, keabsahan dan kehandalan sistem informasi. ISMS merupakan komitmen manajemen dalam rangka menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR), sebagai kelemahan-kelemahan material salah satunya berasal dari *Access Control*. TELKOM sebagai emiten di NYSE wajib melaksanakan IT *Governance*; dan
- Menyederhanakan kebijakan dengan melakukan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang ada, melakukan pisah batas kebijakan-kebijakan yang sudah tidak berlaku serta menghilangkan kebijakan yang tumpang tindih, serta menyusunnya kembali menjadi suatu Prosedur Operasi Standar (SOP).

Perusahaan telah mengkonsolidasi kebijakan-kebijakan

LAPORAN KOMITE AUDIT

Perusahaan, dari sekitar 900 kebijakan menjadi sekitar 550 kebijakan. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan penelaahan dan restrukturisasi atas kebijakan internal Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit yang diterapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. *Charter* Komite Audit secara rutin dievaluasi dan disesuaikan untuk menjamin kepatuhan pada persyaratan peraturan Bapepam dan SEC, serta peraturan yang relevan lainnya. *Charter* Komite Audit terakhir telah diubah dengan Keputusan Komisaris No. 20 KEP/DK/2006 pada tanggal 11 September 2006. Selama tahun 2007, tidak diperlukan pemutakhiran *Charter* karena tidak ada perubahan peraturan pasar modal yang mengharuskan penyesuaian tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Secara mendasar, tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit yang diatur dalam *Charter* adalah menjalankan pengawasan dan pemantauan dalam rangka:

1. mendukung dan meningkatkan integritas dan keandalan laporan keuangan TELKOM;
2. mendukung dan meningkatkan efektifitas dan keandalan pengendalian internal;
3. menerapkan peraturan pasar modal yang relevan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan tata kelola Perusahaan termasuk ketentuan Bapepam dan SEC; dan
4. memastikan efektivitas kebijakan dan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi.

Komite Audit juga menerima dan menangani pengaduan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan tata kelola perusahaan terkait dengan peraturan pasar modal dan risiko pelaporan keuangan. Komite Audit juga berwenang memberikan saran profesional secara independen, termasuk masukan di bidang legal, dalam menjalankan tugasnya.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Pada tahun 2007, Komisaris melakukan penyesuaian struktur keanggotaan Komite Audit karena masa jabatan Gatot Trihargo sebagai anggota Komisaris berakhir pada RUPST tanggal 29 Juni 2007. Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Audit sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisaris No. 13/ KEP/DK/ 2007 tanggal 31 Juli 2007 adalah sebagai berikut:

- Ketua/Anggota : Arif Arryman
- Sekretaris/Anggota : Salam
- Anggota : P. Sartono
  M. Ghazali Latief
  Sahat Pardede
  Jarot Kristiono

Arif Arryman dan P. Sartono adalah Komisaris Independen.

Anggota komite audit bertanggung jawab secara kolektif atas efektivitas Komite. Hal ini memungkinkan setiap anggota untuk dapat memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas tertentu, serta memastikan bahwa mandat dari Komite Audit terpenuhi.

Tugas setiap anggota Komite adalah sebagai berikut:

Arif Arryman, Ketua/Anggota
Profil Arif Arryman disajikan pada halaman 33 laporan tahunan ini. Arif Arryman adalah ketua komite audit dan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memonitor pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada setiap anggota Komite.

Salam, Sekretaris/Anggota
Salam merupakan Akuntan Publik terdaftar dan berpengalaman dalam bidang auditing, akuntansi, dan keuangan. Selama periode 1974 -1989 merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pernah menduduki jabatan sebagai AVP Business Development Division PT Rajawali Wirabhakti Utama, *Head of Corporate Control* Unit PT Pabrik Rokok Cap Bentoel dan Direktur Keuangan PT Telekomindo Primakarya. Salam menyandang gelar sarjana akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, di Jakarta.

Tugas utamanya adalah memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas anggota Komite Audi, menyelenggarakan korespondensi, menyiapkan dokumentasi dan melaporkan pemutakhiran piagam dan mekanisme kerja Komite serta mengkoordinasikan proses seleksi auditor independen.

P. Sartono, Anggota
Profil P. Sartono disajikan pada halaman 33 laporan tahunan ini.

P. Sartono bertugas untuk menjalankan pengawasan dan pemantauan atas tata kelola perusahaan dan memantau perubahan pada peraturan pasar modal dan peraturan lain yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

M. Ghazali Latif, Anggota
M. Ghazali Latif merupakan Akuntan Publik terdaftar dan sebagai partner Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat dan Rekan, memiiliki pengalaman luas di bidang auditing. Sebelumnya, pernah menduduki jabatan sebagai Direktur di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. M. Ghazali Latief menyandang gelar sarjana akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, Jakarta dan MSc. di bidang Manajemen dari Management Education Institute ADL, di Cambridge, Massachusetts.

M. Ghazali Latif bertugas untuk menjalankan pengawasan dan pemantauan atas efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi, termasuk memantau dan mengidentifikasi terjadinya kecurangan / penyimpangan yang berpotensi merugikan Perusahaan dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko tersebut.

Sahat Pardede, Anggota
Sahat Pardede merupakan Akuntan Publik terdaftar dan *Managing Partner* Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat dan Rekan. Sangat berpengalaman dan ahli dalam bidang auditing dan memiliki pengetahuan yang luas dalam akuntansi keuangan dan pengendalian internal seperti yang diatur dalam SOA Seksi 404. Selama periode 1981-2000 merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sahat Pardede menyandang gelar sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), di Jakarta dan memegang gelar Master di bidang administrasi bisnis dari Saint Mary's University, di Halifax, Canada.

Sahat Pardede bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan proses *Integrated Audit* dan efektivitas ICOFR.

Jarot Kristiono, Anggota
Sebelum bergabung menjadi Anggota Komite Audit TELKOM, Jarot Kristiono pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern PT Koneba Persero sebuah badan usaha milik negara di bidang energi, AVP di Pengendalian Internal Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan AVP Pengendalian Internal di Panin Bank, Jakarta. Jarot Kristiono menyandang gelar sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung dan memegang gelar Master di bidang manajemen akuntansi dari Universitas Indonesia.

Jarot Kristiono bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas efektivitas pengendalian internal termasuk pengawasan dan pemantauan penanganan pengaduan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Selama tahun 2007, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 72 kali. Rapat tersebut diselenggarakan sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab tiap anggota dan Komite Audit. Tingkat kehadiran, kategori rapat dan frekuensi masing-masing rapat adalah sebagai berikut:

Anggota Komite Audit	Tingkat Kehadiran
Arif Arryman	89%
Salam	90%
P. Sartono	56%
Gatot Trihargo	3%*
M. Ghazali Latief	81%
Sahat Pardede	81%
Jarot Kristiono	84%

* Catatan: Sampai dengan tanggal 29 Juni 2007

Kategori Rapat	Jumlah Rapat
Rapat Internal Komite Audit	22
Rapat Penunjukan Kembali Auditor Independen	5
Rapat dengan auditor independent	11
Rapat dengan Internal audit	7
Rapat dengan Direksi dan Manajemen	21
Rapat lain-lain	6

1. Rapat intern Komite Audit diadakan untuk membahas dan menanggapi permasalahan akuntansi, pengendalian intern, auditing dan penanganan pengaduan termasuk mengulas perkembangan peraturan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
2. Rapat penunjukan kembali auditor independen untuk TELKOM, termasuk menjalankan proses pemilihan bagi usulan Komisaris kepada RUPS pada tanggal 29 Juni 2007 untuk penunjukkan kembali KAP Haryanto Sahari & Rekan, firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai auditor independen untuk melaksanakan *integrated audit* tahun buku 2007;
3. Rapat dengan Internal Audit diadakan untuk mendukung dan secara lanjut memastikan efektivitas Audit Internal dan membantu mengidentifikasi penyimpangan/kecurangan (*fraud*);
4. Rapat dengan auditor independen diadakan untuk memastikan pengawasan yang tepat dalam proses audit yang terintegrasi;
5. Rapat dengan Direksi dan Manajemen diadakan untuk memantau proses manajemen *Integrated Audit*, menelaah perkembangan pengendalian intern atas signifikan defisiensi, kelemahan material dalam ICOFR serta penyelesaian masalah akuntansi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tahun 2007 adalah tahun kedua bagi TELKOM menjalani *integrated audit* untuk memenuhi ketentuan SOA Seksi 404. Selama tahun 2007, Komite Audit memfokuskan perhatian pada aspek pengawasan dan pemantauan untuk mendorong peningkatan integritas dan keandalan pelaporan keuangan dan meningkatkan efektivitas ICOFR. Hal ini mencakup pengawasan atas upaya Direktur dan Manajemen untuk memenuhi persyaratan SOA seksi 404 dan menerapkan *guidance* yang diterbitkan oleh SEC pada bulan Mei 2007 untuk membantu manajemen dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi ICOFR.

Penunjukan Auditor Independen
Komite Audit menyarankan Dewan Komisaris dan Direksi, yang selanjutnya menyarankan RUPS 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2007 untuk menunjuk KAP Haryanto Sahari & Rekan, firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) di Indonesia, sebagai Auditor Independen untuk melakukan *integrated audit* untuk tahun buku 2007.

Pengawasan *Integrated Audit*

Komite Audit berperan dalam pengawasan *integrated audit* tahun 2007 untuk membantu Auditor Independen dan memastikan bahwa pelaksanaan *integrated audit* dijalankan secara objektif dan independen, serta dilakukan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan standar audit yang ditetapkan *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB). Hal ini mencakup:

a. Diskusikan tentang ruang lingkup dan rencana kerja *Integrated Audit*;
b. Mengadakan rapat berkala dengan auditor independen dengan atau tanpa kehadiran Manajemen untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan *Integrated Audit* dan membahas masalah-masalah akuntansi, pengendalian internal, serta hambatan yang diidentifikasi oleh auditor independen;
c. memantau pembahasan dan temuan audit; dan
d. memastikan komunikasi antara Perusahaan dan auditor independen yang dilakukan berdasarkan standar audit yang ada.

Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Untuk lebih meningkatkan efektivitas upaya atas ICOFR TELKOM, sepanjang tahun 2007, Komite Audit telah :

1. Menjalankan pengawasan dan peantauan terhadap upaya-upaya yang dilakukan Direksi dan Manajemen untuk membantu merancang dan melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan membantu mengidentifikasi kekurangan yang signifikan dan kelemahan yang material;
2. Melakukan pembahasan di tingkat korporat dan divisi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai perkembangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan membantu memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan.

Penanganan Pengaduan

Peraturan Bapepam dan SOA Seksi 301 mewajibkan Komite Audit untuk menangani pengaduan yang berkaitan dengan aspek operasi Perusahaan, dalam hal ini mengharuskan Komite Audit untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal, dan auditing dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Komite Audit menjalankan Program *Whistleblower* Perusahaan yang diberlakukan sesuai dengan Keputusan Komisaris No. 03/KEO/DK/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 dan diratifikasi dengan Keputusan Direksi No. KD.48/HK260/RLC-33/2006 tanggal 6 September 2006. Komite Audit telah melakukan usaha pengawasan untuk penanganan pengaduan dengan Telkomsel.

Selama tahun 2007 Komite Audit menerima 11 pengaduan dari karyawan TELKOM dan empat pengaduan dari karyawan Telkomsel. Semua pengaduan yang diterima telah ditelaah, namun beberapa diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan, seperti pengaduan yang ditetapkan oleh keputusan Komisaris No. 03/KEO/DK/2006.

Pengaduan	TELKOM	Telkomsel	Jumlah
Diterima	11	4	15
Ditindaklanjuti	8	4	12
Tidak dapat ditindaklanjuti	3	0	3

Jakarta, Mei 2008,

Arif Arryman
Ketua Komite Audit

LAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kerangka Ketentuan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Komisaris No. 003/KEP/DK/2005 tanggal 21 April 2005 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi TELKOM. Sesuai dengan Keputusan Komisaris tersebut, tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

- Menyusun sistem nominasi dan seleksi untuk jabatan-jabatan strategis di Perusahaan yang mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran (*fairness*) dan kemandirian;
- Membantu Komisaris yang ditugaskan bersama dalam menyeleksi kandidat untuk jabatan-jabatan strategis di Perusahaan yaitu jabatan satu tingkat di bawah Direktur dan Direksi anak perusahaan konsolidasian untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna;
- Menyusun sistem remunerasi Direksi perseroan berdasarkan asas keadilan (*fairness basis*) dan kinerja (*performance-basis*).

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah diatur dalam Keputusan Komisaris No. 003/KEP/DK/2005 tanggal 21 April 2005 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan telah diubah melalui Keputusan Komisaris TELKOM No. 14/KEP/DK/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Berdasarkan Keputusan Komisaris tersebut, struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Tanri Abeng (Komisaris Utama);
Sekretaris/Anggota	:	P. Sartono (Komisaris Independen);
Anggota	:	Mahmuddin Yasin (Komisaris) - menggantikan Gatot Trihargo.

Ringkasan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2007

a. Bidang Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2007, Komite ini mengacu pada kesepakatan antara Komisaris dan Direksi pada tahun 2005 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisaris No. 004/KEP/DK/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang pengisian jabatan strategis di lingkungan perusahaan, yaitu:

- Untuk pengisian jabatan satu tingkat di bawah Direksi di Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan, Direksi perlu berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.
- Sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, untuk mengisi jabatan Direktur dan Komisaris pada anak perusahaan konsolidasian yang memberikan kontribusi pendapatan sebesar 30% terhadap Perusahaan yaitu PT Telkomsel, Direksi TELKOM harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Sebelum persetujuan tertulis ditetapkan, Komisaris TELKOM yang mewakili pemegang saham seri A Dwiwarna wajib berkonsultasi dengan pemegang saham seri A Dwiwarna satu bulan sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, di sepanjang tahun 2007, Komite telah memberikan masukan kepada Direksi TELKOM mengenai nominasi untuk sejumlah jabatan strategis, antara lain jabatan Kepala Divisi Regional III, IV, V, Divisi *Fixed Wireless Network* (FWN) dan *Enterprise Service Center*.

Sedangkan terhadap anak perusahaan, Komite memainkan peranan penting dalam pemilihan Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Keuangan, dan Direktur Perecanaan dan Pengembangan Telkomsel, Direktur Utama Metra, dan Direksi TII.

b. Bidang Remunerasi

Dalam bidang remunerasi, saat ini Komite masih membantu pelaksanaan penelaahan konsultan independen mengenai pemberian santunan purna jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan amanat RUPS tahun 2006. Keputusan mengenai hal tersebut diharapkan dapat disampaikan dalam RUPS tahun buku 2007 mendatang.

Di samping pelaksanaan penelaahan tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan masukan penting pada saat penyusunan Kontrak Manajemen (KM) tahun 2008. Beberapa materi penting yang diminta oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dimasukkan dalam KM 2008, termasuk:

- Penentuan bobot yang sesuai untuk indikator-indikator dalam KM agar terwujud target setting yang lebih terfokus serta dibentuk melalui metode pengukuran yang wajar dan dapat diaudit;
- Proporsi pembobotan antar unsur *Balance Score Card* yang lebih berimbang –unsur keuangan tidak lagi menjadi unsur dengan bobot terbesar;
- Pengukuran proses transformasi di Perusahaan, yang meliputi transformasi budaya, kompetensi, teknologi, portfolio, dan bisnis.

Jakarta, Mei 2008,

Tanri Abeng
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

LAPORAN KOMITE PENGKAJIAN PERENCANAAN DAN RISIKO

Kerangka Ketentuan Pembentukan KPPR

Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (KPPR) dibentuk pada tanggal 19 Mei 2006 melalui Keputusan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) No. 08/KEP/DK/2006 tentang Keanggotaan Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko PT TELKOM Indonesia, Tbk. dengan tujuan untuk membantu Komisaris TELKOM dalam melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap proses perencanaan Perusahaan, proses pelaksanaan rencana Perusahaan termasuk penggunaan anggaran belanja modal (*capital expenditure-capex*), serta pelaksanaan enterprise risk management di lingkungan Perseroan dengan memberikan masukan berupa hasil kajian yang komprehensif.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) KPPR TELKOM yang ditetapkan melalui Keputusan Komisaris TELKOM No. 06/KEP/DK/2006 tanggal 19 Mei 2006, yang kemudian di amandemen dengan Keputusan Komisaris TELKOM No. 07/KEP/DK/2007 tanggal 25 April 2007, KPPR berkewajiban untuk:

a. Menyampaikan hasil kajian atas Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang telah disampaikan oleh Direksi sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Komisaris;
b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Komisaris mengenai hasil penelaahan (*review*) pelaksanaan RJPP dan RKAP serta pelaksanaan manajemen risiko perusahaan di lingkungan Perusahaan;
c. Memberikan saran dan rekomendasi atas usulan RJPP dan RKAP kepada Komisaris sebagai bahan pertimbangan pengesahan;
d. Memberikan saran dan rekomendasi mengenai langkah-langkah penanganan risiko yang harus dijalankan oleh Perseroan;
e. Memegang teguh rahasia Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keanggotaan KPPR

Sesuai dengan Keputusan Komisaris TELKOM No. 16/KEP/DK/2007 tanggal 21 September 2007 tentang perubahan susunan keanggotaan KPPR Perusahaan Perseroan (Persero) TELKOM, struktur keanggotaan KPPR adalah sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Anggito Abimanyu (Komisaris);
Wakil Ketua/Anggota	:	Mahmuddin Yasin (Komisaris);
Sekretaris/Anggota	:	Ario Guntoro;
Anggota	:	Arif Arryman (Komisaris Independen);
		P. Sartono (Komisaris Independen);
		Yuki Indrayadi;
		Adam Wirahadi;
		Rama Kumala Sari;
		Widuri M. Kusumawati.

Seluruh anggota KPPR memenuhi persyaratan independensi dan kompetensi sesuai dengan Charter KPPR yang ditetapkan dengan Keputusan Komisaris No. 06/KEP/DK/2006 tanggal 19 Mei 2006.

Ringkasan Kegiatan KPPR di Tahun 2007

a. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)

Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) atau *Corporate Strategic Scenario* (CSS) 2008-2012 merupakan acuan dalam penyusunan *Corporate Annual Message* (CAM) 2008 dan RKAP 2008. Dalam proses penyusunan untuk siklus 2008-2012 pada tahun 2007, KPPR dan Tim Manajemen telah mengadakan serangkaian pertemuan. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai : (1) Metodologi analisis; (2) Asumsi makro dan mikro; (3) Evaluasi kondisi internal Perseroan; (4) Strategi dan Inisiatif Bisnis; serta (5) Proyeksi Keuangan. Berbagai terobosan dan penyempurnaan dilakukan untuk menghasilkan skenario strategis yang akurat dan dapat diandalkan. Salah satunya dengan dilakukannya optimalisasi data PDRB Regional dan inflasi per provinsi dalam penghitungan *addressable market*.

Dalam CSS 2008-2012 ini mulai diletakkan dasar-dasar implementasi 10 *Strategic Initiatives* baik secara konseptual maupun program di tiap Direktorat dan anak perusahaan. Selanjutnya, pelaksanaan 10 *Strategic Initiatives* tersebut dikawal oleh *Project Management Office* (PMO). Dengan demikian, diharapkan setiap program dapat terimplementasi tepat waktu dan tepat sasaran.

b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Untuk pelaksanaan RKAP 2007, Komisaris secara khusus meminta Direksi untuk melaksanakan serangkaian langkah-langkah penting, antara lain:

1. mengintegrasikan *business portfolio roadmap* dalam rencana strategis Perusahaan dan meningkatkan *sense of ownership* Manajemen terhadap rencana strategis Perusahaan yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris;
2. memperbaiki pelaksanaan *capex management* dan mempercepat penyelesaian alat-alat produksi untuk mendukung pencapaian target-target operasional dan keuangan dalam RKAP 2007; dan
3. meningkatkan peran TELKOM sebagai perusahaan induk dalam perencanaan bisnis di lingkungan anak-anak perusahaan melalui pembentukan *group strategic planning* yang paling lambat harus telah terbentuk pada akhir bulan Januari 2007.

Selama tahun 2007, KPPR melakukan serangkaian kegiatan pemantauan terhadap arahan-arahan Komisaris dalam penyelesaian RKAP 2007. Selain itu, KPPR beserta Komisaris juga melakukan serangkaian pertemuan guna membahas usulan belanja modal dengan nilai di atas Rp 100 miliar untuk tahun anggaran 2008 dan usulan RKAP 2008.

c. Pemantauan Pelaksanaan Enterprise Risk Management (ERM) di lingkungan Perseroan

Kegiatan KPPR dalam hal pemantauan pelaksanaan ERM di tahun 2007 terdiri dari:

1. Penyusunan draft perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait terbitnya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT), di antaranya adalah mengenai RUPS, Komisaris, Direksi dan Laporan Tahunan;
2. Pembahasan penilaian risiko dan rencana mitigasi atas implementasi 10 *Strategic Initiatives*.

d. Tindakan Tertentu Direksi yang memerlukan Persetujuan Komisaris

Selama tahun 2007, terkait dengan lingkup kerja keempat, KPPR telah menghasilkan kajian-kajian antara lain:

1. Kajian penetapan persetujuan metode pengadaan atas sejumlah proyek di Perseroan,
2. Kajian usulan suntikan modal di Metra.

Kajian yang dihasilkan merupakan salah satu masukan bagi Komisaris dalam memberikan keputusan atas permasalahan/ tindakan tertentu Direksi yang diajukan ke Komisaris.

4. Statistik Kegiatan KPPR Tahun 2007*

No.	Lingkup Kerja	Jumlah Rapat Formal	Jumlah Kajian	Jumlah Kegiatan/ Laporan Pengawasan
1	RJPP	15	6	0
2	RKAP	50	41	7
3	Pemantau an Pelaksanaan ERM	9	1	1
4	Tindakan Tertentu Direksi	2	5	1
	Jumlah Total	76	53	9

* Sumber : Laporan KPPR untuk periode Tahun 2007

Jakarta, Mei 2008,

Anggito Abimanyu
Ketua Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko

komitmen kepada masyarakat

- Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) TELKOM

- Kegiatan CSR TELKOM tahun 2007

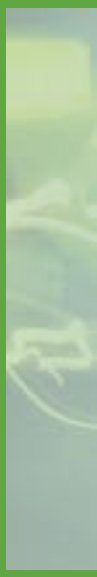

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Konsep CSR TELKOM

Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, TELKOM memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung dan melaksanakan program CSR. Komitmen ini dipicu terutama dilatarbelakangi oleh:

- tuntutan lingkungan global dalam penerapan CSR;
- perubahan persepsi manajemen untuk secara bersamaan mengembangkan bisnis TELKOM dan mencerdaskan masyarakat;
- CSR merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG);
- meningkatnya ekspektasi investor global terhadap implementasi CSR.

Karenanya, kami menempatkan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis TELKOM yang pelaksanaannya dipayungi oleh Keputusan Direksi. Filosofi kegiatan CSR di lingkungan TELKOM (selanjutnya disebut TELKOM CSR) adalah *integrated and strategic* CSR yang tidak saja memperhatikan aspek *generic social impact* untuk sekedar memitigasi dampak negatif dari operasional perusahaan dalam bentuk donasi sosial, tetapi juga melibatkan aspek *value chain social impacts* dan *social dimensions of competitiveness*.

TELKOM CSR menetapkan misi dan visi kegiatannya sebagai arah dan impian bersama. Visi kegiatan TELKOM CSR adalah sebagai pengelola terbaik implementasi CSR di Indonesia dan akhirnya di Asia Tenggara. Sementara misi kami pada aktivitas CSR adalah memberikan solusi jangka panjang atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh karena itu, kami memfokuskan aktivitas CSR pada area berikut:

a. Berperan aktif dalam memperbaiki pendidikan;
b. Berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat; dan
c. Berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

A. Sasaran dan Fokus Kegiatan

TELKOM CSR berupaya menjaga keberlanjutan jangka panjang bisnis Perseroan melalui kegiatan CSR dalam ruang lingkup ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tetap memperhatikan kepentingan TELKOM dan masyarakat, tanpa mengurangi kepentingan pemegang saham.

Ruang lingkup kegiatan tersebut kemudian dikembangkan menjadi tujuh pilar kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan TELKOM CSR, ketujuh pilar tersebut adalah:

1. Pendidikan: meningkatkan kualitas pendidikan bagi anggota masyarakat di sekitar TELKOM, termasuk keluarga pegawai TELKOM Group;
2. Kesehatan Masyarakat: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Kebudayaan dan Keadaban: merupakan bentuk kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olah raga, agama, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai GCG;
4. Kemitraan: memberdayakan perekonomian lokal dan mempererat kemitraan produktif dengan pihak ketiga, baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan *core business* TELKOM, untuk memberikan manfaat bagi semua pihak;
5. Kewajiban Pelayanan Umum: meningkatkan sarana pelayanan dan prasarana telekomunikasi kepada masyarakat;
6. Lingkungan: kepedulian untuk melindungi & meningkatkan kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan alam; dan
7. Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam: kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam.

B. Metode Pelaksanaan

TELKOM menggunakan metode berikut dalam pelaksanaan program CSR:

1. Program yang dikelola secara mandiri oleh TELKOM;
2. Program yang dikelola melalui sinergi antara TELKOM dengan TELKOM Group dan pihak lainnya;
3. Program yang melibatkan partisipasi dari seluruh karyawan dan keluargannya;
4. Program yang memerlukan pembentukan Satuan Tugas;
5. Program yang melibatkan partisipasi dari beberapa elemen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya.

Kegiatan TELKOM CSR di tahun 2007

Beberapa contoh dari TELKOM CSR di tahun 2007 adalah sebagai berikut:

A. Pendidikan

Fokus kegiatan TELKOM CSR pada tahun 2007 adalah pendidikan. Sasaran ini untuk memfasilitasi arus informasi yang lebih baik dan luas. Untuk memperluas distribusi akses informasi dan teknologi melalui pelatihan formal dan informal.

Untuk program CSR yang terkait dengan bidang pendidikan: pada tahun 2007, dana yang sudah dikeluarkan untuk bantuan pendidikan dan pelatihan mencapai 49% dari seluruh anggaran bantuan sosial TELKOM CSR. Kegiatan CSR di bidang pendidikan antara lain meliputi pemberian beasiswa, pembangunan laboratorium, pengadaan peralatan sekolah (komputer, buku), pelatihan dan atau pemagangan bagi anak sekolah, pelatihan dan pemberdayaan guru, program *Education For Tomorrow* (E4T), program penyediaan *hot spot*, program *cyber city*, program *e-community*, program jejaring pendidikan nasional, program *smart campus*, *smart school* dan *internet Goes to School* (IG2S), *internet goes to Army*, dan *internet goes to* Pesantren.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, antara lain:

1. Program Jejaring Pendidikan Nasional;
   Penyerahan 100 PC kepada sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat pada tanggal 2 April 2007 di Bandung.

2. Program *Smart Campus* dan *Smart School*;
   a. Penyediaan akses internet kecepatan tinggi yang dipersembahkan oleh ASTINet dan SMS Kampus pada tanggal 10 November 2007 di 20 perguruan tinggi di Jawa Timur dengan lebih dari 200 ribu mahasiswa. Program ini telah dirintis TELKOM Jawa Timur 2004;
   b. Peningkatan *bandwidth* koneksi internet dan pembangunan *ring backbone fiber optic* untuk lingkungan kampus Universitas Hasanuddin di Makassar, tanggal 10 September 2007;
   c. Penyediaan layanan Flexi Campus sebanyak 25.000 ssf untuk komunitas kampus Bina Sarana Informatika (BSI) pada tanggal 25 Juli 2007;
   d. Penyelenggaraan ajang asah keterampilan pelajar sekolah menengah dalam bidang TI di Gedung Wanita Samarinda Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2007;
   e. Pemberian bantuan fasilitas laboratorium komputer berupa dua unit PC yang telah terkoneksi internet melalui Speedy untuk Sekolah Fajar Hidayah di Desa Cot Meuraya, Kuta Baro, Blangbintang, Aceh Besar;

Pengembangan Situs Kampung Digital
TELKOM mengembangkan situs Kampung Digital bersama masyarakat Desa Terang Bulan di Sunggal, Sumatera Utara. Situs yang menggambarkan dinamika sebuah komunitas masyarakat diharapkan dapat menjadi acuan untuk jasa informasi masyarakat di masa akan datang. Situs ini dipamerkan pada Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Merdeka, Medan pada tanggal 19 Desember 2007 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

f. Penyelenggaraan Grand Final kompetisi Netkuis 2007 di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2007, diikuti 80 sekolah dengan menggunakan 90 PC yang terkoneksi ke internet Speedy. Program ini berlangsung sejak bulan Maret 2007 dan melibatkan 800 pelajar SLTP dan SLTA;
g. Pemberian pelatihan Teknologi Informasi bagi para guru di Yogyakarta pada tanggal 22-23 Juni 2007 bekerja sama dengan Harian Republika; dan
h. Bantuan beasiswa dan seperangkat komputer pada tanggal 23 Mei 2007 di SMAL B/C Dharma Praja, Banjarmasin.

3. Program *Internet Goes to School, Internet Goes to Army* dan *Internet Goes to* Pesantren;
   a. Penyerahan bantuan sembilan unit komputer untuk beberapa sekolah di Jayapura, Abepura, Wamena, dan Manokwari, serta bantuan kepada Gugus Depan Gerakan Pramuka Propinsi Papua;
   b. Penyelenggaraan pelatihan Internet dengan tema "*Open the World*" yang dilaksanakan dari bulan Pebruari-Mei 2007 di SMK TELKOM Banjar Baru & UNISKA Banjarmasin;
   c. Penyelenggaraan pelatihan internet kepada 200 perwira dan anggota Kodam III Siliwangi yang berkecimpung dalam pengolahan data pada tanggal 24 September 2007 di Bandung;
   d. Pemberian pelatihan internet kepada 250 Perwira Menengah Kodam III Siliwangi Bandung pada tanggal 4-8 Juni 2007 di Markas Kodam III Siliwangi Bandung dengan menggunakan koneksi internet Speedy; dan
   e. Pemberian secara resmi laboratorium Internet Speedy di Pondok Pesantren Zainul Hasan Probolinggo pada tanggal 2 November 2007. Laboratorium internet tersebut merupakan sumbangan dari TELKOM Divre V berupa 20 unit komputer dan akses internet Speedy gratis selama setahun.

4. *Education for Tomorrow* (E4T);
   Program ini berupaya mempercepat pencapaian satu juta pelajar paham dan mengerti internet, selain melalui penciptaan "*agent of change*" yang ditempuh melalui program partnership dengan mitra strategis. Salah satu kegiatan E4T adalah pemberian fasilitas TELKOMNet Instan dan Speedy secara gratis selama dua bulan bagi sekolah yang mengikuti program E4T pada tanggal 31 Juli 2007 di Medan. Selain itu TELKOM memberikan bantuan penyelenggaraan E4T untuk instruktur/guru teknologi informasi selama dua bulan.

5. Program *Cyber City*;
   Penyelenggaraan Makassar Cyber Quiz sebagai lanjutan dari program IG2S, IG2 Community serta program kerjasama lainnya dengan pengelola wartel dan ITC untuk mencerdaskan bangsa melalui Internet. Penyelenggaraan program cyber quiz tersebut berlangsung pada tanggal 10 November 2007 dengan akses melalui TELKOMNet Instan dan Speedy. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa di Makassar.

6. Program *e-Community*.
   a. Pemberian pelatihan InfoComm secara gratis untuk masyarakat Manado bekerja sama dengan Manado Post pada tanggal 24 Juli 2007.
   b. Pengembangan Program *E-Community Development* meliputi; e-Government, e-Police, a-Army, e-Campus, e-Health di Bali pada tanggal 11 Juli 2007.

Yayasan Pendidikan

a. Yayasan Pendidikan TELKOM (YPT)

YPT menyelenggarakan pendidikan formal tingkat diploma, sarjana dan magister di bidang telekomunikasi melalui Sekolah Tinggi Teknologi TELKOM (STT TELKOM) dan Sekolah Tinggi Manajemen TELKOM (STMB TELKOM).

Sampai dengan 31 Desember 2007, STT TELKOM mencatat 5.358 mahasiswa aktif yang terdiri dari 747 mahasiswa Diploma 3 (D3); 4.530 mahasiswa sarjana; dan 81 mahasiswa magister. Jumlah lulusan tercatat 856 mahasiswa yang terdiri dari 170 mahasiswa D3, 684 mahasiswa sarjana dan 2 mahasiswa magister.

Sementara STMB TELKOM sampai dengan 31 Desember 2007 mencatat 1.677 mahasiswa aktif yang terdiri dari 1.445 mahasiswa sarjana dan 232 mahasiswa magister. Jumlah lulusan tercatat 173 mahasiswa, terdiri dari 129 mahasiswa sarjana dan 44 mahasiswa magister.

Selain pendidikan formal, YPT menyelenggarakan pendidikan non formal melalui lembaga NTC (NIIT & TELKOM Center) dan Program Profesional dengan lama pelatihan 1-2 tahun. Jumlah peserta pelatihan tahun 2007 NTC sebanyak 712 orang dan Program Profesional sebanyak 377 orang.

Pada tahun 2007, YPT Group memberikan beasiswa kepada pelajar SMU di kota Bandung, yang diberikan kepada STT TELKOM sebesar Rp 920.660.000, STMB TELKOM sebesar Rp 183.000.000, NTC sebesar Rp 1.602.000.000, dan YPT sebesar Rp 18.750.000 Sumber dana beasiswa berasal dari Kopertis, YPTI, Supersemar, Gratika dan TELKOM. Sedangkan beasiswa yang murni dikeluarkan dari dana YPT adalah sebesar Rp 1.620.750.000 (yang diberikan melalui NTC dan YPT).

Pada tanggal 27 September 2007, YPT Group secara resmi mendirikan Politeknik TELKOM.

b. Yayasan Sandhykara Putra TELKOM (YSPT)
YSPT menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai dengan tingkat akademi. Sampai dengan Desember 2007, YSPT mengelola 32 TK dengan 2.546 siswa, 1 Sekolah Dasar (SD) dengan 258 siswa, 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 956 siswa, 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 694 siswa, 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telekomunikasi dengan 3.692 siswa, 3 SMK Pariwisata dengan 1.073 siswa, 1 Akademi Pariwisata dengan 96 mahasiswa, dan 1 Akademi Telekomunikasi dengan 479 mahasiswa.

B. Kesehatan

TELKOM secara aktif berupaya membantu meningkatkan standar kehidupan masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan kehidupan yang sehat dan bersih melalui kegiatan kesehatan masyarakat.

Beberapa kegiatan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh TELKOM termasuk:

- Aksi Peduli Donor Darah bekerja sama dengan Pundi Amal SCTV dan PMI di Bandung, pada tanggal 19-20 Juli 2007. Kegiatan serupa juga diselenggarakan di Semarang (28-29 Juli 2007), Jakarta, Yogyakarta, dan Malang;
- Kegiatan Donor Darah TELKOM di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada hari Minggu, 10 September 2007;
- Khitanan Massal Gratis di Al-Hidayah NAD pada tanggal 2 Juli 2007 dan di Yayasan LPI Istiqlal, Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2007;
- Pengobatan gratis untuk masyarakat di Tanjung Riau, Batam pada tanggal 11 September 2007;
- Program penyuluhan bahaya narkoba di berbagai sekolah menengah atas di Cirebon pada tanggal 30-31 Agustus 2007 yang diikuti lebih dari 1.000 siswa dan guru, bekerja sama dengan beberapa lembaga.

C. Kegiatan Kebudayaan dan Keadaban

- Renovasi sarana ibadah di SDN Pemurus Dalam 6, Banjarmasin dan renovasi sarana olah raga dan halaman gedung sekolah di Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2007.
- Partisipasi dalam Konferensi Zakat se-Asia Tenggara di Padang. Dalam acara tersebut, Flexi & Speedy menyisihkan Rp 5.000 dari setiap penjualan *Starterpack* Trendi Dahsyat untuk disumbangkan ke Badan Amil Zakat (BAZ).
- Penyerahan bantuan dana untuk beberapa gereja dan masjid di Jayapura.

Direktur Utama TELKOM Rinaldi Firmansyah pada rangkaian acara Safari Ramadhan mulai dari Pekanbaru, Riau sampai Solok, Sumatera Barat pada tanggal 5-6 Oktober 2007, berkesempatan memberikan Sumbangan sarana ibadah kepada Mesjid Al-Karam, Bangkinang sebesar Rp 20 juta, Mesjid Ubudiyah, Danau Bingkuang sebesar Rp 10 juta, Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar sebanyak dua unit komputer senilai Rp 10 juta, Pesantren Al-Badr Islamic Institut Bangkinang sebanyak satu unit komputer senilai Rp 5 juta.

D. Kemitraan

Sejak tahun 2003 sampai 2007, TELKOM telah membina 40.301 mitra binaan dan menyalurkan pinjaman lunak senilai Rp 552,84 miliar. Pada tahun 2007, telah disalurkan dana kemitraan sebesar Rp 182,59 miliar dari target sebesar Rp 190 miliar atau pencapaiannya sebesar 96%, disalurkan kepada 9.709 mitra binaan yang tersebar di 33 propinsi dan terbagi dalam delapan sektor.

Distribusi Dana Kemitraan tahun 2007 (dalam Rp miliar)

WILAYAH	Sektor									
	Industri	Perdagangan	Pertanian	Peternakan	Perkebunan	Perkebunan	Jasa	Lain-lain	Jumlah	%
Sumatera	8.460	25.881	122	2.189	485	1.216	12.954	146	51.453	28,2%
Jakarta dan Banten	3.900	10.675	1.309	425	–	390	3.233	395	20.327	11,1%
Jawa Barat	3.408	5.365	257	180	83	226	3.985	353	13.856	7,6%
Jawa Tengah	5.246	6.499	1.265	615	24	478	6.366	810	21.302	11,7%
Jawa Timur	2.487	5.307	91	436	–	128	5.314	694	14.456	7,9%
Kalimantan	2.137	8.437	126	897	169	285	5.259	257	17.595	9,6%
Indonesia Timur	5.582	18.576	290	1.130	60	1.189	13.805	2.975	43.606	23,9%
NASIONAL	31.218	80.740	3.460	5.872	821	3.911	50.945	5.630	182.595	100,0%
PERSENTASE	17,1%	44,2%	1,9%	3,2%	0,4%	2,1%	27,9%	3,1%	100,0%	

Secara kumulatif mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, jumlah mitra binaan dan besarnya penyaluran dana kemitraan per sektor adalah sebagai berikut:

Realisasi Program 2003 - 2007

Sektor	Jumlah Mitra Binaan	Persentase	Jumlah Penyaluran Dana (Rp juta)	Persentase
Industri	7.123	17,7%	101.530	18,4%
Perdagangan	17.496	43,4%	218.924	39,6%
Pertanian	772	1,9%	8.899	1,6%
Peternakan	1.404	3,5%	19.004	3,4%
Perkebunan	211	0,5%	3.170	0,6%
Perikanan	1.122	2,8%	13.930	2,5%
Jasa	11.574	28,7%	165.855	30,0%
Lain-lain	599	1,5%	21.528	3,9%
Total	40.301	100,0%	552.840	100,0%

Berdasarkan survei pada tahun 2007, terdapat tiga bentuk pembinaan yang paling dibutuhkan oleh mitra binaan, yaitu pelatihan, promosi, dan pendampingan. Sementara jenis pelatihan yang dibutuhkan adalah kewirausahaan, pembukuan, dan pemasaran. Dari hasil pembinaan tersebut, mitra binaan TELKOM mengalami peningkatan secara signifikan dalam hal omzet penjualan, jumlah pendapatan, aktiva, dan jumlah tenaga kerja.

Berikut adalah beberapa kegiatan pembinaan mitra binaan yang diselenggarakan TELKOM:

- Penyaluran dan pembekalan program kemitraan pada tanggal 23 Maret 2007, di Banjarmasin dan diikuti oleh 77 mitra binaan;
- Mitra binaan TELKOM mengikuti pameran yang dikemas dengan tajuk “Pameran Sampan Expo 2007” di Tegal pada tanggal 26 Juni 2007;
- Lokakarya dan seminar untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kemampuan Berwirausaha’ bagi para mitra binaan. Pelatihan tersebut dilakukan secara bergiliran di kota-kota Solo, Pekalongan, Purwokerto, dan Semarang yang dimulai pada minggu kedua hingga minggu ke empat di bulan November 2007;
- Mitra binaan TELKOM turut berpartisipasi dalam Pameran Texcraft 2007 di Jogja Expo Center Hall yang berlangsung pada Juli 2007. Dalam kesempatan tersebut 10 mitra binaan TELKOM memamerkan karya dan inovasi mereka antara lain piring bercorak batik, batik sutra, jilbab lukis, batik kayu, dan kerajinan kerang.
- Mitra binaan TELKOM kembali berpartisipasi dalam serangkaian pameran pada bulan September 2007: Indonesia Textile & Apparel Fair 2007 (6-9 September), Indocraft 2007 (12-16 September), dan Gelar Batik Nusantara (19-23 September) yang seluruhnya berlangsung di Jakarta Convention Center. Selain batik, mitra binaan TELKOM juga memamerkan ukiran kayu jepara dan gerabah.

E. Bencana Alam dan Bantuan Kemanusiaan

TELKOM memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena bencana alam dengan menyediakan pertolongan pertama dalam bentuk bantuan logistik, kesehatan, makanan, dan alat-alat kebersihan.

Berikut adalah daftar bantuan kemanusiaan TELKOM pada tahun 2007:

- Penyerahan bantuan kemanusiaan untuk membantu korban bencana gempa di Sumatera Barat dan Bengkulu masing-masing sebesar Rp 360 juta dan Rp 210 juta;
- Pendirian Posko Bantuan TELKOM di Bengkulu, saat terjadi gempa tektonik berkekuatan 7,9 skala Richter pada tanggal 12 September 2007 dan di Kediri, saat mengantisipasi meletusnya Gunung Kelud pada bulan Oktober 2007;
- Penyerahan bantuan untuk korban gempa di Situbondo pada tanggal 10 September 2007. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan dana sebesar Rp 50 juta dan 10 ton beras; dan
- Bantuan bencana puting beliung di Kecamatan Banjar Timur pada tanggal 6 Juni 2007. TELKOM menyediakan berupa uang santunan dan telepon Flexi sebagai sarana koordinasi.

F. Kewajiban Layanan Umum

- Pemberian fasilitas telepon gratis bagi masyarakat yang terjebak kemacetan di Pelabuhan Penyeberangan Merak pada tanggal 31 Agustus 2007.
- Menyediakan *Hotspot Areas*;
- Pendirian Posko Bantuan TELKOM untuk memperlancar kegiatan Mudik Lebaran 2007 di beberapa lokasi: Surabaya, beberapa kota di Jawa Tengah, Pelabuhan Merak, dan Bogor.

G. Lingkungan

Perbaikan dan pemeliharaan taman kota;
Penghijauan / penanaman pohon;
Perbaikan sarana umum.

- Kegiatan penanaman pohon di Palembang pada bulan Desember 2007.
- TELKOM bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melakukan gerakan penghijauan sebagai bagian dari program Majalengka Hijau pada bulan Pebruari 2007.
- Aksi penanaman 50.000 batang pohon tanaman produktif di atas lahan kritis 1,5 Ha di kawasan wisata *Jogging* Punclut Bandung 1 Desember 2007.
- Kegiatan *Fun Bike* (Sepeda Sehat) bertema “Bandung bersih tanpa Polusi”, melibatkan lebih dari 1.000 *biker*, digelar pada hari Minggu, 23 Desember 2007 menjelajah rute sejauh 10 km mengitari jalur jalan utama Kota Bandung.

Realisasi Program CSR 2007

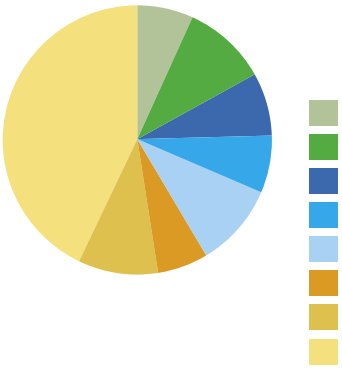

	2007
Wilayah	**Materialisasi (Rp ribu)**
Sumatera	3.297.203
Jakarta dan Banten	4.069.659
Jawa Barat	3.042.219
Jawa Tengah	2.613.477
Jawa Timur	4.122.304
Kalimantan	2.329.239
Indonesia Timur	3.917.488
Kantor Perusahaan	17.788.817
Total	41.180.406

data perusahaan

- Struktur Bisnis dan Organisasi
- Aktiva Tetap
- Wilayah Operasi
- Produk dan Layanan
- Manajemen Senior
- Alamat Perusahaan

STRUKTUR BISNIS DAN ORGANISASI

Informasi mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi

Anak Perusahaan Terkonsolidasi

Lihat Catatan 1d Laporan Keuangan Konsolidasian.

Perusahaan Asosiasi Tidak Dikonsolidasi

PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")

Patrakom didirikan pada bulan September 1995 dan sampai dengan tanggal penyusunan laporan tahunan ini sahamnya dimiliki oleh TELKOM (40%), PT Elnusa (40%), dan PT Tanjung Mustika (20%). Patrakom menyediakan layanan komunikasi satelit (VSAT) dan layanan serta fasilitas terkait kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan.

PT Citra Sari Makmur ("CSM")

CSM didirikan pada bulan Pebruari 1986 dan sampai dengan tanggal penyusunan laporan tahunan ini sahamnya dimiliki oleh TELKOM (25%), PT Tigatra Media (38,29%) dan Media Trio (L) Inc. Malaysia (36,71%). CSM didirikan di Indonesia dan menyediakan layanan telekomunikasi terkait dengan aplikasi VSAT dan teknologi telekomunikasi lainnya, serta fasilitas terkait.

PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")

PSN didirikan pada bulan Juli 1991 dan sampai dengan tanggal penyusunan laporan tahunan ini sahamnya dimiliki oleh Magic Alliance Labuan Limited (42,67%), TELKOM (22,38%), Bank of New York (9,97%), Pulsa Labuan Limited (3,95%), Skaisnetindo Teknotama (3,76%), PT Trinur Cakrawala (3,75%), Hughes Space and Communications International (3,71%), Telesat Canada (3,71%), dan pihak lain (6,10%). PSN menyediakan layanan sewa transponder satelit dan komunikasi berbasis-satelit ke negara-negara di wilayah Asia Pasifik. PSN melaksanakan penawaran saham perdana saham biasa dan pencatatan di NASDAQ pada bulan Juni 1996, tetapi dihapus dari pencatatan pada 6 November 2001 sehubungan dengan kegagalannya memenuhi persyaratan tertentu NASDAQ *National Market Listing*.

Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani pada 8 Agustus 2003 antara TELKOM dan Centralindo Pancasakti Cellular (CPSC), TELKOM berhak menerima kepemilikan CPSC sebesar 21,12% di PSN dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Selama jangka waktu ini, seluruh hak CPSC sehubungan dengan saham diberikan kepada TELKOM. TELKOM menerima saham CPSC di PSN pada 9 Agustus 2004, yang meningkatkan hak kepemilikannya di PSN menjadi 43,69%. Pada tahun 2005, hak kepemilikan TELKOM di PSN dikurangi menjadi 35,5% sebagai hasil dari konversi *debt-to-equity* oleh PSN. Pada tahun 2006, hak kepemilikan TELKOM di PSN lebih lanjut berkurang menjadi 22,38% sebagai akibat dari penerbitan saham baru tambahan kepada para pemegang saham baru.

Sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, TELKOM sedang mengevaluasi biaya dan keuntungan terkait dengan peningkatan kepemilikan TELKOM di PSN untuk mengembangkan layanan berbasis satelit ritel seperti selular melalui satelit dan untuk mendukung program pemerintah untuk menyediakan sambungan telekomunikasi ke daerah terpencil.

PT Batam Bintan Telekomunikasi ("BBT")

BBT didirikan pada bulan Juni 1996 dan pada tanggal laporan tahunan ini disusun dimiliki oleh TELKOM (5%) dan Batamindo Investment (95%). BBT menyediakan layanan telekomunikasi sambungan kabel tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo di Muka Kuning, Pulau Batam dan di Bintan Beach International Resort dan Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia ("Bangtelindo")

Bangtelindo didirikan pada bulan Desember 1993 di Indonesia. Para pemegang saham Bangtelindo adalah TELKOM (3,18%), Dana Pensiun TELKOM (82%) dan pihak lain (14,82%). Kegiatan usaha utama Bangtelindo adalah menyediakan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi.

Bridge Mobile Pte. Ltd.

Pada 3 November 2004, Telkomsel bersama enam operator seluler internasional lain di Asia Pasifik mendirikan Bridge Mobile Pte. Ltd. (Singapura), suatu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan selular regional di wilayah Asia Pasifik.

Telkomsel sebelumnya memegang hak kepemilikan 14,286%. Pada tahun 2005, hak kepemilikan Telkomsel di Bridge Mobile Pte. Ltd. berkurang menjadi 12,5% sebagai akibat dari dikeluarkannya saham oleh Bridge Mobile Pte. Ltd. ke pemegang saham baru yaitu Hong Kong CSL Limited.

Berdasarkan perjanjian tertanggal 18 Juni 2007, pihak-pihak terkait telah setuju dengan bergabungnya SK Telecom Co., Ltd dan Advanced Info Service Public Company Limited sebagai pemegang saham Bridge Mobile yang baru. Pada tahun 2007, hak kepemilikan Telkomsel atas Bridge Mobile Pte. Ltd. menurun menjadi 10%.

Pada tahun 2007, Telkomsel telah membayar untuk tambahan hak kepemilikan sebesar US$ 1.200.000 (setara dengan Rp 11.069 juta).

Sampai dengan Desember 2006 dan 2007, kontribusi Telkomsel yang mewakili hak kepemilikan 12,5% dan 10% adalah masing-masing sebesar US$ 1.000.000 (Rp 9.290 juta) dan US$ 2.200.000 (Rp 20.360 juta).

PT Mandara Selular Indonesia ("MSI"), sebelumnya disebut PT Mobile Selular Indonesia ("Mobisel")

Pada 13 Januari 2006, TELKOM menjual seluruh hak kepemilikannya di MSI kepada pihak ketiga yaitu Twinwood Venture Limited. Keuntungan yang diperoleh tidak signifikan pada laporan laba rugi konsolidasian TELKOM.

Struktur Organisasi TELKOM

Secara umum, organisasi TELKOM pada tahun 2007 terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Bisnis. Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama bertugas mengawasi

jalannya operasional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite yang mencakup Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko, Rapat Koordinasi gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan setiap dua minggu sekali.

Sejak RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Pebruari 2007, komposisi Direksi TELKOM berubah. Direktur TELKOM menjadi berjumlah delapan orang yang terdiri dari Direktur Utama (CEO), Direktur Network & Solution, Direktur Konsumer, Direktur Enterprise & Wholesale, Direktur Keuangan (CFO) dan Direktur Human Capital & General Affairs, Direktur Information & Supply (CIO) serta Direktur Compliance & Risk Management. Dengan perubahan ini, struktur organisasi TELKOM menjadi sebagai berikut: Corporate Office Group meliputi Direktorat Human Capital & General Affair, Direktorat Keuangan, Direktorat Information Technology & Supply, Direktorat Compliance & Risk Management, Unit Strategic Investment & Corporate Planning, Internal Auditor Group, Departemen Corporate Affairs dan Departemen Corporate Communications, sedangkan Business Operations Group meliputi Direktorat Konsumen, Direktorat Enterprise & Wholesale dan Direktorat Network and Solution.

Direktorat Keuangan fokus pada pengelolaan keuangan perusahaan, dan untuk penyelenggaraan operasi fungsi keuangan dilakukan secara terpusat, diperankan oleh Unit Finance Center. Direktorat Human Capital & General Affairs fokus pada pengelolaan SDM perusahaan, dan untuk penyelenggaraan operasi fungsi SDM dilakukan secara terpusat, diperankan oleh Unit Human Resources Center. Direktorat Teknologi dan Informasi yang berada di bawah pengawasan CIO fokus pada pengelolaan pendayagunaan Teknologi Informasi perusahaan dan pengelolaan fungsi supply management serta mengendalikan Information Service Center dan Supply Center. Direktorat Kepatuhan & Manajemen Risiko fokus pada kepatuhan, pengelolaan legal dan manajemen risiko. Direktorat Network & Solution fokus sebagai unit pengelola infrastruktur dan service serta mengendalikan Divisi Infrastruktur Telekomunikasi, Divisi Multimedia, Divisi Fixed Wireless Network, Divisi Research & Development Center dan Maintenance Service Center. Direktorat Konsumer fokus sebagai unit pengelola fungsi delivery channel untuk segmen pasar ritel serta mengendalikan Divisi Regional (tujuh regional). Direktorat Enterprise & Wholesale fokus sebagai unit pengelola fungsi delivery channel untuk segmen pasar enterprise dan wholesale serta mengendalikan Divisi Enterprise Service dan Divisi Carrier dan Interconnection Service.

Dalam rangka percepatan dan efektivitas proses pengambilan keputusan, Direksi dibantu oleh Komite –Komite Eksekutif yaitu: Komite Etika, SDM & Organisasi; Komite Costing, Tariff, Pricing dan Marketing; Komite Corporate Social Responsibility; Komite Regulasi; Komite Disclosure; Komite Pengelolaan Anak Perusahaan; Komite Produk, Infrastruktur dan Investasi; Komite Treasury, Keuangan dan Akuntansi; dan Komite Risiko.

Organisasi TELKOM secara fundamental telah didesain dan dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang yang berfokus kepada kepuasan pelanggan, infrastruktur, penyediaan layanan berkualitas, serta pada pendayagunaan sumber daya yang kompeten.

Struktur Organisasi TELKOM

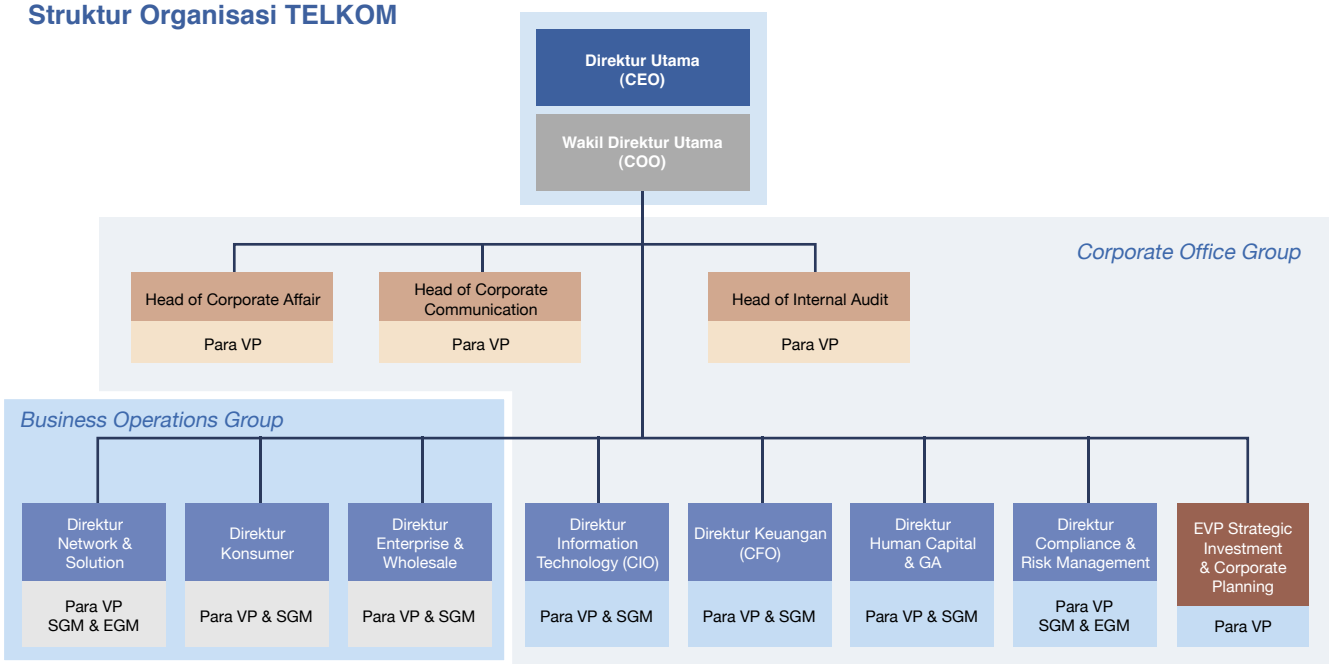

AKTIVA TETAP

Kecuali untuk hak kepemilikan yang diberikan kepada perorangan di Indonesia, hak atas tanah dipegang oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Agraria Dasar No. 5/1960. Peruntukan tanah dilaksanakan melalui hak atas tanah, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Pemegang hak atas tanah menikmati penggunaan penuh tanah untuk jangka waktu yang dinyatakan, dan dapat diperbaharui serta diperpanjang. Hampir dalam setiap hal, hak atas tanah dapat diperdagangkan dengan bebas dan dapat digadaikan sebagai jaminan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Sampai dengan 31 Desember 2007, TELKOM, tidak termasuk anak perusahaannya, memiliki hak guna tanah atas 2.578 properti. TELKOM memegang hak guna bangunan resmi untuk mayoritas tanah dan bangunannya. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, jangka waktu awal maksimum untuk hak guna bangunan adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk tambahan 20 tahun. Sebagian besar tanah dan bangunan TELKOM digunakan untuk menampung peralatan untuk penyediaan operasi telekomunikasi termasuk sentral telepon, stasiun transmisi dan peralatan radio gelombang mikro.

Tidak ada satupun dari properti TELKOM yang dihipotikkan. TELKOM tidak melihat adanya persoalan lingkungan yang dapat berdampak pada penggunaan propertinya.

WILAYAH OPERASI

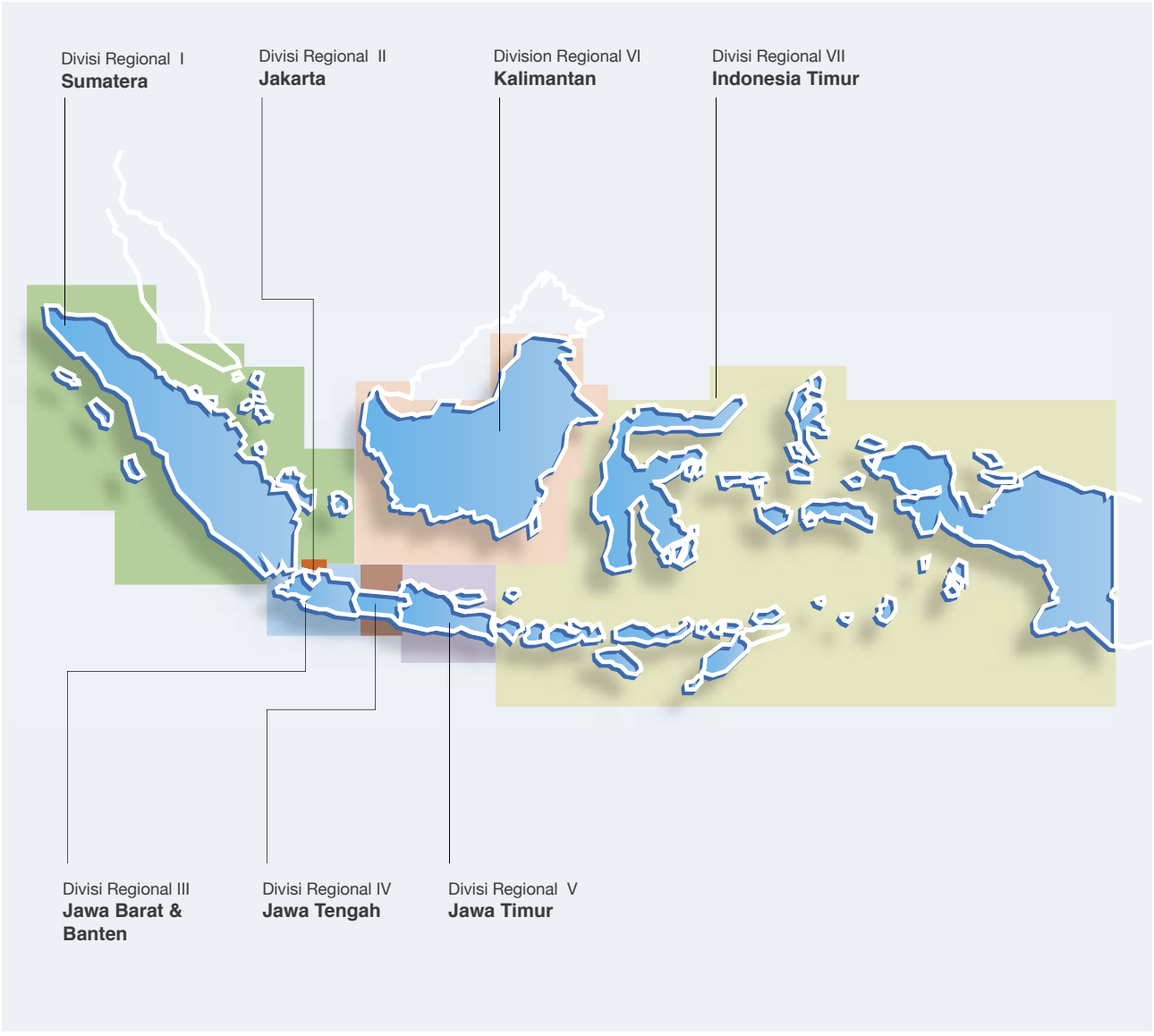

PRODUK & LAYANAN

Transformasi bisnis selain dilakukan melalui restrukturisasi perusahaan, juga dilakukan melalui tahapan-tahapan lainnya, salah satunya adalah pengembangan usaha, terutama untuk menjawab kebutuhan pelanggan dan menangkap peluang yang ada. Dalam posisinya sebagai operator terintegrasi, TELKOM telah melakukan pengembangan usaha yang berbasis pada telepon tidak bergerak kabel, telepon tetap nirkabel, selular, data dan internet, dan *network* & *interconnection* untuk melayani seluruh segmen pelanggan, baik konsumer, konsumen korporasi, maupun operator telekomunikasi berlisensi lainnya.

Dengan keberhasilan pengembangan usaha yang telah dilakukan memungkinkan Perusahaan melakukan sinergi optimal atas seluruh potensi yang dimiliki sehingga memposisikan diri sebagai penyedia total solusi kepada para pelanggan sekaligus memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Untuk itu TELKOMGroup telah memainkan sinergi dalam *marketing* dan *sales promotion*-nya.

Produk dan layanan TELKOMGroup berjumlah lebih dari 150 buah, berdasarkan portofolio bisnis, produk dan layanan TELKOM dapat dikelompokkan sebagai berikut: sambungan telepon tidak bergerak kabel, sambungan telepon tetap nirkabel, telepon selular, data & internet, dan jaringan & interkoneksi.

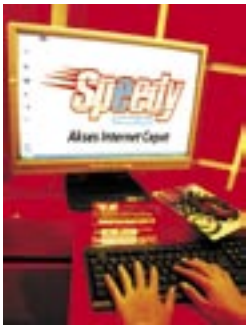

Daftar berikut merupakan produk-produk utama yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan TELKOM.

Sambungan Telepon Tidak Bergerak Kabel

TELKOMLokal. TELKOMLokal atau panggilan lokal adalah panggilan antar pelanggan tetap dalam jarak kurang dari 30 km atau di dalam satu wilayah (*boundary*) lokal. Nomor pemanggil dan nomor yang dipanggil masih dalam satu kode area. tarif telepon lokal Rp 250 per pulsa.

TELKOMSLJJ. TELKOMSLJJ atau panggilan SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh) adalah panggilan telepon jarak jauh untuk satu wilayah negara. Nomor pemanggil dan nomor yang dipanggil berbeda wilayah kode area. Biaya penggunaannya tergantung pada jarak, waktu, dan hari.

TELKOMSLI-007. Sebelumnya produk dari layanan ini dinamai TELKOM International Call (TIC) 007 yang diluncurkan pada Juni 2004. Pada bulan Mei 2006, TELKOM merubah namanya menjadi TELKOMSLI-007. Sambungan Langsung Internasional (SLI) 007 adalah layanan jasa komunikasi antar-negara melalui SLI dengan kode akses 007. Layanan ini juga dilengkapi dengan panggilan melalui bantuan operator dengan nomor akses 107. TELKOMSLI-007 memberikan tujuh manfaat nyata: *real expert, real time and price, real simple, real value, real care, real sound,* dan *real lifestyle*.

TELKOMSpeedy. Speedy *Broadband Access* merupakan layanan *broadband* dengan menggunakan teknologi ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) untuk akses internet dengan kecepatan tinggi hingga 512 kbps. Speedy memberikan layanan data, multimedia, dan telepon/fax secara bersamaan (simultan) dengan hanya menggunakan saluran telepon kabel yang sudah ada.

Pelanggan hanya perlu menghubungi TELKOM melalui 147 atau Plasa TELKOM, tidak memerlukan penyedia jasa internet lain. Pembayaran tagihan biaya akses dan biaya internet digabung dalam satu tagihan. Penanganan pelanggan (*customer service*) dilakukan melalui satu pintu, 147 atau Plasa TELKOM. Setiap layanan yang disediakan memiliki koneksi yang terdedikasi dengan kabel modem, memungkinkan dilakukan *shareline* dengan pengguna lainnya.

Sambungan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel

TELKOMFlexi. TELKOMFlexi adalah layanan jasa telekomunikasi suara dan data berbasis akses tanpa kabel dengan teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*) 2000-IX dan biaya pemakaiannya mengacu pada tarif telepon rumah (PSTN TELKOM). Lingkup layanan TELKOMFlexi terbatas pada satu kode area tertentu (*limited mobility*), produk ini tidak memiliki fasilitas *roaming* seperti halnya pada selular.

TELKOMFlexi memiliki kualitas suara yang sangat jernih dan radiasi yang rendah. Jenis terminalnya juga beragam, pelanggan bebas memilih untuk menggunakan *terminal mobile* atau *fixed*. Untuk *terminal mobile* pelanggan dapat memilih Flexi pascabayar (FLEXIClassy) dan prabayar (FLEXITrendy) dengan menggunakan handset CDMA, sementara untuk terminal fixed pelanggan dapat menggunakan FLEXIHome yang diakses dengan menggunakan pesawat *Fixed Wireless Terminal* (FWT) dan berbasis ESN (*Non Sim Card*). Pelanggan juga dapat memilih FLEXICombo yang memungkinkan pelanggan memiliki dua sampai tiga nomor Flexi dalam satu kartu. FLEXICombo merupakan pengembangan layanan dari FLEXIClassy dan Trendy untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mobilitas antar kota atau pelanggan dengan rutinitas *roaming* ke kota-kota tertentu.

Selular

Telkomsel. Telkomsel merupakan penyedia jasa telekomunikasi selular dengan teknologi GSM. Dengan produk-produk kartuHALO, simPATI, dan Kartu As, Telkomsel menawarkan satu layanan pascabayar dan dua layanan prabayar. Para pelanggan dan pengguna Telkomsel mendapatkan beragam fitur, aplikasi, dan layanan nilai tambah (*value added service*), termasuk SMS, WAP, GPRS, MMS, Wi-Fi, *roaming* internasional, *mobile banking*, CSD, dan EDGE. Semuanya itu dilengkapi dengan jangkauan sinyal yang luas dan tarif kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan komunikasi dan multimedia.

kartuHALO

Diperkenalkan pertama kali tahun 1995. kartuHALO merupakan kartu pascabayar yang paling banyak digunakan, yang pada akhir tahun 2007 memiliki 1,9 juta pelanggan. Dengan pangsa pasar mencapai 60% dari pelanggan pascabayar, kartuHALO tetap menjadi pemimpin pasar pada segmen ini. Layanan nilai tambah diperkenalkan di tahun ini, dalam bentuk Paket HALObebas, mencakup tarif khusus untuk panggilan kelima nomor favorit, gratis 150 SMS per bulan, gratis biaya abonemen, dan tarif flat nasional. Tahun ini, Telkomsel memperkenalkan HaloHybrid.

simPATI

Merupakan kartu prabayar pertama dan terpopuler di Asia dan merupakan produk Telkomsel yang paling sukses. Perbedaan antara layanan prabayar dibandingkan operator lainnya adalah simPATI memberikan jasa *roaming* internasional dan bebas *roaming* nasional dan domestik. Keunggulan kompetitif lain dari simPATI adalah keamanan (bebas dari penyadapan dan penggandaan), dapat di akses dimana saja, dan harga yang terjangkau. Semua pelanggan simPATI akan mendapat nilai maksimal dari aneka pelayanan yang berkesinambungan dari kartu tersebut. Telkomsel meluncurkan dua variasi kartu simPATI, yaitu simPATI Ekstra dan simPATI PeDe.

KartuAs

Diluncurkan tahun 2004, merupakan kartu prabayar yang terjangkau dan murah. KartuAs dapat digunakan di seluruh Indonesia, tarif percakapan sangat kompetitif karena mempunyai dua tarif khusus, yaitu: Tarif Murah (tarif flat dari pelanggan KartuAs ke pelanggan kartuHALO dan simPATI) dan Tarif Super Murah (tarif flat per detik antar sesama pengguna KartuAs).

Data & Internet

TELKOMGlobal-017. Merupakan layanan untuk panggilan internasional dengan menggunakan jaringan internet dengan kode akses 017 untuk panggilan ke telepon tidak bergerak maupun selular ke 253 tujuan panggilan di mancanegara. Tarif layanan ini adalah 60% dari tarif SLI untuk semua negara dan tidak mengenal *timeband* (tarif *flat* untuk setiap waktu). Untuk penggunaan layanan ini tidak memerlukan perangkat tambahan, merupakan layanan yang legal, dan mudah diakses (*one stage dialling*).

TELKOMSave. TELKOMSave adalah layanan panggilan Internasional VoiP standar yang sejenis dengan TELKOMGlobal-017 namun menggunakan metode *two stage dialling*, jadi untuk melakukan panggilan internasional, pelanggan terlebih dahulu harus memutar nomor akses, memasukkan nomor pin, setelah itu baru memutar nomor tujuan. Tarif layanan yang dikenakan adalah 40% dari tarif SLI. Layanan ini terdiri dari pascabayar dan prabayar.

TELKOMNet Instan. Merupakan layanan akses internet *dial-up* tanpa perlu berlangganan dengan konsep layanan yang mudah dan sederhana. Pada konfigurasi koneksi internet pelanggan mengisi *dial number* 0809 8 9999, konfigurasi DNS dan *proxy server* dikosongkan. Untuk *log in*, pelanggan mengisi *user name*: telkomnet@instan, dan *password*: telkom. Biaya pemakaian dibebankan berdasarkan lama waktu pemakaian dan disatukan dengan tagihan penggunaan telepon.

plasa.com (www.plasa.com). Layanan portal web TELKOM yang menyajikan layanan informasi serta komunitas internet berbahasa Indonesia dengan fokus layanan pada komunitas pendidikan nasional. plasa.com diharapkan menjadi portal informasi dan komunitas internet terlengkap dengan akses layanan yang cepat.

plasa.com memiliki beberapa layanan portal di antaranya: Komunitas Sekolah Indonesia (KSI), Mailing List Indonesia, Net Kuis, Desa Multimedia Indonesia, Informasi Tagihan telepon secara *on-line*, dan Direktori Indonesia. Layanan *hosting* dengan mengelompokkan informasi *hosting* ke dalam komunitas-komunitas yang sama. Dalam skala yang lebih kecil TELKOM juga memiliki layanan sejenis yaitu JATIMMAL dan RisTIShop.

i-VAS Card. Untuk mendukung penggunaan internet, TELKOM mengeluarkan i-VAS (*Internet Value Added Service*) Card yang merupakan alat pembayaran *micropayment* dengan sistem prabayar untuk akses berbagai konten atau layanan internet.

Saat ini beragam layanan telah tersedia di internet mulai dari layanan *download ring tone*, aplikasi, e-mail, games, dan sebagainya. Sejalan dengan penggunaan internet yang semakin luas di Indonesia maka keragaman konten di dalamnya semakin lama semakin banyak. Hal ini tentunya memunculkan kebutuhan sebuah alat pembayaran *on-line* terpercaya untuk dapat memfasilitasi proses pembayaran dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar. Untuk kondisi seperti ini penggunaan kartu kredit kurang cocok karena nilai nominal transaksinya tidak terlalu besar.

TELKOM mencoba memberi solusi atas kondisi tersebut dengan meluncurkan produk kartu i-VAS "Satu Kartu Multi Layanan Internet" yang menjadi alat pembayaran untuk berbagai konten atau layanan internet yang bersifat *micropayment*, dengan nilai transaksi di bawah Rp 100.000.

Ventus. Ventus merupakan jasa nilai tambah dan konvergensi antara e-mail dan sistem selular (*mobile*) atau yang dikenal dengan istilah *mobile push e-mail* yang memungkinkan me-relay e-mail yang umumnya dihubungkan *via desktop* dan laptop di alihkan ke *smartphone* (telepon selular) atau telepon PDA. Melalui Ventus, pemilik *account* e-mail dapat menerima atau mengirim pesan elektronik, dan tidak hanya melalui SMS, melainkan melalui terminal telelpon selular atau PDA.

Ventus digolongkan ke dalam jasa multimedia untuk Penyedia Jasa Aplikasi (PJA), dengan TELKOM berfungsi sebagai sistem *relay* atas berbagai sistem e-mail yang dimiliki pelanggan atau dikelola oleh TELKOM untuk pengguna akhir sebagai PJA, pelanggan akan dipungut bayaran sewa atas pemakaian aplikasi Ventus secara bulanan kepada TELKOM selain biaya *kilobyte* yang dikenakan kepada pelanggan atas pemakaian jasa GPRS atau PDN yang disediakan oleh operator selular atau nirkabel. Ventus juga dapat digunakan oleh perusahaan yang mengoperasikan sistem e-mailnya sendiri, sebagai aplikasi kolaboratif yang vital untuk menunjang kegiatan bisnis.

Jaringan & Interkoneksi

TELKOMIntercarrier. TELKOMIntercarrier Merupakan layanan interkoneksi untuk penyelenggara jasa dan jaringan lainnya (*other licensed operator,* OLO). TELKOMIntercarrier mencakup layanan interkoneksi jaringan, interkoneksi jasa, dan penyewaan jaringan (*leased line*).

TELKOMVision. TELKOMVision merupakan *brand name* baru dari PT Indonusa Telemedia, salah satu anak perusahaan TELKOM, yang khusus bergerak di bidang *pay* TV (*multimedia view*). Layanan yang diberikan TELKOMVision adalah TV *Cable, fast internet*, dan *satellite* TV.

TV *Cable* menggunakan HFC (*Hybrid Fiber Coaxial)*, teknologi yang menggabungkan dua *physical access* antara *fiber optic* dengan *coaxial cable*. Saluran TV premium seperti HBO, Cinemax dan Star Movie tersedia dalam satu paket dasar, tanpa harus menambah biaya sewa bulanan.

Masih dengan infrastruktur TV Cable, pelanggan TELKOMVision dapat menggunakan layanan *fast internet* (*broadband internet*) dengan kecepatan tinggi (30 Mbps *downstream* dan 512 Kbps *upstream*), tanpa dibatasi waktu, dan tanpa tagihan pulsa tambahan. Dengan menyediakan *cable modem docsis* 1.0 (modem broadband) pelanggan sudah dapat tersambung dengan jaringan TELKOMNet melalui Divisi Multimedia TELKOM.

Selain melalui jaringan kabel, TELKOMVision juga memiliki Satellite TV (DTH-Direct to Home) yang menggunakan infrastruktur satelit milik TELKOM, yaitu satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 dengan teknologi *extended* C-band dan perangkat tambahan berupa parabola mini dan dekoder.

ALAMAT PERUSAHAAN

Kantor Pusat
GKP TELKOM
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel.: (62-22) 452 1108, 452 7252
Fax: (62-22) 424 0313

Departemen Corporate Communications
Grha Citra Caraka Building Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52,
Jakarta 12710
Tel.: (021) 521 5109
Fax: (021) 522 0500

Divisi Regional I – Sumatera
Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 2,
Medan 20111
Tel.: (62-61) 415 1747
Fax: (62-61) 415 0747

Divisi Regional II – DKI Jakarta
Grha Citra Caraka
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52,
Jakarta 12710
Tel.: (62-21) 521 5100, 521 5105
Fax: (62-21) 520 2733

Divisi Regional III – Jawa Barat dan Banten
Jl. W.R. Supratman No. 66A,
Bandung 40122
Tel.: (62-22) 453 2211, 452 3801
Fax: (62-22) 453 2134

Divisi Regional IV – Jawa Tengah dan DIY
Jl. Pahlawan No. 10,
Semarang 50241
Tel.: (62-24) 830 2312, 830 2331
Fax: (62-24) 830 2313

Divisi Regional V – Jawa Timur
Jl. Ketintang No. 156,
Surabaya 60231
Tel.: (62-31) 828 6000, 828 6250
Fax: (62-31) 828 6080

Divisi Regional VI – Kalimantan
Jl. M.T. Haryono No. 169, Ring Road,
Balikpapan 76114
Tel.: (62-542) 556 889, 556 242, 873 500
Fax: (62-542) 873 030

Divisi Regional VII – Indonesia Timur
Jl. A.P. Pettarani No. 2,
Makassar 90221
Tel.: (62-411) 889 977, 272 7003
Fax: (62-411) 889 959

Divisi Infratel
Grha Citra Caraka
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52,
Jakarta 12710
Tel.: (62-21) 522 1500
Fax: (62-21) 522 9600

Enterprise Services Center
Gedung Chase Plaza
Jl. Sudirman Kav. 21 No. 70-71, Lt. 5
Jakarta 12910
Tel.: (62-21) 386 6600, 386 0068
Fax: (62-21) 386 8400

Unit Corporate Customer
Jl. Kebon Sirih Kav. 10-12
Jakarta Pusat 10100
Tel.: (62-21) 386 6006

Divisi Multimedia
Menara Multimedia Lt.17
Jl. Kebon Sirih No. 12,
Jakarta 10110
Tel.: (62-21) 386 0500
Fax: (62-21) 386 0300

Divisi Fixed-Wireless Network
Wisma Antara
Jl. Merdeka Selatan No. 17, Lt.9-10,
Jakarta
Tel.: (62-21) 344 7070
Fax: (62-21) 344 0707

Maintenance Service Center
Jl. Japati No. 1. Lt.4,
Bandung 40133
Tel.: (62-22) 452 4120, 452 4129
Fax: (62-22) 452 4125

TELKOM Learning Center
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47,
Bandung 40152
Tel.: (62-22) 201 4508, 201 4441
Fax: (62-22) 201 4429

TELKOM Supply Center
Jl. Japati No. 1 Lt.6,
Bandung 40133
Tel.: (62-22) 720 9022
Fax: (62-22) 720 6530

Research and Development Center
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47,
Bandung 40152
Tel.: (62-22) 457 4784
Fax: (62-22) 457 1171

Information System Center
Jl. Japati No. 1 Lt.4,
Bandung 40133
Tel.: (62-22) 452 4228
Fax: (62-22) 720 1890

Carrier and Interconnection Services Center
Menara Jamsostek Lt.10
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 38,
Jakarta 12710
Tel.: (62-21) 5291 7007
Fax: (62-21) 5289 2080

Management Consulting Center
Jl. Cisanggarung No. 2,
Bandung 40115
Tel.: (62-22) 452 1620, 452 1549
Fax: (62-22) 721 7473

TELKOM Community Development Center
Jl. Japati No. 1 Lt.8,
Bandung 40133
Tel.: (62-22) 452 8219
Fax: (62-22) 452 8206

Assessment Service Center
Jl. Japati No. 1 Lt.3,
Bandung 40133
Tel.: (62-22) 452 3359, 452 3360
Fax: (62-22) 452 3344

Anak Perusahaan

PT Telekomunikasi Selular
Wisma Mulia,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42,
Jakarta 12710
Tel.: (62-21) 524 0811
Fax: (62-21) 529 06123

PT Infomedia Nusantara
Jl. R.S. Fatmawati No. 77-81,
Jakarta 12510
Tel.: (62-21) 720 1221
Fax: (62-21) 720 1226

PT Indonusa Telemedia
Gedung Pusyantel, Lt.3
Jl. Prof. Dr. Supomo No. 139, Tebet,
Jakarta Selatan
Tel.: (62-21) 829 8800
Fax: (62-21) 831 0100

PT Graha Sarana Duta
Jl. Kebon Sirih No. 10-12,
Jakarta Pusat 10110
Tel.: (62-21) 380 0900
Fax: (62-21) 3483 0655

PT Telekomunikasi Indonesia International
Kuningan Plaza, North Tower, Lt. 3,
Suit 310 & 316
Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-C14
Jakarta 12940
Tel.: (62-21) 526 4413
Fax: (62-21) 520 5167

PT Multimedia Nusantara
Century Tower Lt.11
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4,
Jakarta 12950
Tel.: (62-21) 521 0123
Fax: (62-21) 521 0124

PT Dayamitra Telekomunikasi
Gedung Graha Pratama Lt.9
Jl. M.T. Haryono Kav.15,
Jakarta
Tel.: (62-21) 8370 9592/93
Fax.: (62-21) 8370 9591

PT Pramindo Ikat Nusantara
Annex Building, Lt. 7, Ruang 702
Kuningan Plaza
Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-C14
Jakarta 12940
Tel.: (62-21) 520 2560
Fax: (62-21) 5292 0156

PT Finnet Indonesia
Menara Bidakara Lt.21
Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73,
Jakarta 12810
Tel.: (62-21) 829 9999
Fax: (62-21) 828 1999

Perusahaan Asosiasi

PT Patra Telekomunikasi Indonesia
Jl. Pringgodani 2 No.33
Jl. Alternatif Raya, Cibubur,
Cibinong 16954
Tel.: (62-21) 845 4040, 352 1915
Fax: (62-21) 8457610

PT Citra Sari Makmur
Chase Plaza, Lt.16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, No. 70-71,
Jakarta 12910
Tel.: (62-21) 520 8311
Fax: (62-21) 570 4656

PT Pasifik Satelit Nusantara
Gedung Kantor Taman A9 Unit C3/C4
Jl. Mega Kuningan Raya Lot 8/9 No.9
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Tel.: (62-21) 576 2292
Fax: (62-21) 576 3378

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Biro Administrasi Efek:
PT Datindo Entrycom
Jl. Jendral Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Tel.: (62-21)570 9009

Depositary Central Efek:
PT Kustodian Saham Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building,
Tower 1, Lt.5
Jl. Jend. Sudirman, Kav.52-53
Jakarta, 12190
Tel.: (62-21) 5299 1003
Fax.: (62-21) 5299 1129

Lembaga Pemeringkat Efek:
PT Pefindo
Setiabudi Atrium Lt. 8,
Suite 809-810
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 62,
Jakarta 12920
Telp.: (62-21) 521 0077
Fax.: (62-21) 521 0078

Bank Kustodi ADS:
The Bank of New York Mellon
One Wall Street
New York, NY 10286
Telp.: (01-212) 495 1784

Auditor Eksternal:
KAP Haryanto Sahari & Rekan, a member firm of PricewaterhouseCoopers
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav X7 No. 6,
Jakarta 12940
Telp.: (62-21) 521 2901
Fax.: (62-21) 5290 5555/ 5050

MANAJEMEN SENIOR

Adek Julianwar
Head of Corporate Affair

Rochiman Sukarno
Head of Corporate Communication

Tjatur Purwadi
Head of Internal Audit

David Burke
EVP Strategic Investment & Corporate Planning

Eddie Wibawa
VP Synergy & BOD Office Administration

Sofwani
VP Business Effectiveness

Santoso Rahardjo
VP Business Performance & Evaluation

Harsya Denny Suryo
VP Investor Relations / Corporate Secretary

Eddy Kurnia
VP Public & Marketing Communication

Herdy Rosadi Harman
VP Regulatory Management

Syamsul Bahri
VP Network & Solution Audit

Eddy Budiono
VP Delivery Channel Audit

Teddy Tedja Permana
VP Enterprise Management Audit

Mohammad Nuhin
VP Information System Audit

Rizkan Chandra
VP Infrastructure and Service Planning

Husni Thamrin
VP Network Operation

Teni Agustini
VP Tariff

Eddy Sarwono
VP Product Management

Iskriono Windiarjanto
VP Marketing & Customer Care

Tri Djatmiko
VP Sales

Anie Sulistiani
VP Access

Slamet Riyadi
VP Enterprise

Pudja Sujitna
VP Wholesale

Abdus Somad Arief
VP Business Development

Walden Robert Bakara
VP Process Risk Management

Ikhsan
VP System Risk Management

Joni Siswadi
VP Legal & Compliance

Michael Gatut
VP Financial & Logistic Policy

Teguh Wahyono
VP Management Accounting

Ofan Sofwan
VP Treasury & Tax Management

Bambang Hardiono
VP Financial Accounting

Heri Supriadi
VP Subsidiary Performance

Pandji Darmawan
VP Human Resources Policy

Ali Rachman Mursalin
VP Industrial Relations

Djaka Sundan
VP Organization Development

Sutoto
VP Supply Planning and Control

Ahmad Kordinal
VP Asset Management

Halim Sulasmono
VP IT Policy

Joddy Hernady
VP Corporate Strategic Planning

Budhi Santoso
VP Strategic Business Development

Mustafa Wangsaatmadja
SGM R&D Center

Nana Iriana
SGM Maintenance Service Center

Ketut Suwirya Kardha
SGM Supply Center

Ana Adriana
SGM Finance Center

Alini Gilang
SGM HR Center

Tutut Bahtiar
SGM Learning Center

Janto Warjanto
SGM Management Consulting Center

Erwien Djuaini
SGM Community Development Center

Judi Rifajantoro
SGM Information System Center

Sarwoto
EGM Infratel Division

Dodiet Hendrojono
EGM Fixed Wireless Network Division

Septika N. Widyasrini
EGM Multimedia Division

Muhammad Awaluddin
EGM Regional Division I

Adeng Achmad
EGM Regional Division II

Dwi Sasongko Purnomo
EGM Regional Division III

Zulheldi
EGM Regional Division IV

Mas'ud Khamid
EGM Regional Division V

Triana Mulyatsa
EGM Regional Division VI

Pahala Putrantara Hariandja
EGM Regional Division VII

Deny Rudiana
EGM Enterprise Service Division

Munadi
EGM Carrier & Interconnection Service Division

Judi Achmadi
Head Project of OBC

Freddy Triany
Project Management Office Coordinator

lampiran

Daftar Istilah

Referensi Silang Form 20-F

Referensi Peraturan Bapepam-LK
No. X.K.6

DAFTAR ISTILAH

3G
adalah istilah umum untuk teknologi selular generasi ketiga. 3G menawarkan sambungan ke telepon selular dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan pelanggan melakukan *video conference* dan aplikasi lainnya melalui sambungan pita lebar ke internet. Dengan 3G, pelanggan dapat terhubung ke internet dari laptop dengan menggunakan telepon selular dan kabel data atau menggunakan PC *Card*.

ADS
American Depositary Share, adalah sertifikat yang diperdagangkan di pasar sekuritas Amerika Serikat yang merepresentasikan sejumlah saham asing. Satu ADS TELKOM mewakili 40 saham Seri B TELKOM. Rasio saham terhadap ADS adalah 40:1.

ARPU
Average Revenue Per User berfungsi sebagai statistik evaluasi dalam hubungannya dengan basis pelanggan operator jaringan. Dihitung dengan membagi jumlah pendapatan (termasuk pendapatan kotor interkoneksi) untuk jangka waktu tertentu dengan menghitung rata-rata jumlah pelanggan, pada suatu periode tertentu tidak termasuk untuk layanan telepon selular, biaya koneksi, pendapatan interkoneksi, pendapatan *roaming* internasional di luar pelanggan dan diskon *dealer*.

ATM
Asynchronous Transfer Mode adalah modus transfer dengan informasi diorganisasi menjadi sel-sel. Asinkronus dalam pengertian bahwa *recurrance* sel yang mengandung informasi dari pengguna individu tidak perlu periodik.

B2B
Business-to-Business Electronic Commerce adalah lingkungan aplikasi berbasiskan teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi bisnis dan mengotomatisasi transaksi komersial yang didesain untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan interaksi antara mitra bisnis.

backbone
merujuk pada jaringan telekomunikasi utama yang terdiri dari fasilitas *switching* dan transmisi yang menghubungkan beberapa node akses jaringan. *Link* transmisi antara node dan fasilitas *switching* termasuk microwave, kabel bawah laut, satelit, serat optik dan teknologi transmisi lainnya.

bandwidth
pita lebar, merujuk pada kapasitas *link* komunikasi.

BEI
merujuk pada Bursa Efek Indonesia.

BRTI
merujuk pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

BTS
Base Transceiver Station merujuk pada perangkat yang memancarkan dan menerima sinyal telefoni radio ke dan dari sistem telekomunikasi lain.

CDMA
Code Division Multiple Access adalah teknologi jaringan spektrum luas pita lebar.

DCS
Digital Communication System adalah sistem telepon selular yang menggunakan teknologi GSM yang beroperasi dalam pita frekuensi 1800 MHz.

downlink
merujuk pada bagian penerimaan satelit yang menyebar dari satelit ke bumi.

DPI
Daftar Penawaran Interkoneksi merujuk pada istilah regulasi yang meliputi seluruh fasilitas, termasuk tarif interkoneksi, fasilitas teknis, dan hal-hal administratif lainnya yang ditawarkan oleh satu operator telekomunikasi ke operator telekomunikasi lainnya untuk akses interkoneksi.

DSL
Digital Subscriber Line adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa layanan, yaitu suara, data dan gambar bergerak untuk dikirimkan melalui jaringan telepon tembaga.

e-*business*
merujuk pada solusi bisnis elektronik yang mencakup layanan pembayaran elektronik, pusat data internet dan konten serta solusi aplikasi.

EGDE
Enhanced Data rates for GSM Evolution, adalah istilah umum untuk teknologi selular generasi 2,5. EDGE menawarkan layanan komunikasi data dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan GPRS.

Erlang
merujuk pada satuan pengukuran trafik telepon yang sama dengan percakapan satu jam.

FWL
fixed wire line (sambungan telepon tidak bergerak) merujuk pada telepon tidak bergerak kabel.

FWA
fixed wireless access (telepon tidak bergerak nirkabel) merujuk pada *link* transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi selular, gelombang mikro atau radio untuk me-*link* pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal.

frame relay
adalah *packet-switching protocol* (pesan dibagi menjadi paket-paket sebelum dikirim) untuk menghubungkan perangkat pada jaringan komputer yang membentang pada daerah geografis yang relatif luas.

GPRS
General Packet Radio Service adalah teknologi data packet *switching* yang memungkinkan informasi dikirim dan diterima pada jaringan *mobile* dan hanya menggunakan jaringan bila terdapat data yang harus dikirim.

GSM
Global System for Mobile Telecommunication adalah standar Eropa untuk telepon selular digital.

IP DSLAM
Internet Protocol Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Sebuah DSLAM memfasilitasi sambungan telepon untuk membuat koneksi yang lebih cepat ke internet. DSLAM adalah perangkat jaringan yang terletak di dekat lokasi pelanggan, yang menghubungkan sambungan pelanggan digital kepada *backbone* internet berkecepatan tinggi menggunakan teknik *multiplexing*.

ISDN
Integrated Services Digital Network adalah jaringan yang menyediakan konektivitas digital *end-to-end* dan memungkinkan terwujudnya transmisi suara, data dan video dalam waktu bersamaan dan menghasilkan konektivitas internet kecepatan tinggi.

jaringan pintar
adalah jaringan telekomunikasi yang tidak bergantung pada layanan dimana fungsi *logic* dikeluarkan dari *switch* dan ditempatkan dalam *node* komputer yang didistribusikan di seluruh jaringan. Dengan demikian tersedia sarana untuk mengembangkan dan mengontrol layanan dengan lebih efisien sehingga layanan telefoni baru atau yang canggih dengan cepat dapat diperkenalkan.

kapasitas sentral lokal
merujuk pada jumlah sambungan keseluruhan di sentral lokal yang terhubung dan tersedia untuk hubungan ke instalasi luar.

Kbps
Kilobits per second adalah ukuran kecepatan transmisi sinyal digital yang dinyatakan dalam ribuan bit per detik.

KSO
Kerja Sama Operasi atau Pola Kerja Sama Operasi adalah jenis pola Bangun, Operasi dan Transfer yang unik dengan konsorsium mitra tempat konsorsium melakukan investasi pada dan mengoperasikan fasilitas TELKOM di divisi regional. Mitra konsorsium dimiliki oleh operator internasional dan perusahaan domestik swasta atau, TELKOM telah mengakuisisi mitra konsorsium.

LIS
lines in service, merujuk pada sambungan yang menghasilkan pendapatan yang terhubung ke pelanggan, termasuk telepon berbayar, tetapi tidak termasuk pelanggan telepon selular atau sambungan yang digunakan dalam lingkup internal oleh TELKOM.

MHz
Megahertz adalah satuan ukuran frekuensi. 1 MHz sama dengan satu juta siklus per detik.

NSS
Network Switching Subsystem adalah bagian utama dari system GSM. NSS menangani fungsi *switching*, *mobility management* dan mengatur komunikasi antara *mobile phone* jaringan telepon lain

panggilan lokal
adalah panggilan di antara pelanggan di wilayah penomoran yang sama tanpa diperlukan nomor kode wilayah.

pola bagi hasil atau PBH
adalah jenis skema pola *build*, *operate*, transfer (bangun, operasi, dan transfer) antara TELKOM dan perusahaan swasta domestik. Berdasarkan skema ini, perusahaan swasta melakukan investasi pada fasilitas telekomunikasi yang dioperasikan oleh TELKOM.

perjanjian KSO
merujuk pada perjanjian, yang diubah dari waktu ke waktu, yang mengatur operasi jaringan di wilayah KSO yang bersangkutan untuk periode KSO.

PSTN
Public Switched Telephone Network adalah jaringan telepon yang dioperasikan dan dipelihara oleh TELKOM.

roaming
merujuk pada fitur telekomunikasi selular yang membuat pelanggan dapat berpindah dari satu area ke area yang lain yang masih dalam *coverage area*.

RUIM
Removable User Identity Module adalah *smart card* (kartu cerdas) yang didesain untuk disisipkan ke dalam telepon tetap nirkabel yang secara unik mengidentifikasi langganan jaringan CDMA dan yang mengandung data yang terkait dengan pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori untuk menyimpan pesan.

sentral jarak jauh
adalah sentral yang memiliki fungsi menghubungkan satu sentral telepon ke sentral telepon lain, yang dapat berupa sentral lokal atau sentral *trunk*.

serat optik
merujuk pada kabel yang menggunakan serat optik dan teknologi laser, berkas cahaya yang memodulasi yang merupakan data ditransmisi melalui filamen kaca tipis.

SIM atau SIM *card*
Subscriber Identity Module adalah *smart card* yang didisain untuk disisipkan ke dalam telepon selular yang secara unik mengidentifikasi langganan jaringan GSM dan yang berisi data yang terkait dengan pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori untuk menyimpan pesan.

sirkit sewa
adalah line transmisi telekomunikasi khusus yang menghubungkan satu titik *fixed* ke titik *fixed* lain, yang disewa dari operator untuk penggunaan eksklusif.

sistem duopoli
adalah sistem yang hanya mengijinkan dua operator nasional, yang di Indonesia adalah TELKOM dan Indosat, untuk menyediakan layanan telekomunikasi sambungan telepon tidak bergerak termasuk sambungan langsung jarak jauh dan internasional.

SLI
pada Sambungan Langsung Internasional (SLI) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan panggilan internasional tanpa bantuan atau campur tangan operator dari suatu terminal telepon.

SLJJ
merujuk pada Sambungan Langsung Jarak Jauh atau *Domestic Long Distance*.

SMS
Short Messaging Service (Layanan Pesan Singkat), yaitu teknologi yang memungkinkan pertukaran pesan teks antara telepon selular dan antara telepon tetap nirkabel dapat terwujud.

stasiun bumi
adalah antena serta perangkat terkait yang digunakan untuk menerima atau memancarkan sinyal telekomunikasi melalui satelit.

switch
adalah perangkat mekanik, listrik atau elektronik yang membuka atau menutup sirkit, menyambung atau memutus sambungan listrik, atau memilih sambungan atau sirkit, yang digunakan untuk me'*route*' trafik dalam jaringan telekomunikasi.

transponder satelit
adalah perangkat relay radio yang dipasang pada satelit yang menerima sinyal dari bumi dan memperkuat serta memancarkannya kembali ke bumi.

transmisi gelombang mikro
adalah transmisi yang terdiri dari gelombang elektromagnetik dalam spektrum frekuensi radio di atas 890 juta siklus per detik dan di bawah 20 miliar siklus per detik.

UMTS
Universal Mobile Telephone System adalah salah satu dari sistem telepon bergerak generasi ketiga (3G) yang dikembangkan dalam kerangka kerja IMT-2000 ITU.

USO
Universal Service Obligation (Kewajiban Pelayanan Universal) adalah kewajiban layanan yang disyaratkan oleh Pemerintah pada seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk tujuan penyediaan layanan umum di Indonesia.

VoIP
Voice over Internet Protocol adalah cara mengirim informasi suara dengan menggunakan Protokol Internet.

VPN
Virtual Private Network adalah koneksi jaringan pribadi yang aman, yang dibangun di atas infrastruktur yang dapat diakses oleh umum, seperti Internet atau jaringan telepon umum. VPN biasanya menggunakan kombinasi enkripsi, sertifikat digital, otentikasi pengguna yang ketat dan kontrol akses tertentu untuk memberikan keamanan pada trafik yang dibawanya. Biasanya menyediakan konektivitas untuk banyak mesin di balik *gateway* atau *firewall*.

VSAT
Very Small Aperture Terminal adalah antena yang relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai 3,0 meter, yang ditempatkan di persil pengguna dan digunakan untuk komunikasi dua-arah melalui satelit.

WAP
Wireless Application Protocol adalah standar platform teknologi global dan terbuka yang memungkinkan pengguna telepon selular mengakses dan berinteraksi dengan layanan informasi mobile seperti e-mail, situs web, informasi keuangan, perbankan *online*, informasi dan *entertainment* (*infotainment*), *game* dan pembayaran mikro.

WLL
Wireless Local Loop adalah sarana penyediaan fasilitas *local loop* (koneksi fisik dari persil pelanggan ke titik keberadaan *carrier* atau POP) tanpa kabel, sehingga *carrier* dapat menyediakan *loop* lokal dengan pita lebar keseluruhan kurang lebih 1 Gbps atau lebih per daerah jangkauan. WLL sangat efektif terutama di wilayah berbatu-batu atau lembab.

REFERENSI SILANG FORM 20-F

HAL	HAL YANG DIPERSYARATKAN DALAM FORM 20F	NOMOR HALAMAN
ITEM 1.	Identitas Direksi, Manajemen Senior dan Penasihat	N/A
ITEM 2.	Statistik Penawaran dan Perkiraan Jadual	N/A
ITEM 3.	Informasi Kunci	
	3. A Data Keuangan Tertentu	7-9; 107-108
	3. B Kapitalisasi dan Hutang	N/A
	3. C Alasan Penawaran dan Penggunaan Hasil Penawaran	N/A
	3. D Faktor Risiko	69-74
ITEM 4.	Informasi tentang Perusahaan	
	4. A Sejarah dan Pengembangan Perusahaan	4-5
	4. B Tinjauan Bisnis	58-68, 50-57
	4. C Struktur Bisnis dan Organisasi	144-145
	4. D Aktiva Tetap	146
ITEM 5.	Tinjauan dan Prospek terhadap Operasi dan Keuangan	
	5. A Tinjauan Hasil Usaha	78-93
	5. B Likuiditas dan Sumber Permodalan	93-99
	5. C Riset dan Pengembangan dan Kekayaan Intelektual	99-100
	5. D Informasi Tren	100
	5. E Pengaturan Transaksi di Luar Neraca	100
	5. F Pengungkapan dalam Bentuk Tabel untuk Kewajiban Kontraktual	101
ITEM 6.	Direktur, Manajemen Senior, dan Karyawan	
	6. A Direksi dan Manajemen Senior	32-35; 117-119
	6. B Kompensasi	46, 123
	6. C Tata Kelola Pengurus	122-123
	6. D Karyawan	43-48
	6. E Kepemilikan Saham	123
ITEM 7.	Pemegang Saham Mayoritas dan Transaksi Pihak Terkait	
	7. A Pemegang Saham Mayoritas	15-17
	7. B Transaksi Pihak Terkait	17
	7. C Kepentingan dari Ahli dan Penasehat Hukum	N/A
ITEM 8.	Informasi Keuangan	
	8. A Laporan Konsolidasian dan Informasi Keuangan Lainnya	163
	8. B Perubahan Signifikan	102; 121-123*
ITEM 9.	Penawaran dan Pencatatan	
	9. A Rincian Penawaran dan Pencatatan	13
	9. B Rencana Distribusi	N/A
	9. C Pasar	14-15
	9. D Menjual Pemegang Saham	N/A
	9. E Dilusi	N/A
	9. F Pengeluaran dari Penerbitan	N/A

*) Halaman Laporan Keuangan

HAL	HAL YANG DIPERSYARATKAN DALAM FORM 20F	NOMOR HALAMAN
ITEM 10.	Informasi Tambahan	
	10. A Kapital Saham	N/A
	10. B Memorandum dan Anggaran Dasar	103-105
	10. C Kontrak Material	105-107
	10. D Pengendalian Nilai Tukar	107
	10. E Perpajakan	108
	10. F Agen Pembayar dan Dividen	N/A
	10. G Laporan dani Ahli	N/A
	10. H Dokumen yang Ditunjukkan	110
	10. I Informasi Anak Perusahaan	N/A
ITEM 11.	Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar	74-77
ITEM 12.	Deskripsi dari Sekuritas Selain Sekuritas Ekuitas	N/A
ITEM 13.	Wanprestasi. Keterlambatan dan Penundaan Pembayaran Dividen	N/A
ITEM 14.	Modifikasi Material terhadap Hak Pemegang Saham dan Penggunaan	N/A
ITEM 15.	Prosedur dan Kendali	111-113
ITEM 16.	Cadangan	
	16. A Ahli Keuangan Komite Audit	113
	16. B Kode Etik	113
	16. C Layanan dan Biaya Akuntan Utama	113
	16. D Pengecualian dari Standar Pencatatan untuk Komite Audit	114
	16. E Pembelian Sekuritas Ekuitas oleh Penerbit dan Pembeli Terafiliasi	17
ITEM 17.	Laporan Keuangan	N/A
ITEM 18.	Laporan Keuangan	163
ITEM 19.	Lampiran	

REFERENSI PERATURAN BAPEPAM-LK NO. X.K.6

NO	HAL YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERATURAN BAPEPAM&LK NO. X.K.6	NOMOR HALAMAN
1.	Ikhtisar Keuangan Penting (perbandingan selama lima tahun buku).	6-10
2.	Informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam dua tahun buku terakhir.	13
3.	Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus	11
4.	Laporan Dewan Komisaris	26-27
5.	Laporan Direksi	28-30
6.	Profil Perusahaan	
	a. Nama dan alamat perusahaan	150
	b. Riwayat singkat perusahaan	4-5
	c. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan	58, 147-149
	d. Struktur organisasi dalam bentuk bagan	145
	e. Visi dan misi perusahaan	3
	f. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	32-33
	g. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	34-35
	h. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya	43-48
7.	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya	
	a. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih	15
	b. Direktur dan komisaris yang memiliki saham	15
	c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5%	15
8.	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut	144
9.	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan	11, 13, 14
10.	Kronologis pencatatan efek lainnya dan peringkat efek	(*)
11.	Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	151
12.	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal	151
13.	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	22-24
14.	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan	150
15.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	78-100
16.	Tata kelola perusahaan	
	a. Dewan Komisaris:	
	• Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	118
	• Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi	124
	• Anggota Dewan Komisaris	33
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris	123
	b. Direksi:	
	• Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi	120
	• Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi	124
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi	123
	• Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi	125
	c. Komite audit:	
	• Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit	129-130
	• Uraian tugas dan tanggung jawab	129
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran setiap anggota komite audit	130
	• Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit	130-131
	d. Komite-komite lain yang dimiliki oleh Perusahaan:	120-121
	e. Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;	
	• Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan	122
	• Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	122
	f. Uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal	111-113, 125
	g. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan	136 - 142
	h. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan	102
	i. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut	69 - 77, 128
	j. Penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan	150, sampul belakang
17.	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan	161
18.	Laporan keuangan yang telah diaudit	163
19.	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris	160

(*) Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok, berjangka waktu lima tahun yang memberikan bunga obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 17% per tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2002 sedangkan Pembayaran Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2007 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

terbuka & bertanggung jawab

- Tanggung Jawab Manajemen
- Pernyataan Direksi
- Opini Auditor Independen
- Laporan Keuangan Konsolidasian

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN UNTUK LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan 2007
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Tanri Abeng
Komisaris Utama

Anggito Abimanyu
Komisaris

Mahmuddin Yasin
Komisaris

P. Sartono
Komisaris Independen

Arif Arryman
Komisaris Independen

DIREKSI

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama / CEO

Sudiro Asno
Direktur Keuangan / CFO

Faisal Syam
Direktur Human Capital & General Affairs

I Nyoman Gede Wiryanata
Direktur Network & Solution

Ermady Dahlan
Direktur Konsumer

Arief Yahya
Direktur Enterprise & Wholesale

Prasetio
Direktur Compliance & Risk Management

Indra Utoyo
Direktur Information Technology & Supply (CIO)

Surat Pernyataan Direksi mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Keuangan Konsolidasian (Audited) untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2006 dan 2007
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	Rinaldi Firmansyah
	Alamat kantor	:	Jl. Japati No.1 Bandung 40133
	Alamat rumah sesuai KTP	:	Jl. Cibitung I /22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
	Telepon	:	(022) 452 7101
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Sudiro Asno
	Alamat kantor	:	Jl. Japati No.1 Bandung 40133
	Alamat rumah sesuai KTP	:	Jl. Ranca Kendal No. 8A, Bandung
	Telepon	:	(022) 452 7201
	Jabatan	:	Direktur Keuangan

Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut:
1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Mei 2008

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama

Sudiro Asno
Direktur Keuangan

Haryanto Sahari & Rekan

A member firm of
PRICEWATERHOUSECOOPERS

Kantor Akuntan Publik
Haryanto Sahari & Rekan
PricewaterhouseCoopers
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940 - INDONESIA
P.O. Box 2473 JKP 10001
Telephone: +62 21 5212901
Facsimile: +62 21 52905555 / 52905050
www.pwc.com

A00545/DC2/IRT/II/2008

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, serta laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tanggal 8 Juni 2006, kecuali Catatan 55 bertanggal 16 Juni 2006, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan standar yang ditetapkan *Public Company Accounting Oversight Board (United States)*. Standar-standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berbeda secara signifikan dalam hal-hal tertentu dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Informasi mengenai perbedaan dan pengaruhnya disajikan dalam Catatan 55 atas laporan keuangan konsolidasian.

JAKARTA,

22 Mei 2008

Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA
Nomor Ijin Akuntan Publik 99.1.0683

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Investor Relations and Corporate Secretary
Grha Citra Caraka Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710

Tel. : (62-21) 521 5109
Fax. : (62-21) 522 0500

IDX : TLKM
NYSE : TLK
LSE : TKIA

www.telkom-indonesia.com